



**PEMERINTAH
KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2023**

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI KAMPAR TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua dan dengan izin-Nya, kami telah dapat menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kampar Tahun 2022, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kampar Tahun 2022 ini merupakan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kampar selama 1 (satu) Tahun Anggaran yang bertujuan sebagai bahan evaluasi terhadap keberhasilan dan kelemahan atas pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Kampar Tahun 2022 yang selanjutnya disampaikan kepada DPRD Kabupaten Kampar.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kampar Tahun 2022 ini mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang diantaranya memuat Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah serta Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan selama Tahun 2022;

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini, dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan menuju masa depan Kabupaten Kampar demi ***“Mewujudkan Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Industri Berbasis Pertanian dan Perkebunan, dengan Masyarakat yang Berakhlak, Berbudaya dan Beradat Menuju Masyarakat Sejahtera”***

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bangkinang, Maret 2023

PJ. BUPATI KAMPAR,

Dr. H. KAMSOL

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Hukum	3
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah	6
1.3 Data Umum Daerah	6
1. Data Geografis Wilayah	7
2. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	13
3. Jumlah PNS	18
4. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	20
5. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	21
6. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan	24
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	25
2.1 Kondisi dan Kebijakan Keuangan Daerah	25
2.2 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022	39
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	40
3.1 Capaian Program dan Kegiatan	40
3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan	327
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	338
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	372
4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan	374
4.2. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian	382
BAB V PRESTASI DAN PENGHARGAAN	383
BAB VI PENUTUP	385

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berwenang dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.

Untuk mencapai hasil yang maksimal, pemerintahan daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagaimana pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD).

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPj adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang dalam penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.1 DASAR HUKUM

Peraturan perundang - undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kampar Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
18. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 20);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 1).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Kampar Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 23);

1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Adapun Misi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

a. VISI

"Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera"

b. MISI

- 1) Menyiapkan sumberdaya manusia yang handal dan profesional;
- 2) Mengembangkan pertanian yang modern dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- 3) Membangun infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan proporsional;
- 4) Menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- 5) Mengembangkan kawasan pariwisata dan industri pengolahan yang maju;
- 6) Memperkuat citra Kampar sebagai serambi Mekkah Riau yang religius, beradat, dan berbudaya.

1.3 DATA UMUM DAERAH

Kabupaten Kampar pada awalnya terbentuk melalui Ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor 3/DC/STG/50 tanggal 6 Februari 1950 tentang Penetapan Kabupaten Kampar yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Kemudian pada tahun 1956 dikukuhkan kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Kampar sebagai Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah, dengan luas wilayah ± 30.569,56 Km² dengan pusat pemerintahan di Bangkinang.

Kabupaten Kampar awalnya merupakan daerah otonom dengan wilayah relatif sangat luas dan terbagi dalam 19 kecamatan dengan 2 Pembantu Bupati

sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor KPTS.318/VII/1987 tanggal 17 Juli 1987. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangaraian yang mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan dan Tambusai dan Pembantu Bupati Wilayah II berkedudukan di Pangkalan Kerinci mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut dan Kuala Kampar. Penetapan pembagian wilayah pembantu Bupati tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor KPTS.318 /VII/1987 tanggal 17 Juli 1987.

Pada Tahun 1999 Kabupaten Kampar dimekarkan menjadi 3 Kabupaten yaitu, Kabupaten Kampar (*induk*), Kabupaten Pelalawan (*pemekaran*), dan Kabupaten Rokan Hulu (*pemekaran*) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuansing dan Kota Batam. Hingga saat ini Kabupaten Kampar terdiri dari 21 Kecamatan dan 242 Desa serta 8 kelurahan.

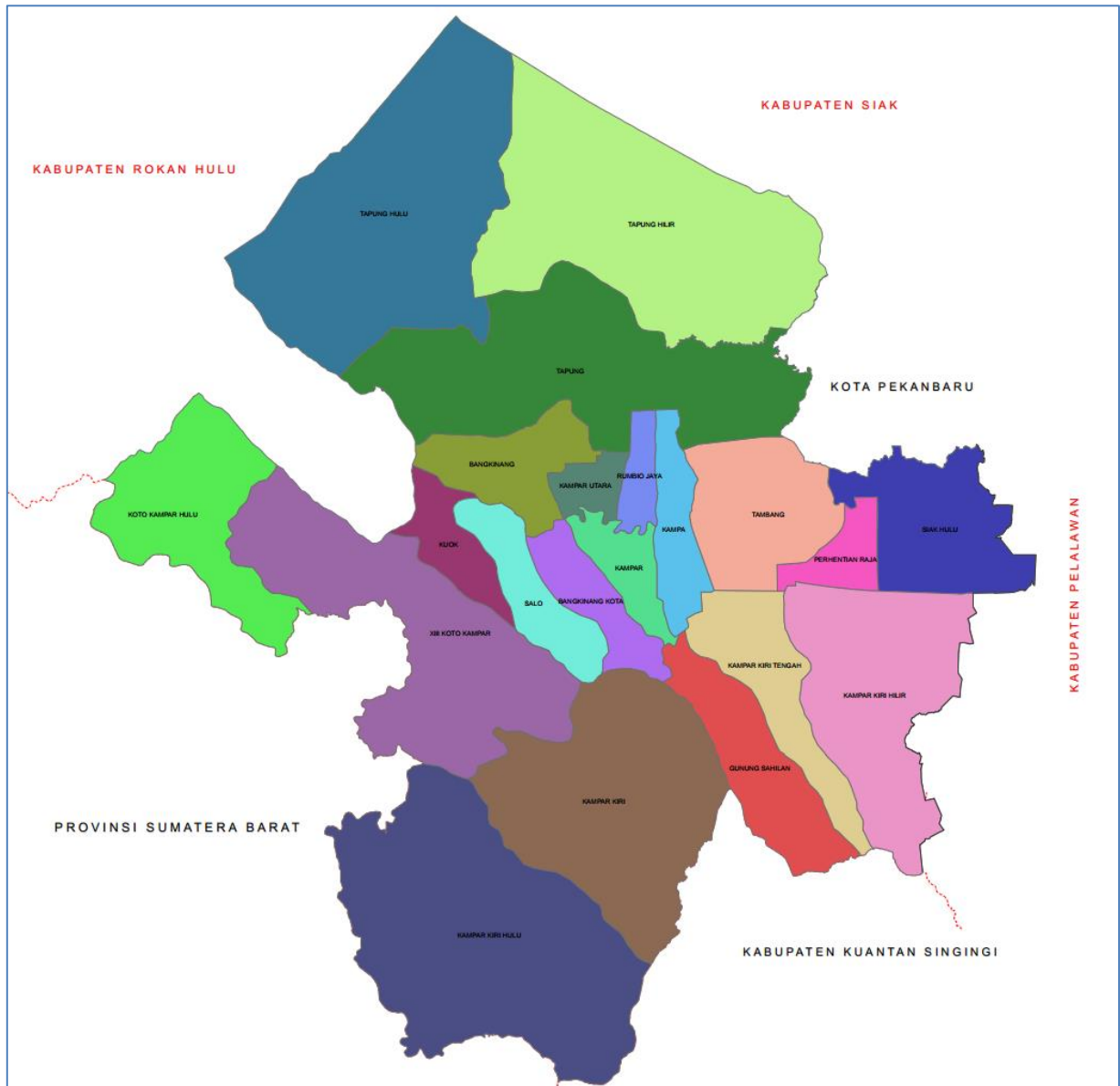
1. Data Geografis Wilayah

1] Batas administrasi dan Luas wilayah

Kabupaten Kampar terletak antara 01°00'40" Lintang Utara sampai dengan 00° 27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30" sampai dengan 101° 14'30" Bujur Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Siak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru.

PETA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR



Kabupaten Kampar memiliki banyak sungai, baik sungai besar maupun sungai-sungai kecil, alur, danau, dan rawa-rawa. Perairan umum dimanfaatkan untuk budidaya perikanan darat, dan tempat penangkapan (*fishing ground*) berbagai jenis ikan perairan, sedangkan sungai-sungai

besar (Sungai Kampar, Sungai Siak, dan Sungai Tapung) dimanfaatkan sebagai jalur perhubungan antar desa.

Berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) 2017 Skala 1 : 50.000 di Wilayah Kabupaten Kampar terdapat 4 (empat) batang sungai besar, yaitu :

- Sungai Kampar Kanan yang panjangnya \pm 182,9 km, dengan kedalaman rata-rata 7 – 10 m dan dengan lebar rata-rata 143 meter. Sungai kampar Kanan ini melewati Kecamatan Koto Kampar Hulu, XIII Koto Kampar, Kuok, Salo, Bangkinang, Bangkinang Kota, Kampar, Kampa, Tambang dan Kecamatan Siak Hulu ;
- Sungai Kampar Kiri yang panjangnya \pm 115,8 km, dengan kedalaman rata-rata 2 - 6 m yang melewati Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Gunung Sahilan dan Kecamatan Kampar Kiri;
- Sungai Tapung Kanan yang panjangnya \pm 94,5 km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m, melintasi kecamatan Tapung Hulu, Tapung dan Kecamatan Tapung Hilir.
- Sungai Tapung Kiri yang panjangnya \pm 115,5 km dengan kedalaman rata-rata 2 – 8 m, melintasi kecamatan Tapung.

Empat sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih, kegiatan budi daya perikanan, maupun sebagai sumber energi listrik Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA Koto Panjang).

Berdasarkan Satuan Wilayah Sungai (SWS), Kabupaten Kampar terbagi atas dua Satuan Wilayah Sungai, yaitu SWS Kampar dan SWS Siak. Dari kedua SWS tersebut telah mengalami perubahan kondisi neraca air di wilayah tangkapan air di hulu sungai yang terletak di punggung timur Bukit Barisan yang secara batasan administrasi berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Terbagi menjadi tiga Sub Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu Sub DAS Tapung, Kampar Kanan, dan Kampar Kiri.

Luas wilayah Kabupaten Kampar saat ini kurang lebih 11,289.28km² atau ±11,62 % dari luas wilayah Provinsi Riau [94.561,60 km²]. Dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung merupakan kecamatan yang memiliki wilayah terluas yakni 1.365,97 km² [12,10%], diikuti oleh Kecamatan Kampar Kiri Hulu yakni 1.301,25 km² [11,53%] dan Kecamatan Tapung Hulu 1.169,15 km² [10,36%]. Sedangkan Kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Rumbio Jaya merupakan kecamatan dengan wilayah terkecil yakni 76,92 km² [0,68%] diikuti oleh Kecamatan Kampar Utara 79,84 km² [0,71%] dan Kecamatan Perhentian Raja 111,54 km² [0,99%].

Tabel 1.1
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kampar

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah		Jumlah	
			Ha	(%)	Kelurahan	Desa
1	Kampar Kiri	Lipat Kain	91.533	8,1	1	19
2	Kampar Kiri Hulu	Gema	130.125	11,5	-	24
3	Kampar Kiri Hilir	Sungai Pagar	75.974	6,7	1	7
4	Kampar Kiri Tengah	Simalinyang	33.059	2,9	-	11
5	Gunung Sahilan	Gunung Sahilan	59.797	5,3	-	9
6	XIII Koto Kampar	Batu Bersurat	73.240	6,5	1	12
7	Koto Kampar Hulu	Tanjung	67.400	6,0	-	6
8	Kuok	Kuok	15.141	1,3	-	9
9	Salo	Salo	20.783	1,8	-	6
10	Tapung	Petapahan	136.597	12,1	-	25
11	Tapung Hulu	Senama Nenek	116.915	10,4	-	14
12	Tapung Hilir	Kota Garo	101.356	9,0	-	16
13	Bangkinang Kota	Bangkinang	17.718	1,6	2	2
14	Bangkinang	Muara Uwai	25.350	2,2	2	7
15	Kampar	Air Tiris	13.628	1,2	1	17
16	Kampar Timur	Kampar	17.308	1,5	-	9
17	Rumbio Jaya	Teratak	7.692	0,7	-	7
18	Kampar Utara	Sawah	7.984	0,7	-	8
19	Tambang	Sungai Pinang	37.194	3,3	-	17
20	Siak Hulu	Pangkalan Baru	68.980	6,1	-	12
21	Perhentian Raja	Pantai Raja	11.154	1,0	-	5
Jumlah			1.128.928	100,00	8	242

Sumber data : Kampar dalam Angka Tahun 2021

2] Topografi

Topografi Kabupaten Kampar sebagian besar merupakan daerah perbukitan yang berada di sepanjang Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dengan ketinggian 0 – 500 meter dari permukaan laut dan kemiringan 0 - 40%.

Secara umum Kabupaten Kampar beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata 22°C – 33°C, kelembaban nisbi rata-rata 78 – 94 persen, dan curah hujan rata-rata 283 mili meter per tahun. Dengan kondisi lahan tanah yang relative subur dan pada umumnya struktur tanah bersifat arganosol, glei humus, alluvial, hidromorfik kelabu, podzolik merah kuning, litosol dan regosol. Jenis tanah arganosol tersebar luas di dataran rendah berawa-rawa dan berasosiasi dengan humus, semakin jauh dari pinggir sungai semakin tebal bahan gambutnya dan dikenal dengan gambut ombrogen.

Fisiografi lahan Kabupaten Kampar didominasi oleh grup kubah gambut, aluvial, dataran, dataran tufmasam, perbukitan, dan pegunungan. Kondisi fisiografi tersebut terdiri dari :

1. **Grup Kubah Gambut.** Satuan lahan ini berkembang di daerah cekungan rawa belakang pantai tua akibat penimbunan bahan organik dalam keadaan selalu jenuh air, sehingga proses dekomposisi minim terhadap bahan organik. Ketebalan gambut berangsur semakin tinggi ke bagian tengah sehingga permukaannya membentuk kubah dengan ketinggian tempat 10 - 20 meter di atas permukaan laut;
2. **Grup Aluvial.** Satuan lahan ini merupakan bentukan muda, oleh aktivitas danau, pelebaran sungai, dan koluviasi. Bahan pembentuknya berupa bahan endapan aluvial, koluvial, dan kadang ditutupi endapan bahan organik. Ketinggian tempat 15-475 meter di atas permukaan laut;

3. **Dataran Tuf Masam.** Merupakan dataran luas dan terbentuk dari bahan tuf vulkanik masam dan sedimen halus mempunyai ciri khas berupa punggung memanjang yang dipisahkan lembah dengan pola drainase dendritik dan aliran sungai satu arah lereng yang menyatu ke dalam sungai besar. Grup ini dijumpai berdekatan dengan grup dataran yang penyebarannya di sebelah timur laut jalur patahan utama Sumatera. Bahan tuf masam makin menipis ke arah utara dan sedikit menutupi dataran dan perbukitan. Ketinggian tempat adalah 40 – 250 meter di atas permukaan laut;
4. **Dataran.** Daerah yang tidak termasuk grup dataran tuf masam karena terbentuk dari sedimen halus sampai kasar dan telah mengalami lipatan, pengikisan dan penorehan merupakan grup tersendiri sebagai grup dataran. Umumnya lereng hampir seragam (lereng < 16% dan beda tinggi < 50 meter). Dataran memiliki sejarah yang cukup kompleks, yaitu telah mengalami berbagai proses geomorfik di permukaannya termasuk proses erosi dan sedimentasi serta pelipatan. Banyak sisa tanda proses pembentukan tanah yang dijumpai, seperti tutupan konkresi besi, lapisan plintit, dan lain-lain;
5. **Perbukitan,** terbentuk oleh proses orogenesis dan erosi terdiri atas bukit-bukit kecil dan besar masing-masing dengan perbedaan tinggi 10-50 m atau 50-300 m serta berkembang dari batuan sedimen dan metamorfik yang mengalami proses pengangkatan dan atau pelipatan serta perbukitan yang terbentuk oleh intrusi batuan plutonik masam;
6. **Pegunungan dan Plato.** Terbentuk dari batuan sedimen halus sampai kasar, granit dan batuan vulkanik yang telah mengalami lipatan/ patahan dan merupakan rangkaian Pegunungan Barisan. Puncak-puncak berada pada ketinggian > 1.000 m di atas permukaan laut.

Penggunaan lahan di Kabupaten Kampar terbagi menjadi sebelas 11 (sebelas) jenis penggunaan yaitu lahan sawah, Lahan bukan pertanian, Tegal Kebun, Ladang Huma, padang rumput, Rawa, Kolam, Lahan sementara tiddak digunakan, Hutan Negara dan Hutan Rakyat, Perkebunan dan Lahan Lain-lain. Jenis penggunaan lahan terbesar adalah lahan bukan pertanian dengan luasan sebesar 325.093 ha atau 28,80 persen dari luas wilayah Kabupaten Kampar. Sedangkan luasan terkecil adalah lahan sawah dengan jumlah luasan sebesar 3.390 ha atau sekitar 0,30 persen dari luas wilayah Kabupaten Kampar.

Tabel 1.2
Luas Tanah Menurut Penggunaan Tahun 2022

No	JenisPenggunaanLahan	Jumlah (Ha)	Persentase (%)
1	Lahan Sawah	4.542	0,40
2	Lahan Bukan Pertanian	325.093	28,80
3	Tegal Kebun	91.770	8,13
4	Ladang Huma	15.655	1,39
5	Padang Rumput	3.390	0,30
6	Rawa	-	-
7	Kolam	-	-
8	Sementara Tidak Diusahakan	88.594	7,85
9	Hutan Negara dan Hutan Rakyat	125.252	11,09
10	Perkebunan	449.691	39,83
11	Lain-lain	24.291	2,21
	Jumlah	1.128.928	100,00

Sumber : Kampar dalam Angka 2022

2. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, penduduk Kabupaten Kampar tahun 2022 sebanyak 847.236 jiwa, secara rinci dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2022

No	URAIAN	TAHUN 2022	%
1	Jumlah penduduk	847.236	100
2	Kepala Keluarga	252.117	
3	Penduduk berdasarkan Jenis kelamin:		
	- Laki-laki	432.615	51.06
	- Perempuan	414.621	48.94

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kampar Tahun 2023

Tabel 2.2
Sebaran dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Kampar Menurut Kecamatan Tahun 2022

KODE	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		PENDUDUK n(Jiwa)	LUAS (KM2)	KEPADATAN PENDUDUK n(Jiwa)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN			
		n(Jiwa)	n(Jiwa)			
1	BANGKINANG KOTA	19.533	19.491	39.024	177,18	220
2	KAMPAR	26.901	26.298	53.199	136,28	390
3	TAMBANG	43.725	42.634	86.359	371,94	232
4	XIII KOTO KAMPAR	12.517	11.878	24.395	732,40	33
5	KUOK	13.424	13.005	26.429	151,41	175
6	SIAK HULU	47.982	45.916	93.898	689,80	136
7	KAMPAR KIRI	18.288	17.276	35.564	915,33	39
8	KAMPAR KIRI HILIR	7.252	6.847	14.099	759,74	19
9	KAMPAR KIRI HULU	5.866	5.501	11.367	1.301,25	9
10	TAPUNG	53.506	50.663	104.169	1.365,97	76
11	TAPUNG HILIR	30.485	28.951	59.436	1.013,56	59
12	TAPUNG HULU	41.963	39.455	81.418	1.169,15	70
13	SALO	13.857	13.237	27.094	207,83	130
14	RUMBIO JAYA	9.737	9.381	19.118	76,92	249
15	BANGKINANG	18.117	17.591	35.708	253,50	141
16	PERHENTIAN RAJA	10.400	9.868	20.268	111,54	182
17	KAMPA	12.664	12.300	24.964	173,08	144
18	KAMPAR UTARA	9.907	9.645	19.552	79,84	245
19	KAMPAR KIRI TENGAH	14.805	14.052	28.857	330,59	87
20	GUNUNG SAHILAN	11.072	10.493	21.565	597,97	36
21	KOTO KAMPAR HULU	10.614	10.139	20.753	674,00	31
	KAB. KAB. KAMPAR	432.615	414.621	847.236	11.289,28	75

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kampar Tahun 2023

- Apabila dibandingkan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah Kabupaten Kampar, dapat diketahui bahwa rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Kampar pada tahun 2022 sebesar 75 jiwa/km², dimana kepadatan penduduk tertinggi berada di wilayah Kecamatan Kampar yaitu 390 jiwa/ Km², diikuti dengan kecamatan Kecamatan Rumbio Jaya 249 jiwa/ Km² dan Kampar Utara yaitu 245 jiwa/km² sedangkan kerapatan penduduk terendah berada di wilayah Kecamatan Kampar Kiri Hulu yaitu 9 jiwa/ Km², diikuti oleh Kecamatan Kampar Kiri Hilir yaitu 19 jiwa/ Km² dan Koto Kampar Hulu yaitu 31 jiwa/ Km².
- Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Tapung yaitu 104.169 jiwa (12,30 %) diikuti Kecamatan Siak Hulu yaitu 93.898 jiwa (11,08 %) dan Kecamatan Tapung Hulu yaitu 81.418 jiwa (9,61 %), sementara itu penduduk yang paling sedikit berada di kecamatan Kampar Kiri Hulu yaitu 11.367 jiwa (1,34 %) diikuti oleh Kampar Kiri Hilir yaitu 14.099 (1,66%) dan Kecamatan Rumbio Jaya yaitu 19.118 jiwa (2,26 %).

Tabel 2.3
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA	%
1	BANGKINANG KOTA	11.436	4,54
2	KAMPAR	15.971	6,33
3	TAMBANG	25.066	9,94
4	XIII KOTO KAMPAR	7.461	2,96
5	KUOK	7.930	3,15
6	SIAK HULU	27.564	10,93
7	KAMPAR KIRI	10.800	4,28
8	KAMPAR KIRI HILIR	4.248	1,68
9	KAMPAR KIRI HULU	3.455	1,37
10	TAPUNG	30.716	12,18
11	TAPUNG HILIR	17.430	6,91
12	TAPUNG HULU	23.671	9,39
13	SALO	7.965	3,16
14	RUMBIO JAYA	6.190	2,46
15	BANGKINANG	10.425	4,13
16	PERHENTIAN RAJA	6.166	2,45

17	KAMPA	7.414	2,94
18	KAMPAR UTARA	6.036	2,39
19	KAMPAR KIRI TENGAH	8.925	3,54
20	GUNUNG SAHILAN	6.553	2,60
21	KOTO KAMPAR HULU	6.695	2,66
	TOTAL	252.117	

Sumber : DISDUKPENCAPIL Kampar tahun 2023

Jumlah Kepala Keluarga terbanyak Tahun 2022 berada pada Kecamatan Tapung dan Siak Hulu, masing-masing 30.716 KK (12,18 %) dan 27.564 KK (10,93 %), sedangkan jumlah Kepala keluarga yang paling sedikit berada pada Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan Kampar Kiri Hilir masing-masing 3.455 KK (1,37 %) dan 4.248 KK (1,68 %).

Tabel 2.4
Pertambahan Penduduk Per Kecamatan
Tahun 2022

KODE	NAMA_KAB	2021	2022	PERTAMBAHAN	%
140101	BANGKINANG KOTA	38.182	39.024	842	2,75
140102	KAMPAR	52.058	53.199	1.141	3,72
140103	TAMBANG	79.892	86.359	6.467	21,09
140104	XIII KOTO KAMPAR	23.985	24.395	410	1,34
140105	KUOK	25.568	26.429	861	2,81
140106	SIAK HULU	88.775	93.898	5.123	16,70
140107	KAMPAR KIRI	33.720	35.564	1.844	6,01
140108	KAMPAR KIRI HILIR	13.429	14.099	670	2,18
140109	KAMPAR KIRI HULU	11.090	11.367	277	0,90
140110	TAPUNG	99.291	104.169	4.878	15,90
140111	TAPUNG HILIR	57.996	59.436	1.440	4,70
140112	TAPUNG HULU	81.175	81.418	243	0,79
140113	SALO	26.372	27.094	722	2,35
140114	RUMBIO JAYA	18.536	19.118	582	1,90
140115	BANGKINANG	34.732	35.708	976	3,18
140116	PERHENTIAN RAJA	19.613	20.268	655	2,14
140117	KAMPA	24.057	24.964	907	2,96
140118	KAMPAR UTARA	18.953	19.552	599	1,95
140119	KAMPAR KIRI TENGAH	28.137	28.857	720	2,35
140120	GUNUNG SAHILAN	20.502	21.565	1.063	3,47
140121	KOTO KAMPAR HULU	20.503	20.753	250	0,82
1401	KAB. KAMPAR	16.566	47.236	30.670	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022

Berdasarkan Tabel 2.4 diatas dapat diketahui bahwa penambahan jumlah penduduk Kabupaten Kampar pada tahun 2022 sebanyak 30.670 jiwa (3,76%) dibanding jumlah penduduk Kabupaten Kampar pada tahun 2021. Pertambahan penduduk terbanyak pada tahun 2022 terdapat pada Kecamatan Tambang sebanyak 6.467 jiwa /tahun (21,09%), Kecamatan Siak Hulu yaitu sebesar 5.123 jiwa/tahun (16,70%) dan Kecamatan Tapung 4.878 jiwa /tahun (15,90%). Sedangkan untuk penambahan penduduk pada tahun 2022 yang paling kecil yaitu pada Kecamatan Tapung Hulu yaitu 243 jiwa / tahun (0,79%) diikuti oleh Kecamatan Koto Kampar Hulu 250 jiwa /tahun (0,82%) dan Kecamatan Kampar Kiri Hulu 277 jiwa/tahun (0,90%). Tinggi jumlah pertambahan penduduk pada Kecamatan Tambang, Siak Hulu dan Tapung disebabkan karena 3 kecamatan ini adalah kecamatan penyangga yang berbatas langsung dengan Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau, sebaliknya 3 kecamatan yang rendah pertambahan penduduknya yaitu Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan Kecamatan Kota Kampar Hulu, merupakan kecamatan yang terluar dari Kabupaten Kampar.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar
Menurut Kelompok Umur Usia Non Produktif dan Produktif Tahun 2022

NO.	USIA NON PRODUKTIF DAN PRODUKTIF	JENIS KELAMIN		PENDUDUK n(JIWA)	PERSEN (%)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
		n(JIWA)	n(JIWA)		
1.	00-14 Tahun (Usia Muda/Non Produktif)	116.640	108.576	225.216	26,58
2.	15-64 Tahun (Usia Produktif)	298.745	289.137	587.882	69,39
3.	>=65 Tahun (Usia Tua/Non Produktif)	17.230	16.908	34.138	4,03
4.	JUMLAH	432.621	414.621	847.236	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022

Berdasarkan kelompok umur, penduduk terbanyak Kabupaten Kampar adalah penduduk berusia produktif 15-64 Tahun sebanyak sebanyak 587.882 jiwa (69,39 %). Sedangkan komposisi jumlah penduduk yang paling

sedikit yaitu Usia Tua/Non Produktif >65 tahun sebanyak 34.138 jiwa (4,03%).

3. Jumlah PNS

Jumlah PNS Berdasarkan Data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Jumlah PNS pada Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan jenis Kelamin

Tabel 3.1

NO	NAMA OPD	JUMLAH		
		LAKI-	PEREMPUAN	FUNGSIONAL
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN	28	17	26
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	17	7	6
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	32	2	22
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	24	20	27
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	20	12	16
6	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN	37	18	28
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN	17	12	16
8	DINAS KESEHATAN	203	1035	1181
9	DINAS KETAHANAN PANGAN	19	6	8
10	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN	18	15	18
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	35	17	33
12	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	22	4	9
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	102	18	90
14	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN	9	6	6
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN	22	15	20
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN LAYANAN	29	12	19
17	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN	1693	3138	4803
18	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,	11	26	17
19	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA	25	13	19
20	DINAS PERHUBUNGAN	33	11	24
21	DINAS PERIKANAN	23	17	21
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	20	15	16
23	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN	62	17	47
24	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	17	12	16
25	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN	97	74	138

26	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN	37	11	32
27	DINAS SOSIAL	22	12	18
28	INSPEKTORAT	37	24	52
29	KECAMATAN BANGKINANG	11	5	7
30	KECAMATAN BANGKINANG KOTA	15	9	12
31	KECAMATAN KAMPA	7	5	6
32	KECAMATAN GUNUNG SAHILAN	10	2	7
33	KECAMATAN KAMPAR	25	4	19
34	KECAMATAN KAMPAR KIRI	16	5	14
35	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR	15	5	8
36	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU	16	2	10
37	KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH	17	6	15
38	KECAMATAN KAMPAR UTARA	8	4	8
39	KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU	9	3	5
40	KECAMATAN KUOK	11	2	6
41	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA	11	5	12
42	KECAMATAN RUMBIO JAYA	11	3	7
43	KECAMATAN SALO	9	4	7
44	KECAMATAN SIAK HULU	22	5	19
45	KECAMATAN TAMBANG	19	3	17
46	KECAMATAN TAPUNG	14	3	10
47	KECAMATAN TAPUNG HILIR	16	4	12
48	KECAMATAN TAPUNG HULU	11	2	7
49	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR	14	1	11
50	SEKRETARIAT DAERAH	112	66	58
51	SEKRETARIAT DPRD	37	11	31
52	STAF AHLI	28	4	32
53	RSUD	76	179	55
54	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	46	0	30
	JUMLAH	3297	4928	7153

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.tahun 2022

Berdasarkan data dari tabel di atas jumlah total PNS di Kabupaten Kampar sebanyak 8.225 PNS dengan persentase jumlah PNS Perempuan sebesar 59,91 % dan persentase jumlah PNS Laki-laki sebesar 40,09 %. Jumlah PNS status jabatan fungsional sebanyak 7.153 PNS (86,97%), dengan jumlah PNS fungsional terbanyak berada di OPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebanyak 4.803 PNS (67,16%) dan Dinas Kesehatan sebanyak 1.181 PNS (16,51%).

4. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar untuk Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI 2021
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.493.942.228.582,00	2.427.503.585.552,71	97,34	2.480.892.607.820,76
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	252.925.053.734,00	260.225.610.592,71	102,89	267.671.965.076,34
1	Pajak Daerah	151.227.920.126,00	142.366.052.600,00	94,14	146.101.632.400,00
2	Retribusi Daerah	13.385.050.000,00	8.917.742.152,31	66,62	12.847.571.260,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.344.989.367,00	23.550.128.300,00	110,33	27.916.502.794,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	66.967.094.241,00	85.391.687.540,40	127,51	80.806.258.622,34
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.241.017.174.848,00	2.165.917.262.786,00	96,65	2.099.315.082.744,42
1	Dana Perimbangan	1.850.583.107.653,00	1.764.922.667.215,00	95,37	1.660.245.230.211,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	220.964.548.000,00	220.298.670.324,00	99,7	267.032.684.600,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	169.469.519.195,00	180.695.925.247,00	106,62	172.037.167.933,42
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	1360712174	100,76	113.905.560.000,00
1	Pendapatan Hibah	-	1.360.712.174,00	100,00	1.034.000.000,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	112.871.560.000,00

Sumber Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.427.503.585.552,71 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu Rp. 2.480.928.780.920,76, terjadi penurunan sebesar Rp. 53.389.022.268,05 (2,15%).

Untuk Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 dari target anggaran sebesar Rp. 252.925.053.734,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 260.225.610.592,71 (102,89%). Jika diperbandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 267.671.965.076,34, realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 7.446.354.483,63 (2,78%). Persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 10,72%.

Untuk Pendapatan Transfer Tahun 2022 terealisasi sebesar 96,65%, dari target anggaran sebesar Rp. 2.241.017.174.848,00 terealisasi Rp. 2.165.917.262.786,00. Pendapatan transfer didapat dari Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.764.922.667.215,00 (81,49 %), Transfer Dana Insentif Daerah dan Dana Desa Sebesar Rp. 220.298.670.324 (10,17%) dan Transfer Antar Daerah Rp. 180.695.925.247 (8,34%). Persentase kontribusi Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Daerah sebesar 89,22%.

Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp. 1.360.712.174,00. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah. Persentase kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Daerah sebesar 0,06%.

5. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Adapun anggaran dan realisasi belanja menurut jenis belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 digambarkan melalui tabel di bawah ini :

Tabel 5.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022

Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI 2021
5.	BELANJA DAERAH	2.589.837.610.263,00	2.480.592.185.573,96	95,78	2.501.626.248.277,14
5.1.	BELANJA OPERASI	1.889.541.139.841,00	1.818.618.607.702,14	96,25	1.826.289.297.910,14
5.1.01.	Belanja Pegawai	993.986.424.876,00	963.391.408.176,00	96,92	981.223.563.086,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	823.156.542.515,00	787.240.777.384,22	95,64	752.213.786.739,14
	Belanja Subsidi	436.500.000,00	436.450.000,00	99,99	-
5.1.05.	Belanja Hibah	49.022.363.900,00	47.872.957.141,92	97,66	74.277.448.085,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	22.939.308.550,00	19.677.015.000,00	85,78	18.574.500.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	312.475.438.040,00	281.509.813.581,82	90,09	320.264.168.917,00
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	590.000.000,00	505.118.496,00	85,61	1.125.952.960,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.530.233.254,00	80.023.194.214,82	85,56	106.007.705.908,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.120.097.320,00	64.626.802.305,00	96,29	51.464.311.363,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	141.357.438.016,00	127.694.277.285,00	90,33	145.332.172.309,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.877.669.450,00	8.660.421.281,00	87,68	16.334.026.377,00
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000.000,00	846.120.950,00	56,41	3.392.283.032,00
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	846.120.950,00	56,41	3.392.283.032,00
5.4.	BELANJA TRANSFER	386.321.032.382,00	379.617.643.340,00	98,26	351.680.498.418,00
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	16.461.297.013,00	10.423.785.747,00	63,32	13.935.415.056,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	369.859.735.369,00	369.193.857.593,00	99,82	337.745.083.362,00

Sumber Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Realisasi Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar 95,78 % yaitu Rp. 2.480.592.185.573,96 dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 2.589.837.610.263,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kampar tahun 2021 yaitu Rp. 2.501.626.248.277,14, realisasi belanja di Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 21.034.062.703,18 (0,84%).

Belanja Operasi pada tahun 2022 terealisasi 96,25%, dari anggaran sebesar Rp. 1.889.541.139.841,00, terealisasi sebesar Rp. 1.818.618.607.702,14. Persentase kontribusi Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah sebesar 73,31%. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Persentase kontribusi realisasi belanja terhadap belanja operasi yaitu belanja pegawai sebesar 52,97%, belanja Barang dan Jasa 43,29%, Belanja Subsidi 0,02%, belanja Hibah 2,63% dan belanja bantuan sosial 1,08%.

Belanja Modal pada tahun 2022 terealisasi 90,09%, dari anggaran sebesar Rp. 312.475.438.040,00, terealisasi sebesar Rp. 281.509.813.581,82. Persentase kontribusi Belanja Modal terhadap Belanja Daerah sebesar 11,35%. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Pengadaan Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal aset tetap lainnya dan Belanja Aset lainnya. Persentase kontribusi realisasi belanja terhadap belanja operasi yaitu Belanja Modal Pengadaan Tanah 0,18%, Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28,43%, Belanja Modal gedung dan Bangunan 22,96%, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 45,36% dan Belanja Modal aset tetap lainnya 3,08%.

Belanja Tidak Terduga pada tahun 2022 terealisasi 56,41%, dari anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,00, terealisasi sebesar Rp. 846.120.950,00. Persentase kontribusi Belanja Tidak Terduga terhadap Belanja Daerah sebesar 0,03%.

Belanja Transfer pada tahun 2022 terealisasi 98,26%, dari anggaran sebesar Rp. 386.321.032.382,00, terealisasi sebesar Rp. 379.617.643.340,00. Persentase kontribusi Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah sebesar 15,30%. Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

6. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kampar tahun 2022 dapat digambarkan melalui tabel berikut ini :

Tabel 6.1
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2022

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI 2021
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	95.895.381.680,97	74.859.762.812,21	78,06	96.243.047.177,59
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	95.895.381.680,97	74.859.762.812,21	78,06	96.243.047.177,59
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	74.859.762.811,97	74.859.762.812,21	100	96.243.047.177,59
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	21.035.618.869,00	-	-	-
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, realisasi Pembiayaan Daerah tahun Anggaran 2022 sebesar 78,06%, dari anggaran pembiayaan yang ditetapkan sebesar Rp. 95.895.381.680,97 terealisasi sebesar Rp. 74.859.762.812,21. Bila dibandingkan dengan realisasi pembiayaan Tahun 2021 yaitu Rp. 96.243.047.177,59, realisasi Pembiayaan Daerah tahun Anggaran 2022 menurun sebesar 21.383.284.365,38 (22,22%).

BAB
II**PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH****2.1 Kondisi dan Kebijakan Keuangan Daerah****2.1.1 Pendapatan Daerah****2.1.1.1 Kebijakan Umum Perubahan Pendapatan Daerah.**

Dalam pengelolaan penerimaan pendapatan daerah tetap berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka efisiensi dan efektifitas dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kebutuhan, tuntutan dan dinamika yang berkembang sesuai dengan kemampuan sumberdaya yang dimiliki.

Selanjutnya kebijakan pengelolaan penerimaan pendapatan daerah diarahkan pula dalam upaya pencapaian Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 dan diwujudkan dengan program kegiatan tahunan daerah melalui dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dokumen anggaran berupa Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Plafond dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) menjadi Plafond dan Prioritas Anggaran (PPA) dan selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022.

Arah kebijakan pendapatan daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 adalah:

- a. Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah, retribusi daerah dengan tetap berpihak pada kebijakan dengan meminimalkan beban masyarakat, tidak menghambat iklim investasi serta bertumbuhan ekonomi daerah, termasuk mengoptimalkan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan kebijakan sebagai berikut :

- 1) Melakukan optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi, untuk semua jenis penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Melakukan kajian dan penghitungan potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial.
- 3) Melakukan pembinaan dengan melaksanakan sosialisasi ke masyarakat atau wajib pajak terkait pajak daerah dan retribusi daerah, untuk meningkatkan pemahaman pajak guna mengoptimalkan penerimaan daerah, serta melakukan himbauan baik secara langsung kepada Wajib Pajak, maupun melalui Spanduk, Baliho, Media Massa (Koran, Radio) dan Media Sosial.
- 4) Melakukan pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah (SIMPAD) secara Online, serta penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada Aplikasi SIMPAD.
- 5) Memberikan Stimulus kepada Wajib Pajak berupa pembebasan denda untuk pembayaran PBB - P2 masa pajak periode Tahun 1995 s/d 2020.
- 6) Memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk pembayaran Pajak Daerah, melalui Teller Bank RiauKepri, ATM Bank RiauKepri, sedangkan untuk pembayaran PBB - P2 diberi tambahan kemudahan melalui Aplikasi Bukalapak, Tokopedia, Traveloka, Indomaret, Alfamart, Gopay, Link Aja dan I-Saku.
- 7) Mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 8) Melakukan kajian terhadap jenis penerimaan baru sebagai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan tetap memperhatikan kemampuan dunia usaha dan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang yang berlaku.
- 9) Melakukan perjanjian kerja antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dan Kejaksaan Negeri Bangkinang tentang

pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya dalam bidang pajak daerah, bidang perdata dan tata usaha negara kepada Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar.

b. Memaksimalkan perolehan Pendapatan Transfer dengan kebijakan sebagai berikut :

- 1) Ekstensifikasi dan Intensifikasi pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan, Perkebunan dan Pertambangan (PBB-P3), serta Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21.
- 2) Mengoptimalkan pelaksanaan perjanjian kerja sama antara pemerintah pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Kabupaten Kampar tentang optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah di Kabupaten Kampar.
- 3) Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kampar selaku Daerah penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi (MIGAS) dan sumberdaya alam lainnya bersama Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah/Kementerian terkait;
- 4) Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan data terbaru.
- 5) Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam peningkatan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK).
- 6) Melakukan koordinasi secara intens dengan Pemerintah Provinsi Riau terkait peningkatan penerimaan Transfer Antar Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (AP) dan Pajak Rokok.
- 7) Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait untuk peningkatan penerimaan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa

- c. Mengoptimalkan perolehan Lain-lain Pendapatan yang Sah melalui kebijakan dengan Melakukan koordinasi dengan Pemerintah/Instansi terkait dalam rangka peningkatan penerimaan alokasi pendapatan Hibah.

2.1.1.2 Kondisi Umum Perubahan Pendapatan Daerah.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan daerah. Pengelolaan pendapatan daerah telah dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, berupa peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dijadikan sebagai acuan untuk menggali potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Kampar telah melakukan restrukturisasi dasar pemungutan pendapatan daerah melalui beberapa perubahan atas Peraturan Daerah dan penerbitan Peraturan Daerah baru. Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Perkembangan ekonomi global di tahun 2022 diproyeksikan semakin membaik meskipun tingkat ketidakpastian dan risiko yang membayangi masih sangat tinggi. Pandemi Covid-19 dan merebaknya beberapa varian baru Covid-19 masih menjadi salah satu sumber risiko terbesar yang harus diwaspadai. Penanganan pandemi yang semakin membaik seiring akselerasi pelaksanaan vaksinasi di seluruh negara diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap prospek pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi juga akan didukung semakin kuatnya pola hidup kebiasaan baru dan membaiknya kualitas kesehatan masyarakat untuk berdampingan dengan kondisi pandemi (living with endemic). Dengan demikian, aktivitas ekonomi

dan sosial masyarakat diharapkan dapat kembali berjalan normal seiring adaptasi pola kehidupan normal yang baru tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka setiap daerah dituntut agar mampu melaksanakan pembangunan secara berkesinambungan disegala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik (*Publik Services*). Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah baik dari sisi perencanaan, pembangunan serta pembiayaan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan banyak memberikan manfaat bagi daerah.

Adanya penurunan Pendapatan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Kampar tentu tidak akan berdiam diri atau puas sampai disini saja, melainkan terus berupaya menggali potensi-potensi sumber pendapatan asli daerah, karena barometer keberhasilan otonomi daerah itu dapat dilihat dari kemandirian daerah dalam menciptakan dan mengelola sumber-sumber pendapatan baru untuk melaksanakan pembangunan daerah.

Memperhatikan hal tersebut diatas, kedepan diharapkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dapat terus ditingkatkan, sehingga PAD dapat meningkat perannya untuk pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Estimasi penerimaan daerah pada APBD Perubahan Kabupaten Kampar T.A.2022 mengalami Perubahan dari rencana target APBD Murni T.A.2022 sebesar Rp.2.412.166.907.158.,00,-. menjadi Rp.2.492.014.331.982,00,-. Naik sebesar Rp.79.847.424.824,00,- atau 3,31 persen. Peningkatan tersebut terjadi pada Sektor Pendapatan Transfer, untuk Pendapatan Asli Daerah terjadi penurunan, sedangkan pada Sektor Lain-lain Pendapatan yang Sah tidak ditargetkan. Secara rinci perbandingan target penerimaan daerah Kabupaten Kampar pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.412.166.907.158	2.492.014.331.982	79.847.424.824	3,31
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	270.587.472.871	267.041.133.144	-3.546.339.727	-1,31%
4.1.01.	Pajak Daerah	136.003.615.653	151.227.920.126	15.224.304.473	11,19%
4.1.02.	Retribusi Daerah	13.268.542.000	13.385.050.000	116.508.000	0,88%
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.856.353.777	21.344.989.367	-5.511.364.410	-20,52%
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	94.458.961.441	81.083.173.651	-13.375.787.790	-14,16%
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.141.579.434.287	2.224.973.198.838	83.393.764.551	3,89%
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.000.025.911.692	2.057.367.676.243	57.341.764.551	2,87%
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	141.553.522.595	167.605.522.595	26.052.000.000	18,40%

Sumber : KUA PPAS Perubahan APBD Kab. Kampar Tahun 2022

2.1.1.3 Permasalahan Utama Perubahan Pendapatan Daerah.

Masalah utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kampar dalam meningkatkan Pendapatan Daerah, antara lain :

1. *Pendapatan Asli Daerah.*

❖ Permasalahannya :

- Potensi Sumber PAD sangat terbatas dan belum optimalnya upaya pengembangan strategi serta pemetaan potensi PAD.
- Masih belum optimalnya pendataan dan pemungutan seluruh potensi objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak/retribusi dalam membayar kewajibannya.
- Masih belum maksimalnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

2. *Dana Perimbangan.*

➤ *Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (SDA).*

❖ Permasalahannya :

- Distribusi dan realisasi dana dari pemerintah pusat sering terlambat dari jadwal yang ditetapkan.

- b) Adanya perubahan kebijakan yang mendasar berupa perubahan peraturan dari Pemerintah Pusat, sehingga berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan Kabupaten Kampar.
- c) Khusus penerimaan pendapatan dari Dana Bagi Hasil minyak bumi dan gas bumi sangat tergantung dari :
 - Jumlah sumur minyak yang beroperasi.
 - Realisasi penjualan hasil produksi atau lifting Migas.
 - Cost Recovery (Pengembalian biaya operasi).
 - Harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP)
 - Nilai tukar Rupiah (Rp) terhadap US Dolar (US\$).
 - Faktor Pengurang Penerimaan Migas.

➤ *Dana Alokasi Umum (DAU).*

❖ Permasalahannya :

- a) Kurangnya akurasi data yang terkait dengan variabel-variabel dalam perhitungan dan perumusan antara lain :
 - Jumlah Penduduk tahun terakhir.
 - Luas Wilayah.
 - Jumlah Gaji Pegawai Sipil Daerah.
 - Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).
 - Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.
 - Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
 - Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
- b) Belum terkoordinasinya penyampaian data ke Pemerintah pusat.

➤ *Dana Alokasi Khusus (DAK).*

❖ Permasalahannya :

Kriteria teknis program / kegiatan ditentukan oleh Kementerian teknis terkait, sehingga pemerintah daerah kesulitan dalam menyesuaikan dengan keadaan daerah.

3. *Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah*

➤ *Bagi Hasil Pajak Propinsi.*

❖ Permasalahannya :

- a) Lambatnya penyusunan jumlah estimasi target bagi hasil Provinsi untuk Kab/Kota, sehingga memperlambat dalam penyusunan target pendapatan.
- b) Bagi hasil pajak tidak semuanya dibayarkan pada tahun yang bersangkutan.

➤ *Dana Penyesuaian.*

❖ Permasalahannya :

- a) Keterlambatan mempersiapkan Peraturan dan Penyaluran dana oleh Pemerintah Pusat.
- b) Belum diperolehnya jumlah dana dan waktu yang pasti terkait penerimaan dana penyesuaian dari Pemerintah Pusat.

2.1.2 Belanja Daerah

2.1.2.1 Kebijakan Umum Perubahan Belanja Daerah.

Kebijakan perubahan belanja daerah adalah dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah. Kebijakan umum perubahan belanja daerah adalah untuk mengalokasikan anggaran belanja yang bersifat prioritas baik untuk penambahan belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Perubahan kebijakan belanja daerah pada perubahan APBD 2022 antara lain dipengaruhi oleh;

- 1) perubahan kebijakan belanja yang disebabkan oleh peraturan perundangan menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran belanja antar program, kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran belanja antar kelompok belanja yang mengharuskan terpenuhinya mandatory yang merupakan kewajiban daerah;

- 2) perubahan kebijakan belanja dengan melakukan rasionalisasi dan formulasi ulang terhadap kegiatan yang tidak prioritas.
- 3) Perubahan karena adanya varian SILPA. Perubahan dilakukan karena perkiraan atas SILPA tidak sesuai;
- 4) Perubahan karena adanya pergeseran anggaran. Pergeseran anggaran dapat terjadi dalam satu OPD, meskipun total alokasi untuk OPD yang bersangkutan tidak berubah;
- 5) Karena adanya perubahan dalam penerimaan, khususnya pendapatan. Perubahan target atas pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi belanja perubahan pada tahun yang sama. Pada saat penyusunan APBD murni, target PAD ditetapkan di bawah potensi, lalu dilakukan adjustment pada saat melakukan perubahan APBD.
- 6) Adanya perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Riau sehubungan dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang telah berlangsung sejak bulan Januari 2020.

Kebijakan terkait dengan perubahan belanja daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pengalokasian belanja untuk menampung perubahan APBD pada pelaksanaan APBD tahun 2022 yang telah dilakukan melalui pergeseran mendahului perubahan APBD tahun 2022 sebanyak 6 (enam) kali yaitu:
 - 1) Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan untuk penyesuaian belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) dan menampung belanja yang bersumber dari bantuan keuangan propinsi Riau;
 - 2) Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan untuk penyesuaian belanja bantuan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan, dan kegiatan DAK;

- 3) Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan untuk penyesuaian belanja bantuan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) yang belum terpenuhi anggarannya;
 - 4) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan untuk penyesuaian belanja bantuan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) bidang kesehatan;
 - 5) Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan untuk pergeseran belanja tidak terduga ke belanja kegiatan tagihan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Dinas Perhubungan;
 - 6) Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan untuk pergeseran belanja untuk kegiatan Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07 /2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
2. Pengalokasian anggaran belanja untuk kegiatan yang belum cukup anggarannya;
 3. Melakukan rasionalisasi dan pergeseran belanja pada kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan atau belum prioritas;
 4. Pengalokasian anggaran untuk penyesuaian belanja yang terjadi karena perubahan SiLPA.

Perubahan atas alokasi anggaran belanja merupakan bagian terpenting dalam perubahan. Perubahan dalam pembiayaan terjadi ketika asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD harus direvisi. Ketika besaran realisasi

surplus/defisit dalam APBD berjalan berbeda dengan anggaran yang ditetapkan sejak awal tahun anggaran, maka diperlukan penyesuaian dalam anggaran penerimaan pembiayaan, setidaknya untuk mengoreksi penerimaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA).

SILPA tahun berjalan merupakan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan) tahun lalu. Oleh karena itu, SILPA merupakan penerimaan pada awal tahun berjalan. Namun, besaran yang diakui pada saat penyus APBD masih bersifat taksiran, belum definitif, karena (a) pada akhir tahun lalu tersebut belum seluruh pertanggungjawaban disampaikan oleh SKPD ke BUD dan (b) BPK belum menyatakan bahwa jumlah SILPA sudah sesuai dengan yang sesungguhnya.

Selisih (variance) antara SILPA dalam APBD tahun berjalan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun sebelumnya merupakan angka yang menjadi salah satu bahan untuk perubahan anggaran dalam tahun berjalan, terutama dalam bentuk penyesuaian untuk belanja. Jika diterapkan konsep anggaran berimbang (penerimaan sama dengan pengeluaran atau SILPA bernilai nol atau nihil), maka varian SILPA akan menyebabkan perubahan alokasi belanja.

2.1.2.2 Kondisi Umum Perubahan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran daerah sebagai pagu tertinggi yang dialokasikan untuk menunjang setiap kegiatan yang telah direncanakan. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang/pendukung yang penanganannya dalam bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antarpemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, perubahan belanja daerah tahun 2021 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari

input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan

Untuk menunjang pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam APBD, belanja daerah terbagi dalam klasifikasi belanja daerah sebagai berikut: 1) belanja operasi, 2) belanja modal, 3) belanja transfer dan 4) belanja tidak terduga. Gambaran selengkapnya tentang Perubahan APBD Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 : Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022

Kode Rekening	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
5.	BELANJA DAERAH	2.468.431.050.724	2.587.909.713.663	119.478.662.939
5.1.	BELANJA OPERASI	1.783.797.653.507	1.894.135.920.263	110.338.266.756
5.2.	BELANJA MODAL	300.403.030.089	305.949.431.018	5.546.400.929
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.057.395.472	305.949.431.018	-4.554.065.472
5.4.	BELANJA TRANSFER	378.172.971.656	386.321.032.382	8.148.060.726

Sumber : KUA PPAS Perubahan APBD Kab. Kampar Tahun 2022

2.1.2.3 Permasalahan Utama Perubahan Belanja Daerah

Secara umum permasalahan belanja daerah adalah terbatasnya pendapatan yang bersumber dari PAD dan terjadinya pengurangan Dana Perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil Pajak/Sumber Daya Alam yang sangat signifikan yang disebabkan oleh pemotongan lebih bayar oleh pemerintah pusat terhadap Dana Bagi Hasil sektor minyak bumi, sedangkan jumlah kebutuhan belanja dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, disamping itu masih terdapat kesalahan dalam penulisan/input kode rekening sehingga perlu adanya revisi/pergeseran kode rekening dalam rangka penyesuaian kode rekening yang berakibat pelaksanaan program dan kegiatan tertunda sampai ditetapkannya Peraturan Daerah Perubahan APBD.

2.1.3 Pembiayaan Daerah

2.1.3.1 Kondisi Umum Perubahan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

2.1.3.2 Perubahan Pembiayaan

Pembiayaan Netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan dan pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran. APBD Kabupaten Kampar setiap tahun mengalami defisit anggaran namun dapat ditutup dengan Pembiayaan Netto.

Penerimaan pembiayaan digunakan dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Penerimaan pembiayaan pada APBD 2022 mengalami perubahan berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPK perwakilan Propinsi Riau terhadap Laporan Hasil Pertanggungjawaban APBD tahun 2021 terutama terhadap pembiayaan yang bersumber dari SiLPA tahun 2021. Perubahan penerimaan ini mempengaruhi terhadap jumlah defisit anggaran yang harus ditutupi oleh SiLPA tahun 2021. Perencanaan Perubahan APBD tahun 2022 mengalami defisit disebabkan perencanaan belanja lebih besar dari pendapatan daerah. Untuk menutupi defisit digunakan penerimaan

pembiayaan dengan kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun 2021 untuk mendanai belanja kegiatan dari semula dianggarkan Rp.56.264.143.566,00 menjadi Rp.74.859.762.812,12;
2. Menganggarkan penerimaan pembiayaan dari pengembalian investasi jangka Panjang dana bergulir pada BPR Sari Madu sebesar Rp. 21.431.030.291,00. Penerimaan kembali pembiayaan dari pengembalian dana bergulir ini dilakukan karena SiLPA pada tahun 2021 tidak bisa menutupi defisit belanja pada perubahan APBD tahun 2022

Pengeluaran pembiayaan daerah adalah semua pengeluaran yang perlu diterimakan kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Dalam APBD tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kampar tidak melakukan pengeluaran pembiayaan.

Tabel 2.3 : Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022

Kode Rekening	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
6.	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	56.264.143.566,00	95.895.381.681	39.631.238.115
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	56.264.143.566,00	74.859.762.812	18.595.619.246
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	21.035.618.869	21.035.618.869
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	56.264.143.566	95.895.381.681	39.631.238.115

Sumber : KUA PPAS Perubahan APBD Kab. Kampar Tahun 2022

2.2 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022, yang penjabarannya tertuang dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 semula berjumlah Rp. 2.468.431.050.724 bertambah sejumlah Rp. 119.542.562.939,- sehingga menjadi Rp. 2.587.973.613.663,- dengan rincian sebagai berikut :

1. *Pendapatan Daerah*

a. Semula	Rp. 2.412.166.907.158,-
b. Bertambah	Rp. 79.911.324.824,-
c. Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.492.078.231.982,-

2. *Belanja Daerah*

a. Semula	Rp. 2.468.431.050.724,-
b. Bertambah	Rp. 119.542.562.939,-
c. Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 2.587.973.613.663,-

3. *Pembiayaan Daerah*

➤ *Penerimaan Pembiayaan*

a. Semula	Rp. 56.264.143.566,-
b. Bertambah	Rp. 39.631.238.115,-
c. Jumlah setelah perubahan	Rp. 95.895.381.681,-

➤ *Pengeluaran Pembiayaan*

a. Semula	Rp. 0,-
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp. 0,-
c. Jumlah setelah perubahan	Rp. 0,-

➤ *Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan* Rp. 95.895.381.681,-

➤ *Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan* Rp. 0,-

**BAB
III****HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH****3.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan Target Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Pemerintah Kabupaten Kampar selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Kampar melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja (LKj) yang disusun sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) tersebut menyajikan penilaian tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kampar melaksanakan kegiatan sepanjang tahun anggaran 2022 sesuai dengan target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar 2017-2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kampar.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran. Gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran didapatkan melalui perbandingan antara Perjanjian Kinerja dengan realisasi pada tahun berjalan.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, diperoleh capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis dan selanjutnya dianalisis dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun berakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD.
4. Nilai yang diperoleh dari pencapaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Ordinal Pencapaian Kinerja

NO	% CAPAIAN KINERJA	PERINGKAT	INTERPRETASI
1	≥ 85	AA	Memuaskan
2	≥ 75 – 85	A	Baik Sekali
3	≥ 65 – 75	B	Baik
4	≥ 50 – 65	CC	Cukup Baik
5	≥ 30 – 50	C	Agak Kurang
6	≥ 0 – 30	D	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja, dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

➤ Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*).

➤ Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

3.1.2 Evaluasi Pencapaian Sasaran dan Pengukuran Kinerja

Secara umum Pemerintah Kabupaten Kampar telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022. 43 (empat puluh tiga) sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2022 sebagaimana juga telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 dan mengacu kepada Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2022, memiliki indikator sasaran sebanyak 43 (empat puluh tiga), terdiri dari 13 (tiga belas) indikator untuk misi I, 7 (tujuh) indikator untuk misi II, 7 (tujuh) indikator untuk misi III, 5 (lima) indikator untuk misi IV, 6 (enam) indikator untuk misi V dan 5 (lima) indikator untuk misi VI.

Tabel 3.2
Pencapaian Target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian									Kategori Capaian
			Capaian indikator $\geq 100\%$		Capaian Indikator $< 100\%$		Capaian Indikator $< 100\%$ Tetapi Lebih Tinggi Dibanding Tahun Lalu		Tidak Dapat Diukur (NA)		Rata-rata Capaian	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	%	
1.	Misi Pertama	13	4	30,77	2	15,38	4	30,77	3	23,08	95,46	Memuaskan
2.	Misi Kedua	7	4	57,14	3	42,86	0	0	0	0	106,59	Memuaskan
3.	Misi Ketiga	7	4	57,14	3	42,86	0	0	0	0	101,82	Memuaskan
4.	Misi Keempat	5	4	80	1	20	0	0	0	0	108,58	Memuaskan
5.	Misi Kelima	6	5	83,33	0	0	0	0	1	16,67	98,79	Memuaskan
6.	Misi Keenam	5	2	40	2	40	0	0	1	20	79,75	Kurang
Jumlah		43	23	53,49	11	25,58	3	6,98	6	13,95	114,06	Baik Sekali

Selanjutnya analisis pengukuran terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran untuk masing-masing indikator pada tahun 2022 yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kampar berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Misi Pertama :	Menyiapkan SDM yang Handal dan Profesional
-----------------------	---

Pada misi pertama terdapat 6 (enam) sasaran dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja sasaran yang digunakan. Penjelasan tingkat capaian 13 (tiga belas) indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 4 (empat) indikator kinerja sasaran (30,77%) mencapai atau melebihi target;
2. Sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja sasaran (23,08%) tidak mencapai target tetapi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya;
3. Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja sasaran (15,38%) tidak mencapai target;
4. Sebanyak 4 (empat) indikator kinerja sasaran (30,77%) tidak dapat dinilai karena tidak tersedia data (N/A).

Evaluasi terhadap masing-masing kinerja sasaran yang berada pada misi pertama adalah:

Sasaran1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan.
-----------------	--

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Evaluasi Pencapaian Misi 1 Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Hasil 2022	% Capaian	Tercapai/ Tidak	Target Akhir RPJMD
Indeks Pembangunan Manusia	72,50	73,15	72,83	73,02	73,19	73,84	100,88	V	
Angka rata-rata lama sekolah	9,75	10,09	10,25	10,25	10,88	9,66	88,79	^	
Harapan lama sekolah	13,45	13,57	13,75	13,75	13,96	12,90	92,41	X	
Rata-Rata Capaian Tahun 2022							94,03	Memuaskan	

Keterangan:

V = *tercapai*

X = *tidak tercapai*

^ = *Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi sudah melebihi realisasi tahun sebelumnya*

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, nilai capaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan untuk tahun 2022 mencapai kategori AA (Memuaskan) yaitu sebesar 94,03%.

Penjelasan untuk masing - masing indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut :

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kampar Tahun 2022 mengalami peningkatan disbanding tahun sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2022 adalah sebesar 73,84 atau meningkat 0,82 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia 2022 didukung oleh peningkatan disemua komponen penyusunnya, yaitu :

1. Angka Harapan Hidup
2. Angka Melek Huruf
3. Rata-rata Lama Sekolah
4. Pengeluaran Riil Perkapita yang disesuaikan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Angka rata - rata lama sekolah

Diperoleh data bahwa angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Kampar tahun 2022 adalah 9,66 Tahun, artinya rata-rata penduduk di Kabupaten Kampar bersekolah selama 9,66 tahun atau setara tamat kelas 9 SMP. Rumus Angka Rata-rata lama sekolah adalah :

$$ARLS = \frac{\text{Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas sedang sekolah atau sudah berijazah}}{\text{Jumlah penduduk x lama pendidikan yang dihabiskan}}$$

Angka rata-rata lama sekolah adalah kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2022, angka rata-rata lama sekolah belum mencapai target yang telah ditetapkan, dari target sebesar 10,88 tahun terealisasi sebesar 9,66 tahun dengan persentase capaian kinerja sebesar 88,79%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi capaian kinerja indikator angka rata - rata lama sekolah ini mengalami peningkatan.

Harapan lama sekolah

Realisasi harapan lama sekolah di Kabupaten Kampar pada tahun 2022 adalah 12,90% dari target sebesar 13,96% atau dengan capaian 92,41%. Ini berarti anak - anak Indonesia yang berusia 7 tahun memiliki harapan menempuh pendidikan hingga Diploma I. Dibandingkan dengan capaian tahun - tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja harapan lama sekolah ini mengalami penurunan.

Harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Asumsi Harapan lama sekolah yaitu kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Tujuan Harapan Lama Sekolah adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai setiap anak.

Sasaran 2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
------------------	---

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Evaluasi Pencapaian Misi 1 Sasaran 2

Indikator Kinerja	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Hasil 2022	% Capaian	Tercapai /	Target Akhir RPJMD
								Tidak	
Angka Harapan Hidup	71,1	70,1	71,5	71,5	71,9	71,12	98,92	^	
Rata-Rata Capaian Tahun 2022								98,92	Memuaskan

Keterangan:

V = tercapai

X = tidak tercapai

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi sudah melebihi realisasi tahun sebelumnya

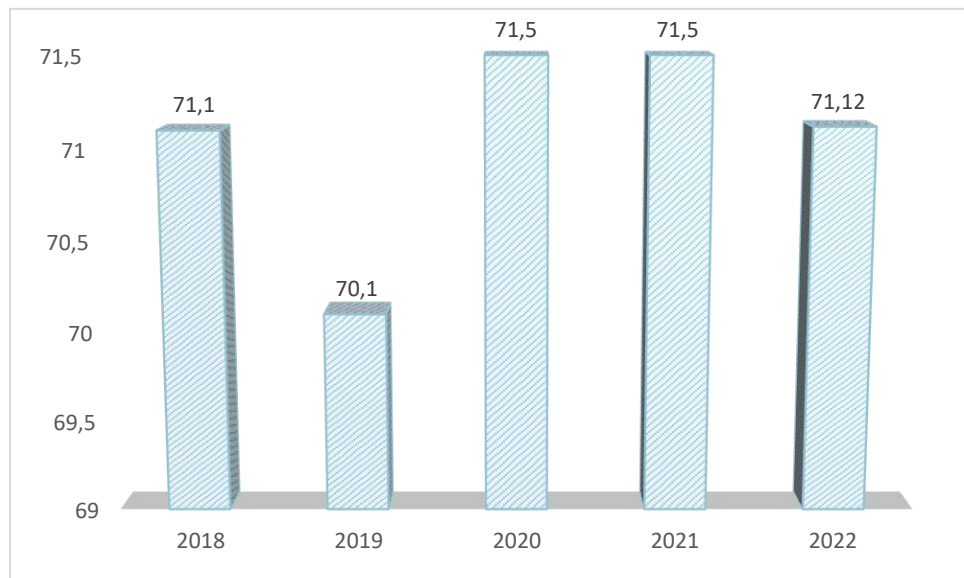
Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas dapat dilihat capaian sasaran 2 (dua) dengan kategori Memuaskan (AA) dengan rata-rata capaian 98,92%.

Penjelasan untuk indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

Angka Harapan Hidup

Indikator kinerja angka harapan hidup untuk tahun 2022 terealisasi 71,12% dari target 71,9% dengan nilai capaian 98,92% dengan kategori Memuaskan (AA). Dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja ini mengalami kenaikan. Capaian angka harapan hidup dari tahun 2018-2022 berturut-turut yaitu 71,1%, 70,1%, 71,5, 71,5 dan 71,12 Secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik 3.1
Angka Harapan Hidup



Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Angka harapan hidup dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, Pendidikan, kebijakan Pemerintah maupun perekonomian masyarakat dan sebagainya.

Sasaran 3	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
------------------	--

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Evaluasi Pencapaian Misi 1 Sasaran 3

Indikator Kinerja	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Hasil 2022	% Capaian	Tercapai /	Target Akhir RPJMD
								Tidak	
Tingkat Pengangguran terbuka	8,07	7,99	5,66	5,66	5	N/A	N/A	N/A	
Tingkat kemiskinan	8,18	8,18	6,25	6,25	5,49	1,73	100	V	
Rata-Rata Capaian Tahun 2022							100%	Memuaskan	

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, dapat dilihat capaian sasaran 3 (tiga) dengan kategori Memuaskan (AA) dengan rata-rata capaian 100%.

Penjelasan untuk masing-masing indikator di atas adalah sebagai berikut:

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tidak terdapat angka Realisasi capaian Indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka untuk tahun 2022 karena masih dalam proses pengumpulan data ke Perusahaan-perusahaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun

persen berguna sebagai acuan Pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru.

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persenta sejumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dampak pengangguran terbuka diantaranya :

1. Menyebabkan kesenjangan sosial;
2. Menurunkan daya saing dan kemampuan;
3. Menambah angka kemiskinan.

Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) tahun 2022, jumlah masyarakat miskin ekstrem Kampar sebesar 1,73 persen atau setara dengan 15.450 jiwa dari total penduduk yang ada. Jumlah persentase penduduk miskin di Kabupaten Kampar mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Kampar sangat komit terhadap pemberantasan kemiskinan di Kampar, sehingga target Pemerintah Indonesia harus bebas miskin ekstrem pada tahun 2024 dapat terealisasikan. Akan tetapi hal ini tidak hanya dapat dilakukan oleh Pemkab Kampar sendiri, adahal yang sangat mengganjal dalam penuntasan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kampar. Di Kampar, terdapat 23 desa sangat tertinggal yang berada di beberapa jalur. Diantaranya 9 desa hanya dapat dilalui dengan jalur sungai, ada juga yang berada di jalur kuning namun belum ada jaringan telekomunikasi dan jaringan listrik. Semuanya diakibatkan pembangunan infrastruktur sangat minim, tersebut wilayah tersebut merupakan wilayah yang termasuk dalam kawasan hutan lindung suaka margasatwa dan Pemerintah Daerah tidak bisa melakukan pembangunan infrastruktur karena terhalang peraturan pemerintah untuk melindungi area tersebut. Pemerintah Kabupaten Kampar berharap agar pemerintah pusat memberikan regulasi dan jalan keluarnya, agar pemerintah daerah bisa melakukan pembangunan infrastruktur khususnya jalan darat, karena wilayah

tersebut akses hanya jalan air atau sungai. Upaya lain yang dilakukan Pemkab Kampar dengan membentuk 50 Desa Kreatif dan 50 Desa Menuju Desa Kreatif, yang melibatkan peran ibu-ibu dan wanita desa dalam mengangkat ekonomi masyarakat.

Sasaran 4	Meningkatnya Pembangunan Kepemudaan
------------------	--

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.6
Evaluasi Pencapaian Misi 1 Sasaran 4

Indikator Kinerja	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Hasil 2022	% Capaian	Tercapai / Tidak		Target Akhir RPJMD
Indeks pembangunan pemuda	N/A	48,76	49,19	49,19	51,23	N/A	N/A	N/A		
Indeks Reformasi Birokrasi	68,55	68,91	69,31	69,52	70	57,52	^	82,17		
Rata-Rata Capaian Tahun 2022							82,17%	Baik Sekali		

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

N/A = Tidak tersedia data

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas dapat dilihat capaian sasaran meningkatnya pembangunan kepemudaan dengan kategori Baik Sekali (A) dengan rata-rata capaian 82,17%.

Penjelasan untuk indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut:

Indeks pembangunan pemuda

Tidak didapat data realisasi capaian target mengenai indikator kinerja indeks pembangunan pemuda untuk tahun 2022.

Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2022 tidak terealisasi sesuai dengan target yang diharapkan namun lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kabupaten Kampar memperoleh predikat CC dengan nilai 57,52. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar telah berupaya untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada hasil antara dan reform serta diikuti dengan peningkatan nilai pada total komponen hasil. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Kampar perlu meningkatkan upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi agar mencapai target minimal indeks RB > 60 atau predikat "B".

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hampir seluruh kualitas hasil antara Pemerintah Kabupaten Kampar di tahun 2022 mengalami + peningkatan. Meskipun begitu, kualitas hasil masih perlu untuk terus ditingkatkan karena beberapa masih berada pada kategori penilaian yang belum baik. Hal tersebut yang dimaksud adalah Sistem Merit dengan kategori "Buruk", Indeks Profesionalitas ASN dengan kategori "Sangat Rendah" dan Indeks Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Kategori "Cukup".

Tujuan evaluasi RB ini untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Sasaran 5	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan
------------------	---

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 4 (empat) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.7
Evaluasi Pencapaian Misi 1 Sasaran 5

Indikator Kinerja	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Hasil 2022	% Capaian	Tercapai /	Target Akhir RPJMD
								Tidak	
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	V	WTP
Nilai SAKIP	CC	B	B	B	BB	B	90	X	BB
Nilai EKPPD	N/A	3	3,01	3,01	3,05	N/A	N/A	N/A	
Indeks SPBE	N/A	2,97	2,94	2,94	3	2,22	74	^	
Rata-Rata Capaian Tahun 2022								88%	Memuaskan

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

N/A = Tidak tersedia data

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, secara umum dapat diketahui bahwa sasaran meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan tidak berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) indikator kinerja yakni Opini BPK berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian 100%, 2 (dua) indikator Kinerja yakni Nilai SAKIP dan indeks SPBE tidak mencapai target yang telah ditetapkan dan 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Nilai EKPPD tidak diperoleh data mengenai realisasi tahun 2022.

Penjelasan untuk masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

Opini BPK

Indikator kinerja Opini BPK terealisasi dengan capaian 100%. Sama dengan tahun sebelumnya, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Kampar. Capaian opini tersebut diperoleh melalui meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar akan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan asset, meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian opini BPK-RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini BPK atas laporan keuangan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Kampar sejak tahun 2017 adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian pelaksanaan indikator kinerja ini didukung oleh program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

Nilai SAKIP

Indikator kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2022 tidak terealisasi sesuai dengan target yang diharapkan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kabupaten Kampar memperoleh predikat B dengan nilai 62,23. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja yang baik, yaitu pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang sudah baik khususnya pada unit kerja utama, namun masih adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,95
2.	Pengukuran Kinerja	30	17,55
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,53
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	12,20
5.	Nilai Hasil Evaluasi	100	62,23
6.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Penyajian Laporan Kinerja perlu ditingkatkan kualitas dengan analisis yang mendalam dan komprehensif serta memberikan informasi yang memadai tentang strategi perbaikan kinerja kedepan.

Nilai EKPPD

Nilai EKPPD untuk tahun 2022 juga belum di publish oleh Kementerian Dalam Negeri. Nilai EKPPD terakhir yang di publish Kementerian Dalam Negeri adalah tahun 2018.

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan menggunakan system pengukuran kinerja.

Indeks SPBE

Indikator kinerja indeks SPBE tahun 2022 tercapai 2,22 (Cukup) dari target sebesar 3 atau dengan capaian 74%. Capaian tahun ini naik atau lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang biasa disebut dengan *e-government* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi Pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis,

masyarakat dan pihak - pihak lainnya. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berdampak pada integrasi sistem implementasi SPBE yang terpadu ini bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari Domain, Aspek, dan Indikator. Tiga domain diantaranya domain kebijakan, domain tata kelola, domain SPBE, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai. Kedua Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai dan ketiga Indikator, yang merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah.

Ada tiga unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut yaitu penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (*enabler*) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Sasaran 6	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.
------------------	--

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.8

Evaluasi Pencapaian Misi 1 Sasaran 6

Indikator Kinerja	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Hasil 2022	% Capaian	Tercapai /	Target Akhir RPJMD
								Tidak	
Indeks kepuasan masyarakat	100	76,61	77,61	77,61	79,44	87,08	109,62	V	
Rata-Rata Capaian Tahun 2022							109,62	Memuaskan	

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Secara umum kualitas pelayanan dalam unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dipersepsikan baik oleh publik, Hal ini terlihat dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh berkisar antara 35,19 sampai dengan 99,92 sehingga nilai SKM rata-rata bagi Pemerintah Kabupaten Kampar yang diperoleh adalah 87,08. Bila dibandingkan dengan target, capaian indikator kinerja ini melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 79,44% atau dengan capaian 109,62% dengan kategori Memuaskan. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022 mengalami kenaikan, dimana hasil IKM tahun 2021 adalah 84,63.

Hasil analisis terhadap penilaian indeks kepuasan masyarakat melalui kuesioner yang telah disebar pada 18 (delapan belas) Perangkat Daerah, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) masing-masing perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	: 99
2. Inspektorat	: 92,9
3. RumahSakitUmum Daerah Bangkinang	: 80,28
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	: 86,43
5. Dinas Ketahanan Pangan	: 94,66
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	: 94,66
7. Badan Pendapatan Daerah	: 92,70
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	: 77,25
9. Dinas PemadamKebakaran dan Penyelamatan	: 84,86
10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	: 92,46
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat &Desa	: 35,19
12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	: 90,70
13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	: 99,92
14. Dinas Perhubungan	: 84,91
15. Dinas Perikanan	: 89,53
16. Dinas Lingkungan Hidup	: 87,77
17. Satuan Polisi PamongPraja	: 87,22
18. Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	: 97,14

Misi Kedua :	Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
---------------------	---

Pada misi kedua terdapat 3 (tiga) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran yang digunakan. Penjelasan tingkat capaian 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 4 indikator kinerja sasaran (57,14%) mencapai atau melebihi target;
2. Sebanyak 3 indikator kinerja sasaran (42,86%) tidak mencapai target.

Evaluasi terhadap masing-masing kinerja sasaran yang berada pada misi kedua adalah:

Sasaran 1	Meningkatnya Kesejahteraan Petani
------------------	--

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.9
Evaluasi Pencapaian Misi 2 Sasaran1

Indikator Kinerja	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Hasil 2022	% Capaian	Tercapai / Tidak	Target Akhir RPJMD
	Pertumbuhan Ekonomi sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	6,76	5,85	5,62	3,91	3,95	4,77	120,76	V
Nilai Tukar Petani	N/A	90,3	111,74	111,74	111,87	152,94	136,71	V	
Rata-rata Capaian Tahun 2022								128,74	Memuaskan

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas dapat dilihat capaian sasaran meningkatnya kesejahteraan petani dengan kategori Memuaskan (AA) dengan rata-rata capaian 128,74%.

Penjelasan untuk indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

Indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Kampar Tahun 2022 terealisasi sebesar 4,77 persen. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 ini mengalami peningkatan dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar Tahun 2021 sebesar 3,91 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar ditunjang oleh faktor potensi unggulan, yaitu:

➤ **Sektor Pertanian**

Potensi sumber daya alam yang sangat besar bagi perkembangan Pertanian, dimana dengan potensi yang cukup luas Potensi Lahan Sawah Tahun 2021 di Kabupaten Kampar seluas 4.542 Ha dengan Lahan sawah yang dimanfaatkan seluas 3.758 Ha, yang belum dimanfaatkan seluas 784 Ha, sedangkan penetapan lahan LP2B seluas 3.220 Ha.

➤ **Sektor Peternakan**

Pemerintah Kabupaten Kampar dalam beberapa tahun terakhir juga serius dalam meningkatkan pembangunan di sub sektor peternakan. Pembangunan sub sektor peternakan tidak hanya untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan peternak.

Banyak jenis ternak di Kabupaten Kampar yang banyak di pelihara dan dikembang biakkan oleh petani. Diantaranya ternak kerbau, sapi potong, Sapi Perah, Ternak Kecil Ternak Unggas.

➤ **Sektor Kehutanan**

Berdasarkan data lahan sebagai kawasan hutan yang ada di Kabupaten Kampar seluas 566.121 Ha, terbagi ke dalam lima kategori hutan antara lain hutan lindung seluas 49.255 ha, hutan suaka alam

dan wisata seluas 108.034 ha, hutan produksi tetap seluas 157.419 ha, hutan produksi terbatas seluas 116.066 ha dan kawasan hutan yang dapat dikonservasi seluas 135.347 ha. Sedangkan hasil hutan non HPH terdiri dari tiga kelompok yakni, kayu bulat (HTI) acasia dan evcoliptus sebanyak 471.637,43 M3, kayu gergajian sebanyak 3.853.367 M3 dan kayu olahan sebanyak 2.488.678 M3.

Dinas Kehutanan Kampar seperti dikutip dari Kampar kab.go.id. pada tahun 2015 mencatat ada 121 perusahaan dan usaha milik perorangan yang ilegal atau non - prosedural. Usaha itu menduduki kawasan hutan tanpa izin. 121 perusahaan dan perorangan itu menguasai sekitar 141.350 hektare kawasan hutan. Bukan hanya Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Lindung juga ikut dibabat. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan sudah mengingatkan agar pengusaha melengkapi persyaratan. Pengurusan izin dimulai dari Pemerintah Kabupaten Kampar. Berlanjut ke Pemprov Riau dan terakhir, Menteri Kehutanan menerbitkan izin prinsip pelepasan dari kawasan hutan. Himbauan agar izin diurus tidak berarti melegalkan perusahaan di dalam kawasan hutan. Untuk tahun 2017 sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan kewenangan kehutanan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Riau.

➤ **Sektor Perikanan**

Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan (usaha penetasan, pembibitan, pembesaran) ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, pengeringan, atau mengawetkan ikan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha (komersial/bisnis).

Potensi perikanan di Kabupaten Kampar sangat tinggi. Pemerintah terus meningkatkan pembangunan di sub sector perikanan. Sumber daya perairan air tawar memberikan keuntungan

yang sangat potensial di Kabupaten Kampar dengan adanya kekayaan hasil produksi sektor perikanan.

Untuk budidaya keramba dan jaring apung tersedia areal seluas 410 ha antara lain mencakup: waduk PLTA Koto Panjang seluas 275 Ha, sungai seluas 125 Ha dan danau lainnya seluas 10 Ha. Dari jumlah tersebut baru dimanfaatkan untuk budidaya keramba seluas 48.14 Ha (11,74%) atau sebanyak 7.521 unit.

Sejalan dengan perkembangan usaha perikanan budidaya, usaha perbenihan ikut berkembang dalam rangka memenuhi kebutuhan benih. Hal ini terlihat dari produksi pada tahun 2021 sebesar 251.862 juta menjadi 267.582 juta ekor pada tahun 2022.

Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Riau Tahun 2022 sebesar 152,94 atau naik 5,64 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 143,86. Hal ini disebabkan indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikan sebesar 5,50 persen sedangkan indeks harga yang dibayar petani mengalami penurunan yaitu turun sebesar 0,13 persen. Indeks harga konsumsi rumah tangga mengalami penurunan sebesar 0,24 persen, sementara indeks harga yang dibayar untuk keperluan produksi naik sebesar 0,16 persen.

Kenaikan NTP di Provinsi Riau pada bulan November 2022 terjadi pada tiga subsektor penyusun NTP. Kenaikan NTP tertinggi terjadi pada sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat yaitu sebesar 6,50 persen, kemudian diikuti kenaikan NTP pada sub sektor Tanaman Pangan sebesar 0,27 persen dan diikuti kenaikan NTP pada sub sektor Perikanan sebesar 0,14 persen.

Sedangkan dua sub sektor penyusun NTP lainnya mengalami penurunan. Sub sektor Hortikultura mengalami penurunan NTP sebesar 2,95 persen dan diikuti penurun NTP pada sub sektor Peternakan sebesar 0,78 persen.

Lebih lanjut dikatakan, pada November 2022, tujuh Provinsi di Pulau Sumatera mengalami kenaikan NTP. Riau tercatat sebagai provinsi dengan kenaikan NTP tertinggi di Pulau Sumatera yaitu naik sebesar 5,64 persen. Sementara provinsi Kepulauan Riau tercatat sebagai provinsi di Pulau Sumatera yang mengalami penurunan NTP tertinggi yaitu turun sebesar 1,58 persen

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Sasaran 2	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah
------------------	---

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.10
Evaluasi Pencapaian Misi 2 Sasaran2

Indikator Kinerja	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Hasil 2022	% Capaian	Tercapai / Tidak	Target Akhir RPJMD
Indeks Ketahanan Pangan	52,74	63,97	64,21	65,78	66,93	56,28	84,88	X	
Indeks kualitas lingkungan hidup	68,43	68,27	68,07	67,89	67,72	71,45	105,51	V	
Rata-rata Capaian Tahun 2022							95,19	Memuaskan	

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas dapat dilihat capaian sasaran meningkatnya ketahanan pangan daerah dengan kategori Memuaskan (AA) dengan rata-rata capaian 95,19%.

Penjelasan untuk indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut:

Indeks Ketahanan Pangan

Berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional, Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar tahun 2022 berada diperingkat 362 dengan nilai 56,28 persen. Hasil tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan didalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kampar tahun 2017-2022 yaitu sebesar 66,93 persen. Pemerintah Kabupaten Kampar terus berupaya meningkatkan produksi pangan, khususnya padi melalui penerapan inovasi teknologi intensifikasi Padi Aerob Terkendali Berbasis Organik (IPAT-BO). Teknologi IPAT-BO menggunakan berbagai produk pupuk hayati sebagai sumber nutrisi mikroba tanah yang mampu meningkatkan kualitas lahan dan menghidupkan Kembali tanah-tanah yang rusak serta dapat menghemat penggunaan air. Diharapkan dengan penerapan inovasi IPAT-BO ini indeks ketahanan pangan Kabupaten Kampar dapat meningkat.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Tahun 2022 mengalami peningkatan, yakni meningkat 3,56 poin dari angka 67,89 pada tahun 2021, menjadi 71,45 pada tahun 2022. Sehingga Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kampar tahun 2022 melebihi target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kabupaten Kampar yaitu 67,72. Hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan pada Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu masing-masing 88,91, 47,39 dan 66,67.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan gambaran suatu kondisi lingkungan hidup

pada lingkup dan periode tertentu. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari :

1. Indeks Kualitas Air (IKA)
2. Indeks Kualitas Udara (IKU)
3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Tujuan penyusunan nilai IKLH dimaksudkan sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat Pusat maupun Daerah yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, nilai IKLH digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Nilai IKLH dapat digunakan sebagai instrumen indikator keberhasilan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Mengendalikan pencemaran lingkungan hidup untuk mencegah kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat, perairan air tawar dan laut, maupun udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Sasaran 3	Meningkatkan Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan
------------------	---

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.11
Evaluasi Pencapaian Misi 2 Sasaran 3

Indikator Kinerja	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Hasil 2022	% Capaian	Tercapai / Tidak	Target Akhir RPJMD
Indeks Kualitas Air	95,52	64,56	71,86	71,86	77,11	66,67	86,46	X	
Indeks Udara	94,45	87,32	85,12	85,12	82,22	88,91	108,14	V	
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	N/A	N/A	48,95	48,95	51,01	47,39	92,90	X	
Rata-rata Capaian Tahun 2022								95,83	Memuaskan

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya

N/A = Tidak tersedia data

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas dapat dilihat capaian sasaran meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan dengan kategori Memuaskan (AA) dengan rata-rata capaian 95,83%.

Penjelasan untuk indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut:

Indeks Kualitas Air

Indikator kinerja Indeks Kualitas Air Kabupaten Kampar Tahun 2022 terealisasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 66,67 persen dari target 77,11 persen. Ketidak capaian target ini disebabkan tidak adanya anggaran pendukung untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Indeks Kualitas Air **dihitung dari hasil konversi Pollution Index (PI)**. Perhitungan IKA dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Perhitungan ini didasarkan pada nilai hasil sampel terhadap baku mutu tiap parameter.

Kualitas air adalah mutu air yang memenuhi standar untuk tujuan tertentu. Syarat yang ditetapkan sebagai standar mutu air berbeda-beda tergantung tujuan penggunaan air tersebut. Perubahan kualitas air sungai adalah kondisi kualitas air yang dapat diukur dan diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Indeks Kualitas Udara

Indikator kinerja Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kampar Tahun 2022 terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 88,91 persen dari target 82,22 persen. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian target indikator kinerja Indeks Kualitas Udara tahun 2022 ini mengalami peningkatan.

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan oleh badan pemerintah untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah. Parameter yang digunakan dalam perhitungan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) hingga saat ini adalah Partikulat (PM10 dan PM2.5), Karbon Monoksida (CO), Sulfur Dioksida (SO2), Nitrogen Dioksida (NO2), Ozon (O3) dan Hidrokarbon (HC). Untuk Kabupaten Kampar Indeks Kualitas Udara sebesar 51* (sedang) dengan polutan utama PM2.5.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Berdasarkan data yang diterima di lapangan, Indikator Kinerja tentang Indeks kualitas tutupan lahan tidak mencapai target yang telah ditetapkan atau dengan capaian 92,90%. Realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2022 hanya sebesar 47,39 persen dari target 51,01 persen. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi ini juga mengalami penurunan. Penurunan tutupan hutan itu mayoritas terjadi karena lahannya berubah menjadi perkebunan, pertanian lahan kering dan campuran, atau kebun campuran.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah *nilai* yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan.

Misi Ketiga : Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional

Pada misi ketiga terdapat 3 (tiga) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran yang digunakan. Penjelasan tingkat capaian 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sebanyak 4 (empat) indikator kinerja sasaran (57,14) mencapai atau melebihi target
2. Sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja sasaran (42,86) tidak mencapai target

Evaluasi terhadap masing-masing kinerja sasaran yang berada pada misi ketiga adalah:

Sasaran 1	Meningkatkan Infrastruktur Kewilayahan
------------------	---

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 4 (empat) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.12
Evaluasi Pencapaian Misi 3 Sasaran1

Indikator Kinerja	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Hasil 2022	% Capaian	Tercapai /Tidak	Target Akhir RPJMD
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	-	-	-	-	81,66%	74,37%	91,07	X	
Proporsi jalan kondisi baik (%)	80%	42,41%	55%	77,77%	65%	62,16%	95,63	X	
Persentase penduduk berakses air bersih	76%	67,44%	79,45%	89,94%	81,68%	87,96%	107,69	V	
Rasio irigasi dalam kondisi baik	-	43,81%	75,18%	70,33%	79,63%	73%	91,67	X	
						Rata-Rata Capaian Tahun 2022	96,52%		Memuaskan

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, nilai capaian sasaran Meningkatkan Infrastruktur Kewilayahan untuk tahun 2022 mencapai kategori AA (Memuaskan) yaitu sebesar 96,52%.

Penjelasan untuk indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (%)

Indikator persentase Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) tahun 2022 terealisasi sebesar 74,37% dengan capaian 91,07% dari

target 81,66%. Tidak tercapainya disebabkan oleh karena adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terkait dengan aturan galian C yang menyebabkan pekerjaan yang menggunakan material Galian C batal dikerjakan. Solusi yang akan di lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah memastikan Quarry yang ada di Kabupaten Kampar memiliki Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).

Proporsi Jalan Kondisi Baik (%)

Indikator persentase Proporsi Jalan Kondisi Baik tahun 2022 terealisasi sebesar 62,16% dengan capaian 95,63% dari target 65%.

Persentase Penduduk Berakses Air Bersih

Indikator persentase Penduduk Berakses Air Bersih tahun 2022 terealisasi sebesar 87,96% dengan capaian 107,69% dari target 81,68%.

Rasio Irigasi Dalam Kondisi Baik

Indikator persentase Rasio irigasi dalam kondisi baik tahun 2022 terealisasi sebesar 73,% dengan capaian 91,67% dari target 79,63%

Sasaran 2	Meningkatkan permukiman dan fasilitas umum lainnya
------------------	---

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.13
Evaluasi Pencapaian Misi 3 Sasaran2

Indikator Kinerja	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Hasil 2022	% Capaian	Tercapai/ Tidak	Target Akhir RPJMD
	Persentase rumah layak huni yang terbangun	97,38	98,17	300 unit	300 unit	98,59	99,96	101,39	V
Persentase lingkungan yang sehat & aman didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum	44 Paket	96,85	79,98	79,98%	85,77%	99,89%	116,46	V	
				Rata-Rata Capaian Tahun 2022			108,93%	Memuaskan	

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, nilai capaian sasaran Meningkatkan Permukiman dan Fasilitas Umum Lainnya untuk tahun 2022 mencapai kategori AA (Memuaskan) yaitu sebesar 108,93%.

Penjelasan untuk indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

Persentase Rumah Layak Huni yang Terbangun

Indikator Rasio rumah layak huni Tahun 2022 terealisasi sebesar 101,39%. Tercapainya target ini karena adanya upaya sosialisasi, desiminasi, dan melakukan survey kedesa-desa. Juga melakukan koordinasi ke Provinsi dan ke Pusat/Kementrian.

Persentase Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Indikator Persentase Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Tahun 2022 terealisasi sebesar 116,46%. Tercapainya target ini karena adanya upaya :

- Melakukan pemetaan terhadap setiap kelurahan dan kawasan
- Melakukan Koordinasi ke Provinsi dan ke Pusat/ Kemetrian dan OPD terkait.

Sasaran 3	Meningkatkan Infrastruktur Transportasi
------------------	--

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.14
Evaluasi Pencapaian Misi 3 Sasaran 3

Indikator Kinerja	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Hasil 2022	% Capaian	Tercapai /Tidak	Target Akhir RPJMD
Persentase ketersediaan infrastruktur transportasi	18,1%	36%	39%	39%	45%	45%	100	V	
			Rata-Rata Capaian Tahun 2022				100	Memuaskan	

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, dapat diketahui realisasi dari sasaran meningkatkan infrastruktur transportasi mencapai target yang telah ditetapkan.

Penjelasan untuk indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

Persentase Ketersediaan Infrastruktur Transportasi

Indikator Persentase ketersediaan infrastruktur transportasi Tahun 2022 terealisasi sebesar 100%. Tercapainya target ini karena adanya upaya untuk selalu berkoordinasi dengan instansi terkait baik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar maupun Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka pembangunan dan penataan transportasi Kabupaten Kampar. Disamping itu juga mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada dalam rangka pembinaan, evaluasi dan monitoring serta penanganan masalah pembangunan di Bidang Perhubungan.

Misi Keempat : Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif

Pada misi keempat terdapat 2 sasaran dengan 5 indikator kinerja sasaran yang digunakan. Penjelasan tingkat capaian 5 indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 5 indikator kinerja sasaran (100%) mencapai atau melebihi target;

Pengukuran kinerja pencapaian sasaran terhadap misi keempat pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1	Meningkatkan Investasi
------------------	-------------------------------

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.15
Evaluasi Pencapaian Misi 4 Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Hasil 2022	% Capaian	Tercapai/ Tidak	Target Akhir RPJMD
Realisasi Investasi PMDN (Rp.) PMA (\$)									
1. PMDN (rupiah)	75.000.000.000	665.200.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000	150.000.000.000	3.371.308.700.000	54	X	
2. PMA (\$)	14.000.000	164,4	16.000.000	16.000.000	14.000.000	342.801.410.000	188,35	V	
Rata-Rata Capaian Tahun 2022							121,18	Memuaskan	

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data pada tabel di atas, rata-rata capaian sasaran Menurun karena adanya beberapa pelaku usaha belum mengetahui pedoman dan tata cara pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), tidak tercapai target dikarenakan sebagian Investor telah menyelesaikan pekerjaannya/ Kontrak pada Tahun 2022 dan telah selesai pelaksanaan pekerjaan PNS, Tol Pekanbaru - Bangkinang dengan nilai capaian 121,18% dengan kategori Memuaskan (AA). Secara umum dari realisasi ketiga indikator kinerja selama tahun 2022 menunjukkan bahwa ke dua indikator kinerja tidak mencapai target.

Penjelasan untuk indikator kinerja PMDN (Rp) dan PMA (dollar) sebagai berikut:

Sasaran strategis meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan Indikator Kinerja jumlah nilai investasi di Kabupaten Kampar dari target sebesar Rp. 3.714.110.110 , sehingga realisasi pencapaian tercatat 2.247,54 %.

Tabel 3.16
Realisasi Investasi Berdasarkan Jumlah Proyek,
Investasi PMA/PMDN dan Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2021

No	Uraian	Tahun		Laju pertumbuhan (%)
		2021	2022	
1	Jumlah Total Proyek :	106	24	111,57
	a. PMA (buah)			
	b. PMDN (buah)	593	106	166,29
2	Jumlah Total Investasi :	2.984.426.200.000	342.801.410	1243,7
	a. PMA (Rp.)			
	b. PMDN (Rp.)	4.966.374.500.000	3.371.308.700.000	67,64
3	Penyerapan Tenaga Kerja:	1.282	3	42,67
	a. PMA (Orang)			
	b. PMDN Orang	9.362	7.666	61,6

Sumber : Hasil Rilis Investasi Provinsi Riau 2021 (s/d TWR IV)

Dari tabel 3.16 tersebut diatas jumlah proyek (lapangan usaha) PMA/PMDN tahun 2022 tercatat sebanyak 295 proyek/usaha. Bila dibandingkan dengan tahun 2021 jumlah proyek/usaha sebanyak 699 proyek terjadi peningkatan yang cukup signifikan mencapai 57,79 %. Begitu juga terhadap serapan tenaga kerja tahun 2022 sebanyak 7.669 orang, dari jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 27,95 % disbanding tahun 2021 sebanyak 10.644 orang.

Berdasarkan rumpun sektor usaha yang berkontribusi terhadap realisasi Investasi di Kabupaten Kampar tahun 2022 PMA/PMDN meliputi 19 sektor usaha saja, secara rinci dapat dilihat seperti table berikut ini :

Tabel 3.17
Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha,
Investasi PMA dan PMDN Tahun 2022 (setelah dikonversi ke Rupiah)

No	Sektor Usaha	Nilai Investasi (Rp.)		Jumlah
		PMA	PMDN	
1	Industri Kimia dan Farmasi	0	190.000.000	190.000.000
2	Tan.Pangan, Perkebunan dan KH	155.668.800.000	1.254.989.600.000	1.410.658.400.000
3	IndustriMakanan	178.654.635.000	1.38.175.200.000	1.216.829.835.000
4	Hotel dan Restoran	0	275.000.000	275.000.000
5	Jasa Lainnya	0	1.161.300.000	1.161.300.000
6	IndustriLainnya	0	27.613.100.000	27.613.100.000
7	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	0	1.605.000.000	1.605.000.000
8	Konstruksi	0	339.017.900.000	339.017.900.000

9	Perdagangan dan Referasi	0	116.728.500.000	116.728.500.000
10	Listrik, Gas dan Air	6.988.445.000	50.000.000	7.035.445.000
11	Industri Kertas dan Percetakan Karet dan Plastik	0	1.053.700.000	1.053.700.000
12	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	0	203.088.000.000	203.088.000.000
13	Industri Karet dan Plastik	1.489.530.000	165.162.900.000	166.654.430.000
14	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	0	20.181.000.000	20.181.000.000
15	Kehutanan	0	35.988.200.000	35.988.200.000
16	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi Optik dan Jam	0	50.000.000	50.000.000
17	Pertambangan	0	975.000.000	975.000.000
18	Industri Mineral dan Non Logam	0	164.869.300.000	164.869.300.000
19	Perikanan	0	135.000.000	135.000.000
	Total PMA + PMDN	342.801.410.000	3.714.110.110.000	7.914.800.700.000

Sasaran 2	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Kerakyatan
------------------	--

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.18
Evaluasi Pencapaian Misi 4 Sasaran 2

Indikator Kinerja	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Hasil 2022	% Capaian	Tercapai / Tidak	Target Akhir RPJMD
1. Jumlah koperasi aktif	250	150	288	288	315	277	87,94	V	
2. Jumlah BUMDES aktif	240	250	150	150	242	242	100	V	
3. UMKM	5.421	5.490	6.234	6.535	6.750	6.750	100	V	
Rata-Rata Capaian Tahun 2022							95,98	Memuaskan	

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data pada tabel di atas, rata-rata capaian sasaran Meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi kerakyatan dengan nilai capaian 95,98% dengan kategori Memuaskan (AA). Secara umum dari realisasi ketiga indikator kinerja selama tahun 2022 menunjukkan bahwa ketiga indikator kinerja mencapai target yang memuaskan.

Lingkungan strategis yang mempengaruhi kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar ditentukan oleh faktor-faktor pengaruh baik yang berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Analisis terhadap lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal (analisa SWOT) merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan Kekuatan (strengths), Kelemahan (weakness), Peluang (opportunities) dan Tantangan/Kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut diatas sangat penting dan merupakan dasar bagi keberhasilan perwujudan visi dan misi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar.

Adapun faktor-faktor atau unsur-unsur dari analisa SWOT tersebut adalah sebagai berikut:

1. KEKUATAN (STRENGTH)

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar sesuai perda diberikan amanah membantu sebagian tugas pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan/pemberdayaan Koperasi dan UMK, oleh karena itu peran dan posisinya dalam pembinaan/pemberdayaan koperasi dan UMK tidak saja penting tetapi juga strategi khususnya dalam rangka mendukung percepatan kesejahteraan rakyat yakni mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Seiring dengan itu Komitmen aparatur Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil untuk kembali kepada 5 pilar pembangunan Kabupaten Kampar, sebagai dimensi baru bagi pemberdayaan Pasar, Koperasi dan UMK. Komitmen ini merupakan bagian penting, untuk meningkatkan kinerja, yang sekaligus sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan.

Disadari bahwa koperasi dan UMK telah memberikan berbagai sumbangan dalam proses pembangunan daerah. Dari pendataan akhir tahun 2022, diketahui jumlah pelaku UMK mencapai 18.380 unit. Jumlah ini berarti bahwa UMK merupakan pelaku ekonomi yang dominan karena mencapai 90% dari seluruh pelaku ekonomi Kabupaten Kampar. Keberadaan jumlah UMK yang besar, dengan penyebaran hingga ke pelosok kelurahan/desa, merupakan kekuatan ekonomi yang sesungguhnya dalam struktur pelaku ekonomi regional dan nasional.

Potensi koperasi dapat dilihat dari jumlah Koperasi hingga akhir 2022 sebanyak 528 unit yang diperkirakan setiap tahunnya akan terus meningkat, potensi lain koperasi juga dapat dilihat dari jumlah anggota yang hingga akhir tahun 2022 mencapai 109.938 orang. Sedangkan dilihat dari aset berupa modal sendiri, Koperasi hingga akhir tahun 2022 mencapai Rp. 478.539 miliar, selain daripada itu Koperasi juga mengelolah modal luar yang mencapai Rp. 351.837 miliar.

Hal diatas memperlihatkan bahwa keterkaitan Koperasi dengan masyarakat tidak sekedar dalam bentuk keanggotaan dan usaha saja, tetapi juga dalam pengeelolahan aset keuangan masyarakat. Bahkan keberadaannya merupakan kekuatan utama dibidang kredit mikro disekitar wilayah kerjanya melalui USP dan KSP. Dilihat dari volume usaha Koperasi, pada tahun 2022 mencapai lebih dari Rp. 898.872 miliar, Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi secara menyeluruh mencapai Rp. 49.5339 miliar.

Dari sisi pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UMK terdapat Aparatur pembina di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, sarana dan prasarana penunjang lain yang selama ini menjadi modal dasar dalam menjalankan pembinaan/pemberdayaan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar hingga tahun 2021 sebanyak 36 (Tiga Puluh Enam) orang PNS, dan 32 (Tiga Puluh Lima) orang Honorer, dan 5 (Lima) Orang Tenaga Pendamping. satu unit gedung yang dapat dipergunakan untuk rapat-rapat pemberdayaan Perdagangan, Koperasi dan UMK.

2. KELEMAHAN (WEAKNESS)

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, Perdagangan, Koperasi dan UMK masih menghadapi banyak kendala. Kelembagaan Usaha Koperasi dan UMK merupakan aspek penting yang perlu dicermati dalam membedah permasalahan Kopersai dan UMK. Perlu digarisbawahi bahwa lebih dari 6.462 usaha yang ada atau lebih dari 90% pelaku usaha adalah usaha mikro dan kecil dengan skala usaha yang sulit berkembang, karena tidak mencapai skala usaha yang ekonomis, disamping itu pula badan usaha perorangan kebanyakan usaha dagang dikelola secara tertutup dengan legalitas usaha dan administrasi kelembagaan yang sangat tidak memadai, jumlah usaha sektor riil berkembang lambat, kebanyakan pelaku usaha baru lebih memilih usaha dagang/ritel dan usaha dari pasar ke pasar. Upaya pemberdayaan UMK ke depan makin rumit karena jumlah dan jangkauan UMK demikian banyak dan luas, terlebih lagi daerah tertinggal terisolir dan perbatasan serta kultur masyarakat yang beraneka ragam di lapangan.

Lemahnya kelembagaan ini juga terjadi pada Koperasi, karena rendahnya pemahaman perkoperasian oleh para pengelola, pengurus, maupun anggota Koperasi. Kondisi ini cukup memprihatinkan, tidak saja jika dilihat dari rendahnya partisipasi anggota dalam usaha koperasi, tapi dapat juga dilihat dari rendahnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) oleh Koperasi aktif. Pada beberapa koperasi juga dapat dilihat berbagai permasalahan kelembagaan, usaha dan keanggotaan yang masih perlu pembinaan dan penataannya secara lebih baik.

Dengan kondisi seperti itu, menunjukkan bahwa kapasitas dan kualitas para pengelola koperasi, sebagian besar masih sangat rendah dan terbatas. Hal ini juga mengidentifikasi bahwa telah terjadi pengelolaan Koperasi yang tidak sesuai dengan nilai, identitas dan jati diri koperasi. Semakin memburuknya citra Koperasi ditengah masyarakat, karna masih banyak koperasi tidak aktif dengan legalitas yang tidak memadai, terlilit persoalan hukum, bahkan pengurus, anggota adalah persoalan-persoalan akut yang perlu segera ditangani sementara harapan

untuk melakukan perubahan tidak mungkin diserahkan pada masyarakat karena kesadaran untuk berkoperasi belum sepenuhnya tumbuh berkembang sebagai sebuah kebutuhan.

Perdagangan, Koperasi dan UMK juga menghadapi persoalan rendahnya kualitas SDM. Kebanyakan SDM koperasi dan UMK berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, dan kompetensi, kewirausahaan manajemen yang seadanya. Langkah perubahannya dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kebijakan kurikulum dan pelaksanaan diklat, serta revitalisasi lembaga diklat, baik ditingkat Provinsi maupun Pusat.

Masalah klasik lain yang dihadapi Koperasi dan UMK adalah terbatasnya akses Koperasi dan UMK kepada sumberdaya produktif. Akses kepada sumber daya produktif terutama terhadap bahan baku, permodalan, teknologi, sarana prasarana serta informasi pasar.

Dalam hal pendanaan utamanya Perdagangan, Koperasi dan UMK memiliki permasalahan karena modal sendiri yang terbatas, tingkat pendapatan rendah, aset jaminan dan administrasi tidak memenuhi persyaratan perbankan. Bahkan bagi usaha mikro dan kecil seringkali terjerat rentenir/pihak ketiga dan kurang tersentuh lembaga pembiayaan.

Selain permasalahan yang berkaitan dengan pelaku usaha, keberadaan aparatur dan sarana prasarana penunjang sangat menentukan berhasil tidaknya proses pemberdayaan Perdagangan, Koperasi dan UMK. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa dari jumlah aparatur tidak sepenuhnya sebanding dengan cakupan jumlah Perdagangan, Koperasi dan UMK, bahkan hampir 10 tahun terakhir, saat ini baru dapat diantisipasi melalui rekrutmen tenaga pendamping koperasi dilapangan pada tahun 2011 yang dibiayai melalui APBN Prov Riau. Namun dipandang perlu penambahan dan peningkatan kompetensi bagi setiap aparat, dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu apabila terjadi mutasi dan yang pensiun.

3. PELUANG (OPPORTUNITY)

Sesungguhnya upaya pemberdayaan Perdagangan, Koperasi dan UMK ini telah menemukan momentum yang tepat, yaitu ditandai dengan tingginya komitmen dan dukungan masyarakat, Pemerintah Daerah dan Lembaga Legislatif terhadap pembangunan ekonomi rakyat sebagai pelaku utama dalam perekonomian domestik dan nasional.

Prospek kemajuan pembangunan daerah juga cenderung terbuka, krisis ekonomi diperkirakan mulai pulih, kondisi ini juga ditopang stabilitas politik dan keamanan yang relatif aman terjaga. Dengan demikian diharapkan akan makin meningkatnya daya beli dan keanekaragaman pola permintaan masyarakat dan memungkinkan pula tumbuhnya usaha sektor riil masyarakat, mengingat Kabupaten Kampar sebagai barometer pembangunan Provinsi Riau kedepan.

Seiring dengan itu telah terjadi perubahan struktur pelaku ekonomi dari pertanian ke agrobisnis, yang diharapkan dapat memacu dan meningkatkan produktivitas usaha dan Investasi bagi UMK. Kondisi ini diharapkan akan memacu peluang bagi usaha Perdagangan, Koperasi dan UMK terutama dibidang Agrobisnis, Agroindustri.

Demikian pula dukungan perubahan orientasi kebijakan investasi, perdagangan dan industri ke arah industri pedesaan dan industri yang berbasis sumber daya alam, terutama pertanian, kehutanan, pertambangan, pariwisata serta kerajinan rakyat memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya Perdagangan, Koperasi dan UMK.

Dibidang permodalan, pengembangan potensi masih memungkinkan terbuka, untuk menjadikan UKM sebagai kekuatan pembiayaan bagi usaha mikro di pedesaan, melalui berbagai program pemerintah. Selain itu juga tersedia plafon kredit yang cukup besar melalui skema kredit Dana Bergulir dari Pemerintah Daerah. Dan Lembaga Keuangan Bank.

4. ANCAMAN (TREATH)

Kondisi Perdagangan, Koperasi Dan UMK hingga saat ini memang belum menampakkan kemampuannya dalam penguasaan pasar dan rendahnya daya saing untuk menghasilkan produk yang dapat di pasarkan dengan baik di pasar domestic dan pasar Internasional, Sehingga dapat dikategorikan Koperasai dan UMK Kabupaten Kampar berada pada kelompok konsumen bukan produsen.

Hal ini di tandai dengan berkembangnya bisnis retail oleh usaha besar di masyarakat, maka lengkaplah sudah tekanan persaingan yang di alami oleh produk Perdagangan, Koperasi dan UMK. Sementara dalam rangka peningkatan kapasitas usaha Perdagangan, koperasi dan UMK, terbentur oleh produk jasa Lembaga Keuangan yang sebagian Besar berupa kredit modal kerja bukan kredit investasi (dengan jangka waktu yang relatif lebih lama). Bagi Perdagangan, Koperasi dan UMK keadaan ini akan mempersulit Upaya Produk unggulan yang berdaya saing.

Permasalahan lain yang mempengaruhi perkembangan Perdagangan, Koperasi dan UMK adalah kurang kondusifnya iklim usaha. Hal ini berkaitan dengan penataan lokasi usaha, infrastruktur, kebijakan dalam aspek pendanaan bagi usaha mikro dan kecil, kebijakan aspek informasi, kemitraan, pemberian kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan yang kurang mendukung, serta perlunya peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Selain itu eksistensi Perdagangan, koperasi dan UMK juga selalu masih di pandang sebelah Mata, bahkan berkembang pandangan minor terhadap pemberdayaan Perdagangan, Koperasi dan UMK seolah pemberdayaan adalah bagian dari program tambahan dan belas kasihan.

Dari berbagai permasalahan-permasalahan tersebut, pemberdayaan Perdagangan, Koperasi dan UMK pada tahun 2017-2022 juga akan menghadapi tantangan, untuk berperang mengatasi persoalan sosial ekonomi seperti penyediaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan, mengatasi kesenjangan antar daerah (Terutama daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan).

Dengan pemahaman yang jernih terhadap potensi dan permasalahan Perdagangan, koperasi dan UMK tersebut, kiranya dapat menggugah kesadaran dan semangat kebersamaan dan kebangsaan, bahwa keberadaan Perdagangan, koperasi dan UMK merupakan alat yang penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi regional dan nasional. Konon katanya di beberapa negara maju, Perdagangan, Koperasi dan UMK menjadi kekuatan utama dalam perekonomian nasional dan memiliki posisi tawar yang besar dalam setiap kebijakan ekonomi pemerintahan.

Selain dari pada itu bahwa Perdagangan, Koperasi dan UMK juga berkaitan erat dengan upaya mencapai millenium development Goals (MDG S) Atau tujuan pembangunan millenium, yang ditujukan pada pencapaian hak-hak dasar kebutuhan hidup bagi segenap Bangsa Indonesia, khususnya menyangkut menanggulangi pengentasan pemesanan dan kelaparan yang ekstrim, mendorong kesetaraan Gender dan pemberdayaan perempuan, dan membangun kemitraan Global dalam pembangunan tertama dengan mengembangkan usaha produktif yang layak dijalankan untuk kaum muda. Kabupaten kampar sebagai barometer Provinsi, dengan pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah yang perlu di topang oleh kekuatan ekonomi lokal yang sepadan, sehingga 5 (Lima) Pilar penopang Pembangunan Kabupaten Kampar berdiri kokoh dengan harapan mengakar kesuatu Realitas kehidupan ekonomi masyarakat Kabupaten Kampar.

Momentum yang hadir saat ini membawa harapan besar agar perekonomian daerah berlandaskan pada pembangunan ekonomi rakyat sejatinya, dan bukan harapan dan dari ssebuah cita-cita masa depan. Meskipun demikian, disadari bahwa keberadaan usaha besar di daerah merupakan mitra penting dalam pembangunan ekonomi rakyat. Oleh karena itu perlu pengembangan berbagai bentuk kerja sama dengan usaha besar yang di fasilitasi daerah, diantaranya pengembangan kemitraan jaringan pasar bersama Perdagangan, Koperasi dan UMK, tempat magang, alih teknologi, pendampingan dan advokasi serta CSR

(Coorprate Sosial Responsibility). Dengan prinsip kerja sama yang saling membutuhkan, menguntungkan dan membesarkan.

Dengan demikian Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil kabupaten Kampar sebagai salah satu unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar bertujuan melakukan penyelarasan yang berkesesuaian dengan Visi, Misi dan program Kepala Daerah terpilih yang tetap berlandaskan, Tepat sasaran, berhasil guna dan bermanfaat secara langsung bagi pemberdayaan Perdagangan, Koperasi dan UMK kabupaten Kampar. Kesemuanya itu tidak terpisahkan dalam kerangka mekanisme maupun sistem rencana pembangunan dan penyelenggaraan pembangunan.

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Penyusunan RPJM daerah berpedoman pada RPJP Daerah, dengan memperhatikan RPJM, RPJM daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, Strategi pembangunan daerah kebijakan umum dan program OPD, lintas OPD dan program kewilayahan , yang disertai dengan rencana kerja/kegiatan dalam koridor kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan/ anggaran yang bersifat indikatif.

RPJM Daerah dijabarkan dalam RKPD, dan mengacu pada RKP, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, Rencana kerja pendanaanya, baik yang di laksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, Oleh karenanya perlu disusun dokumen rencana starategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil 2017-2022, Untuk dijadikan sebagai kerangka acuan/pedoman bagi segenap pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menggapai sebagian dari sebuah harapan yang menjadi cita-cita RPJM Kabupaten Kampar 2017-2022.

Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) yang aktif

Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) yang aktif mengalami peningkatan pada tahun 2022 yang dijelaskan pada Tabel 3.19 berikut:

Tabel. 3.19

Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) yang aktif

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah BUMDES aktif	242	242	100

Sumber data : Bidang UED,SDA dan TTG

Sasaran Kinerja pada tahun 2022 tersebut dicapai melalui program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kerja Sama Antar Desa Total Pagu Rp. 101.000/008,- dengan Realisasi Keuangan Rp. 191.000.008,- Rp. atau 75,40%,-
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama Antar Desa dengan pagu Rp. 144.688.872,- dengan Realisasi Keuangan Rp. 1.055.530.205,- Rp. atau 94,00%,-

Target utama pembinaan BUMDES di Kabupaten Kampar adalah 242 Desa. Dalam pelaksanaannya terdapat 238 BUMDes yang aktif melaksanakan pengelolaan BUMDes secara berlanjut dan terdapat 3 (tiga) yang tidak aktif, tolak ukur aktif atau tidaknya pengelolaan BUMDes dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Adanya Pengurus tetap BUMDes dengan Manajemen yang jelas dan baik
2. Adanya unit usaha BUMDes
3. MDPT tidak menjadi ukuran aktif atau tidaknya suatu BUMDes

Misi Kelima : Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industry Pengolahan yang Maju

Pada misi kelima terdapat 3 sasaran dengan 6 indikator kinerja sasaran yang digunakan. Penjelasan tingkat capaian 6 indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 5 indikator kinerja sasaran (83,33%) mencapai atau melebihi target;
2. Sebanyak 1 indikator kinerja sasaran (16,67%) tidak dapat dinilai karena tidak tersedia data (N/A).

Evaluasi terhadap masing-masing kinerja sasaran yang berada pada misi kelima adalah:

Sasaran1	Meningkatkan Destinasi Wisata
-----------------	--------------------------------------

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.20
Evaluasi Pencapaian Misi 5 Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Hasil 2022	% Capaian	Tercapai /	Target Akhir RPJMD	
								Tidak		
Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	954.094	1.188.727	1.188.727	1.188.727	2.124.988	1.998.748	94	V		
Jumlah objek daya tarik wisata	84	107	107	90	94	94	94	V		
			Rata-Rata Capaian Tahun 2022					94	Memuaskan	

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja jumlah jumlah objek daya tarik wisata mencapai hasil 94 % atau dengan kategori memuaskan (AA).

Penjelasan indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

Jumlah kunjungan wisatawan (orang)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa target untuk tahun 2022 sebanyak 1.188.727 Orang, sedangkan capaian realisasi jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kampar pada tahun 1.993.067 Orang mencapai target kenaikan 30% yang telah ditetapkan, terjadi kenaikan jumlah kunjungan sebanyak 900.067 Orang (94.00%), untuk mencapai Target 100% masih terdapat beberapa kekurangan sarana dan prasarana dalam mencapai target yaitu 1. Masih kurangnya memaidainya infrastruktur, sarana dan prasarana dilokasi objek wisata.

Jumlah objek daya tarik wisata

Pada tahun 2022, jumlah Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) Kabupaten Kampar bertambah 8 ODTW dari target yang ditentukan sebanyak 8 ODTW atau dengan capaian sebesar 94 %, dengan kategori Memuaskan (AA). Jika dibandingkan pada tahun 2021 terjadi peningkatan ditahun 2022 .

Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) adalah suatu bentukan dan fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang kesuatu daerah atau tempat tertentu. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar terus melakukan akses jalan kelokasi destinasi wisata agar pengunjung lebih meningkat untuk ditahun 2023.

Sasaran 2	Pemasaran dan promosi wisata
------------------	-------------------------------------

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.21
Evaluasi Pencapaian Misi 5 Sasaran 2

Indikator Kinerja	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Hasil 2022	% Capaian	Tercapai / Tidak	Target Akhir RPJMD
	Persentase publikasi dan promosi wisata	2.920	8.63%	4.35	5,38	NA	NA	NA	NA
Jumlah event pariwisata	18	20	22	24	24	27	113%	V	
	Rata-Rata Capaian Tahun 2022							113%	Memuaskan

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja jumlah even pariwisata mencapai hasil 113% atau dengan kategori Memuaskan (AA).

Penjelasan indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

Persentase publikasi dan promosi wisata

Tidak didapat data mengenai indikator kinerja persentase publikasi dan promosi wisata tahun 2022 karena Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak tahu indikator untuk menghitung indikator kinerja tersebut.

Jumlah event pariwisata

Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan berbagai kegiatan untuk mewujudkan Sasaran yang telah ditetapkan, dengan indikatornya adalah Jumlah event Pariwisata dan Kebudayaan yang diikuti dan dilaksanakan.

Target pelaksanaan / keikutsertaan pada berbagai event pariwisata dan kebudayaan tahun 2022 adalah 24 event, telah dapat direalisasikan sebanyak 27 event, dapat melebihi target. Upaya untuk meningkatkan capaian indikator kinerja "Jumlah event Pariwisata dan Kebudayaan yang diikuti atau dilaksanakan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET (Rp)
1	Pengembangan Nilai Budaya	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya	280.818.468 1 Kegiatan
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembagian Lembaga Adat	417.438.581 1 Kegiatan
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	589.550.579 24 Event

Sasaran 3	Meningkatkan pembangunan industri
------------------	--

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut

Tabel 3.22
Evaluasi Pencapaian Misi 5 Sasaran 3

Indikator Kinerja	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Hasil 2022	% Capaian	Tercapai/	Target Akhir RPJMD
								Tidak	
PDRB sector industri	24,056	23,204	23,63	24,056	24,482	25,399,17	103,74	V	
Persentase pertumbuhan industri	3,02	3,51	4,35	5,38	5,87	4,40	75	V	
Rata-Rata Capaian Tahun 2022								89,37%	Memuaskan

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, capaian sasaran Meningkatkan Pembangunan Industri mencapai hasil 89,37% dengan kategori memuaskan.

Penjelasan indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

PDRB Sektor Industri

Indikator PDRB Sektor Industri tahun 2022 terealisasi sebanyak 103,74% dari target 25,399,17. Dari data diatas, dapat dilihat bahwa PDRB Sektor Industri mencapai target karena PDRB digunakan dua pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Persentase Pertumbuhan Industri

Indikator persentase pertumbuhan industri tahun 2021 terealisasi sebesar 4,40% dari target 5.38%. Dari data diatas, dapat dilihat bahwa persentase pertumbuhan industri mencapai target karena dilakukan pendataan terhadap IKM yang ada di kabupaten Kampar, adanya pembinaan untuk membentuk IKM baru dan selalu meningkatkan mutu dan jenis produk IKM. Untuk tetap mendorong pertumbuhan industri di Kabupaten Kampar, perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang sehingga dapat memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha industri dan memberikan perhatian lebih bagi pengusaha industri dalam hal penyediaan sarana dan prasarana Industri. Selain itu bisa dengan melakukan pemusatan pembinaan dan pendataan yang lebih akurat sehingga pembinaan akan lebih terarah kedepannya.

Misi Keenam Memperkuat Citra Kampar sebagai Serambi Mekkah Riau yang Religius, Beradat, dan Berbudaya

Pada misi keenam terdapat 2 (dua) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran yang digunakan. Penjelasan tingkat capaian 5 (lima) indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja sasaran (40%) mencapai atau melebihi target;

1. Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja sasaran (40%) tidak mencapai target;
2. Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja sasaran (20%) tidak dapat dinilai karena tidak tersedia data (N/A).

Evaluasi terhadap masing-masing kinerja sasaran yang berada pada misi keenam adalah:

Sasaran 1	Meningkatkan Kerukunan Hidup Beragama
------------------	--

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 3 indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.23
Evaluasi Pencapaian Misi 6 Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Hasil 2022	% Capaian	Tercapai / Tidak	Target Akhir RPJMD
	Tingkat kerukunan umat beragama	NA	NA	NA	14 Kasus	5 Kasus	3 Kasus	60	X
Persentase penyelesaian konflik antar umat beragama	4 Kasus	10 Kasus	NA	100	100	66,67	66.67	X	
Persentase adat dan budaya yang dilestarikan	72,73	75,61	78,26	80,23	82,35	N/A	N/A	N/A	
Rata-Rata Capaian Tahun 2022							63,34%	Cukup Baik	

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, Capaian sasaran Meningkatkan Kerukunan Hidup Beragama mencapai hasil 63,34% dengan kategori Cukup Baik (CC).

Penjelasan indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut :

Tingkat kerukunan umat beragama

Masyarakat Kabupaten Kampar mayoritas bersuku Melayu dan beragama Islam, walaupun kehidupan beragama dan bermasyarakat di kabupaten Kampar cukup harmonis tetapi tetapsaja sering terjadi fanatisme aliran agama tertentu yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat. Rendahnya pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa dimasyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak mengingat dan menghargai lagi bagaimana perjuangan pendahulu-pendahulu bangsa. Pemahaman-pemahaman yang masih rendah di masyarakat sehingga sering terjadi konflik/pergesekan yang diakibatkan provokasi pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan.

Solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala atau permasalahan-permasalahan di dalam kerukunan umat beragama yaitu adanya sikap saling menerima dan saling menghargai antara satu kelompok agama terhadap agama lainnya, adanya kesetaraan atau kemauan saling melindungi serta memberikan hak dan kesempatan satu sama lain, dan adanya kerjasama yakni saling bersosialisasi serta saling berempati dan bersimpati baik dalam persoalan sosial, ekonomi, budaya, maupun agama.

Persentase penyelesaian konflik antar umat beragama

Tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik dilatar belakang oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Masih rendahnya kehidupan sosial masyarakat sehingga sering terjadi konflik-konflik sosial dimasyarakat salah satunya adalah konflik antar umat beragama. Salah satu hal yang menjadi kendala tidak tercapainya penyelesaian konflik antar umat beragama ini adalah tidak adanya kesepakatan yang bisa dibuat diantara kedua belah pihak.

Solusi yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan konflik antar umat beragama adalah meminta kepada masing-masing individu atau pemimpin-pemimpin kelompok untuk tidak memperburuk situasi konflik dan saling berkomunikasi dengan baik untuk mencegah adanya konflik yang lebih besar terjadi.

Persentase adat dan budaya yang dilestarikan

Sebagaimana masyarakat lain di planet Bumi ini, masyarakat Indonesia yang terdiri atas ratusan suku dan etnis ini juga memiliki tradisi dan kebudayaan yang khas dan unik, baik yang murni dibentuk oleh faktor-faktor lokal, global (atau internasional), maupun gabungan lokal dan global yang oleh sosiolog Roland Robertson disebut “glokal” atau “glocalization”.

Meskipun Indonesia memiliki tradisi dan kebudayaan yang sangat kaya, tetapi bukan berarti bahwa tradisi dan kebudayaan itu bisa eksis selamanya. Sama halnya di Kabupaten Kampar, begitu banyak tradisi dan kebudayaan yang khas dan unik. Jika belum adanya keoptimalan pengelolaan budaya daerah, rendahnya minat generasi muda dalam upaya mempelajari dan melestarikan budaya daerah maka bukan hal yang mustahil jika kelak tradisi dan budaya itu tinggal kenangan saja. Bukan hanya kelak, sekarang pun bahkan sudah terjadi. Sejumlah adat dan budaya yang hampir “lenyap dari peredaran” karena sejumlah faktor.

Sasaran 2	Memajukan dan Melestarikan Adat dan Budaya Daerah
------------------	--

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 2 indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.24
Evaluasi Pencapaian Misi 6 Sasaran 2

Indikator Kinerja	Target 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Hasil 2022	% Capaian	Tercapai /	Target Akhir RPJMD
								Tidak	
1. Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif dan di lestarikan	43	45	43	43	47	47	100	V	
2. Jumlah benda, Situs dan Kawasan cagar budaya yang di lestarikan	100	100	100	12	13	12	92,30	V	
Rata-Rata Capaian Tahun 2022								96,15%	Memuaskan

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, Capaian sasaran Memajukan dan Melestarikan Adat dan Budaya Daerah mencapai hasil 96,15% dengan kategori Memuaskan (AA).

Penjelasan indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut :

Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif dan dilestarikan.

Indikator jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif dan dilestarikan dapat terpenuhi karena adanya target dan Pelaksanaan pelestarian berupa pelatihan dan pembimbingan sekaligus pemberian bantuan alat musik. Selain itu, dengan juga adanya dana yang tersedia akan bisa nantinya untuk mengembangkan kesenian tradisional dan juga menciptakan kelompok-kelompok yang mempunyai kreatifitas dalam mengembangkan pariwisata.

Rasa bangga dan cinta kebudayaan sendiri perlu ditanamkan pada seluruh masyarakat, terutama generasi muda di daerah itu sendiri. Ragam sosial budaya perlu dijaga dan dilestarikan. Menjaga kelestarian ragam sosial budaya berarti menjaga identitas dan jati diri agar tidak punah. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan serta diplomasi budaya

untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri yang memiliki ketahanan budaya.

Sebagai salah satu contoh di Kabupaten Kampar, seni pertunjukan calempong menjadi pertunjukan wajib dalam setiap perayaan hari besar masyarakat Kampar. Saat itu pula masyarakat di kabupaten Kampar dari berbagai suku dan agama menyatu untuk merasakan indahnya budaya seni calempong yang biasanya diselenggarakan di desa-desa saat perayaan hari besar ninik mamak, acara festival budaya Kampar dan acara pesta pernikahan di daerah Kampar. Caempong juga kerap diundang untuk melakukan pertunjukan pada acara pernikahan dengan adanya pertunjukan seni calempong dapat menjadi yang nantinya diharapkan akan membawa kebudayaan menjadi lebih dikenal oleh masyarakat luas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa calempong di Kabupaten Kampar masih memegang nilai-nilai budaya dari seni pertunjukan calempong.

Persentase benda, Situs dan Kawasan cagar budaya yang di Lestarikan

Indikator jumlah Persentase benda, Situs dan Kawasan cagar budaya yang di lestarikan ini tercapai dengan adanya upaya-upaya yang telah dilakukan seperti adanya kesadaran masyarakat setempat tentang nilai kebudayaan dan dukungan pemerintah terhadap alokasi anggaran untuk pengembangannya. Tujuan yang diharapkan adalah untuk terdatanya atau terinventarisasi situs cagar budaya yang terpelihara dan dikelola. Keanekaragaman, kekayaan budaya dan sejarah lokal menjadi ciri khas daerah dengan keunikan dan keragamannya.

Dengan adanya keunikan-keunikan dari benda, situs dan kawasan cagar budaya ini nantinya akan menjadi peluang kesempatan untuk menjadi daya tarik daerah itu sendiri. Pemerintah Kabupaten Kampar bisa mendukung pengelolaan dan pelestarian kekayaan budaya daerah dan bekerjasama dengan peran masyarakat dalam mengoptimalkan pengembangan dan pengelolaan objek wisata.

3.1.3 Capaian Kinerja Keluaran masing- masing Kegiatan pada setiap Urusan Pemerintahan/ urusan penunjang/ urusan pendukung Pemerintahan sesuai dengan target dalam Dokumen Anggaran dan masalah yang di hadapi serta solusi pemecahannya

A. Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan kualitas layanan pendidikan	1 Persentase SD Berakreditasi	100%
		2 Persentase SMP Berakreditasi	100%
		3 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	88%
		4 Persentase Peningkatan Sistem Informasi Layanan Pendidikan	100%
2	Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	1 Persentase Guru SD Berkualifikasi	86,00%
		2 Persentase Guru SMP Berkualifikasi	93,00%
		3 Persentase Guru PAUD Berkualifikasi	52,00%
		4 Persentase Guru SD Bersertifikasi	52,00%
		5 Persentase Guru SMP Bersertifikasi	63,00%
		6 Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Guru SD	80
		7 Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Guru SMP	80
		8 Rasio Guru terhadap Siswa SD	1 : 20 Orang
		9 Rasio Guru terhadap Siswa SMP	1 : 10 Orang
3	Meningkatnya Kualitas lulusan SD/SMP	1 Rata-rata Nilai UN SD	70
		2 Rata-rata Nilai UN SMP	50,00
		3 Angka Putus Sekolah SD	0,01%
		4 Angka Putus Sekolah SMP	0,03%
		5 Persentase Kelulusan SD	100%
		6 Persentase Kelulusan SMP	99,91%
		7 APM SD	95,00%
		8 APM SMP	85,30%
4	Meningkatnya Pendidikan Kesetaraan	1 Persentase PKBM Berakreditasi	100%
		2 Persentase Guru Tutor PKBM Berkualifikasi	85%

5	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pendidikan yang berstandar	1	Persentase SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas	83%
		2	Persentase SMP yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas	85,00%
		3	Persentase Ruang Kelas SD dengan kondisi Baik	62%
		4	Persentase Ruang Kelas SMP dengan kondisi Baik	65%
6	Meningkatnya taraf Pendidikan Masyarakat	1	APK SD	99,20%
		2	APK SMP	90,00%
		3	APK PAUD	77,00%
		4	Rata-rata Lama Sekolah	11 Tahun
		5	Persentase Anak Usia Sekolah dari Keluarga Prasejahtera yang Sekolah lulus sampai SMP	27%
7	Meningkatnya Prestasi Olahraga	1	Persentase Sarana Olahraga Masyarakat dengan kondisi baik	75%
		2	Jumlah Atlet Berprestasi	112 Atlet
		3	Jumlah Pelatih Bersertifikat	400
		4	Jumlah Wasit Bersertifikat	500
8	Meningkatnya Kualitas Organisasi Kepemudaan	1	Persentase Peningkatan Kegiatan Kepemudaan	63%
		2	Persentase Peningkatan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP)	30%
9	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Bidang Keagamaan	1	Persentase Peningkatan Prestasi Pemuda di Bidang Keagamaan	55%

Program Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2022

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 588.197.850.123,00	DANA APBD
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp. 288.394.416.159,00	DANA APBD/ APBN(DAK)
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rp. 200.000.000,00	DANA APBD
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp. 2.046.721.419,00	DANA APBD
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp. 10.914.486.658,00	DANA APBD
JUMLAH		Rp. 889.753.474.359,00	

➤ **Masalah :**

1. Masih terdapatnya anak putus sekolah khususnya tingkat pendidikan menengah.
2. Masih kurangnya aparatur yang Profesional
3. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidikan.
4. Masih lemahnya sistem manajemen dan pengawasan pendidikan.
5. Masih kurangnya inventarisasi peninggalan situs-situs budaya dan belum optimalnya promosi nilai-nilai budaya.
6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana sekolah di setiap jenjang pendidikan dan pendidikan luar biasa.

➤ **Solusi :**

1. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peserta didik yang melanjutkan pendidikannya pada tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri melalui pendidikan gratis secara menyeluruh dan pemerataan Sarana dan Prasarana sebagai penunjang Kegiatan belajar mengajar.
2. Pegawai Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan administrasi baik dari segi penyelenggaraan kegiatan, keuangan dan perencanaan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang ingin di targetkan.
3. Memberikan kesempatan kepada Tenaga Pendidik untuk mengikuti Pelatihan-pelatihan, bimtek Peningkatan mutu sesuai dengan perkembangan teknologi.
4. Perlunya peningkatan sistem manajemen yang berbasis IT dan lebih menintensifkan sistem pengawasan di Sekolah.
5. Perlunya inventarisasi secara detail peninggalan situs budaya dan promosi kepariwisataan.
6. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan yang bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN maupun dari sumber dari pendapatan sah lainnya yang tidak mengikuti.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Cakupan Fasilitas Kesehatan yang terstandarisasi	100%
2	Menurunkan angka kematian dan kesakitan	Angka kematian ibu	98/100000 kelahiran hidup
		Angka kematian bayi	20/1000 kelahiran hidup
		Cakupan kesakitan yang di sebabkan penyakit tidak menular (DM, Hipertensi, OGDJ)	100%
		Cakupan kesakitan yang di sebabkan penyakit menular (TB dan HIV)	100%
		Persentase Pendudukan Dengan Akses Sanitasi Layak	90%

Program Dinas Kesehatan Tahun 2022

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	KET
1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp. 479.214.165	APBD
2	Administrasi keuangan perangkat daerah	Rp. 105.758.009.459	APBD
3	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Rp. 11.933.070	APBD
4	Administrasi umum perangkat daerah	Rp. 517.063.643	APBD
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp. 7.157.022.070	APBD
6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Rp. 414.519.900	APBD
7	Peningkatan pelayanan BLUD	Rp. 26.208.961.441	APBD
8	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan	Rp. 29.657.296.017	APBD dan APBN
9	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Rp 55.581.459.068	APBD dan APBN
10	Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	Rp. 241.199.707	APBD
11	Penerbitan izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Rp. 49.999.515	APBD
12	Pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah Kabupaten/Kota	Rp. 45.174.000	APBD

13	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	Rp. 10.211.015.181	APBD
14	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Rp. 73.930.100	APBD
15	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp. 118.433.000	APBD
16	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Rp. 17.594.428	APBD
17	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 17 Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Rp. 106.840.000	APBD
18	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 181.462.200	APBD
19	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 141.204.986	APBD
20	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.806.198	APBD

Program Rumah Sakit Umum Bangkinang Tahun 2022

NO.	URAIAN	ANGGARAN	% CAPAIAN
1	2	3	4
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	112.570.338.603	69,07
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	32.620.313.624	19,78
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	12.951.347.764	7,30

➤ **Permasalahan dan Solusi**

pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan didasarkan komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar yang tertuang dalam perjanjian kinerja Tahun 2022 yang dilandasi dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Tahun 2018 - 2022. Secara ringkas seluruh capaian kinerja pada tahun 2022 telah memberikan arah bagi jajaran pemerintah Kabupaten Kampar untuk meningkatkan kinerjanya pada masa selanjutnya secara berkesinambungan. Oleh karena itu, sesuai dengan hasil analisa capaian kinerja 2022, dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dimasa selanjutnya, sebagai berikut:

1. Perbaiki perencanaan pembangunan lima tahunan sebagai landasan pembangunan yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kinerja setiap tahunnya secara lebih akurat dan cermat. Sehingga rencana kinerja yang disepakati secara bersama-sama dengan stakeholders, dapat diwujudkan dan diukur kinerjanya secara lebih akurat dengan hasil yang lebih optimal.
2. Menjadikan hasil kinerja Tahun 2022 sebagai langkah nyata untuk perbaikan perencanaan dan kinerja tahun 2022 dengan mengantisipasi kegagalan pencapaian target tahun 2022 dan mempertahankan keberhasilan yang diraih ditahun 2022.
3. Melakukan konsolidasi organisasi secara internal dalam rangka meningkatkan kesadaran dan komitmen jajaran aparatur di Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar terhadap tugas dan fungsi pelayanan umum. BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 78
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kampar.

5. Mekanisme pengumpulan data kinerja terus ditingkatkan secara berkesinambungan sehingga pencapaian kinerja dapat dimonitor secara berkala dan didukung dengan informasi yang lebih akurat.
6. Meningkatkan pengalokasian penggunaan anggaran secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
7. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus selaku pelayan masyarakat

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Proporsi Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap(%)	74,77
		Persentase Penduduk Berakses Air Bersih	89,94
		Rasio Irigasi Dalam Kondisi Baik	51,80
2	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemerintah	Bangunan gedung Pemerintah Dalam Kondisi Layak (%)	84
3	Pemanfaatan Lahan Sesuai Dengan Rencana TataRuang	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Alam Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	95

**Program Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Tahun 2022**

NO	PROGRAM	ANGGARAN(Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.085.670.473
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	1.847.592.700
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.909.408.294
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air limbah	3.597.633.700
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	6.480.495.380
6	Program Penataan Bangunan Gedung	17.121.097.091
7	Program Penyelenggaraan, Jalan	107.014.487.929
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.259.879.640
9	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	916.061.349
10	Program Pengelolaan Tanah Kosong	188.382.290
11	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	122.534.000
	JUMLAH	162.543.242.846

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat

**Perjanjian kinerja Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Pemukiman Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kab/ Kota yang ditangani	100 %
2	Meningkatkan Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Persentase Unit RLTH (Rumah Tidak Layak Huni) yang dikurangi	100 %
3	Meningkatkan Penataan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Perentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	100 %

**Program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022**

NO	PROGRAM	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6.091.682.265,00
2	Program Pengembangan Perumahan	748.433.040,00
3	Program Kawasan Permukiman	5.999.709.371,00
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	8.143.147.037,00
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	23.676.313.827,00
6	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	983.171.622,00

➤ **Permasalahan dan Solusi**

Berbagai permasalahan maupun isu-isu dan Solusi yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah daerah dalam Bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar antara lain :

1. Terbatasnya dana untuk bedah rumah
2. Masih banyaknya pemukiman kumuh yang belum terjangkau
3. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
4. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
5. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan Pemukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan Pemukiman;
6. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan Pemukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;

7. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/ perlengkapan, perencanaan dan organisasi serta ketatalaksanaan Dinas;
8. Melaksanakan Tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Penanganan Kasus K3	Persentase Kasus k3 yang tertangani	100%
2	Menurunnya Pelanggaran Peraturan Daerah	Persentase Penegakan Perda	100%
3	Meningkatnya Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)	Persentase Tingkat Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)	100%

Program Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.134775.814	
	Perencanaan , Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.499.523	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.651640.163	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.049.030.407	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	8.659.129.904	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	771.475.817	
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.475.762.029	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.475.762.029	
JUMLAH		15.610.537.843	

➤ **Permasalahan dan Solusi**

❖ **Masalah / hambatan :**

Beberapa hambatan yang dilalui dalam pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan dalam pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yakni :

1. Kurangnya Fasilitas pendukung baik secara fisik maupun sumber daya manusia;
2. Kurangnya koordinasi dan sinergitas antar organisasi perangkat daerah (OPD) dalam hal peraturan daerah, keputusan kepala daerah terutama koordinasi perkara yang ditangani oleh PPNS yang notabene sebagai penyidik beberapa kasus terutama pelanggaran yang dilakukan perorangan, badan hukum dan objek hukum lainnya;
3. Masalah anggaran dirasa sangat kurang, mengingat semua kegiatan berada di lapangan;

❖ **Solusi :**

Agar kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan pada bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman dapat dilaksanakan secara lebih maksimal, disarankan untuk menambah jumlah anggota dan sarana penunjang pengamanan yang standar.

1. Pengalokasian anggaran secara Proposional dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan urusan wajib pelayanan dasar;
2. Penambahan sarana dan prasarana pendukung dalam menjalankan tugas operasional;
3. Menambah jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja sesuai PP No. 16 Tahun 2018;

4. Meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja Satuan Polisi Pamong Praja melalui pendidikan, Pelatihan serta Kursus-kursus teknis dan fungsional seperti , Pelatihan PPNS, Pelatihan Intelejen dan Pelatihan Diksar.

❖ **Masalah / hambatan :**

Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan Kegiatan Tim YUSTISI dan Penertiban Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kampar antara lain :

1. Masih rendahnya jumlah personil PPNS dan terbatasnya kemampuan penyidik PPNS dalam Kegiatan TIM YUSTISI dan Penerbitan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kampar;
2. Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk mendukung operasional kegiatann TIM YUSTISI dan Penerbitan Perda Satpol PP Kab. Kampar;
3. Terbatasnya sarana dan Prasarana untuk penunjang Kegiatan Operasional Kegiatan TIM YUSTISI dan Penerbitan Perda Satpol PP Ka. Kampar.

❖ **Solusi / Saran:**

1. Agar dilakukan penambahan personil Penyidik PPNS;
2. Peningkatan kemampuan Teknis PPNS melalui Kegiatan Bimtek;
3. Agar ditingkatkan anggaran untuk mendukung operasional kegiatan TIM YUSTISI dan Penerbitan Perda Satpol PP Kab. Kampar; Agar dilengkapi sarana dan prasarana untuk penunjang Kegiatan Operasional Kegiatan TIM YUSTISI dan Penerbitan Perda Satpol PP Ka. Kampar.

**Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2022**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kewaspadaan akan Kerawanan Bencana Alam	Peningkatan Jumlah Desa Desa Tangguh Bencana	5 Desa
		Persentase Kemampuan tentang kebencanaan	83%
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	93%
2	Penanganan Darurat Bencana yang Responsif disertai Dukungan Logistik dan Peralatan	Persentase Penanganan Darurat Bencana	88%

**Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2022**

NO	Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.136.474	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	28.797.750	
	Koordinasi dan Penyusunan dan Perubahan RKA SKPD	6.885.900	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	6.885.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	6.781.950	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.218.031.827	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.203.300	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	55.157.100	
	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	656.377.291	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.414.030	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.045.946	
	Penyediaan Bahan Bacaan Perundang-Undangan	14.256.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	369.228.000	

4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	685.000.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	136.790.400	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.927.029.048	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	461.742.700	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.723.175	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	468.573.000	
7	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		
	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	49.560.700	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	278.636.420	
8	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	210.993.790	
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	31.460.000	
	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	1.035.164.570	
	Pengembangan Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	163.382.340	
9	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	91.332.650	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	132.788.225	
	TOTAL	10.188.378.486	

Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan respons time rate (tingkat waktu tanggap) bencana kebakaran bangunan 15 menit di Kabupaten Kampar	Tingkat waktu tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	100 %
		Persentase peningkatan respon penanganan bencana kebakaran dan penyelamatan	100 %
		Persentase Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan penyelamatan	100%

➤ **Permasalahan dan Solusi**

❖ **Masalah :**

1. Penetapan indikator-indikator kinerja yang belum seluruhnya terukur dengan indikator kinerja yang tepat atau masih banyak indikator kinerja yang berorientasi pada output kegiatan, sehingga target kinerja tiap tahun cenderung statis dan tidak dapat menunjukkan/menggambarkan hasil kinerja sebenarnya;
2. Kualitas SDM belum memenuhi standar kapabilitas yang mencukupi, sehingga masih terdapat kelemahan-kelemahan, hal ini menyebabkan belum optimalnya peran, fungsi, dan kualitas kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kampar.

❖ **Solusi :**

1. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan seluruh OPD, khususnya yang berhubungan dengan kebencanaan;
2. Menyusun dan menetapkan indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kampar melalui koordinasi internal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kampar, untuk

membahas dan menyepakati indikator kinerja atas program-kegiatan yang dilaksanakan pada bidang-bidang sehingga dapat memperjelas target tujuan yang hendak dicapai dengan ukuran yang tersusun secara sinergis, sistematis dan secara signifikan terarah pada peningkatan capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kampar;

3. Meningkatkan kualitas SDM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kampar melalui pelaksanaan pelatihan-pelatihan, pembinaan yang berkelanjutan, serta pemberian kesempatan pendidikan, guna meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dokumen Perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Kampar	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pada Dinas Sosial Kabupaten Kampar	7 Dokumen
2	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang ada di Kecamatan	Meningkatnya SDM dan Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di kabupaten Kampar	21 Orang TKSK dan 1 Orang Korda
3	Pekerja social masyarakat (PSM) yang ada di kecamatan	Meningkatnya SDM dsn Kinerja Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kab Kampar	57 Orang di 21 Kecamatan
4	Korkab, Korkam, Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan (PKH)	Meningkatnya SDM dan Kinerja Korkab, Korkam, Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan (PKH)	115 Orang Pendamping dan Operator PKH
5	Lembaga Sosial yang melaksanakan Pelayanan terhadap PMKS	Meningkatnya Kinerja Lembaga sosial yang menangani PMKS di kabupaten Kampar (LK3,SLRT, Puskessos, Vetran, Perlansia, BNK, dan KKKS)	7 Lembaga Sosial
6	Penyandang Disabilitas	Tersedianya Peralatan Alat bantu Gerak bagi penyandang disabilitas dan ekstrauma dikabupaten Kampar (Kaki Palsu, Tangan Palsu, Kursi Roda, Hearing Head dan Tongkat Walker	27 Orang Penyandang Disabilitas

7	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kesiagaan dan Penanganan Sosial terkait dengan PMKS di wilayah Kabupaten Kampar (ODG), orang terlantar, Mayat Terlantar, Gepeng, Pengemis, Gelandangan, warga Binaan, Napza, dan PMKS lainnya	39 Orang PMKS
8	Data DTKS skala Kabupaten	Terkelolanya Data DTKS Skala Kabupaten dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang valid	1 Dokumen data DTKS
9	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Pangan (BSP)	Terlaksananya Monitoring dan Pendampingan Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan (BSP)	21 Kecamatan
10	KUBE-FM, Lansia Produktif dan Penyandang Disabilitas	Meningkatnya Ekonomi masyarakat kurang mampu dikabupaten Kampar melalui bantuan kelompok usaha bersama bagi fakir miskin (KUBE-FM), Usaha Ekonomi Produktif bagi Lansia Produktif (EEP Lansia) dan Usaha Ekonomi Produktif bagi Penyandang Disabilitas (UEP Penyandang Disabilitas)	11 Orang UEP Disabilitas, dan 210 Orang UEP Lansia Produktif
11	Relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana Kabupaten Kampar)	terlaksananya pelayanan social bagi korban bencana alam dan bencana social oleh anggota tagana kabupaten Kampar serta peningkatan sdm anggota tagana kabupaten kampar dalam penanggulangan bencana alam dan bencana sosial	72 Orang Relawan Tagana Kabupaten Kampar
12	Korban Bencana	Terlaksananya Pelayanan Sosial bagi Korban Bencana di Kabupaten Kampar	1 Tahun Anggaran
13	Pengusulan Pahlawan Daerah menjadi Pahlawan Nasional	Terlaksananya Pengusulan Pahlawan Daerah Mahmud Marzuki menjadi Pahlawan Nasional	1 Orang Pahlawan
14	Makam Pahlawan Eka Kusuma Bhakti Bangkinang	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Makam Pahlawan Eka Kusuma Bhakti Bangkinang, Makam Bahagia Dan Makam Panglima Khatib Simpang Kubu	3 Lokasi Pemakaman

Program Dinas Sosial Tahun 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / KABUPATEN / KOTA	6,836,500,575	
a	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	405,389,947	
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,592,039,645	
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	562,480,628	
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	630,050,500	
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,092,855,000	
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	553,684,855	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3,997,454,817	
a	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	3,997,454,817	
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	425,380,003	
a	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	255,271,215	
b	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	170,108,788	
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	502,669,732	
a	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	502,669,732	

❖ **Permasalahan dan Solusi**

Berdasarkan program dan kegiatan dapat disimpulkan bahwa pencapaian kegiatan fisik terlaksana 100 %, sedangkan realisasi keuangan 96.76 %. Pada umumnya semua kegiatan telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik.

B. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Penetapan Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	
1	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke atas	66%

Program Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KET.
1.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.493.830.392	
2.	Penempatan Tenaga Kerja	170.350.094	
3.	Hubungan Industrial	495.349.001	
4	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	6.931.986.283	
5	Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.154.440.534	
6	Pengendalian izin Usaha Industri Kab/Kota	129.162.322	
7	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	112.751.896	
	TOTAL	12.487.870.522	

❖ Permasalahan dan Solusi

❖ Masalah :

1. Penerapan Peraturan Tentang Kalrifikasi, Kodefikasi dan Momenklator Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 belum optimal;

2. Kurang Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Hal sertifikasi pengadaan barang/ jasa sehingga pengadaan barang dan jasa kurang maksimal dalam penataannya serta kurangnya SDM untuk Penatausahaan Keuangan Daerah.

❖ **Solusi :**

1. Perlu adanya komitmen yang kuat dari seluruh pimpinan untuk melaksanakan peraturan penatausahaan keuangan daerah secara utuh;
2. Melakukan pelatihan dan bimbingan teknis kepada Aparatur dalam pengadaan barang dan jasa serta Penatausahaan Keuangan Daerah.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perjanjian Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terjaganya generasi dari bahaya dari penggunaan NAPZA, pergaulan bebas dan Radikalisme	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal	
		1. Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	21 Kecamatan
		2. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	21 Kecamatan
		3. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Saranadi Balai Penyuluhan KKBPK	21 Kecamatan
		4. Pengendalian Program KKBPK	21 Kecamatan
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Lapangan KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
	1. Penyedia sarana pendukung operasional PKB/PLKB	21 Balai	

		2. Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	250 Desa
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
		1. Pengedalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan saran penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jejaringan dan jejaringnya	1 Kegiatan
		2. Peningkatkan Kesertaan Penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	1 Kegiatan
		3. Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	1 Kegiatan
		4. Peningkatkan kompetensi tenaga pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	1 Kegiatan
		5. Dukungan operasional pelayanan KB bergerak	1 Kegiatan
		6. Promosi dan konseling KB pasca persalinan dan pasca keguguran	1 Kegiatan
		Kesertaan ber-KB	
		1. Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	21 Kecamatan
		2. Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di Kampung KB	21 Kecamatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
		Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	
		1. Orientasi/pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPKS,PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	10 Kelompok
		2. Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	10 Kelompok
		3. Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta pengelola keuangan keluarga)	10 Kelompok

		<p>Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</p> <p>1. Promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja</p> <p>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</p>	21 Kecamatan
		1. Penyediaan dan pengolahan data kependudukan	5 Buku
B.	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
		Pelembagaan pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/kota	
		1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	36 Orang
		Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosialisasi, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	
		1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	50 Orang
		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	
		1. Advokasi kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	21 Orang
		2. Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	21 FAN
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
		Penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	
		1. Penyedia layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	30 Orang
		Penguatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota	
		1. Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	5 Kelompok

		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang diwilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	
		1. Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota	1 Kegiatan
		2. Penguatan jenjang antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota	1 Kegiatan
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
		Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota	
		1. Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota	1 Kegiatan
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
		Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	
		1. Koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	21 FAN
		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup usaha kewenangan kabupaten/kota	
		1. Penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	21 FAN
		2. Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	21 Orang dan FAN
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
		Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	
		1. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	10 Desa
		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	

	1. Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	1 Kegiatan
--	--	------------

Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.320.439.651	
2.	Program Pengendalian Penduduk	263.398.189	
3.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	6.751.568.709	
4.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	5.553.376.569	
5.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	331.562.217	
6.	Program Perlindungan Perempuan	186.626.146	
7.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	2.400.225.139	
8.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	44.151.845	
9.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	794.077.659	
10	Program Perlindungan Khusus Anak	957.118.735	
	J U M L A H	23.602.544.859	

❖ **Permasalahan dan Solusi**

❖ **Masalah :**

1. Bidang Keluarga Berencana

- Pencapaian peserta KB baru (PB) untuk akseptor yang menggunakan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) yang belum mencapai target yang mana sasaran PPM (Perkiraan Permintaan Masyarakat) tahun 2022 (lampiran 7) sebesar 8.473 dan pencapaian 3.283 atau 39% sedangkan untuk PPM Tahun 2022 untuk seluruh alkon untuk Kab. Kampar PPMnya 25.656 akseptor dan pencapaian sebesar 1.143 akseptor atau 4.4% (lampiran 8).

- Kurangnya pembinaan kesertaan Ber - KB Jalur wilayah di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan (Calcitas) sehingga tingkat kesertaan KB masih rendah yang menyebabkan masih tingginya Unmet Need. Di Provinsi Riau pada tahun 2022 Unmet Need sebesar 25.86% sedangkan di Kabupaten Kampar 23.08 %.
- Belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan KB yang belum merata seperti masih tingginya *CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE (CPR)*, *CPR*, *(AGESPECIFIC FERTILITY RATE (ASFR))* dan kesertaan KB Pria masih rendah sebanyak 1.7 % serta kurang optimalnya pemanfaatan tenaga medis setelah melakukan pelatihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) khususnya Intra Uterine Devise (IUD) dan Implant.
- Masih tingginya ASFR (Age Spscifik Fertilitas Rate) usia (15-19 tahun) untuk Kabupaten Kampar sebesar 25,2 %.
- Belum terlayannya calon Akseptor MKJP karena Menurut Perpres NO 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan ditanggung BPJS, tetapi BPJS belum siap maka pembiayaan pelayanan KB terutama Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP) masih dalam proses pembiayaan dan administrasi pertanggung jawaban, pada BKKBN Provinsi Riau..
- Kurangnya partisipasi keluarga yang mempunyai anak, remaja dan lansia dalam kegiatan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak melalui kelompok kegiatan BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja) dan BKL (Bina Keluarga Lansia).
- Belum tersosialisasinya program (Generasi Berencana) yakni program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan keluarga bagi remaja dengan meningkatkan kemampuan dan kemauan positif remaja.

- Kurangnya pembinaan terhadap usaha kelompok yang merupakan kegiatan ekonomi produktif yang harus memberika keuntungan yang akan meningkatkan pendapatan keluarga anggota kelompok.
- Masih banyaknya keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 sebanyak 375.716 KK atau 8,38 % berdasarkan Kabupaten Kampar dalam angka tahun 2017.
- Masih rendahnya rasio PLKB dengan desa binaan lebih kurang 2.9 yang idealnya 1 petugas 2 memegang ½ desa.
- Persentase penggunaan Inform Consentatas pelayanan KB Baru MKJP sampai bulan Desember 2022 mencapai 2498 (4,3%) masih jauh dari angka ideal 100%. Dari hasil telaah laporan F/II/KB terlihat masih banyak klinik yang belum menggunakan/ melaporkan penggunaan inform concent dalam pelayanan Kbbaru MKJP dan juga banyak yang belum mengetahui bahwa pelayanan KB suntik harus menggunakan inform concent, padahal salah satu pelayanan KBMKJP dan suntik yang sesuai SOP adalah dengan pemberian informconcent.
- Mekanisme operasional lini lapangan tidak berjalan secara optimal karena keterbatasan SDM dan dukungan dana.
- Kurangnya sarana dan prasarana untuk lini lapangan seperti PLKB kit, IUD kit, KIE kit dsb.
- Alat kontrasepsi yang masih kurang belum sesuai dengan permintaan dan realisasiyang diminta.

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Belum maksimalnya pelaksanaan Perencanaan berorientasi pada pengarus utamaan gender.
- Belum optimalnya peran perempuan baik di bidang politik, ketenaga kerjaan maupun teknologi.
- Belum maksimalnya program pemberdayaan perempuan, bidang peningkatan SDM, ekonomi dan kelembagaan.

- Kemajuan teknologi informasi telah membawa dampak negatif pada psikologi anak. Produksi media cetak dan elektronik yang tidak sensitif anak, seperti iklan rokok, sinetron berkualitas rendah dan mengabaikan nilai - nilai luhur budaya bangsa telah melahirkan fenomena sosial baru; berupa sikap konsumerisme dan tindakan yang tidak rasional; kekerasan dan eksploitasi anak; pornografi dan pornoaksi; geng – geng remaja, bullying; pola hidup yang tidak sehat dan maraknya kasus-kasus trafiking anak. Semakin meningkatnya kasus kekerasan pada perempuan dan anak dari tahun 2013 sebanyak 36 kasus menjadi 55 kasus pada tahun 2014, pada tahun
- 2015 menjadi 52 kasus, pada tahun 2016 sebanyak 20 kasus dan tahun 2017 sebanyak 50 kasus serta kasus terhadap anak tahun 2018 sebanyak 42 kasus, Tahun 2019 Kekerasan pada Anak Sebanyak 20 Orang, Tahun 2020 Kekerasan pada Perempuan dan Anak Sebanyak 24 Kasus, Sedangkan pada Tahun 2021 Kekerasan pada Anak sebanyak 120 Orang dan Kasus Kekerasan pada Perempuan pada Tahun 2021 sebanyak 11 Orang, kasus Tahun 2022 kekerasan pada anak 128 orang dan kasus kekerasan perempuan 165 orang.
- Belum terbentuknya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar namun Kabupaten Kampar sudah menuju Kabupaten Kota Layak Anak dengan peringkat Madya pada tahun 2022

❖ **Solusi :**

1. Bidang Keluarga Berencana

- Menggerakkan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, pustu, bidan praktek dsb untuk lebih proaktif dalam memberikan informasi tentang manfaat dari Metode Kontrasepsi Jangka Panjang setiap melakukan pelayanan baik di fasilitas kesehatan maupun dipraktek swasta.

- Meningkatkan penggerakan lini lapangan dengan memberdayakan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) terutama petugas PLKB/PKB minimal 4 kali dalam sebulan, menyiapkan bahan – bahan KIE yang bersifat edukasi inter personal dan konseling untuk merubah sikap dan perilaku masyarakat sehingga apa yang menjadi pilihan masyarakat dalam ber-KB benar-benar mantap dan lestari.
- Lebih mengoptimalkan penggunaan Mobil Pelayanan (Muyan) terutama untuk daerah calcitas, daerah terpencil dan daerah tertinggal dalam pelayanan KB dari satu (1) kali dalam sebulan menjadi 3 tiga kali dalam sebulan.
- Memberdayakan stakeholder, mitra kerja dan seluruh masyarakat untuk lebih cerdas memilih alat kontrasepsi dengan melakukan intensitas KIE kepada masyarakat tentang Keluarga Berencana sebanyak 2 kali dalam sebulan.
- Menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Daerah maupun Swasta dalam meningkatkan capaian MKJP untuk ibu Pasca Persalinan dan Keguguran dengan membuat kerjasama atau MOU.
- Memberikan pengetahuan dan ketrampilan khususnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang Balita, anak, remaja serta peningkatan kualitas hidup Lansia, melalui kegiatan BKB, BKR dan BKL dengan cara mengikut sertakan para kader mengikuti pelatihan, orientasi serta mengadakan lomba kader.
- Membentuk dan Membina PIK-R/ Mahasiswa baik jalur masyarakat ataupun jalur sekolah menjadi 50 PIK-R, sebagai wadah memfasilitasi remaja belajar memahami dan mempraktekan hidup sehat serta berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan remaja yang berperilaku sehat, dan terhindar dari resiko TRIADKRR (Seksualitas, NAPZA, HIV dan AIDS),

menunda usia perkawinan, mempunyai perencanaan berkeluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera serta menjadi contoh, model dan Idola bagi teman sebaya.

- Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah lain seperti Dinas Perindustrian dan Pasar, Dinas Kesehatan untuk izin industri Rumah Tangga, mengemaskan dan memasarkan hasil industri rumah tangga sehingga dapat bernilai jual tinggi yang nantinya akan meningkatkan tahap hidup masyarakat dari Keluarga Pra KS menjadi KS1 ataupun KS 1 menjadi KSII.
- Menambah jumlah PLKB/ PKB dengan cara mengadakan tenaga THL ataupun TKS agar program KB dapat sukses dimasyarakat sejumlah ± 40 Orang.
- Agar angka penggunaan inform concent meningkat, diharapkan untuk melakukan sosialisasi di berbagai kesempatan tentang penggunaan inform concent untuk pelayanan KB dengan metode suntik kepada klinik KB yang ada di Kabupaten Kampar dan melaporkannya pada laporan F/II/KB.
- Memberikan reward kepada mitra kerja, tokoh agama, tokoh masyarakat dan kader baik kader di tingkat desa maupun tingkat RW atau RT dengan cara mengadakan berbagai kegiatan perlombaan.
- Meningkatkan kerjasama dengan cara sosialisasi program KB ke StakeHolder, Lembaga Legislatif dan Bappeda serta BKKBN Perwakilan Riau agar penambahan anggaran bisa tercapai.

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Langkah-langkah untuk merealisasikan hak perempuan dengan menghapus perbedaan, disparitas, atau keadaan yang merugikan perempuan misalnya keharusan adanya perubahan pola pikir dan tingkah laku sosial budaya terhadap perempuan, menghapuskan prasangka serta kebiasaan dan praktek yang bersifat deskriminatif melalui

kegiatan pembinaan organisasi perempuan, pendidikan dan pelatihan (kursus menjahit, membordir dan magang tata rias pengantin) bagi perempuan putus sekolah dan perempuan sebagai Kepala Keluarga.

- Melakukan sosialisasi pada anak dan orang tua baik disekolah- sekolah, wirid pengajian dsb tentang Undang-Undang Kekerasan pada Perempuan dan Anak dan Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kabupaten Kampar minimal 4 kali dalam sebulan.
- Menjalin kerjasama dan komunikasi antara orang tua dengan sekolah, Mitra kerja dan Instansi terkait tentang pengawasan kegiatan anak dirumah, disekolah dan dilingkungan masyarakat untuk mengarahkan kegiatan yang positif seperti olahraga, ketrampilan pengajian dsb minimal 1 bulan sekali.
- Mengadakan pendekatan dan komunikasi baik secara eksternal maupun internal dengan instansi terkait tentang penganggaran minimal 4 kali dalam setahun.
- Perlu diadakan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang layak bagi anak, yaitu kebijakan pembangunan yang didasarkan pada, hak-hak dan kewajiban anak, kepentingan dan kebutuhan anak, yang dilaksanakan dengan seksama, sebagaimana diamanatkan oleh **Undang-Undang** Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hak-hak tersebut antara lain hak dibidang kesehatan, pendidikan, perlindungan, infrastruktur dan lingkungan hidup, Anak memerlukan tempat aman dan layak untuk bermain, anak-anak di kota memerlukan ruang terbuka hijau dan rute aman menuju sekolah, dan lain-lain.
- Membentuk gugus tugas pada tahun 2016 agar terbentuk Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dengan cara mengikut

sertakan intansi terkait dalam membangun dan menciptakan sarana dan prasarana sesuai dengan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Pendirian Rumah Aman untuk anak yang sedang menghadapi masalah baik anak sebagai pelaku dan korban serta perempuan yang mengalami gangguan perkembangan. Rumah Aman juga di fungsikan sebagai Lembaga Per masyarakatan untuk anak-anak dan pada Tahun 2022 Kampar sudah Menuju Kota Layak Anak dengan Peringkat Madya

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Angka Pola Pangan Harapan	1. Tersedianya informasi harga pangan pokok 2. Tersedianya dokumen harga dan stok pangan 3. Tersedianya sarana produksi lumbung pangan 4. Tersedianya cadangan pangan Daerah 5. Terlaksananya lomba cipta menu	21 Kecamatan 21 Kecamatan 2 Gapoktan 20.000 Kg 2 Iven
2	Terlaksananya Pemanfaatan Pekarangan Sebagai Tambahan Sumber Gizi Keluarga	1. Tersedianya rumah bibit dan fasilitas pendukung lainnya	21 Kecamatan
3	Terpantaunya Mutu dan Keamanan Panga	1. Terlaksananya rapid test kit pangan segar, olahan, jajanan sekolah dan jajanan buka puas	21 Kecamatan
4	Tersusunnya peta kerentanan dan rawan pangan	1. Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan	21 Kecamatan

Program Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022

PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.932.472.597,-	APBD
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1.107.913.148,-	APBD
3.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.842.336.251,-	APBD
4.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	73.105.475,-	APBD
5.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	125.906.810,-	APBD
JUMLAH		8.081.734.281,-	

❖ Permasalahan dan Solusi

❖ Masalah :

- Masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang pendekatan pola pangan harapan (PPH).
- Masih tingginya tingkat ketergantungan masyarakat Kabupaten Kampar terhadap ketersediaan dan cadangan pangan dari luar daerah.
- Masih tingginya pola konsumsi terhadap beras
- Belum tergalinya secara optimal potensi pangan lokal dan makanan tradisional.
- Masih ditemukanya makanan siap saji yang beredar/diperjualbelikan ditengah masyarakat mengandung zat berbahaya bagi kesehatan.
- Masih rendahnya adopsi masyarakat terhadap pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana penanganan daerah kerawanan pangan.

❖ Solusi :

- Membudayakan/memasyarakatkan konsep Pola Pangan Harapan (PPH) kepada masyarakat Kabupaten Kampar, baik pada aspek Ketersediaan Pangan maupun pada aspek Konsumsi Pangan.

- Meningkatkan peran masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan melalui program KRPL.
- Menggali potensi keanekaragaman konsumsi pangan lokal yang bernilai ekonomis tinggi berbasis industri rumah tangga.
- Mendorong masyarakat untuk berpacu mengaplikasikan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).
- Melaksanakan program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) melalui kegiatan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan, sosialisasi ke sekolah-sekolah(Taman Kanak-Kanak, SD/MI, SLTP/MTS dan SLTA/MA) dan sosialisasi kepada masyarakat.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Penataan Tanah Milik Pemkab Kampar	Tanah Milik pemerintah Kabupaten teridentifikasi dan terdata dengan baik	2 Dokumen
2	Pemanfaatan Lahan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Alam Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	95

Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	641.446.600
2	Program Pengelolaan Tanah Kosong	261.656.125
3	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	215.071.125
	JUMLAH	1.118.173.850

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Terlaksananya musrenbang dan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen
2	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Terlaksananya Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
3	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen
4	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Terlaksananya Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
5	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen
6	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen
7	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	1 Dokumen
8	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan
9	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan
10	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Terpenuhinya Penyediaan Listrik penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun
11	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	1 Tahun
12	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Tersedianya Peralatan rumah tangga kantor	1 Tahun
13	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Tersedianya makan dan minum rapat	1 Tahun
14	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun

15	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Terpenuhinya informasi dari media massa	12 Bulan
16	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Terpenuhinya pelaksanaan konsultasi dan koordinasi ke luar dan/atau dalam daerah	1 Tahun
17	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan
18	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Terpenuhinya Jasa Tenaga Harian Lepas, Jasa Kebersihan kantor, Jasa Pengamanan Kantor dan Jasa pendukung Teknis Lapangan	12 Bulan
19	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Terpeliharanya Alat Besar Operasional atau lapangan	1 Tahun
20	Persentase Kegiatan Perencanaan Lingkungan Hidup Terlaksana	Tersusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kab Kampar	1 Dokumen
21	Persentase Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Terlaksana	Terlaksananya Pemantauan tentang kualitas Air dan Neraca Sumber Daya Air	20 Perusahaan
22	Persentase Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Terlaksana	Terlaksananya Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 Tahun
23	Persentase Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Terlaksana	Terkelolaanya Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kampar	1 Tahun
24	Persentase Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan & Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Terlaksana	Terlaksananya pembinaan dan penertiban terhadap Perusahaan yang telah diterbitkan Izin Lingkungan Hidup	10 Kegiatan/ Usaha
25	Persentase Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan & Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Terlaksana	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bagi Usaha/Kegiatan yang memiliki Izin PPLH	40 Perusahaan
26	Persentase Kegiatan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH Terlaksana	Jumlah Masyarakat yang mengikuti sosialisasi	1 Tahun
27	Persentase Kegiatan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Terlaksana	Terlaksananya Penyuluhan Lingkungan Hidup utk Lembaga Kemasyarakatan serta Tersusunnya Buku/ Publikasi data dan Informasi Lingkungan Hidup	3 Organisasi

28	Persentase Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Terlaksana	Terlaksananya Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Dunia Pendidikan/ Masyarakat	1 Tahun
29	Persentase Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Terlaksana	Tersedianya pos Pelayanan pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran	1 Tahun
30	Persentase Program Pengelolaan Persampahan Terlaksana	Terlaksananya penyusunan Jakstrada Kabupaten Kampar dan tercapainya target pengelolaan persampahan	1 Dokumen
31	Persentase Program Pengelolaan Persampahan Terlaksana	Tersedianya sarana dan prasarana pendauran ulang Sampah	1 Tahun
32	Persentase Program Pengelolaan Persampahan Terlaksana	Terlaksananya penanganan sampah dan terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	1 Tahun
33	Persentase Program Pengelolaan Persampahan Terlaksana	Terlaksananya Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	1 Tahun

Program Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	
I	Perencanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	128.768.344
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18.483.344
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.483.344
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.833.344
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.833.344
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.288.244
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.623.344
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.540.749.575
2	Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.063.344
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.970.990
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124.317.630
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.080.970
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.639.750

5	Penyediaan Penggandaan Barang Cetak dan Pengadaan	24.523.570
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan	5.400.000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	363.061.000
IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.921.900
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.364.544.000
V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	153.853.600
B	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
I	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	25.364.468
C	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
I	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	331.780.680
II	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
1	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	24.655.440
D	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
I	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.836.656.027
E	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
I	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	174.741.000
2	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	140.371.228
F	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	
I	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	
1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	730.139.100

G	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
I	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	89.083.176
H	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
I	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	71.719.798
I	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
I	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	47.240.096
J	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
I	Pengelolaan Sampah	
1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	8.156.690
2	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	872.232.350
3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.047.890.702
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.112.943.490
	Jumlah Anggaran	26.485.413.882

➤ **Permasalahan dan Solusi**

❖ **Masalah :**

Untuk Tahun Anggaran 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar mengalami Refocusing Anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional.

❖ **Solusinya**

Sebelum dilakukannya penganggaran agar dilakukan terlebih dahulu analisa perencanaan untuk setiap program dan kegiatan yang tepat sasaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar untuk tahun berikutnya.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Cakil

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kualitas pelayanan penerbitan KTP – el, dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta pelayanan pemanfaatan NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan Kepada Lembaga Pengguna, Penerapan Identitas Kependudukan Digital, Penggunaan DKB untuk pelayanan di Kabupaten Kampar	<p>Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk Kabupaten Kampar meliputi:</p> <p>a. Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik</p> <p>b. Penerapan Identitas Kependudukan Digital</p> <p>c. Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun</p> <p>d. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)</p> <p>e. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra</p> <p>f. Penggunaan Data Konsolidasi Bersih (DKB) untuk pelayanan</p> <p>g. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data</p> <p>h. Integrasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dengan OPD</p> <p>i. Larangan melakukan pungutan dalam pengurusan dokumen kependudukan</p> <p>j. Pelanggaran terhadap Permendagri Nomor 60 Tahun 2021</p> <p>k. Dilarang menambah persyaratan dalam pelayanan adminduk</p>	<p>99,3%</p> <p>Menerapkan Identitas Kependudukan Digital</p> <p>97%</p> <p>40%</p> <p>3 (tiga) Mitra</p> <p>Sudah menggunakan data DKB</p> <p>10 (sepuluh) OPD</p> <p>5 (lima) OPD</p> <p>Tidak ada Pungutan dan tidak terjadi OTT</p> <p>Tidak ada pelanggaran</p> <p>Tidak ada penambahan persyaratan dalam pelayanan adminduk</p>

2.	Capaian Keluaran / Output Kinerja Pelayanan Dokumen Lainnya	Keluaran / Output hasil Pelayanan Dokumen Lainnya	Output 24 (dua puluh empat) Dokumen Layanan Adminduk dan 2 (dua) Layanan Data Pribadi dan Agregat
3.	Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	a. Pelayanan Bidang Dafduk, Capil dan PIAK serta Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	3 (tiga) jenis inovasi
		b. Pelayanan terintegrasi administrasi kependudukan	3 (tiga) pelayanan terintegrasi
4.	Laporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Kabupaten Kampar	Melaksanakan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Kabupaten Kampar	1. Ketersediaan Blanko KTP-el 2. Aset BMN di daerah
5.	Penyediaan Data Kependudukan berskala Kabupaten Kampar yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian	Penyusunan Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten Kampar yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian	Tersusunnya profil data kependudukan berskala Kabupaten Kampar
6.	Penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan	Sudah melaksanakan pelayanan di tingkat desa	Terselenggaranya sebagian urusan Administrasi Kependudukan di desa

Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.896.354.754

❖ **Permasalahan dan Solusi**

❖ **Pengelolaan Keuangan**

Dalam pengelolaan keuangan permasalahan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

▪ ***Permasalahan Teknis***

Kesalahan teknis sering terjadi dan menjadi kendala dalam melaksanakan manajemen keuangan secara paripurna. Manajemen keuangan yang bersih harus terhindar dari kesalahan sekecil apapun yang dapat menjadi temuan dari pihak pemeriksa. Kesalahan dari tahun ke tahun dapat diperkecil namun tetap tidak dapat dihindarkan untuk tetap ada. Solusi yang diusulkan adalah bagaimana pengawasan dari atasan terhadap bawahan dapat dilaksanakan dengan lebih ketat sehingga permasalahan teknis dapat diminimalisir.

▪ ***Permasalahan sumber daya manusia***

Kesalahan teknis juga menyangkut kecakapan sumber daya manusia yang mengelola keuangan. Beberapa tenaga teknis keuangan telah tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar namun belum cukup untuk mengurangi kesalahan. Upaya untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia telah dilakukan namun perlu didukung oleh sumber daya keuangan yang memadai. Solusi yang diharapkan adalah dengan merekrut tenaga profesional keuangan seperti Sarjana Akuntansi dan Sarjana Komputer.

▪ ***Permasalahan Birokratis***

Kendala dalam masalah birokratis adalah keterlambatan realisasi dana serta terlalu panjangnya birokrasi di tingkat pemerintah daerah sehingga menyulitkan pengurusan keuangan. Upaya untuk mempercepat dan memangkas birokrasi tanpa mengurangi ketelitian manajemen keuangan sangat perlu untuk dilakukan.

❖ Perangkat Alat Cetak

Alat cetak KTP-EI masih kurang karena alat cetak yang ada pada saat ini hanya tersedia tiga (3) unit dan satu (1) unit dalam keadaan rusak diharapkan alat cetak KTP-EI untuk kabupaten kampar sebanyak 5 unit karna kemampuan alat tersebut untuk mencetak sangat terbatas dan sangat sensitive. Solusi telah membuat surat Kemendagri agar dapat memberikan alat cetak sesuai kebutuhan dan mengusulkan biaya perbaikan atau pembelian alat cetak KTP- el melalui dana APBD Kabupaten Kampar.

Pengadaan blanko KTP-EI masih dari pusat melalui Dirjen Admindak Kemendagri sehingga tidak bisa diminta sesuai yang dibutuhkan apabila blanko KTP-EI yang diberikan pusat habis maka pelayanan terhadap masyarakat terpaksa terhenti / terkendala. Solusi telah mengajukan permohonan permintaan Blanko KTP –EI sesuai kebutuhan Kemendagri melalui Dirjen Administrasi Kependudukan.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya perencanaan pembangunan Desa menuju Desa mandiri yang berkelanjutan	Tersusunnya Renja, Renja Perubahan, DPA, DPPA, dan Renstra Perangkat Daerah	8 Dokumen
		Jumlah dokumen Akuntabilitas yang disusun	6 Dokumen
		Evaluasi SAKIP " A "	1 Dokumen
		Tersusunnya RKPDes	242 Desa
		Jumlah Desa Pilot Project SIDAMRI yang dibina dan dilatih	242 Desa
2	Meningkatnya penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik menuju Desa mandiri yang berkelanjutan	Jumlah Desa yang dibentuk, dihapus, digabung, dan berubah statusnya	23 Desa
		Jumlah Permasalahan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD yang diselesaikan	60 Kasus
		Jumlah Camat dan Kepala Desa yang diberikan Pembekalan	54 Orang
		Jumlah Kegiatan Penyeleksian, Pemilihan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih	105 Desa

		Jumlah Data Profil Desa yang disusun	242 Desa
		Evaluasi Desa dan Kelurahan	21 Kecamatan
		Menurunnya Jumlah Pelaporan pertanggungjawaban dana desa yang bermasalah (tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan)	242 Desa
		Jumlah pengelola Aset Desa yang terlatih dengan SIPADES	242 Desa
3	Meningkatnya keberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi di Desa menuju Desa mandiri yang berkelanjutan	Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk dan dibina dalam rangka kerjasama desa	1 Kawasan
		Terlaksananya monitoring pelaksanaan Program Pemberdayaan di Desa	242 Desa
		Jumlah BUMDesbersama yang terbentuk dan disosialisasikan	1 Bumdes Bersama
		Jumlah Kader Pembangunan Manusia Desa yang dibina	242 Desa
		Jumlah BUMDes yang aktif	240 Bumdes
		Jumlah BP-SPAM yang dibina	20 BP-SPAM
		Jumlah Aset Pasar Desa yang pengelolaannya diserahkan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa	25 Pasar Desa
		Jumlah Posyantek yang dibina	21 Posyantek

Program Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Tahun 2022

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.941.447.565
2	Program Penataan Desa	143.568.300
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	133.694.470
5	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.144.688.872
6	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	357.096.204
JUMLAH		7.720.495.411

❖ Permasalahan :

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar ditentukan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. SDM
2. Sarana dan prasarana OPD
3. Dukungan aplikasi yang berkaitan dengan kegiatan

❖ **Solusi :**

Koordinasi yang baik antar OPD, camat dan pihak desa dan keselarasan pelaksanaan program/kegiatan di Kabupaten Kampar dan program/kegiatan di desa.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk & KB

Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	
A	Tersedia Data Kependudukan Untuk Perencanaan Program Bangga Kencana dan Pembangunan Lainnya	Program KB		
		1	Program Pengendalian Penduduk	
			- Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab./Kota	21 Kecamatan
			Sub. Kegiatan pendapatan dan Pengelolaan data kependudukan	
			- Tersedia data kependudukan	250 Desa/ Kelurahan
			Sub. Kegiatan pergerakan kader institusi Masyarakat pedesaan (IMP)	
			-Terlaksana kegiatan IMP	21 Kecamatan
2	Pemberdayaan dan Pembinaan PKB/PLKBn serta IMP dalam Pelaksanaan Program Bangga Kencana/KKBPK	2	Program Pembinaan Keluarga Berencana Kegiatan Pemberdayaan Tenaga PKB/PLKB	
			a. Sub. Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung	
			- Tersediannya Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung	21 Kecamatan
			b. Pergerakan Kader IMP	
			1. Terlaksana Pergerakan Kader IMP	21 Kecamatan
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peranserta Organisasi Kemasyarakatan TK. Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	
			a. Sub. Kegiatan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra	

			2. Terlaksananya Kegiatan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan dan Pembinaan Kesertaraan Ber KB	21 Kecamatan
			b. Sub. Kegiatan Pelaksana Program KKBPK di Kampung KB	
			3. Pelaksanaan Program KKBPK di Kampung KB	21 Kecamatan
3	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sehingga Kesertaraan Ber-KB Bagi Anggota Kelompok Kegiatan yang ada di Kecamatan	3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
			Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			a. Sub. Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	
			4. Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	21 Kecamatan
			b. Sub. Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	
			c. Sub Kegiatan Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan keluarga menjadi orang tua hebat, Generasi berencana kelanjut usiaan serta pengolahan keuangan keluarga	
			5. Terlaksananya promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan keluarga menjadi orang tua hebat, Generasi berencana kelanjut usiaan serta pengolahan keuangan keluarga	21 kecamatan

		Kegiatan Pelaksanan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten /Kota dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan keluarga	
		a. Sub kegiatan promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesehatan keluarga bagi mitra kerja	
		6. Terlaksananya promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesehatan keluarga bagi mitra kerja	21 kecamatan

Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1.	Program PengendalianPenduduk	241.398.189	APBD
2.	Program PembinaanKeluargaBerencana (KB)	6.621.916.307	APBD
3.	Program PemberdayaanDan PeningkatanKeluargaSejahtera (KS)	5.067.121.121	APBD
	JUMLAH	11.930.435.617	

➤ **Permasalahan dan Solusi**

❖ **Masalah :**

1. Dikarenakan juknis terlalu lama maka menjadi salah satu kendala untuk menjalankan kegiatan
2. Pencapaian peserta KB baru (PB) untuk akseptor yang menggunakan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) yang belum mencapai target yang mana sasaran PPM (Perkiraan Permintaan Masyarakat) tahun 2020 (lampiran 7) sebesar 36.876 dan pencapaian 4.494 atau 8.2%, sedangkan untuk PPM Tahun 2021 untuk seluruh alkon untuk Kab.Kampar PPMnya 26.265 akseptor dan pencapaian sebesar 1.143 akseptor atau 4.4% (lampiran 8).
3. Kurangnya pembinaan kesertaan Ber-KB Jalur wilayah di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan (Calcitas) sehingga tingkat kesertaan KB masih rendah yang menyebabkan masih

tingginya Unmet Need. Di Provinsi Riau pada tahun 2021 Unmet Need sebesar 25,6 % sedangkan di Kabupaten Kampar 26,6 %.

4. Belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan KB yang belum merata seperti masih tingginya CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE (CPR) CPR, (AGE SPECIFIC FERTILITY RATE (ASFR) dan kesertaan KB Pria masih rendah sebanyak 1.7 % serta kurang optimalnya pemanfaatan tenaga medis setelah melakukan pelatihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) khususnya Intra Uterine Devise (IUD) dan Implant.
5. Masih tingginya ASFR (Age Spacific Fertilitas Rate) usia (15-19 tahun) untuk Kabupaten Kampar sebesar 21,7%.
6. Belum terlayannya calon Akseptor MKJP karena Menurut Perpres NO 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan ditanggung BPJS, tetapi BPJS belum siap maka pembiayaan pelayanan KB terutama Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP) masih dalam proses pembiayaan dan administrasi pertanggung jawaban, pada BKKBN Provinsi Riau
7. Kurangnya partisipasi keluarga yang mempunyai anak, remaja dan lansia dalam kegiatan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak melalui kelompok kegiatan BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja) dan BKL (Bina Keluarga Lansia).
8. Belum tersosialisasinya program (Generasi Berencana) yakni program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan keluarga bagi remaja dengan meningkatkan kemampuan dan kemauan positif remaja.
9. Kurangnya pembinaan terhadap usaha kelompok yang merupakan kegiatan ekonomi produktif yang harus memberika keuntungan yang akan meningkatkan pendapatan keluarga anggota kelompok.

10. Masih banyaknya keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 sebanyak 375.716 KK atau 8,38 % berdasarkan Kabupaten Kampar dalam angka tahun 2017.
11. Masih rendahnya rasio PLKB dengan desa binaan lebih kurang 2.9 yang idealnya 1 petugas 2 memegang ½ desa
12. Persentase penggunaan Inform Consent atas pelayanan KB Baru MKJP sampai bulan Desember 2021 mencapai 11741 (4,3%) masih
13. Laporan Tahunan 2021 DPPKBP3A Kab. Kampar 36
14. jauh dari angka ideal 100%. Dari hasil telaah laporan F/II/KB terlihat masih banyak klinik yang belum menggunakan/melaporkan penggunaan inform concent dalam pelayanan KB baru MKJP dan juga banyak yang belum mengetahui bahwa pelayanan KB suntik harus menggunakan inform concent, padahal salah satu pelayanan KB MKJP dan suntik yang sesuai SOP adalah dengan pemberian inform concent.
15. Mekanisme operasional lini lapangan tidak berjalan secara optimal karena keterbatasan SDM dan dukungan dana.
16. Kurangnya sarana dan prasarana untuk lini lapangan seperti PLKB kit, IUD kit, KIE kit dsb.
17. Alat kontrasepsi yang masih kurang belum sesuai dengan permintaan dan realisasi yang diminta.

❖ **Solusi :**

1. Harus mempercepat juknis sampai ke OPD sehingga bisa menjalankan kegiatan dengan cepat
2. Untuk mengumpulkan banyak orang dan kondisi daerah yang jauh juga membutuhkan anggaran lebih sehingga bisa membentuk tim untuk ke daerah-daerah jauh tersebut
3. Menggerakkan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, pustu, bidan praktek dsb untuk lebih proaktif dalam memberikan informasi tentang manfaat dari Metode Kontrasepsi Jangka

Panjang setiap melakukan pelayanan baik di fasilitas kesehatan maupun di praktek swasta.

4. Meningkatkan penggerakan lini lapangan dengan memberdayakan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) terutama petugas PLKB/PKB minimal 4 kali dalam sebulan, menyiapkan bahan-bahan KIE yang bersifat edukasi interpersonal dan konseling untuk merubah sikap dan perilaku masyarakat sehingga apa yang menjadi pilihan masyarakat dalam ber-KB benar-benar mantap dan lestari.
5. Lebih mengoptimalkan penggunaan Mobil Pelayanan (Moyan) terutama untuk daerah kalkitas, daerah terpencil dan daerah tertinggal dalam pelayanan KB dari satu (1) kali dalam sebulan menjadi 3 tiga kali dalam sebulan.
6. Memberdayakan stakeholder, mitra kerja dan seluruh masyarakat untuk lebih cerdas memilih alat kontrasepsi dengan melakukan intensitas KIE kepada masyarakat tentang Keluarga Berencana sebanyak 2 kali dalam sebulan.
7. Menjalinkan kerjasama dengan Rumah Sakit Daerah maupun Swasta dalam meningkatkan capaian MKJP untuk ibu Pasca Persalinan dan Keguguran dengan membuat kerjasama atau MOU.
8. Memberikan pengetahuan dan ketrampilan khususnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang Balita, anak, remaja
9. peningkatan kualitas hidup Lansia, melalui kegiatan BKB, BKR dan BKL dengan cara mengikutsertakan para kader mengikuti pelatihan, orientasi serta mengadakan lomba kader.
10. Membentuk dan Membina PIK-R/Mahasiswa baik jalur masyarakat ataupun jalur sekolah menjadi 50 PIK-R, sebagai wadah memfasilitasi remaja belajar memahami dan mempraktekan hidup sehat serta berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan remaja yang berperilaku sehat, etrhindar dari Remaja, dan terhindar dari resiko TRIAD KRR (Seksualitas, NAPZA,HIV dan AIDS),

menunda usia perkawinan, mempunyai perencanaan berkeluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera serta menjadi contoh, model dan Idola bagi teman sebaya.

11. Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah lain seperti Dinas Perindustrian dan Pasar, Dinas Kesehatan untuk izin industri Rumah Tangga , mengemaskan dan memasarkan hasil industri rumah tangga sehingga dapat bernilai jual tinggi yang nantinya akan meningkatkan tahap hidup masyarakat dari Keluarga Pra KS menjadi KS 1 ataupun KS 1 menjadi KS II.
12. Menambah jumlah PLKB/ PKB dengan cara mengadakan tenaga THL ataupun TKS agar program KB dapat sukses di masyarakat sejumlah ± 40 Orang.
13. Agar angka penggunaan inform concent meningkat, diharapkan untuk melakukan sosialisasi di berbagai kesempatan tentang penggunaan inform concent untuk pelayanan KB dengan metode suntik kepada klinik KB yang ada di Kabupaten Kampar dan melaporkannya pada laporan F/II/KB.
14. Memberikan reward kepada mitra kerja, tokoh agama, tokoh masyarakat dan kader baik kader di tingkat desa maupun tingkat RW atau RT dengan cara mengadakan berbagai kegiatan perlombaan.
15. Meningkatkan kerjasama dengan cara sosialisasi program KB ke Stake Holder, Lembaga Legislatif dan Bappeda serta BKKBN Perwakilan Riau agar penambahan anggaran bisa tercapai.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi	Indeks Kinerja PelayananTransportasi	26.1%

Program Dinas PerhubunganTahun 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab /Kota	11.332.034.897	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan (LLAJ)	36.649.142.382	APBD
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	227.250.000	APBD
	JUMLAH	48.208.427.279	

➤ **Permasalahan dan Solusi**

❖ **Masalah :**

1. Rendahnya jaringan pelayanan transportasi yang belum dapat menjangkau seluruh Kawasan Kabupaten Kampar.
2. Belum terdatanya semuakondisi ruas jalan di Kabupaten Kampar dan anggaran daerah yang terbatas.
3. Kurangnya aparatur teknistransportasi.
4. Sistem Jaringan Teknologi yang belum memadai

❖ **Solusi :**

1. Membangun jaringan pelayanan transportasi yang memadai di Kabupaten Kampar.
2. Melakukan Pendataan yang menyeluruh terkait kondisi ruas jalan di Kabupaten Kampar.
3. Meningkatkan SDM Aparatur teknis transportasi yang ada.
4. Meningkatkan dan menambah jaringan teknologi di Kabupaten Kampar.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100% 100% 100% 100% 100%
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%
3	Program Aplikasi Informatika	1. Pengelolaan nama Domain yang Telah di Tetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100% 100%

Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2022

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.934.744.587
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	3.628.316.690
3	Program Aplikasi Informatika	1.229.870.626
	JUMLAH	12.792.931.903

➤ **Permasalahan dan Solusi:**

❖ **Masalah :**

1. Penerapan e-government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar masih rendah.
2. Kurangnya jumlah aparatur bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Kampar
3. Terbatasnya jaringan telekomunikasi seluler di daerah sulit
4. Masih rendahnya insfrastruktur bidang komunikasi dan informatika hingga pedesaan
5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public
6. Belum tersedianya data center
7. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik
8. Perlu adanya pengelolaan aplikasi elektronik berbasis data base dan terintegritas untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran dalam pelayanan antara pemerintah dan masyarakat
9. Belum optimalnya layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung focus pembangunan pemerintah daerah
10. Pengembangan website pemerintah daerah Kabupaten Kampar.

❖ **Solusi :**

1. Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja sehingga setiap *judgement* yang terkait dengan penetapan target indicator kinerja dapat didukung dengan data yang lebih lengkap dan akurat.
2. Lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai sasaran dan

tujuan kegiatan yang dikaitkandenganupaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan

3. Berupaya untuk lebih mendorong secara optimal sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus sebagai pelayanan masyarakat, melalui berbagai pelatihan atau *short course* terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Koperasi Aktif	Persentase Peningkatan Koperasi Yang Aktif	50,6
2	Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah	36,3

Program Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Tahun 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	218.644.573	APBD
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasian	54.962.530	APBD
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	313.853.116	APBD
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	2.968.125.221	APBD
5	Program Pengembangan UMKM	437.329.452	APBD
	JUMLAH	4.397.114.684	

➤ **Permasalahan dan Solusi**

❖ **Masalah :**

1. Masih adanya koperasi yang belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan(RAT)
2. Masih banyak nya Koperasi yang belum memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)
3. Kurangnya pemahaman pengurus koperasi tentang Pelaporan Keuangan Koperasi
4. Kurang berminatnya Koperasi dalam Kerja Sama Pembiayaan, Kemitraan, Penyertaan Modal dari Pemerintah
5. Adanya pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya, sehingga mengganggu pengguna jalan seperti : pasar tambang, pasar kampa, pasar kuok, dan pasar siak hulu
6. Tidak tercapainya Target PAD seperti Royalti Plaza Bangkinang dan pasar-pasar yang dikelola oleh Pemda.

❖ **Solusi :**

1. Melakukan Pembinaan dan penyuluhan terkait pentingnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) bagi jalannya roda organisasi Koperasi
2. Menyurati dan memberikan Sanksi bagi Koperasi yang belum melaksanakan RAT
3. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
4. Memberikan sosialisasi tentang pentingnya memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)
5. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan (BIMTEK) tentang Perkoperasian dan Pelaporan Keuangan Koperasi
6. Melakukan Monitoring PelaporanKeuanganKoperasi

7. Melakukan Sosialisasi tentang Program Pembiayaan, Kemitraan, Penyertaan Modal Pemerintah kepada Koperasi
8. Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UMK Kabupaten Kampar bekerja sama dengan OPD terkait Satpol PP dan Dishub untuk melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya secara berkala
9. Terhadap pasar yang dikelola oleh Pemda Kampar Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK melakukan uji petik tentang Target PAD
Melakukan rehabilitasi terhadap sarana dan prasarana pasar sehingga dapat meningkatkan PAD.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	85%
		Persentase penyelesaian perizinan yang tepat waktu	100%
2	Meningkatkan kemudahan investasi	Persentase peningkatan fasilitasi investasi	100%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar	BB

Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN (Rp)
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
	I	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	85.678.226,-
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.797.507,-
	II	Administrasi keuangan perangkat daerah	
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	5.728.831.377,-
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.248.213,-
	III	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	16.500.000,-
	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	52.232.000,-
	IV	Administrasi umum perangkat daerah	
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	29.783.500,-
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175.586.320,-
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	183.689.436,-
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	372.061.885,-
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.240.000,-
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	555.351.000,-
	V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	663.448.000,-
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	147.948.000,-
	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.500.000,-
	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	211.430.000,-
	VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	182.838.800,-
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.770.692.872,-
	VII	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	168.879.800,-
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.190.850,-
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	979.999.180,-
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	52.324.000,-
B	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		
	I	Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota	
	1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	79.183.780,-
C	Program Pelayanan Penanaman Modal		
	I	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	

	1	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	311.592.046,-
	2	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	131.050.628,-
	3	Koordinasi dan sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	323.932.086,-
D	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		
	I	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	
	1	Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	302.010.300,-
	2	Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	91.330.000,-
E	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		
	I	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	
	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	205.915.980,-
		JUMLAH	12.939.265.786,-

➤ **Permasalahan dan Solusi**

❖ **Masalah :**

1. Pada tahun anggaran 2022 dalam mengeksekusi penarikan retribusi khususnya IMB belum dijumpai permasalahan yang berarti. Solusi yang diberikan adalah tetap menerapkan protokol kesehatan dan menggunakan system pertemuan melalui daring (jarak jauh), demi kepentingan masyarakat
2. Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor : 68 Tahun 2019 tanggal tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka OPD-DPMPTSP menindak lanjuti dan sekaligus ditunjuk sebagai pemungut Retribusi yang ditimbulkan akibat dari Izin yang diterbitkan.

❖ **Solusi :**

1. Pada tahun 2017 berdasarkan Permendagri Nomor 29 Tahun 2017 tentang pencabutan Izin Gangguan, maka dengan demikian sejak itu pula Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Kampar tidak dilakukan lagi

2. OPD-DPMPTSP menindak lanjuti dan sekaligus ditunjuk sebagai pemungut Retribusi yang ditimbulkan akibat dari Izin yang diterbitkan. Oleh sebab itu DPMPTSP melaksanakan amanah Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sebagai catatan bahwa DPMPTSP Kabupaten Kampar adalah merupakan salah satu OPD dibidang pelayanan publik, target pendapatan asli daerah tidak mesti menjadi tolok ukur untuk keberhasilan kinerja OPD, namun lebih diutamakan bagaimana menciptakan pelayanan publik yang prima secara transparan dan mampu memberikan terbaik serta menjadi kepuasan

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas Organisasi kepemudaan	Persentase peningkatan kegiatan kepemudaan	63 %
		Persentase Peningkatan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP)	30 %
2	Meningkatnya Prestasi Olah Raga	Persentase sarana olah raga masyarakat dengan kondisi baik	70 %
		Jumlah atlet berprestasi	112
		Jumlah pelatih bersertifikat	400
		Jumlah Wasit bersertifikat	500

Program Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	2.116.577.402
2	Program Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	10.968.909.908
	JUMLAH	13.085.478.310

➤ **Permasalahan :**

Pekan Olahraga Kabupaten dan Event-even turnamen Pada Hari-hari Besar. Disamping itu dalam hal anggaran untuk Program Kepemudaan dan Olahraga masih dikategorikan rendah baik dari segi pengembangan Atlit dan pemuda beserta Sarana Prasarana Penunjangnya, sebab jika dilihat dari anggaran yang tersedia memang cukup besar namun anggaran Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada anggran yang tercantum hanya 50% selebihnya ke Pihak Hibah Organisasi seperti KONI, NPC, PRAMUKA DLL.

➤ **Solusi :**

1. Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja sehingga setiap judgement yang terkait dengan penetapan target indicator kinerja dapat didukung dengan data yang lebih lengkap dan akurat.
2. Lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai sasaran dan tujuan kegiatan yang dikaitkan dengan upaya mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
3. Berupaya untuk lebih mendayagunakan secara optimal sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus sebagai pelayan masyarakat, melalui berbagai pelatihan atau short course terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
4. Melakukan Pendekatan bersama dengan Mitra OPD yaitu komisi I DPRD Kampar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kampar, dalam hal penyampaian Usulan Anggaran Untuk Urusan

Pemuda dan Olahraga Baik Dari Segi Sumber daya Manusia atau Sarana Prasarannya.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Perjanjian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2022

NO	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)
			SATUAN	TARGET	TARGET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(9)
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Infrastruktur	Diskominfo, dan persandian	1Kegiatan	1Kegiatan

Program Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KET.
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	93.765.000,-	
	JUMLAH	93.765.000,-	

➤ Permasalahan dan Solusi

❖ Masalah :

1. Kurangnya sarana dan Prasarana di bidang statistik dan Informasi publik.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pembinaan pelayanan informasi public untuk implementasi Undang- undang keterbukaan informasi publik.
3. Masih kurangnya komitmen pimpinan OPD terhadap aintegras data, pertukaran data dan keterisian data.

4. Sistem informasi dan komunikasi yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal.
5. Belum berjalannya fungsi kelompok informasi masyarakat yang telah terbentuk secara optimal.
6. Content digital yang kurang mendidik, merusak moral dan tatanan sosial masyarakat.
7. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan hak dan kewajiban terhadap keterbukaan informasi.
8. Ketidak siapan badan public dalam menghadapi permintaan informasi.
9. Belum tersedianya data yang akurat dan mutahir untuk mendukung bidang statistik.
10. Penggunaan data rujukan bagi OPD yang tidak seragam

❖ **Solusi :**

1. Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja sehingga setiap judgment yang terkait dengan penetapan target indicator kinerja dapat didukung dengan data yang lebih lengkap dan akurat.
2. Lebih meningkatkan efesiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai sasaran dan tujuan kegiatan yang dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
3. Berupaya untuk lebih mendorong secara optimal Sumber Daya Manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus sebagai pelayanan masyarakat, melalui berbagai pelatihan atau short course terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Perjanjian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun 2022

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Index keamanan informasi	- Tersedianya SDM persandian - Terlaksananya pengamanan informasi	12 12	

Program Urusan pemerintahan Bidang Persandian Tahun 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KET.
1.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	179.711.450	APBD
	JUMLAH	179.711.450	

➤ Permasalahan dan Solusi

❖ Masalah :

1. Kurangnya Fasilitas pendukung bidang persandian.
2. Ketersediaan anggaran untuk pemeliharaan alat/ sarana persandian sangat terbatas.

❖ Solusi :

1. Meningkatkan Fasilitas pendukung untuk menunjang kegiatan di bidang persandian.
2. Meminta Penambahan anggaran untuk pemeliharaan alat/ sarana persandian.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Perjanjian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2022

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kelestarian Seni dan Budaya Daerah	Persentase Kelompok Seni dan Budaya yang Aktif dan dilestarikan	100%	
2	Terpeliharanya Warisan Budaya (Tangible dan Intangible) dan Situs Cagar Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	

Program Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KET.
1	Program Pengembangan Kebudayaan	1,169,997,337	APBD
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	299,148,075	APBD
	JUMLAH	1.469.145.412	

❖ Permasalahan :

1. Terbatasnya SDM aparatur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan baik Kuantitas maupun Kualitas.
2. Masih minimnya Sarana dan Prasarana Penunjang Objek wisata dan budaya
3. Rendahnya pelaksanaan koordinasi pembangunan bidang pariwisata.
4. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati perundang-undangan bidang pariwisata dan kebudayaan sehingga tingkat partisipasi masyarakat masih rendah.

❖ Solusi :

1. Mengirimkan aparatur untuk mengikuti Diklat Kepariwisata dan Kebudayaan di tingkat Provinsi maupun Pusat.
2. Mengoptimalkan pembinaan dan Penataan Objek serta daya Tarik wisata secara efektif dan memadai.

3. Secara bertahap mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana penunjang objek wisata, kebudayaan.
4. Meningkatkan koordinasi pembangunan bidang pariwisata dan kebudayaan dengan pihak-pihak terkait.
5. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Pariwisata dan kebudayaan.
6. Melakukan Pendataan usaha kepariwisataan dan kebudayaan yang ada di kecamatan- kecamatan.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Perjanjian Kinerja (PENJA) Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Minat dan Budaya Baca Masyarakat	Jumlah Pustaka Binaan (Pustaka Umum)	40 Pustaka
		Jumlah Koleksi Pustaka Daerah dan Kecamatan	5.000 Judul
		Jumlah Pemustaka Perpustakaan Daerah dan Kecamatan	13.000 Orang
		Jumlah Promosi Budaya Baca	2 Keg

Program Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan Tahun 2022

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.437.176.384,00
2	Program Pembinaan Perpustakaan	187.557.974,00
	JUMLAH	6.624.734.358,00

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Perjanjian Kerja (PENJA) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Tata Kelola Kearsipan yang baik	Pendataan dan Penataan Arsip SKPD dan Kecamatan	10 SKP dan Kecamatan
		Jumlah SDM Kearsipan	50 Orang
		Jumlah Pemustaka Perpustakaan Daerah dan Kecamatan	13.000 Orang
		Jumlah SKPD yang Tertata Arsip Dinamis dan Arsip Statis	5 Opd dan 5 Kecamatan

Program Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan Tahun 2022

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Pengelolaan Arsip	105.325.739,00
2	Program Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	82.232.235,00
	JUMLAH	187.557.974,00

➤ Permasalahan dan Solusi:

Secara umum, dalam pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022, permasalahan yang dihadapi adalah:

- a. Penetapan dan pengesahan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021, belum sesuai dengan waktu yang diinginkan dan di tambah dengan urusan Administrasi kelengkapan APBD di TAPD sehingga pelaksanaan kegiatan pada OPD terkesan terlambat di mulai.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

- c. Kebutuhan Sumberdaya Manusia dari Pustakawan 10 orang sedangkan yang tersedia masih 4 orang, sehingga pustakawan Kampar sangat kurang dari yang di butuhkan.

Sedangkan solusinya, diharapkan penetapan dan pengesahan APBD Kabupaten Kampar dapat ditetapkan dan disahkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan serta sarana dan prasarana penunjang dapat disediakan sehingga seluruh kegiatan dan program yang telah direncanakan dapat terealisasi.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Perjanjian Kerja Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Budidaya dan Tangkap Perikanan	Pertumbuhan Produksi Sektor Perikanan	69.400

Program Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2022

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.061.531.990
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1,424,314,984
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4,652,336,997
4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2,263,149,762
5	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	883,623,596
	JUMLAH	17.284.957.329

➤ Permasalahan dan Solusi

❖ Masalah :

1. Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia sehingga sulit mengadopsi teknologi sesuai perkembangan sehingga belum optimalnya penerapan teknologi perikanan tepat guna di masyarakat.
2. Kesenjangan antara jumlah nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan yang membutuhkan penyuluhan dengan jumlah tenaga penyuluh serta sarana dan sarana penunjang penyuluhan.
3. Kemampuan modal yang dimiliki oleh nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan sangat kecil sehingga sangat sulit untuk memasarkan dan mengembangkan usaha.

4. Kurangnya minat investor menanamkan modalnya di bidang kelautan dan perikanan akibat belum adanya informasi paket investasi menguntungkan.
5. Masih lemahnya dukungan dari lembaga keuangan bank dan non bank dalam hal akses permodalan kepada nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan dalam rangka pengembangan usaha.
6. Masih adanya penangkapan ikan secara illegal dengan menggunakan bahan terlarang seperti racun dan bom.
7. Terbatasnya sarana produksi seperti induk dan benih unggul, pakan, pupuk dan obat-obatan yang standar.
8. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pembinaan maupun sarana pendukung pembinaan maupun sarana pendukung lainnya seperti TPI/PPI, pabrik es dan prasarana saluran tambak.
9. Masih rendahnya penanganan pasca panen.
10. Terbatasnya infrastruktur dasar, seperti kelistrikan, modal transportasi dan prasarana jalan.
11. Organisasi pembudidaya dan nelayan belum berfungsi secara optimal.
12. Belum ada zonasi yang jelas bagi kawasan budidaya serta pembukaan kawasan tanpa mengikuti aturan yang berlaku.
13. Kepemilikan lahan seringkali tidak jelas, adanya status tanah sengketa atau konflik antar hak adat, perseorangan dan perusahaan.
14. Tata letak (lay out) dan konstruksi petak budidaya tidak kokoh, terlalu dangkal dan luas.
15. Masih tingginya ancaman penyakit ikan.

❖ **Solusi :**

1. Peningkatan Pemanfaatan sumber daya alam/ perikanan.
2. Peningkatan skala usaha dan produksi perikanan, yang diikuti dengan meningkatnya pendapatan masyarakat pelaku usaha.
3. Peningkatan Fasilitas permodalan dan pemasaran.

4. Dapat dikendalikannya keberadaan penyakit ikan menular.
5. Adanya peningkatan kontribusi dari bidang perikanan untuk mengentaskan kemiskinan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Perjanjian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2022

NO (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Destinasi Wisata	2%
2	Meningkatnya Pemasaran dan Provinsi Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	10%
3	Meningkatnya Kelestarian Seni dan Budaya Daerah	Persentase Kelompok Seni dan Budaya yang Aktif dan dilestarikan	100%
4	Terpeliharanya Warisan Budaya (Tangible dan Intangible) dan Situs Cagar Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarika	100%

Program Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2022

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.140.058.028
2	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.374.098.411
3	Pemasaran Pariwisata	439,998,912
4	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	300,027,954
5	Pengembangan Kebudayaan	1,169,997,337
6	Pengembangan Kesenian Tradisional	299,148,075
	JUMLAH	8,723,328,717

➤ Permasalahan dan Solusi

❖ Masalah :

1. Terbatasnya SDM aparatur Bidang Pariwisata dan kebudayaan baik kuantitas maupun kualitas

2. Terbatasnya sarana dan prasarana Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang dimiliki
3. Kurangnya kesadaran masyarakat pemilik usaha kepariwisataan untuk mendaftarkan usaha kepariwisataan dan Kebudayaan.
4. Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang pada objek – objek wisata, kebudayaan.
5. Rendahnya pelaksanaan koordinasi pembangunan bidang pariwisata, dan Kebudayaan baik secara vertikal maupun horizontal.
6. Rendahnya Pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati perundang-undangan bidang Pariwisata dan kebudayaan sehingga tingkat partisipasi masyarakat masih rendah.

❖ **Solusi:**

1. Mengirimkan Aparatur untuk mengikuti Diklat Kepariwisata dan Kebudayaan ditingkatkan Provinsi maupun Pusat.
2. Mengupayakan agar Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dapat memiliki fasilitas ruangan dan perlengkapan yang cukup dan memadai.
3. Mengoptimalkan Pembinaan dan Penataan Objek serta daya tarik wisata secara efektif dan memadai.
4. Melakukan sosialisasi kepada pemilik usaha kepariwisataan agar dapat mendaftarkan usaha kepariwisataannya.
5. Secara bertahap mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana penunjang objek wisata, kebudayaan.
6. Meningkatkan koordinasi pembangunan bidang pariwisata dan kebudayaan dengan pihak – pihak terkait.
7. Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Perjanjian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2022

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura :	
		Padi	72.680,13
		Jagung	17.246,78
		Cabe	2.008,97
		Jeruk	4.505,42
		Presentase Petani yang menerapkan teknologi tepat guna	80,87
	Presentase peningkatan KK Petani yang bergerak di Bidang Pertanian	52,968	

Program Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2022

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	19.186.828.749
2	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	630.653.826
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.157.118.139
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	191.421.344
5	Program Perizinan Usaha Pertanian	235.126.964
6	Program Penyuluhan Pertanian	1.160.324.902
	JUMLAH	27.561.473.924

➤ Permasalahan dan Solusi

❖ Masalah :

1. Sosial budaya masyarakat yang masih lemah.
2. Rendahnya tingkat penerapan teknologi ditingkat petani.
3. Masih terbatasnya penggunaan benih bermutu.
4. Adanya alih fungsi lahan.

❖ **Solusi :**

1. Dalam melaksanakan pembangunan pertanian perlu menyatukan persepsi, bahwa sub sektor pertanian pada umumnya merupakan sub sektor yang penting dan strategis dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Kampar untuk menuju visi Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai wilayah swasembada pangan dan Hortikultura berbasis industry pertanian tahun 2022.
2. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan semua Stakeholder dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam sub sektor pertanian.
3. Untuk mewujudkan visi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar tahun 2022 mendapat dukungan baik dalam hal kebijakan dan pendanaan dari Pemerintah Daerah serta dari stakeholder lainnya dalam pembangunan pertanian.

**Perjanjian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Dinas
Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mengembangkan Pertanian Berbasis Potensi Daerah	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	1,4 %	Pembangunan Prasarana Pertanian		
					Penyusunan Masterplan pengembangan prasarana, sarana kawasan & komoditas perkebunan	Jumlah buku data statistic perkebunan dan peternakan	2 buku
					Pembangunan Prasarana pertanian		
					Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	Jumlah pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	1 unit
					Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota		
					Pengendalian Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, Hortikultura, dan perkebunan	Jumlah pengendalian Organisme Pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan	12 bulan
					Pencegahan, Penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, Hortikultura perkebunan	Jumlah Pencegahan, Penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha perkebunan	12 bulan
					Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya		
					Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian	Jumlah pembinaan petugas dan bimbingan peternak	15 perusahaan
					Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		
Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Jumlah pembinaan petugas dan bimbingan peternak	48 orang					

					Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan Desa	Jumlah pembinaan dan pembentukan KUB petani perkebunan	4 KUB
			Persentase Penyakit ternak yang tertangani (%)	25 %	Pengawasan Obat hewan di tingkat Pengecer		
					Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan	Jumlah pengawasan obat hewan	12 bulan
					Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan Daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/Kota		
					Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Jumlah ternak yang terlayani	1.000 ekor
					Pembebasan penyakit hewan menular dalam 1 (satu) daerah Kab/ Kota	Jumlah ternak yang terlayani	12.500 ekor
					Penerapan dan pengawasan persyaratan Teknis kesehatan Masyarakat Veteriner		
					Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Jumlah penyediaan BAH dan HBAH secara ASUH dan pemeriksaan ternak qurban	6.500 ekor
					Penerapan dan pengawasan persyaratan Teknis		
					Pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan	Jumlah pelayanan pemotongan di RPH	12 bulan
			Persentase Petani yang menerapkan teknologi tepat guna	33 %	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		
					Pemanfaatan SDG	Jumlah bibit perkebunan siap salur	20.000 batang
					Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman	Jumlah pelayanan Inseminasi buatan (IB)	4.600 ekor

			Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (%)	1,18 %	Peningkatan mutu dan peredaran Benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
					Pengawasan peredaran bahan /pakan benih/bibit hijauan pakan ternak	Jumlah pelaksanaan analisis sampel dan pengawasan mutu pakan	12 bulan
					Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah Kabupaten/Kota		
					Penjaminan peredaran benih/ bibit ternak	Jumlah pelaksanaan pembibitan, perawatan & pemeliharaan ternak	12 bulan

Program Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Dinas Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	10.460.566.770
2	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.300.388.167
3	Penyediaan dan Pengembangan Parasarana Pertanian	5.190.000.362
4	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	561.218.355
5	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	149.264.993
6	Perizinan Usaha Pertanian	163.910.208
7	Penyuluhan Pertanian	588.376.673
	JUMLAH	20.413.725.528

➤ **Permasalahan dan Solusi**

❖ **Masalah :**

1. Kurangnya SDM aparatur di Dinas Perkebunan dan Kesehatan Hewan baik kuantitas maupun kualitas.

❖ **Solusi :**

1. Peningkatan Kualitas SDM secara berkesinambungan, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan akurasi data, penjadwalan SDM pada kegiatan yang optimal, peningkatan respon oleh para PPTK/PPK pengambil kebijakan khususnya terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat mendesak.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1	Terwujudnya Kestabilan Harga Bahan Pokok Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Mendapatkan akses Pasar Murah Persentase ketersediaan bahan pokok dan bahan penting lainnya	76% 57%
2	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	Persentase UTTP yang di tera tera ulang	6,2%
3	Meningkatkan Koperasi Aktif	Persentase Peningkatan Koperasi yang Aktif	52%
4	Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah	100%

Program Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Tahun 2022

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.8.581.246.417,-	APBD
2	Program Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	Rp.207.709.573,-	APBD
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp.54.962.530,-	APBD
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp.743.053.206,-	APBD
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil da Usaha Mikro (UMKM)	Rp.2.152.413.765,-	APBD
6	Program Pengembangan UMKM	Rp.387.329.702,-	APBD
7	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp.255.041.503,-	APBD
8	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.550.335.093,-	APBD
9	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp.107.225.193,-	APBD
10	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp.376.633.880,-	APBD
11	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp.64.809.370,-	APBD
	JUMLAH	Rp. 13.480.760.232,-	

➤ **Permasalahan dan Solusi**

Kendala dalam pelaksanaan Kegiatan Dinas Perdagangan , Koperasi dan Usaha Mikro Kecil adalah :

1. Lemahnya dalam pengumpulan data sehingga berakibat pada kurang akuratnya dalam penetapan indikator dan sasaran kinerja terutama jangka menengah dan panjang;
2. Kurang disiplinnya dalam penggunaan anggaran terutama dalam ketetapan dalam ketetapan waktu pelaksanaan kegiatan;
3. Kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran dan tujuan kegiatan dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan;
4. Merupakan sisa dana dari transportasi ke Luar Daerah;
5. Adanya sisa kontrak;
6. Adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan.

Dan adanya permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan , Koperasi dan Usaha Mikro Kecil adalah :

1. Masalah Sumber Daya Manusia (SDM), SDM yang di miliki saat ini oleh Dinas Perdagangan , Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar masih kurang baik segi kualitas maupun kuantitas sehingga berpengaruh pada proses percepatan hasil kerja;
2. Masalah sarana dan prasarana yang dimiliki Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar saat ini masih kurang sehingga berpengaruh terhadap hasil kerja.

➤ **Solusi :**

1. Lebih meningkatkan kecermatan dalam perencanaan terutama untuk pelaksanaan kegiatan di Bidang Koperasi dan UKM;
2. Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja sehingga penetapan indikator kinerja dapat di dukung data lebih akurat;

3. Lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai sasaran dan tujuan kegiatan dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan Misi yang telah ditetapkan.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Rasio Kesempatamn Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	66%
2	Meningkatkan Pembangunan Industri	% Pertumbuhan Industri	5,87%

Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Program	Anggaran
1	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.493.830.392,-
2	Penempatan Tenaga Kerja	170.350.094,-
3	Hubungan Industrial	495.349.001,-
4	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	6.931.986.283,-
5	Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.154.440.534,-
6	Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota	129.162.322,-
7	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	112.751.896,-
	TOTAL	12.487.870.522

➤ Permasalahan dan Solusi

Adapun Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Belanja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar antara lain :

1. Penerapan peraturan tentang klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 belum optimal;
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal sertifikasi pengadaan barang/Jasa sehingga pengadaan barang dan jasa

kurang maksimal dalam penataannya serta kurangnya SDM untuk Penatausahaan Keuangan Daerah.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya komitmen yang kuat dari seluruh pimpinan untuk melaksanakan peraturan penatausahaan keuangan daerah secara utuh;
2. Melakukan pelatihan dan bimbingan teknis kepada aparatur dalam pengadaan barang dan jasa serta penatausahaan keuangan daerah.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022 dan Program Sekretariat Daerah Tahun 2022

BAGIAN HUKUM			
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	Terciptanya kepastian hukum dan terkoordinasinya Peraturan Perundang-undangan dalam rangka penegakan hukum di Kabupaten Kampar	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	3 Dokumen
		Fasilitasi Bantuan Hukum	7 Perkara
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	3 Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
A.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp. 859.958.742
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp. 307.910.788
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp. 258.172.057
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp. 293.875.897

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN			
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan Pembinaan Kecamatan	1 Tahun
		Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan Pemekaran Wilayah Kecamatan/Kelurahan Penegasan Batas Daerah Penegasan Batas Desa Terlaksananya tertib administrasi kewilayahan Kabupaten Kampar	1 Tahun
		Pelaksanaan Peringatan HUT OTDA Penyusunan LPPD dan LKPj Bupati dan Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati Tersusunnya SPM, LKPJ dan LPPD	1 Tahun

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
A.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :	Administrasi Tata Pemerintahan	Rp. 1.665.488.635
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp. 121.015.748
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp. 289.925.479
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp. 1.254.547.408

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYA			
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	Terlaksananya Program Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya proses Bantuan Dana Hibah, Pembinaan Sekolah/Madrasah Sehat dan Inventarisasi Pemilikan Lahan Eks Transmigrasi	1 Tahun
		Terlaksananya pembekalan (Manasik Haji), Pelayanan Pemberangkatan dan Pemulangan JCH/JH Kab. Kampar serta Pemberangkatan Umroh bagi masyarakat panutan	12 Bulan
		Terbayarnya Honor imam dan gharim masjid raya kecamatan, markaz islami kab. kampar dan terlaksananya kegiatan keagamaan serta peringatan hari besar islam, terselenggaranya pelatihan dewan hakim mtq, qori/qorih yang mengikuti tk. kabupaten kampar, Dewan Hakim yang mengikuti peningkatan, keterampilan dan profesionalisme Dewan Hakim MTQ serta keikutsetaan kafilah MTQ tingkat Provinsi	12 Bulan

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
A.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 11.874.513.828
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Rp. 3.058.834.491
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 1.276.997.339
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Rp. 7.538.681.998

BAGIAN KERJA SAMA			
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	Terealisasinya Kerja Sama Daerah	Jumlah pelaksanaan kerjasama dengan Daerah Lain/Wilayah Perbatasan/Dunia Usaha/Lembaga/ Pihak Ketiga yang difasilitasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan Kab. Kampar	1 Tahun
		Jumlah pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/pemerintah diluar negeri yang difasilitasi	1 Tahun
		Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama	1 Tahun

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
A.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Rp. 847.281.399
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Rp. 771.183.168
		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Rp. 22.911.507
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Rp. 53.186.724

BAGIAN PEREKONOMIAN			
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	Terwujudnya aparatur yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	3 Dokumen
B.	Meningkatnya profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia BUMD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3 Dokumen
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	3 Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
A.	Program Perekonomian dan Pembangunan :	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp. 887.887.687
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp. 421.448.055
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp. 260.852.754
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Rp. 205.586.878

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pembangunan, Tersusunnya Perbup tentang Juklak dan Juknis tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Tersusunnya Perbup tentang Juklak dan Juknis tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	2 Dokumen
B.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Evaluasi Penyerapan Penggunaan APBD	Tersedianya Data Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan /Rapat Evaluasi Bulanan/ Triwulan dan Laporan Penyerapan Anggaran	12 Dokumen
C.	Mengetahui Secara Dini Pelaksanaan Pembangunan	Tersedianya laporan pembangunan	12 Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
A.	Program Perekonomian dan Pembangunan :	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp. 461.247.311
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Rp. 206.965.180
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 134.884.808
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp. 119.397.323

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	Terlaksananya Program Perekonomian dan Pembangunan (Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten kampar)	Proses Pelelangan Paket Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kampar berjalan dengan lancar serta terlaksananya penyusunan Sistem Informasi Katalog Lokal	1 Tahun
		Terlaksananya Pelayanan Sistem Jasa Pengadaan Barang/Jasa secara Online, Peningkatan Pelayanan pada Ruang LPSE serta tersedianya basis Sistem Lokal dan Penguatan UKPBJ	1 Tahun
		Terlaksananya Pembinaan dan bantuan Advokasi Pengadaan	1 Tahun

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
A.	Program Perekonomian dan Pembangunan :	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 2.088.423.095
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 1.177.583.460
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Rp. 761.020.626
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 149.819.009

BAGIAN SUMBER DAYA ALAM			
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Tersedianya Data Dibidang Energi dan Sumber Daya Air	1 Tahun
		Tersedianya Data Dibidang Perikanan, Pertanian dan Kehutan	1 Tahun
		Tersedianya data dibidang pertambangan dan lingkungan hidup	1 Tahun

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
A.	Program Perekonomian dan Pembangunan :	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp. 696.746.555
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rp. 155.839.560
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Rp. 404.709.745
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Rp. 136.197.250

BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN			
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	Terwujudnya aparatur yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen
		2. Terlaksananya Koordinasi Penyusunan RKA PD	1 Dokumen
		3. Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Perubahan RKA PD	1 Dokumen
		4. Terlaksananya Koordinasi Penyusunan DPA PD	1 Dokumen
		5. Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA PD	1 Dokumen
		1. Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
		2. Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1 Tahun
		3. Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Tahun
		1. Terlaksananya Koordinasi Penyusunan LKJIP	1 Dokumen
		2. Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 1.150.361.286
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 785.771.074
		2. Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Rp. 79.535.567
		3. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Rp. 81.749.801
		4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 22.339.737
		5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp. 14.983.058

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 18.850.405.562
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 18.706.485.663
		2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 44.607.426
		3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp. 45.736.536
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp. 857.487.386
		1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 753.666.458
		2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 103.820.928
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 1.277.805.588
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 174.451.868
		2. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 600.000.000
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 165.982.049
		1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 165.982.049
		Administrasi Keuangangan Perangkat Daerah	Rp. 53.575.937
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 53.575.937

BAGIAN PROTOKOL			
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	Terlaksananya fasilitasi yang baik untuk semua kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi dan persiapan pelaksanaan kegiatan pimpinan	12 Bulan
		2. Terlaksananya penyelenggaraan hari-hari besar (hari jadi Kabupaten Kampar, hari jadi Prov. Riau dan HUT RI,dll)	1 Tahun
		1. Dokumentasi kegiatan pimpinan terhimpun dengan baik	12 Bulan
		2. Tersedianya Majalah Pemerintah Daerah	12 Bulan
		1. Terlaksananya peliputan dan publikasi dan dokumentasi kegiatan pimpinan	12 Bulan
		2. Tersebarinya informasi melalui baliho, spanduk	1 Tahun

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab /Kota :	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp. 4.149.376.015
		1. Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp. 548.476.147
		2. Fasilitasi Keprotokolan	Rp. 3.443.953.618
		3. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp. 156.946.250

BAGIAN ORGANISASI			
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	Terpenuhinya Kebutuhan Penataan Organisasi Kabupaten Kampar	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelayanan Publik dan Tatalaksana	40 Dokumen
		Tersedianya dokumen Kelembagaan dan Anjab	6 Dokumen
		Tersedianya Kebijakan SAKIP dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :	Penataan Organisasi	Rp. 1.155.849.584
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp. 155.210.073
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp. 165.923.000
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis jabatan	Rp. 530.887.725
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp. 145.833.400
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp. 157.995.386

BAGIAN UMUM			
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur	Terlaksananya sewa menyewa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun
		Terpenuhinya peralatan kerja	1 Tahun
		Terpenuhinya sarana bangunan kantor	1 Tahun
		Tersedianya peralatan gedung kantor	1 Tahun
		Tersedianya penerangan bangunan kantor	1 Tahun
		Tersedianya kendaraan dinas/operasional	1 Tahun
		Tersedianya secara rutin gedung/kantor	1 Tahun
		Tersedianya pemeliharaan mobil jabatan	1 Tahun
		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 Tahun

		Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	1 Tahun
		Tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun
B.	Berkembangnya sistem reward dan punishment berbasis kinerja	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	1 Tahun
		Tersedianya pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah	1 Tahun
A.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai akuntabilitas instansi pemerintah	B
B.	Meningkatkan Kualitas Manajemen Sumberdaya	Terwujudnya peralatan rumah tangga jabatan	12 Bulan
		Tercapainya Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan
		Tamu Pemda terlayani dengan baik	12 Bulan
		Terwujudnya penyediaan makan dan minum	12 Bulan
		Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan
		Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 Bulan
		Tersedianya Peralatan rumah dinas/Jabatan	12 Bulan
A.	Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana disiplin pegawai	12 Bulan
		Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi pegawai	12 Bulan
		Meningkatkan kualitas kinerja aparatur	24 Orang
		Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan
		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan
		Terlaksananya administrasi surat menyurat	12 Bulan
		Terlaksananya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan
		Terlaksananya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota :	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Rp. 688.997.720
		1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapan	Rp. 688.997.720
		Administrasi umum perangkat daerah	Rp. 2.103.148.780
		1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp. 1.121.816.460
		2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 798.179.600
		3. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 183.152.720

		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 1. Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan 2. Pengadaan kendaraan dinas operasional lapangan 3. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya 4. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp. 12.319.531.155 Rp. 1.202.735.200 Rp. 9.471.329.720 Rp. 608.788.720 Rp. 1.036.677.515
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 1.710.984.800 Rp. 1.710.984.800
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan 2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan 3. Pemeliharaan mebel 4. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 5. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya 6. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp. 11.775.055.477 Rp. 1.665.939.464 Rp. 1.779.739.820 Rp. 255.352.243 Rp. 1.446.325.670 Rp. 3.372.576.940 Rp. 3.255.121.340
		Administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah 1. Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dn wakil kepala daerah	Rp. 503.353.720 Rp. 503.353.720
		Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2. Penyediaan bahan logistik kantor 3. Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp. 9.535.618.832 Rp. 468.169.795 Rp. 5.605.064.870 Rp. 3.462.384.167
		Fasilitasi Kerumahtanggan Sekda 1. Penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah 2. Penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah 3. Penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah	Rp. 2.142.063.704 Rp. 1.512.460.664 Rp. 20.010.540 Rp. 609.592.500

		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Rp. 471.186.394
		1. Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Rp. 98.665.500
		2. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Rp. 57.896.250
		3. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp. 314.624.644
		Administrasi umum perangkat daerah	Rp. 477.722.654
		1. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 390.111.214
		2. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp. 87.611.440
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp. 11.585.222.430
		1. Penyediaan jasa surat menyurat	Rp. 227.748.600
		2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air listrik	Rp. 3.037.303.416
		3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp. 8.320.170.414

➤ **Permasalahan :**

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain :

1. Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan *Time Schedule* dari anggaran kas yang telah direncanakan, sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal;
2. Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban pada perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar;
3. Kegiatan yang dianggarkan setelah perubahan APBDP dengan waktu pelaksanaan singkat, hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan.

2. Sekretariat DPRD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Layanan Administrasi Ketatausahaan yang efektif, efisien dan akuntabel yang didukung sarana dan prasarana yang memadai dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki untuk mendapatkan produktifitas yang optimal	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dan kegiatan.	%	95.00	Triwulan I	26.00%
					Triwulan II	55.00%
					Triwulan III	75.00%
					Triwulan IV	95.00%
2	Terwujudnya peningkatan pelayanan dan pengelolaan administrasi Keuangan kepada anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya	1. Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan Tepat Waktu 2. Skor Kepuasan layanan Pimpinan dan Anggota DPRD (bobot 50%)	%	96.00	Triwulan I	35.00%
					Triwulan II	64.64%
					Triwulan III	72.43%
					Triwulan IV	96.00%
3	Meningkatkan Kafasitas DPRD dan fasilitas penyediaan Tenaga Ahli.	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan Tepat Waktu	%	90.00	Triwulan I	30.38%
					Triwulan II	54.64%
					Triwulan III	77.43%
					Triwulan IV	90.00%
4	Meningkatnya Kualitas penyebaran Informasi DPRD Kepada Masyarakat.	Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap informasi DPRD (bobot 50%)	%	85.00	Triwulan I	38.24%
					Triwulan II	47.00%
					Triwulan III	62.66%
					Triwulan IV	85.00%

Program Sekretariat DPRD

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 54,615,855,084
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Rp. 41,528,194,288
	TOTAL	Rp. 96,144,049,372

Dari kegiatan Sekretariat DPRD yang dilaksanakan secara rutin masih menemui permasalahan sehingga kegiatan Sekretariat DPRD maupun kegiatan yang berakitan dengan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kampar dapat terlaksana dengan baik. Permasalahan dan kendala yang perlu dicarikan solusinya antara lain:

1. Masih terbatasnya kemampuan Aparatur Pegawai dalam pelayanan administrasi untuk memenuhi pelayanan prima kepada Anggota Dewan;
2. Masih kurangnya tenaga yang profesional di bidang Peraturan Perundang-undangan;
3. Masih kurangnya kemampuan untuk mengelola keuangan secara komputerasi dalam mewujudkan terlaksananya pelayanan yang prima bidang keuangan;
4. Masih kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang di miliki.

Strategi yang dilakukan untuk memecahkan masalah yang di hadapi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan Aparatur Pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar dengan melakukan pelatihan melalui Diklat-diklat bidang Peraturan-undangan dan keuangan serta komputerasi;
2. Memberikan pembinaan dan motivasi kepada Pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar dalam melaksanakan tugasnya;
3. Menambahkan fasilitas sarana dan prasarana kantor;
4. Meningkatkan koordinasi dengan Unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar;
5. Meningkatkan koordinasi Internal yang baik dengan Dewan untuk mendukung kinerja DPRD Kabupaten Kampar

E. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Perjanjian Kinerja dan Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	Persentase OPD dan Desa yang menerapkan e-planning.	43,92%
		Persentase Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah.	95%
		Persentase Capaian Keberhasilan Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.	55%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Rp. 12.580.874.831
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	Rp. 3.111.614.260
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	Rp. 3.152.645.250
4.	Program Penelitian dan Pengembangan.	Rp. 685.122.263
	JUMLAH	Rp 19.530.256.604

➤ Permasalahan dan Solusi

Secara umum kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 tidak mengalami hambatan yang berarti, hal ini bisa dilihat dari realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,53%.

Adanya beberapa alternatif solusi yang dilakukan agar pencapaian target realisasi keuangan Bappeda Kabupaten Kampar lebih optimal, yaitu :

1. Merencanakan dengan optimal penganggaran tiap program dan kegiatan agar target keuangan tercapai.
2. Meningkatkan pelaksanaan anggaran secara teratur sesuai scedul yang telah direncanakan.

3. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku serta disiplin aparatur untuk mewujudkan ASN yang professional dalam menjalankan tugas.
4. Diperlukan peningkatan kinerja, disiplin dan Kerjasama seluruh aparatur baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan perencanaan pembangunan daerah.

2. Keuangan

Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022

NO	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengelolaan Perencanaan Penganggaran Daerah	1. Ranperda APBD/P Tepat waktu 2. Ranperbup Penjabaran APBD/P Tepat waktu	80 Set 80 Set
2	Meningkatnya Pelayanan penatausahaan Pengelolaan Keuangan	Persentase Layanan SP2D dan SKPP yang diselesaikan sesuai SOP	95%
3	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Pertanggungjawaban sesuai SAP	1. Persentase SKPD/PPKD menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD tepat waktu 2. Presentase Audit BPK	95% 91%
4	Meningkatnya Tertib Pengelolaan Aset Daerah	Persentase barang milik Daerah yang terinput sampai selesai pada SIPKD Barang milik daerah Persentase SDM yang memiliki kompetensi dalam mengelola Barang Milik Daerah	90 % 90 %

Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kampar Tahun 2022

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	49.527.400	APBD
2	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.454.965.811	APBD
3	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	766.196.200	APBD
4	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.391.889.282	APBD

5	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.396.640.158	APBD
6	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	984.440.500	APBD
7	Program Penataan Organisasi	41.555.200	APBD
8	Program Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	573.104.376	APBD
9	Program Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.126.289.450	APBD
10	Program Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	411.153.625	APBD
11	Program penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	387.821.032.382	APBD
12	Program Pengelolaan BMD Daerah	1.408.110.465	APBD
	JUMLAH	405.427.304.849	

Pelaksanaan kegiatan biaya APBD tahun 2022 dapat dikatakan berhasil, hal ini terlihat pada rata-rata presentase pencapaian rencana tingkat capaian seluruh kegiatan yang mencapai 96 %. Namun demikian masih dihadapkan dengan berbagai hambatan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja instansi.

➤ **Hambatan**

Dari beberapa hal yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian realisasi keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Kampar tahun anggaran 2022 yang dibawah 90% disebabkan faktor eksternal seperti Sosialisasi terhadap PPK-SKPD dan Pengurus Barang Pengguna dilaksanakan pada lokasi yang tidak sesuai dengan rencana kegiatan, penggunaan Anggaran sesuai kebutuhan serta efisiensi anggaran

➤ **Saran**

Guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut pada tahun 2022 ditempuh upaya sebagai berikut :

1. Membangun Program dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan pengelolaan keuangan sebagai penunjang bagi Pelaksanaan Pengelolaan keuangan dan Aset yang Akuntabel dan tepat sasaran;
2. Memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan

- pengelolaan administrasi aset sebagai penunjang tupoksi SKPD;
3. Peningkatan sistem pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja daerah;
 4. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima;
 5. Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal.

Berdasarkan sasaran yang ditetapkan, sesuai dengan visi, misi dan tujuan sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran, maka pencapaian akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar tahun 2022 sebesar 96%.

Perjanjian Kinerja dan Program Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah	270.587.472,871,-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota 1. Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi kepegawaian pemerintah daerah 4. Admistrasi umum perangkat daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah 6. Penyedia Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 1. Pengelolaan Pendapatan Daerah	17.460.368.051
Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pengelola Pajak Daerah	Jumlah Aparatur Pengelola Pajak Daerah	75 Orang		3.355.029.175

Dokumen perubahan pelaksanaan anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar tahun anggaran 2022 belanja daerah sebesar 23.868.248.052,- dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 adalah 22.126.774.393,-

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar tidak terlepas dari hal-hal utama yang terkait dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Untuk pemmasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dapat diidentifikasi sebagai berikut
Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD:

1. Pendapatan Asli daerah masih bertumpu pada Pajak Daerah
2. Pelaksanaan Ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak daerah masih belum optimal. Ekstensifikasi pajak daerah adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak yang belum terdaftar dan perluasan objek pajak, sedangkan intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian peningkatan penerimaan pajak dari wajib pajak yang sudah terdaftar;
3. Belum optimalnya pemetaan terhadap Potensi Pendapatan Daerah yang ada di Kabupaten Kampar;
4. Akurasi penyusunan asumsi dan perhitungan target masih harus ditingkatkan;
5. Kualitas SDM masih belum optimal baik dari segi jumlah maupun kebutuhan aparatur dalam melaksanakan TUSI. Diantaranya Belum ada sertifikasi kompetensi untuk pegawai Bapenda ;
6. Penggunaan sistem teknologi informasi harus dioptimalkan;
7. Rendahnya kegiatan sosialisasi kepada wajib pajak;
8. Belum optimalnya Pelaksanaan Pemutahiran Data PBB-P2

Dari hal-hal tersebut, maka rekomendasi dan dan catatan strategis yang dapat diambil dalam perumusan program dan kegiatan prioritas adalah sebagai berikut :

1. Terus melakukan upaya peningkatan Pendapatan asli daerah baik dari sektor pajak daerah maupun dari retribusi daerah ;
2. Akan melaksanakan kegiatan Ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak daerah secara terukur dan tepat sasaran. Sehingga Pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan.;
3. Melakukan kegiatan pemetaan potensi pajak daerah yang terintegrasi dengan menggunakan sistem informasi yang berbasis geospasial;
4. Mempertajam kalkulasi dan pemilihan asumsi-asumsi yang memperkuat kuantitas dan kualitas target pendapatan daerah;
5. Terus meningkatkan kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia aparatur pengelola pendapatan daerah agar berdaya saing bekerjasama dengan kelembagaan keuangan baik sektor pemerintahan lainnya maupun dengan sektor swasta ;
6. Terus melanjutkan inovasi inovasi penggunaan Sistem Teknologi Informasi dengan membangun Sistem/Aplikasi yang terintegrasi utamanya kepada Perangkat Daerah penghasil pajak dan retribusi daerah. Penggunaan IT ini memberika kemudahan kepada Wajib Pajak dalam menunaikan kewajiban membayar pajak;
7. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat Wajib pajak dan dunia usaha;
8. Melaksanakan kegiatan Pemutahiran Data PBB-P2 hingga tuntas dan mendapatkan output yang jelas dan terukur.

3. Kepegawaian

Perjanjian Kinerja dan Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Total Anggaran Rp.
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Berbasis Sistem Elektronik, Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Penanggulangan Pasca Bencana	PROSENTASE PEMENUHAN PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	100%	<ol style="list-style-type: none"> Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Mutasi dan Promosi ASN Pengembangan Kompetensi ASN Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pengembangan Kompetensi Teknis Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 	8.661.623.718,-
	Terpenuhinya Pelayanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%		
	Jumlah ASN penerimaan SK Penseon/ dan SK Pemberhentian	350 Formasi/Orang		
	Jumlah Data ASN yang di update	3500 Orang ASN		
	Terpenuhinya Pelayanan Mutasi dan Promosi ASN	100%		
	Jumlah ASN yang menerima SK pindah Tugas dan mutasi jabatan	500 Orang ASN		
	Jumlah ASN yang penerima SK kenaikan pangkat	2000 Orang		
	Jumlah pengisian Jabatan struktural	760 Jabatan		
	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas ASN	100%		
	Jumlah ASN Penerima bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	40Orang		
	Terpenuhinya penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%		
Jumlah ASN yang dilakukan penilaian dan evaluasi kinerja	7080 Orang			

	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	7080 ASN		
	Jumlah ASN penerima penghargaan Satya Lencana	275 ASN		
	Jumlah penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	40 ASN		
	Jumlah proses izin perceraian Pegawai	40 ASN		
	PROSENTASE PEMENUHAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	100%		
	Terpenuhinya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kopetensi Manajerial dan Fungsional	100%		
	Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan/ Latsar dan jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	86 Orang		

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SumberDayaManusia Kabupaten Kampar telah dapat mengoptimalkan penggunaan dana Tahun 2022, realisasi belanja yang terdiri dari Belanja Operasi (belanja pegawai + belanja barang dan jasa) + Belanja Modal sebesar Rp.7.980.985.286,00 atau 92,14% dari rencana anggaran sebesar Rp.8.661.623.718,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.680.638.432,00 atau 7,86%. Anggaran tersebut adalah gaji, tunjangan Pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Sedangkan uang yang telah disetor pada tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp.147.539,00 merupakan UYHD Tahun2022.

Berdasarkan hasil paparan program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Kampar Tahun 2022 sebagaimana yang telah dikemukakan pada Bab I sampai dengan Bab III diatas maka pada Bab Iv ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian fisik kegiatan 94,15%, sedangkan realisasi keuangan sebesar 92,14%. Ini berarti bahwa masih ada kegiatan yang telah ditetapkan/ direncanakan tidak dapat terlaksana dengan baik.

Selanjutnya beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022 antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya dalam pengumpulan data-data dan koordinasi internal sehingga berakibat pada kurang akuratnya dalam penetapan indikator dan sasaran kinerja terutama jangka menengah dan panjang.
2. Kurang disiplin dalam penggunaan anggaran terutama ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan.
3. Masih terdapat kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran dan tujuan kegiatan dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Selanjutnya beberapa permasalahan yang dihadapi dalam implementasi program oleh Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar antara lain:

1. SumberDaya Manusia (SDM)
Keterbatasan SDM yang dimiliki oleh BKPSDM baik segi kualitas dan kuantitas masih menjadi hambatan pada proses percepatan hasil kerja.
2. Respon Koordinasi Instansi lain masih rendah.
Selaku instansi yang mempunyai tugas pokok pelaksanaan manajemen pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kampar membutuhkan pasrtisipasi aktif dari

instansi lain dalam pelaksanaan program-program kerja terutama yang berkaitan dengan informasi data kepegawaian di masing-masing instansi.

3. Masalah sarana dan prasarana.

Sarana dan prasarana yang dimiliki BKSPDM Kabupaten Kampar saat ini masih kurang memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar.

Selanjutnya sesuai dengan hasil analisis atas capaian kinerja BKPSDM Kabupaten Kampar Tahun 2022 maka dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah untuk kemudian dijadikan sebagai masukan atau bahan evaluasi dimasa yang akan datang, yaitu sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan kecermatan dalam perencanaan terutama untuk mengantisipasi tuntutan para Pegawai Negeri Sipil dalam hal pelaksanaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kesejahteraan.
2. Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja sehingga setiap penetapan indikator kinerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat.
3. Lebih meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/ Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan.
4. Lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai sasaran dan tujuan kegiatan dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
5. Lebih meningkatkan disiplin para PNS sebagai Aparatur Sipil Negara agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada PNS Kabupaten Kampar khususnya dan masyarakat umumnya.

F. Unsur Pengawasan urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

Perjanjian Kinerja dan Program Inspektorat Kabupaten Tahun 2022

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan	Persentase OPD dengan nilai AKIP minimal Baik	80%	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.833.731.447
	Persentase OPD yang diusulkan mendapat predikat WBK/WBBM	6%	2. Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.771.980.000
	Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan	95%	3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	315.650.000
	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	90%		
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Inspektur	BB		

➤ Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dikemukakan merupakan pencapaian kegiatan fisik terlaksana 100% sedangkan realisasi keuangan secara keseluruhan 93,89%. Pada umumnya semua kegiatan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik.

Adapun yang menjadi permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Kampar :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam mengemban tugas dan pelaksanaan fungsi pengawasan, kemampuan aparatur yang ada pada Inspektorat Kabupaten Kampar masih memerlukan perhatian khusus, baik kualitas maupun kuantitas karena latar belakang Pendidikan yang berbeda sangat berpengaruh terhadap kemampuan dan cara memecahkan masalah dalam melaksanakan tugas pengawasan. Kemudian dalam pelaksanaan tugas pengawasan, personil yang ada belum seluruhnya mendapat Pendidikan dan Pelatihan teknis pengawasan, sehingga dalam pelaksanaan tugas pengawasan sangat dirasakan kelemahannya dan hasil yang diperoleh belum optimal.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam mengemban tugas dan pelaksanaan fungsi pengawasan, sarana dan prasarana yang ada pada Inspektorat Kabupaten Kampar masih memerlukan perhatian khusus, karena lokasi pengawasan pada 21 Kecamatan dan 250 Desa/Kelurahan se Kabupaten Kampar dan kondisi bangunan kantor yang kurang memadai dengan luas bangunan 431.675 M2 yang ditempati oleh 63 orang pegawai dan 15 orang THL ditambah kondisi bangunan yang sudah tua.

Sedangkan jumlah kendaraan dinas/operasional pada Inspektorat baru ada 1 unit double cabin, yang seharusnya dibutuhkan 3 unit double cabin.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi melalui :

1. Mengikutsertakan pegawai dalam berbagai diklat teknis fungsional dan structural, baik yang diadakan oleh badan Diklat Kemendagri, BPKP, Inspektorat Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten Kampar.

2. Mengadakan koordinasi/konsultasi teknis dengan berbagai aparat pengawasan (Inspektorat Provinsi Riau, BPKP, BPK dan Irjen Kemendagri) dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan
3. Melaksanakan inventarisasi permasalahan dan merumuskan rencana program kerja tahunan dengan APIP, melaksanakan pembahasan temuan hasil pemeriksaan dengan aparat pengawas sebelum temuan dituangkan dalam LHP.
4. Memberikan motivasi dan penilaian kepada pegawai dalam pelaksanaan tugas.
5. Memberikan pengertian tentang arti pentingnya pengawasan kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar melalui kegiatan sosialisasi pengawasan.
6. Meningkatkan pelaksanaan membuat dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan tepat waktu kepada pihak terkait.
7. Mengefektifkan pemantauan terhadap tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK-RI.
8. Mengadakan pemuktahiran data dan larwasda tingkat kabupaten secara rutin.
9. Menyewa sarana transportasi untuk menjangkau lokasi pengawasan.

Adanya permasalahan yang dihadapi semuanya dapat diatasi dengan mengoptimalkan kegiatan secara efektif dan efisien dalam penggunaan waktu dan dana yang tersedia.

G. Unsur Kewilayahan

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Perjanjian Kinerja dan Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	4.959.802.332
2	Meningkatkan Kerukunan Hidup Umat Beragama	Prosentase penyelesaian Konflik antar umat baragama	14 Kasus	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	616.507.770
				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3.032.042.533
				Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	526.516.275
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	946.003.907
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	3.542.968.110

Dari 6 Program. 11 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar, untuk mewujudkan capaian sasarannya sudah mencapai 98.62 %, dengan realisasi anggaran 91.59 %, yaitu dari anggaran sebesar Rp. 15,178,187,867 dan terealisasi sebesar Rp. 13,902,453,172. Dari hasil capaian di atas menunjukkan bahwa komitmen aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Tantangan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar dalam upaya meningkatkan kinerja di masa yang akan datang dengan Langkah dan upaya yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Memperkuat fungsi koordinasi, Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
2. Meningkatkan kompetensi aparatur sesuai dengan tupoksi dan keahlian sehingga pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas kerja, waktu dan efisiensi anggaran.
3. Melengkapi sarana dan prasarana pendukung, dalam rangka meminimalisasi hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
4. Meningkatkan mekanisme manajemen internal organisasi dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan evaluasi berbagai Program dan Kegiatan.

Tabel 3.1.1

Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Lokalitas sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URUSAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	URUSAN PENDIDIKAN						
		DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	297,683,576	253,133,336	85.03
				SUB KEGIATAN :			
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	202,415,730	194,487,090	96.08
				2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	95,267,846	58,646,246	61.56
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	581,419,735,090	568,508,468,363	97.78
				SUB KEGIATAN :			
				1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	581,366,353,394	568,455,086,667	97.78
				2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	38,382,165	38,382,165	100.00
				3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7,499,722	7,499,722	100.00
				4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7,499,809	7,499,809	100.00
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	218,968,700	217,315,750	99.25
				SUB KEGIATAN :			
				1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	218,968,700	217,315,750	99.25
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,613,275,891	1,507,670,067	93.45
				SUB KEGIATAN :			
				1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	64,976,900	64,875,800	99.84
				2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150,123,000	91,978,656	61.27
				3 Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	59,117,470	56,753,070	96.00
				4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20,148,950	20,148,950	100.00

				5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347,642,686	318,425,491	91.60
				6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	971,266,885	955,488,100	98.38
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,504,536,978	4,351,121,335	96.59
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	569,032,460	459,434,605	80.74
				2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	535,264,488	534,990,700	99.95
				3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,400,240,030	3,356,696,030	98.72
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249,905,729	214,168,290	85.70
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	249,905,729	214,168,290	85.70
2	URUSAN KESEHATAN							
		DINAS KESEHATAN			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	478,397,165	408,089,574	85.30
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	280,188,714	245,492,974	87.62
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25,137,210	25,080,000	99.77
				3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	49,649,266	21,293,500	42.89
				4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,424,800	9,390,000	99.63
				5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113,997,175	106,833,100	93.72
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	110,643,456,980	108,720,882,933	98.26
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	110,535,866,045	108,613,499,633	98.26
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	107,590,935	107,383,300	99.81
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24,035,070	24,034,300	100.00
					SUB KEGIATAN :			

				1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24,035,070	24,034,300	100.00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,115,181,316	1,112,228,331	99.74
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	497,838,256	495,118,780	99.45
				2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91,770,000	91,707,200	99.93
				3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16,143,060	16,142,350	100.00
				4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	509,430,000	509,260,001	99.97
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7,081,390,000	6,732,833,712	95.08
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	261,622,000	219,474,412	83.89
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6,819,768,000	6,513,359,300	95.51
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	662,578,800	644,926,205	97.34
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38,530,000	38,500,000	99.92
				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154,595,000	147,239,905	95.24
				3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	469,453,800	459,186,300	97.81
					Peningkatan Pelayanan BLUD	28,034,146,910	23,133,737,508	82.52
					SUB KEGIATAN :			
				1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	28,034,146,910	23,133,737,508	82.52
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37,955,451,841	36,191,501,410	95.35
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37,955,451,841	36,191,501,410	95.35
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,565,510,850	1,490,153,787	95.19
					SUB KEGIATAN :			
				1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	944,510,850	881,774,851	93.36

				2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	621,000,000	608,378,936	97.97
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	8,553,174,619	8,335,319,558	97.45
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,156,245,796	1,104,197,900	95.50
				2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,568,946,588	3,485,736,946	97.67
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,692,023,475	1,654,836,283	97.80
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,192,288,760	1,151,735,700	96.60
				5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	943,670,000	938,812,729	99.49
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8,204,120,044	7,881,369,280	96.07
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2,011,811,440	1,898,526,430	94.37
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6,192,308,604	5,982,842,850	96.62
					Peningkatan Pelayanan BLUD	42,176,001,839	55,340,274,724	131.21
					SUB KEGIATAN :			
				1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	42,176,001,839	55,340,274,724	131.21
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	31,212,363,624	29,442,818,544	94.33
					SUB KEGIATAN :			
				1	Pengembangan Rumah Sakit	15,576,863,184	14,628,288,656	93.91
				2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	2,837,162,000	2,778,846,000	97.94
				3	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	11,816,210,740	11,285,848,561	95.51
				4	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	336,520,000	300,321,940	89.24
				5	Pengadaan Obat, Vaksin	645,607,700	449,513,387	69.63
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,152,425,000	1,836,532,687	85.32
					SUB KEGIATAN :			
				1	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2,152,425,000	1,836,532,687	85.32
					Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	12,680,160,756	11,538,233,318	90.99
					SUB KEGIATAN :			
				1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	12,680,160,756	11,538,233,318	90.99

3	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	240,201,850	240,201,850	100.00
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	105,683,550	105,683,550	100.00
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	46,452,000	46,452,000	100.00
				3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8,160,900	8,160,900	100.00
				4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	79,905,400	79,905,400	100.00
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,146,252,539	9,930,428,993	97.87
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,069,562,339	9,874,612,785	98.06
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	76,690,200	55,816,208	72.78
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,270,833,263	1,206,510,233	94.94
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13,386,500	12,836,166	95.89
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	507,463,000	457,715,100	90.20
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107,882,000	107,687,600	99.82
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72,355,763	70,103,180	96.89
				5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29,040,000	28,996,000	99.85
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	540,706,000	529,172,187	97.87
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	572,350,000	549,924,500	96.08
					SUB KEGIATAN :			
				1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	533,500,000	514,900,000	96.51
				2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38,850,000	35,024,500	90.15
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,223,076,882	1,139,557,299	93.17
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	251,413,000	225,805,322	89.81

				2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62,500,000	54,478,355	87.17
				3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	909,163,882	859,273,622	94.51
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,221,104,026	1,123,733,992	92.03
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	129,913,026	111,865,861	86.11
				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	320,991,000	311,580,343	97.07
				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	770,200,000	700,287,788	90.92
					Penataan Organisasi	62,550,000	62,040,000	99.18
					SUB KEGIATAN :			
				1	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	62,550,000	62,040,000	99.18
4	UNSUR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140,241,973	129,334,100	92.22
					SUB KEGIATAN :			
				1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	46,560,752	46,560,000	100.00
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	22,317,279	22,316,700	100.00
				3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	17,426,900	17,426,600	100.00
				4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	26,926,410	16,020,800	59.50
				5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27,010,632	27,010,000	100.00
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,893,310,876	3,884,652,313	79.39
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,835,859,026	3,827,203,513	79.14
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14,387,166	14,386,500	100.00
				3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	43,064,684	43,062,300	99.99
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	93,603,000	70,380,000	75.19
					SUB KEGIATAN :			

				1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	66,375,000	51,000,000	76.84
				2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	27,228,000	19,380,000	71.18
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		705,869,615	645,191,093	91.40
				SUB KEGIATAN :				
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,346,325	5,346,325	100.00
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	264,309,688	255,577,688	96.70
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57,184,000	57,184,000	100.00
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23,590,602	21,315,852	90.36
				5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,400,000	5,400,000	100.00
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350,039,000	300,367,228	85.81
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		943,775,400	925,068,072	98.02
				SUB KEGIATAN :				
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46,728,000	42,164,320	90.23
				2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27,967,400	27,888,752	99.72
				3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	869,080,000	855,015,000	98.38
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		578,082,152	564,343,440	97.62
				SUB KEGIATAN :				
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	110,440,000	107,987,960	97.78
				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	147,254,452	136,256,480	92.53
				3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	320,387,700	320,099,000	99.91
5	PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN UMUM, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					35.616.509.538	34.439.852.043	96,70
				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		14.191.503.849	13.959.835.170	98,37

				I	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.499.523	3.499.523	100,00
					SUB KEGIATAN :			
				1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.499.523	3.499.523	100,00
				II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.769.100.574	3.633.362.736	96,40
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	3.765.601.051	3.629.863.213	96,40
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.499.523	3.499.523	100,00
				III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.192.793.666	1.158.176.668	97,10
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.603.200	13.603.200	100,00
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	416.136.572	391.446.534	94,07
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	308.719.350	308.719.350	100,00
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.520.544	15.520.544	100,00
				5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.480.000	12.936.000	70,00
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	420.334.000	415.951.040	98,96
				IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.538.517.404	8.516.101.145	99,74
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.346.800	24.946.000	82,20
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.508.170.604	8.491.155.145	99,80
				V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	687.592.682	648.695.098	94,34
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99.225.078	98.840.000	99,61
				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	468.580.604	430.485.837	91,87
				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.279.000	22.279.000	100,00

				4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	97.508.000	97.090.261	99,57
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				9.066.543.331	8.348.215.930	92,08
				I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.487.974	71.487.974	100,00
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.136.474	22.136.474	100,00
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	28.797.750	28.797.750	100,00
				3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.885.900	6.885.900	100,00
				4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.885.900	6.885.900	100,00
				5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.781.950	6.781.950	100,00
				II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.193.356.883	3.037.291.598	95,11
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.013.653.502	3.696.378.548	92,10
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.203.300	1.203.300	100,00
				III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.263.505.772	1.143.873.241	90,53
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	55.157.100	55.147.500	99,98
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	563.531.231	541.086.491	96,02
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.584.120	100.376.640	99,79
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.300.321	24.300.321	100,00
				5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	519.933.000	422.962.289	81,35
				IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	685.000.000	640.000.000	93,43
					SUB KEGIATAN :			
				1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	685.000.000	640.000.000	93,43
				V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.047.440.048	1.878.129.882	91,73
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.411.000	74.035.353	61,49

				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.927.029.048	1.804.094.529	93,62
				VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	984.252.735	917.142.985	93,18
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	445.491.200	381.342.700	85,60
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.882.425	43.821.175	95,51
				3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	492.879.110	491.979.110	99,82
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				12.358.462.358	12.131.800.943	98,17
				I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	233.871.400	216.366.000	92,51
					SUB KEGIATAN :			
				1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	233.871.400	216.366.000	92,51
				II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.193.356.883	3.037.291.598	95,11
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.183.204.883	3.027.561.598	95,11
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000	4.000.000	100,00
				3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.152.000	5.730.000	93,14
				III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	383.660.967	370.030.500	96,45
					SUB KEGIATAN :			
				1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	369.047.250	365.720.500	99,10
				2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14.613.717	4.310.000	29,49
				IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	835.930.994	834.428.736	99,82
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.480.960	4.050.000	90,38
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.102.074	98.082.977	99,98
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	448.396.266	448.102.500	99,93
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.957.694	54.957.023	100,00
				5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.990.000	9.988.500	99,98

					6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.004.000	219.247.736	99,66
				V		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.063.750.164	7.031.010.409	99,54
						SUB KEGIATAN :			
					1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.430.000	5.430.000	100,00
					2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.460.000	66.357.906	85,67
					3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.980.860.164	6.959.222.503	99,69
				VI		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	647.891.950	642.673.700	99,19
						SUB KEGIATAN :			
					1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98.039.400	92.916.200	94,77
					2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	531.628.200	531.627.500	100,00
					3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.224.350	18.130.000	99,48
6	PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					DINAS SOSIAL	6.995.705.996	6.727.531.697	96,17
				I		Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	451.896.507	431.752.400	95,54
						SUB KEGIATAN :			
					1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	412.200.744	395.510.900	95,95
					2	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.397.843	12.421.000	80,67
					3	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.858.320	3.854.000	99,89
					4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.728.740	2.428.500	89,00
					5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.857.740	4.857.000	99,98
					6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.853.120	12.681.000	98,66
				II		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.477.461.098	3.423.223.284	98,44
						SUB KEGIATAN :			
					1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	3.463.805.578	3.409.721.284	98,44
					2	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.655.520	13.502.000	98,88

				III	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	760.843.036	700.870.022	92,12
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	378.287.716	370.476.650	97,94
				2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.410.000	31.410.000	100,00
				3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.774.320	38.720.000	99,86
				4	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	13.716.000	10.404.000	75,85
				5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	298.655.000	249.859.372	83,66
				IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	630.050.500	581.500.000	92,29
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	550.000.000	502.100.000	91,29
				2	Pengadaan Mebel	80.050.500	79.400.000	99,19
				V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.044.210.000	1.008.475.208	96,58
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	138.290.000	114.010.208	82,44
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	905.920.000	894.465.000	98,74
				VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	631.244.855	581.710.783	92,15
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.737.000	70.040.990	77,19
				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	155.318.530	128.228.550	82,56
				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.448.825	15.350.000	99,36
				4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	369.740.500	368.091.243	99,55
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					7,098,555,241	6,807,015,284	95,89

		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,030,150,279	3,946,316,156	97.92
				SUB KEGIATANMELIPUTI:			
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,030,150,279	3,946,316,156	97.92
			II	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13,500,000	-	0.00
				SUB KEGIATANMELIPUTI:			
			1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13,500,000	-	0.00
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,057,107,216	983,761,386	93.06
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,458,021	2,458,021	100.00
			2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	332,858,715	319,307,115	95.93
			3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84,008,600	80,833,000	96.22
			4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23,805,380	23,799,080	99.97
			5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	38,533,500	38,533,500	100.00
			6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	575,443,000	518,830,670	90.16
			IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	233,822,300	224,579,200	96.05
				SUB KEGIATANMELIPUTI:			
			1	Pengadaan Mebel	55,784,300	54,713,000	98.08
			2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	178,038,000	169,866,200	95.41
			V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,238,580,871	1,168,270,711	94.32
				SUB KEGIATANMELIPUTI:			
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95,777,865	94,731,565	98.91
			2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,142,803,006	1,073,539,146	93.94
			VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	525,394,575	484,087,831	92.14
				SUB KEGIATANMELIPUTI:			
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39,468,358	37,718,384	95.57

				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175,738,789	137,170,519	78.05
				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,143,028	30,143,028	100.00
				4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	280,044,400	279,055,900	99.65
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					3,675,883,212	3,561,482,292	96.89
		DINAS KETAHANAN PANGAN	I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		72,122,383	69,842,383	96.84
				SUB KEGIATAN MELIPUTI:				
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	68,067,908	65,787,908	96.65
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,054,475	4,054,475	100.00
			II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2,721,399,616	2,660,060,206	97.75
				SUB KEGIATAN MELIPUTI:				
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,718,020,880	2,656,681,470	97.74
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,378,736	3,378,736	100.00
			III	Administrasi Umum Perangkat Daerah		433,274,735	406,624,325	93.85
				SUB KEGIATAN MELIPUTI:				
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,292,600	7,292,600	100.00
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198,416,395	197,841,315	99.71
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26,330,000	25,404,800	96.49
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19,639,740	19,639,740	100.00
				5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19,764,000	19,710,000	99.73
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161,832,000	136,735,870	84.49
			IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		365,433,840	358,458,840	98.09
				SUB KEGIATAN MELIPUTI:				

				1	Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19,800,000	19,800,000	100.00
				2	PenyediaanJasaPelayananUmumKantor	345,633,840	338,658,840	97.98
				V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83,652,638	66,496,538	79.49
					SUB KEGIATANMELIPUTI:			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37,676,915	24,138,565	64.07
				2	PenyediaanJasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29,942,973	26,325,223	87.92
				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16,032,750	16,032,750	100.00
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					16,055,788,155	15,874,580,776	98.87
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	I		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	168,245,096	166,611,064	99.03
					SUB KEGIATAN MELIPUTI:			
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	117,263,344	116,682,000	99.50
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,483,344	3,482,000	99.96
				3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,470,016	3,470,016	100.00
				4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4,833,344	4,832,000	99.97
				5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4,820,016	4,820,016	100.00
				6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,887,516	12,887,516	100.00
				II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,653,492,684	4,591,326,930	98.66
					SUB KEGIATANMELIPUTI:			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,642,429,340	4,580,263,586	98.66
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11,063,344	11,063,344	100.00
				III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	570,145,575	557,970,480	97.86
					SUB KEGIATANMELIPUTI:			

				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,970,990	3,970,990	100.00
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116,474,845	113,094,775	97.10
				3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11,080,970	11,080,970	100.00
				4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40,504,200	40,385,000	99.71
				5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24,523,570	23,923,570	97.55
				6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,400,000	3,105,000	57.50
				7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	368,191,000	362,410,175	98.43
			IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		10,510,051,200	10,436,101,297	99.30
				SUB.KEGIATANMELIPUTI:				
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139,447,900	136,981,567	98.23
				2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,059,300	6,059,300	100.00
				3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10,364,544,000	10,293,060,430	99.31
			V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		153,853,600	122,571,005	79.67
				SUB KEGIATANMELIPUTI:				
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	153,853,600	122,571,005	79.67
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL					9,498,890,110	8,894,573,004	93.64
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		58,177,540	48,274,063	82.98
				SUB KEGIATANMELIPUTI:				
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40,474,120	30,690,763	75.83
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,492,090	3,371,970	96.56
				3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,406,970	3,406,970	100.00
				4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,406,970	3,406,970	100.00
				5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3,476,970	3,476,970	100.00

				6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,920,420	3,920,420	100.00
				II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,251,584,823	2,882,599,205	88.65
					SUB KEGIATAN MELIPUTI:			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,251,584,823	2,882,599,205	88.65
				III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,753,604,399	3,573,472,852	95.20
					SUB KEGIATAN MELIPUTI:			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13,771,244	13,769,622	99.99
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,184,482,325	3,005,436,025	94.38
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19,412,000	19,407,000	99.97
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	204,356,830	204,345,385	99.99
				5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	331,582,000	330,514,820	99.68
				IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,962,054,316	1,934,554,212	98.60
					SUB KEGIATAN MELIPUTI:			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	462,785,200	457,373,201	98.83
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,499,269,116	1,477,181,011	98.53
				V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	473,469,032	455,672,672	96.24
					SUB KEGIATAN MELIPUTI:			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	217,788,569	201,951,122	92.73
				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86,180,463	84,227,550	97.73
				3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	169,500,000	169,494,000	100.00
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN			I	PROGRAM PENATAAN DESA	143.568.300	131.319.940	91.47
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA	143.568.300	131.319.940	91.47

					SUB KEGIATANMELIPUTI:			
				1.	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	143.568.300	131.319.940	91,47
				II	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	133.694.470	101.000.008	75,55
					KEGIATAN KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA	133.694.470	101.000.008	75,55
					SUB KEGIATANMELIPUTI:			
				1.	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	61.958.470	45.452.308	73,36
				2.	Fasilitasi Pembangunan Kawasan	71.736.000	55.547.700	77,43
				III	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.144.688.872	1.055.530.205	92,21
					KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.144.688.872	1.055.530.205	92,21
					SUB KEGIATANMELIPUTI:			
				1.	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	106.940.600	106.940.000	100,00
				2.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	74.544.760	74.275.200	99,64
				3.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	357.636.674	309.472.500	86,53
				4.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	243.874.234	238.621.045	97,85
				5.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	124.684.944	101.803.060	81,65
				6.	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	37.076.250	36.441.000	98,29
				7.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	199.931.410	187.977.400	94,02
				IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	357.096.204	307.476.160	86,10
					KEGIATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	357.096.204	307.476.160	86,10

					SUB KEGIATANMELIPUTI:			
				1.	Fasilitasi Penataan, Pembeerdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	64.277.400	45.496.600	70,78
				2.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	82.862.260	79.186.900	95,56
				3.	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum	189.294.769	175.616.160	92,77
				4.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	20.661.775	7.176.500	34,73
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.332.034.897	10.759.300.501	94,95
		DINASPERHUBUNGAN			KEGIATANMELIPUTI:			
					PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	180.311.610	180.196.000	99,94
				1.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	144.704.860	144.621.000	99,94
				2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.606.750	35.575.000	99,91
					ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.856.406.077	4.313.632.945	88,82
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :			
				1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.833.936.057	4.291.232.945	88,77
				2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.470.020	22.400.000	99,69
					ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	49.064.000	48.858.102	99,58
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :			

				1.	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	49.064.000	48.858.102	99,58
					ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.326.421.511	1.323.183.535	99,76
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :			
				1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.315.960	14.200.000	99,19
				2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	219.497.256	218.907.700	99,73
				3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	186.590.500	186.557.500	99,98
				4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	247.940.795	247.741.250	99,92
				5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.375.000	26.000.000	85,74
				6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	631.702.000	629.777.085	85,74
					PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.101.760.000	1.089.249.000	98,86
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :			
				1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	443.100.000	441.800.000	99,71
				2.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	630.660.000	619.449.000	98,22
				3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.000.000	28.000.000	100,00
					PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.983.817.580	2.975.262.919	99,71
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :			
				1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	508.830.080	508.330.794	99,90
				2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.474.987.500	2.466.932.125	99,67
					PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	834.254.119	828.918.000	99,36
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :			
				1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	112.793.493	112.400.000	99,65
				2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	218.306.976	218.200.000	99,95

					3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	425.381.450	420.678.000	98,89
					4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	77.772.200	77.640.000	99,83
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		7.934.744.587	7.683.306.467	96,83
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN			KEGIATAN MELIPUTI:				
					PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		227.289.500	226.656.992	99,72
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :				
					1.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	78,000,000	78,000,000	100,00
					2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	42,200,000	42,200,000	100,00
					ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		4.101.007.522	3.962.963.349	96,63
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :				
					1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.097.057.412	3.959.013.239	96,63
					2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.950.110	3.950.110	100,00
					ADMISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		1.866.277.837	1.849.507.333	99,10
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :				
					1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.372.620	13.372.620	100,00
					2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	652.517.369	647.705.579	99,26
					3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	239.213.310	239.188.110	99,99
					4.	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	158.130.538	158.130.488	100,00
					5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.512.000	28.500.000	99,96
					6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	774.532.000	762.610.536	98,46
					PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1.246.491.500	1.184.540.574	95,03
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :				
					1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.281.500	188.958.074	75,50

				2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	996.210.000	995.582.500	99,94
					PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	493.678.228	459.638.219	93,10
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :			
				1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	162.921.600	157.492.350	96,67
				2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	257.958.200	229.489.650	88,96
				3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.798.428	72.656.219	99,80
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.494.250.966	10.621.639.732	92,41
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			SUB KEGIATANMELIPUTI :			
					PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	119.475.733	113.006.900	94,59
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :			
				1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	85.678.226	79.500.000	92,79
				2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	33.797.507	33.506.900	99,14
					ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.746.079.590	5.352.691.760	93,15
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :			
				1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.728.831.377	5.335.509.060	93,13
				2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.248.213	17.182.700	99,62
					ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	68.732.000	56.611.604	82,37
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :			
				1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	16.500.000	12.500.000	75,76
				2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	52.232.000	44.111.604	84,45
					ADMISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.325.712.141	969.856.713	73,16
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :			

					1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.783.500	21.434.771	71,97
					2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175.586.320	160.432.750	91,37
					3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	183.689.436	160.326.370	87,28
					4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	372.061.885	216.135.000	58,09
					5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.240.000	9.240.000	100,00
					6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	555.351.000	402.287.822	72,44
						PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.039.326.000	1.005.163.500	96,71
						SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :			
					1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	663.448.000	641.349.500	96,67
					2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	147.948.000	137.891.800	93,20
					3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.500.000	16.500.000	100,00
					4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	211.430.000	209.422.200	99,05
						PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.953.531.672	1.922.293.214	98,40
						SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :			
					1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	182.838.800	173.002.654	94,62
					2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.770.692.872	1.749.290.560	98,79
						PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN MILIK DAERAH	1.241.393.830	1.202.016.041	96,83
						SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :			
					1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	168.879.800	138.930.180	82,27
					2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.190.850	38.610.500	96,07
					3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	979.999.180	973.826.861	99,37

					4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	52.324.000	50.648.500	96,80
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			I	PROGRAM PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		6.437.176.384,00	6.236.514.226,00	96,88
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		27.752.651,00	27.752.651,00	100,00
					SUB KEGIATAN :				
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4.999.256,00	4.999.256,00	100,00
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		6.495.987,00	6.495.987,00	100,00
				3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD		4.373.696,00	4.373.696,00	100,00
				4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		4.497.266,00	4.497.266,00	100,00
				5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD		2.597.086,00	2.597.086,00	100,00
				6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4.789.360,00	4.789.360,00	100,00
					Administrasi Keuangan Daerah		3.481.143.645,00	3.313.271.088,00	95,18
					SUB KEGIATAN :				
				1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN		3.478.874.179,00	3.311.001.622,00	95,17
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2.269.466,00	2.269.466,00	100,00
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
					SUB KEGIATAN :				
				1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		434.843.572,00	433.075.417,00	99,59
					SUB KEGIATAN :				
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		4.237.600,00	4.237.600,00	100,00
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		143.545.836,00	143.536.836,00	99,99
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		23.050.000,00	23.050.000,00	100,00
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		12.644.136,00	12.644.136,00	100,00
				5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		8.046.000,00	8.046.000,00	100,00
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		243.320.000,00	241.560.845,00	99,28

					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	435.321.050,00	434.671.100,00	99,85
					SUB KEGIATAN :			
				1	Pengadaan Mebel	55.901.050,00	55.801.050,00	99,82
				2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	379.420.000,00	378.870.050,00	99,86
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.051.315.544,00	1.041.744.956,00	99,09
					KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	152.994.800,00	144.696.190,00	94,58
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	898.320.744,00	897.048.766,00	99,86
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	314.002.565,00	312.067.515,00	99,38
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.886.515,00	104.647.515,00	98,83
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.624.050,00	7.618.000,00	99,92
				3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.492.000,00	199.802.000,00	99,66
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN		I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	7.081.540.182	6.596.393.374	93,15
					SUB KEGIATAN :			
				1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	141.193.984	141.043.984	99,89
				2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.013.475.543	3.985.690.826	99,31
				3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.204.548	1.204.548	100,00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	449.388.605	397.165.418	88,38
					SUB KEGIATAN :			
				1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.802.650	6.018.650	88,48
				2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.117.208	38.088.046	97,37
				3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.313.478,00	7.313.478,00	100,00

				4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.040.000	2.040.000	100,00
				5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.641.269	5.641.269	100,00
				6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.140.000	9.360.000	71,23
				7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375.334.000	328.703.975	87,58
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.456.958.001	1.425.255.714	97,82
				SUB KEGIATAN :				
				1.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	168.534.000	163.788.288	97,18
				2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.665.890.088,00	1.614.649.922,00	96,92
				Pemeliharaan Barqang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				SUB KEGIATAN :				
				1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	151.878.001,00	124.547.714,00	82,01
				2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.880.000	3.500.000	59,52
				3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prsarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	1.299.200.000	1.297.208.000	99,85
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		1.947.349.216	1.492.170.556	76,63
				1.	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	51.231.611	51.191.611	99,92
				2.	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1.896.117.605	1.440.978.945	76,00
				Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/Kota		111.462.294	109.412.294	95,22
				1.	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	111.462.294	109.412.294	95,22
				Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		4.086.132.518	3.619.508.192	88,58
				1.	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	4.038.697.657	3.579.692.931	88,63
				2.	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	47.434.861,00	39.815.261,00	83,94
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		1.212.124.704	1.087.253.723	89,70

					Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	756.000.000	700.646.111	92,68
					Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	367.804.650	298.557.910	81,17
					Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	88.320.054	88.049.702	99,69
					Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2.229.731.762	2.107.795.900	94,53
				1.	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2.229.731.762	2.107.795.900	94,53
					Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	60.308.524	54.618.524	90,57
				1.	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	60.308.524,00	54.618.524,00	90,57
					Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	834.143.392	793.912.710	95,18
				1.	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	270.497.053	235.527.486	87,07
				2.	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	563.646.339	558.385.224	99,07
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA			
		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	102.033.300	99.689.100	97,70
					SUB KEGIATAN :			
				1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	102.033.300	99.689.100	97,70
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
					SUB KEGIATAN :			
				1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.004.559.134	2.962.144.565	98,59
				2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.653.300	10.653.300	100,00
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	47.000.000	47.000.000	100,00

				1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	47.000.000	47.000.000	100,00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	805.097.802	804.664.207	99,95
				1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.811.786	7.811.786	100,00
				2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.289.922	87.141.702	99,83
				3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	101.027.950	100.945.710	99,92
				4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	131.314.023	131.208.883	99,92
				5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	46.332.000	46.332.000	100,00
				6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	431.322.121	431.224.126	99,98
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	994.590.895	910.248.889	91,52
					SUB KEGIATAN :			
				1.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	56.210.595	44.690.588	79,51
				2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	938.380.300	865.558.301	92,24
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	287.650.443	262.805.400	91,36
					SUB KEGIATAN :			
				1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	133.715.565	133.026.600	99,48
				2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.784.878	129.778.800	97,74
				3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.150.000	21.110.000	99,81
					Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-	-
					Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	-
					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.845.147.159	1.835.032.459	99,45
				1.	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	524.897.808	516.402.808	98,38
				2.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.320.249.351	1.318.629.651	99,88

					Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya tarik Destinasi dan Kawaswan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.606.553.512	1.599.743.512	99,58
				1.	Penguatan Promosi melalui media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1.606.553.512	1.599.743.512	99,58
					Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	537.236.609	536.436.609	99,85
				1.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	463.896.769	463.096.769	99,83
				2.	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	73.339.840	73.339.840	100,00
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.235.205	2.235.205	100,00
		DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA			SUB KEGIATAN :			
				1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.235.205	2.235.205	100,00
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.238.685.739	15.265.566.782	94,01
					SUB KEGIATAN :			
				1.	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	16.236.450.534	15.263.331.577	94,01
				2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.235.205	2.235.205	100,00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.478.178.277	1.382.615.018	93,54
					SUB KEGIATAN :			
				1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.152.256	13.152.256	100,00
				2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	262.872.923	255.509.166	97,20
				3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	208.176.660	208.171.650	100,00
				4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	144.273.438	143.124.831	99,20
				5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37.800.000	37.800.000	100,00
				6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	811.903.000	724.857.115	89,28
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.648.735.290	1.614.874.558	97,95
					SUB KEGIATAN :			
				1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.323.750	58.437.188	75,57
				2.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.261.540	6.224.870	99,41

				3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.565.150.000	1.550.212.500	99,05
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.571.800	54.304.800	85,42
					SUB KEGIATAN :			
				1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.330.800	29.652.800	91,72
				2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.241.000	24.652.000	78,91
					Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	865.253.190	614.617.840	71,03
				1.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	435.173.210	193.177.110	44,39
				2.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	430.079.980	421.440.730	97,99
					Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	-
					Pembangunan Prasarana Pertanian	4.960.364.139	4.852.038.679	97,82
				1.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	68.026.698	63.246.698	92,97
				2.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	848.077.198	844.097.948	99,53
				3.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	4.044.260.243	3.944.694.033	97,54
					Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	261.773.344	215.336.317	82,26
				1.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	261.773.344	215.336.317	82,26
					Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	389.351.174	334.199.469	85,83
				1.	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	389.351.174	334.199.469	85,83
					Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.572.770.891	1.377.445.471	87,58
				1.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	848.326.295	767.492.295	90,47
				2.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	724.444.596	609.953.176	84,20
		DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	264.545.178	248.429.969	93,91

					SUB KEGIATAN :			
				1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	248.278.578	232.163.369	93,51
				2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.266.600	16.266.600	100,00
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.749.676.801	6.702.007.926	99,29
					SUB KEGIATAN :			
				1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.749.676.801	6.702.007.926	99,29
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	763.470.928	749.200.893	98,13
					SUB KEGIATAN :			
				1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.892.550	12.892.550	100,00
				2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	377.250.123	377.022.900	99,94
				3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.140.000	74.140.000	100,00
				4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.004.255	53.004.236	100,00
				5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	76.768.000	75.508.000	98,36
				6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.416.000	156.633.207	92,45
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	472.230.000	445.800.000	94,40
					SUB KEGIATAN :			
				1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	472.230.000	445.800.000	94,40
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.150.578.904	1.078.215.880	93,71
					SUB KEGIATAN :			
				1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	169.981.100,00	112.643.356,00	66,27
				2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	980.597.804,00	965.572.524,00	98,47
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	420.299.350	409.028.865	97,32
					SUB KEGIATAN :			
				1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	221.425.000,00	211.754.515,00	95,63
				2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.454.350,00	27.454.350,00	100,00
				3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	171.420.000,00	169.820.000,00	99,07

					Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.983.555.781	1.961.885.823	98,91
				1.	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	337.515.885,00	330.849.523,00	98,02
				2.	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1.646.039.896	1.631.036.300	99,09
					Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam daerah Kabupaten/Kota	49.405.883	45.597.883	92,29
				1.	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	49.405.883	45.597.883	92,29
					Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan hijauan Pakan ternak Dalam daerah Kabupaten/Kota	1.398.615.199	1.389.642.899	99,36
				1.	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	1.398.615.199	1.389.642.899	99,36
					Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
					Pengembangan Prasarana Pertanian	261.687.279	252.969.599	96,67
				1.	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana Kawasan dan Komoditas Perkebunan	261.687.279	252.969.599	96,67
					Pembangunan Prasarana Pertanian	4.003.708.283	3.983.312.927	99,49
				1.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3.703.708.342	3.684.833.986	99,49
				2.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	299.999.941	298.478.941	99,49
					Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	596.169.462	577.421.304	96,86
				1.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	234.921.993	229.420.201	97,66
				2.	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	361.247.469	348.001.103	96,33
					Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	55.784.800	55.754.800	99,95
				1.	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	55.784.800	55.754.800	99,95
					Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	142.143.650	127.851.650	89,95
				1.	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	142.143.650	127.851.650	89,95
					Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	77.079.243	75.729.243	98,25

				1.	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	77.079.243	75.729.243	98,25
				Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		126.530.208	124.548.628	98,43
				1.	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	126.530.208	124.548.628	98,43
				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		582.100.673	580.707.865	99,78
				1.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	524.625.065	523.467.065	99,78
				2.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	57.475.608	57.240.800	99,59
	URUSAN PERDAGANGAN							
19		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		234,394,417	234,393,934	100.00
				SUB KEGIATAN :				
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	216,190,485	216,190,005	100.00
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18,203,932	18,203,929	100.00
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3,838,104,576	3,820,035,602	99.53
				SUB KEGIATAN :				
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,831,894,086	3,813,825,112	99.53
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6,210,490	6,210,490	100.00
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		1,355,788,745	1,341,989,296	98.98
				SUB KEGIATAN :				
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	217,793,103	208,097,103	95.55
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	491,361,447	488,653,225	99.45
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	89,244,500	89,244,500	100.00
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	189,804,730	189,796,275	100.00
				5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8,310,000	8,310,000	100.00
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	359,274,965	357,888,193	99.61
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1,571,683,414	1,493,962,688	95.05

				5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3,632,180	3,630,500	99.95
				6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,527,800	8,527,800	100.00
				7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96,710,695	83,938,395	86.79
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,690,188,844	3,536,964,026	95.85
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,679,912,844	3,526,688,026	95.84
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7,513,000	7,513,000	100.00
				3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2,763,000	2,763,000	100.00
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5,000,000	5,000,000	100.00
					SUB KEGIATAN :			
				1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5,000,000	5,000,000	100.00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	732,078,738	612,190,905	83.62
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,650,400	3,649,000	99.96
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76,486,268	76,285,000	99.74
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78,446,510	77,913,000	99.32
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29,291,560	29,291,200	100.00
				5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,920,000	10,878,000	99.62
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	533,284,000	414,174,705	77.66
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	613,276,796	605,701,900	98.76
					SUB KEGIATAN :			
				1	Pengadaan Mebel	178,027,164	177,401,000	99.65
				2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	435,249,632	428,300,900	98.40

				4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	53,570,423	53,570,423	100.00
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1,397,948,936	1,157,761,788	82.82
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	103,820,928	93,742,728	90.29
				2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,294,128,008	1,064,019,060	82.22
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,227,044,248	1,179,742,638	96.15
					SUB KEGIATAN :			
				1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	132,101,700	129,033,700	97.68
				2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	688,997,720	684,151,310	99.30
				3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	22,447,540	22,447,540	100.00
				4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	383,497,288	344,110,088	89.73
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	17,058,275,852	16,364,259,579	95.93
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,177,201,420	1,174,036,300	99.73
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,066,204,600	1,050,744,700	98.55
				3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	517,398,795	506,549,660	97.90
				4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8,944,177,498	8,944,073,304	100.00
				5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	609,878,474	607,510,025	99.61
				6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	119,422,880	82,884,118	69.40
				7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	266,322,720	263,321,959	98.87
				8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4,357,669,465	3,735,139,513	85.71
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13,637,029,355	13,491,634,291	98.93
					SUB KEGIATAN :			
				1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,152,735,200	1,138,835,200	98.79
				2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9,615,329,720	9,511,436,719	98.92

				3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,461,586,920	1,439,165,820	98.47
				4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,407,377,515	1,402,196,552	99.63
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13,656,988,884	12,735,167,890	93.25
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	409,748,050	409,548,050	99.95
				2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,146,457,397	3,089,022,226	98.17
				3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,763,984,800	1,752,929,640	99.37
				4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8,336,798,637	7,483,667,974	89.77
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16,476,963,482	16,231,906,424	98.51
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,601,251,214	1,542,641,664	96.34
				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2,722,670,260	2,664,603,465	97.87
				3	Pemeliharaan Mebel	334,970,058	334,102,214	99.74
				4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,653,045,670	1,638,271,660	99.11
				5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4,542,282,440	4,509,068,881	99.27
				6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5,622,743,840	5,543,218,540	98.59
					Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,277,805,588	1,071,900,520	83.89
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	174,451,868	34,354,500	19.69
				2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	503,353,720	497,546,020	98.85

				3	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600,000,000	540,000,000	90.00
				Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		2,142,063,704	2,121,985,914	99.06
				SUB KEGIATAN :				
				1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1,512,460,664	1,512,419,664	100.00
				2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	20,010,540	0	0.00
				3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	609,592,500	609,566,250	100.00
	URUSAN SEKRETARIAT DPRD							
22		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		88,032,000	84,852,000	96.39
				SUB KEGIATAN :				
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23,772,000	23,772,000	100.00
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15,270,000	15,270,000	100.00
				3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15,270,000	15,270,000	100.00
				4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15,270,000	15,270,000	100.00
				5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	15,270,000	15,270,000	100.00
				6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,180,000	0	0.00
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4,621,969,052	4,333,900,256	93.77
				SUB KEGIATAN :				
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,610,692,202	4,322,704,256	93.75
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11,276,850	11,196,000	99.28
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2,427,728,500	2,165,001,419	89.18
				SUB KEGIATAN :				
				1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	389,942,500	388,454,000	99.62
				2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2,037,786,000	1,776,547,419	87.18

					Administrasi Umum Perangkat Daerah	4,224,725,585	4,017,148,167	95.09
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49,578,000	41,315,000	83.33
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,120,915,690	3,065,119,240	98.21
				3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12,288,000	12,288,000	100.00
				4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71,250,000	35,000,000	49.12
				5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	970,693,895	863,425,927	88.95
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	516,035,500	482,495,000	93.50
					SUB KEGIATAN :			
				1	Pengadaan Mebel	487,435,500	482,495,000	98.99
				2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28,600,000	0	0.00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,857,380,892	2,756,494,402	96.47
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000	10,000,000	100.00
				2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600,990,780	542,742,315	90.31
				3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	189,989,677	187,792,000	98.84
				4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,056,400,435	2,015,960,087	98.03
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,388,854,300	4,041,981,180	92.10
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	263,000,000	182,543,277	69.41
				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	843,222,000	627,035,349	74.36
				3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,898,128,300	2,855,273,100	98.52

				1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	198,668,500	196,759,400	99.04
				2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22,125,000	17,000,000	76.84
				3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	149,833,630	149,833,630	100.00
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		3,666,278,515	3,651,224,916	99.59
				SUB KEGIATAN :				
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	163,339,387	163,339,387	100.00
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,966,210,623	1,953,286,605	99.34
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	267,590,000	267,590,000	100.00
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	204,479,505	204,335,967	99.93
				5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	64,800,000	64,320,000	99.26
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	999,859,000	998,352,957	99.85
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,086,217,120	1,027,755,365	94.62
				SUB KEGIATAN :				
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106,500,000	105,870,145	99.41
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	979,717,120	921,885,220	94.10
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,926,985,750	1,905,603,673	98.89
				SUB KEGIATAN :				
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	280,485,000	268,008,923	95.55
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	198,352,750	198,352,750	100.00
				3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,448,148,000	1,439,242,000	99.39
	KEUANGAN							
24		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		49,527,400	38,225,400	77.18
				SUB KEGIATANMELIPUTI:				
				1	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi	49,527,400.00	38,225,400.00	77.18

					Kinerja SKPD			
					KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8,454,965,811	7,913,385,454	93.59
					SUB KEGIATANMELIPUTI:			
				1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	8,445,799,577	7,904,415,570	93.59
				2	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9,166,234	8,969,884	97.86
					KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2,391,889,282	2,185,525,420	91.37
					SUB KEGIATANMELIPUTI:			
				1	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	1,167,752,412	1,146,144,120	98.15
				2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	199,480,000	199,480,000	100.00
				3	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	189,100,870	175,041,839	92.57
				4	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	12,510,000	12,402,000	99.14
				5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	823,046,000	652,457,461	79.27
					KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1,396,640,158	1,259,657,287	90.19
					SUB KEGIATANMELIPUTI:			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	264,369,000	228,507,074	86.43
				2	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	208,640,050	198,031,480	94.92
				3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	923,631,108	833,118,733	90.20
					KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	984,440,500	913,793,132	92.82
					SUB KEGIATANMELIPUTI:			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	276,210,500	222,994,132	80.73
				2	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	708,230,000	690,799,000	97.54
					KEGIATAN PENATAAN ORGANISASI	41,555,200	41,405,200	99.64
					SUB KEGIATANMELIPUTI			
				1	Monitoring, Evaluasi Dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	41,555,200	41,405,200	99.64

					KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	573,104,376	488,173,478	85.18
					SUB KEGIATANMELIPUTI			
				1	Koordinasi Dan Penyusunan KUA dan PPAS	61,545,660	47,094,910	76.52
				2	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan KUA Dan Perubahan PPAS	61,545,660	48,029,261	78.04
				3	Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	201,253,798	184,698,388	91.77
				4	Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	227,127,898	195,704,619	86.16
				5	Koordinasi Dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	21,631,360	12,646,300	58.46
					KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	1,126,289,450	1,018,886,859	90.46
					SUB KEGIATANMELIPUTI			
				1	Koordinasi Dan Pengelolaan Kas Daerah	503,571,780	483,067,780	95.93
				2	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, Dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan Dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	161,573,380	119,407,430	73.90
				3	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	461,144,290	416,411,649	90.30
					KEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	411,153,625	399,744,875	97.23
					SUB KEGIATANMELIPUTI			
				1	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan Dan Semesteran	94,274,750	93,875,750	99.58
				2	Koordinasi Dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	316,878,875	305,869,125	96.53
					KEGIATAN PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	387,821,032,382	380,463,764,290	98.10

					SUB KEGIATANMELIPUTI			
				1	Analisis Perencanaan Dan Penyaluran Bantuan Keuangan	369,859,735,369	369,193,857,593	99.82
				2	Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak	1,500,000,000	846,120,950	56.41
				3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	16,461,297,013	10,423,785,747	63.32
					KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1,408,110,465	1,212,616,525	86.12
					SUB KEGIATANMELIPUTI			
				1	Pengamanan Barang Milik Daerah	654,500,145	531,444,655	81.20
				2	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Dan Penghapusan Barang Milik Daerah	312,999,820	260,515,090	83.23
				3	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	440,610,500	420,656,780	95.47
		BADAN PENDAPATAN DAERAH			KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	114.377.359	114.340.909	99,97
					SUB KEGIATANMELIPUTI			
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	54,815,420	54,815,420	100,00
				2	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,743,245	3,743,245	100,00
				3	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4,223,594	4,223,594	100,00
				4	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	4,178,050	4,178,050	100,00
				5	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5,214,500	5,178,050	99.30
				6	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42,202,550	42,202,550	100,00
					KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	12.434.429.112	11.635.242.209	93,57
					SUB KEGIATANMELIPUTI			
				1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	12,420,859,372	11,621,672,469	93,57
				2	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13,569,740	13,569,740	100,00
					KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	185,082,000	146,354,000	79.08
					SUB KEGIATANMELIPUTI			

				1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	185,082,000	146,354,000	79.08
					KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	3,300,249,986	3,127,185,150	94,76
					SUB KEGIATANMELIPUTI			
				1	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	940,594,440	934,947,000.00	99.40
				2	Penyediaan bahan logistik kantor	219,791,000	219,764,750.00	99.99
				3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	782,474,046	781,242,718.00	99.84
				4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	39,955,500	39,955,500.00	100.00
				5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	1,317,435,000	1,151,275,182.00	87.39
					KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1,679,257,518	1,566,071,212	93,26
					SUB KEGIATANMELIPUTI			
				1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	455,273,810	429,135,835.00	94.26
				2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	255,230,000	255,230,000.00	100.00
				3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	968,753,708	881,705,377.00	91.01
					KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1,326,094,652	1,315,313,652	99,19
					SUB KEGIATANMELIPUTI			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	335,696,652	329,557,652.00	98.17
				2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	990,398,000	985,756,000.00	99.53
					KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3,978,757,425	3,396,767,261	85,37
					SUB KEGIATANMELIPUTI			
				1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	124,420,740	31,469,956	25.29
				2	Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah.	569,530,325	550,710,325	96.70
				3	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	614,013,185	579,478,685	94.38
				4	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	235,251,000	196,401,000	83.49
				5	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	243,986,230	138,146,230	56.62

				6	Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbbp2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb)	792,905,020	623,565,020	78.64
				7	Penetapan wajib pajak daerah	484,846,270	484,187,040	99.86
				8	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	111,530,815	111,530,815	100.00
				9	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	112,128,360	69,957,360	62.39
				10	Penagihan pajak daerah	200,166,910	194,721,760	97.28
				11	Penyelesaian keberatan pajak daerah	105,636,110	81,436,110	77.09
				12	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	349,137,050	304,583,550	87.24
				13	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	35,205,410	30,579,410	86.86
	KEPEGAWAIAN							
25		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA			KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	133,688,977	124,303,977	92.98
					SUB KEGIATAN MELIPUTI			
				1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	110,109,372	100,724,372	91.48
				2	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	23,579,605	23,579,605	100.00
					KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4,253,003,603	4,092,272,206	96.22
					SUB KEGIATAN MELIPUTI			
				1	Penyediaan gaji dan tunjangan asn	4,248,751,123.00	4,088,019,726.00	96.22
				2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	4,252,480.00	4,252,480.00	100.00
					KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	390,402,644	369,690,882	94.69
					SUB KEGIATAN MELIPUTI			
				1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,651,300.00	2,583,000.00	97.42
				2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	109,455,526.00	109,255,526.00	99.82
				3	Penyediaan bahan logistik kantor	33,741,000.00	33,540,000.00	99.40

				4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	38,956,818.00	38,934,750.00	99.94
				5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,960,000.00	3,951,000.00	99.77
				6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	201,638,000.00	181,426,606.00	89.98
					KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	388,614,316	305,725,545	78.67
					SUB KEGIATANMELIPUTI			
				1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	98,935,000.00	73,011,141.00	73.80
				2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	289,679,316.00	232,714,404.00	80.34
					KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PNUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	79,713,316	67,834,316	85.10
					SUB KEGIATANMELIPUTI			
				1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan DINAS JABATAN	41,337,516	41,025,316	99.24
				2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	4,535,100	-	0.00
				3	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	33,840,700	26,809,000	79.22
	INSPEKTORAT							
26		INSPEKTORAT KABUPATEN			KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	76,000,000	76,000,000	100,00
					SUB KEGIATANMELIPUTI			
				1	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	76,000,000	76,000,000	100,00
					KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	12,534,161,832	11,939,004,767	100,00
					SUB KEGIATANMELIPUTI			
				1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	11,939,004,767	11,939,004,767	100,00
					KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	271,076,000	143,748,000	53.03
					SUB KEGIATANMELIPUTI			
				1	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	220,076,000	111,498,000	50.66

				2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	51,000,000	32,250,000	63.24
					KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	749,270,379	718,690,321	95.92
					SUB KEGIATANMELIPUTI			
				1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9,911,900	9,900,000	99.88
				2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	176,523,055	176,523,055	100.00
				3	Penyediaan bahan logistik kantor	128,525,000	128,525,000	100.00
				4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	97,856,424	97,817,196	99.96
				5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	31,200,000	30,170,000	96.70
				6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	305,254,000	275,755,070	90.34
					KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	602,021,664	569,756,094	94.64
					SUB KEGIATANMELIPUTI			
				1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	153,894,600	144,898,657	94.15
				2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	448,127,064	424,857,437	94.81
					KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	422,753,500	407,947,289	96.50
					SUB KEGIATANMELIPUTI			
				1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	68,690,000	67,486,038	98.25
				2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	123,411,000	109,821,251	88.99
				3	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	46,092,500	46,081,000	99.98
				4	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	184,560,000	184,559,000	100.00
					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
27		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	101,237,589	100,209,189	98.98
					SUB KEGIATANMELIPUTI			
				1	Penyusunan dokumen perencanaan	15,110,540	15,110,540	100.00

					perangkat daerah			
				2	Koordinasi dan penyusunan dokumen rka-skpd	10,680,425	10,680,425	100.00
				3	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan rka-skpd	10,680,425	10,680,425	100.00
				4	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	64,766,199	63,737,799	98.41
					KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2,495,315,175	2,442,229,010	97.87
					SUB KEGIATANMELIPUTI			
				1	Penyediaan gaji dan tunjangan asn	2,484,984,915	2,431,898,750	97.86
				2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	10,330,260	10,330,260	10.00
					KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1,030,364,568	1,025,629,628	99.54
					SUB KEGIATANMELIPUTI			
				1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	22,998,745	21,511,317	93.53
				2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	166,601,689	164,898,208	98.98
				3	Penyediaan bahan logistik kantor	40,312,000	40,162,540	99.63
				4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	124,613,134	124,140,679	99.62
				5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,780,000	3,780,000	100.00
				6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	672,059,000	671,136,884	99.86
					PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	550,000,000	547,000,000	99.45
					SUB KEGIATANMELIPUTI			
					1.Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	550,000,000	547,000,000	99.45
					KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	879,411,108	748,299,606	85.09
					SUB KEGIATANMELIPUTI			
				1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	180,450,500	174,917,999	96.93
				2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	37,000,000	36,842,501	99.57
				3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	661,960,608	536,539,106	81.05
					PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH	232,423,400	222,599,597	95.77

				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,000,000	100,000,000	100.00
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	365,900,800	365,900,800	99.94
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	87,200,000	87,200,000	100.00
				2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	278,700,800	278,700,800	99.92
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14,850,000	14,850,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14,850,000	14,850,000	100.00
29		KECAMATAN TAPUNG HILIR			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,598,150,063	1,553,218,477	97.19
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,598,150,063	1,553,218,477	97.19
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	145,808,302	142,564,592	97.78
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	1,320,000	1,320,000	100.00
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22,954,362	22,954,362	100.00
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61,792,500	61,792,500	100.00
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,794,440	4,794,440	100.00
				5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1,188,000	1,188,000	100.00
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53,759,000	50,515,290	93.97
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175,317,000	167,822,000	95.72
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13,137,000	9,827,000	74.80
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	162,180,000	157,995,000	97.42
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23,156,963	23,156,500	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	20,502,563	20,502,100	100.00

					Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,654,400	2,654,400	100.00
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,000,000	100,000,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,000,000	100,000,000	100.00
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11,550,000	11,550,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11,550,000	11,550,000	100.00
30		KECAMATAN TAPUNG HULU			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,117,234,070	1,026,982,759	91.92
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,117,234,070	1,026,982,759	91.92
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8,132,000	8,077,400	99.33
					SUB KEGIATAN:			
				1	imbangan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8,132,000	8,077,400	99.33
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	360,239,326	357,703,200	99.30
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	6,000,000	6,000,000	100.00
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93,406,876	93,199,000	99.78
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	106,930,000	106,920,000	99.99
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21,074,450	21,074,450	100.00
				5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5,940,000	5,940,000	100.00
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126,888,000	124,569,800	98.17
					Penggandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25,998,000	25,998,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pengadaan Mebel	25,998,000	25,998,000	100.00

					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60,579,000	57,858,600	95.51
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	18,339,000	18,338,600	100.00
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42,240,000	39,520,000	93.56
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42,853,695	42,016,200	98.05
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33,309,195	32,471,700	97.49
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,544,500	9,544,500	100.00
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,000,000	100,000,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,000,000	100,000,000	100.00
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11,550,000	11,550,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11,550,000	11,550,000	100.00
31		KECAMATAN TAPUNG			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,479,076,159	1,440,619,261	97.40
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,479,076,159	1,440,619,261	97.40
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16,264,000	15,505,600	95.34
					SUB KEGIATAN:			
				1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16,264,000	15,505,600	95.34
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	284,492,726	254,833,823	89.57
					SUB KEGIATAN:			

				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	4,773,600	4,773,600	100.00
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42,531,876	42,379,760	99.64
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87,960,000	87,960,000	100.00
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19,845,250	17,634,063	88.86
				5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3,564,000	3,564,000	100.00
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125,818,000	98,522,400	78.31
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225,888,000	224,518,472	99.39
					SUB KEGIATAN			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29,673,595	17,738,058	59.78
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,320,200	8,320,200	100.00
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,000,000	100,000,000	100.00
					SUB KEGIATAN			
				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,000,000	100,000,000	100.00
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11,550,000	11,550,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11,550,000	11,550,000	100.00
32		KECAMATAN TAMBANG			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,024,247,140	1,980,529,281	97.84
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,024,247,140	1,980,529,281	97.84
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	269,793,098	269,789,850	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88,827,828	88,824,600	100.00

				2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59,746,250	59,746,250	100.00
				3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,769,020	10,769,000	100.00
				4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110,450,000	110,450,000	100.00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175,476,000	173,437,100	98.84
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27,876,000	25,837,100	92.69
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	147,600,000	147,600,000	100.00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45,658,300	45,658,300	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15,927,700	15,927,700	100.00
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,564,600	6,564,600	100.00
				3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23,166,000	23,166,000	100.00
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,000,000	100,000,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,000,000	100,000,000	100.00
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11,550,000	11,550,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11,550,000	11,550,000	100.00
33		KECAMATAN KAMPAR			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,366,205,449	2,366,205,449	97.59
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,366,205,449	2,366,205,449	97.59

					Administrasi Umum Perangkat Daerah	287,074,716	287,074,716	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73,149,716	73,149,716	100.00
				2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60,496,200	60,496,200	100.00
				3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33,070,800	33,070,800	100.00
				4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9,000,000	9,000,000	100.00
				5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111,358,000	111,358,000	100.00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216,066,660	207,859,674	96.20
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	21,816,660	20,134,674	92.29
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	194,250,000	187,725,000	96.64
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49,869,311	49,869,311	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28,189,311	28,189,311	100.00
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21,680,000	21,680,000	100.00
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,000,000	100,000,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	elaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,000,000	100,000,000	100.00
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	365,721,396	365,721,396	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	206,721,396	206,721,396	100.00
				2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	159,000,000	159,000,000	100.00
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13,650,000	13,650,000	100.00

					SUB KEGIATAN:			
				1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13,650,000	13,650,000	100.00
34		KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,543,352,635	1,502,972,232	97.38
					SUB KEGIATAN			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	387,466,820	385,457,584	99.48
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	7,990,000	7,990,000	100.00
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123,851,820	123,575,812	99.78
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71,067,000	71,067,000	100.00
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36,350,000	36,350,000	100.00
				5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148,208,000	146,474,772	98.83
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109,054,536	108,041,845	99.07
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	12,499,536	11,486,845	91.90
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	96,555,000	96,555,000	100.00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37,887,435	37,771,435	99.69
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33,153,135	33,037,135	99.65
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,734,300	4,734,300	100.00
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,000,000	100,000,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,000,000	100,000,000	100.00

					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11,550,000	11,550,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11,550,000	11,550,000	100.00
35		KECAMATAN SIAK HULU			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,328,406,875	2,317,412,118	99.53
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,328,406,875	2,317,412,118	99.53
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	232,130,472	232,107,612	99.99
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	6,000,000	6,000,000	100.00
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98,940,702	98,940,702	100.00
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78,849,720	78,826,860	99.97
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,590,050	14,590,050	100.00
				5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33,750,000	33,750,000	100.00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128,499,000	126,188,075	98.20
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21,939,000	19,708,075	89.83
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	106,560,000	106,480,000	99.92
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31,394,066	31,394,066	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26,999,516	26,999,516	100.00
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,394,550	4,394,550	100.00
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,000,000	100,000,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			

				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,000,000	100,000,000	100.00
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10,150,000	10,150,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10,150,000	10,150,000	100.00
36		KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,687,548,376	1,564,910,436	92.73
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,687,548,376	1,564,910,436	92.73
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	274,183,209	274,062,048	99.96
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	5,347,000	5,347,000	100.00
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110,036,401	110,036,401	100.00
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97,955,850	97,944,689	99.99
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21,403,958	21,403,958	100.00
				5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2,520,000	2,520,000	100.00
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36,920,000	36,810,000	99.70
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237,321,600	235,891,456	99.40
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18,201,600	16,771,456	92.14
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	219,120,000	219,120,000	100.00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36,540,824	36,540,824	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29,086,924	29,086,924	100.00

				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,453,900	7,453,900	100.00
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,000,000	100,000,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,000,000	100,000,000	100.00
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	365,998,330	365,998,330	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	208,375,930	208,375,930	100.00
				2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	157,622,400	157,622,400	100.00
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10,150,000	10,150,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10,150,000	10,150,000	100.00
37		KECAMATAN RUMBIO JAYA			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,071,307,545	1,015,962,985	94.83
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,071,307,545	1,015,962,985	94.83
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	244,796,177	243,654,177	99.53
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27,370,797	27,370,797	100.00
				2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81,366,000	81,366,000	100.00
				3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22,865,380	22,865,380	100.00
				4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113,194,000	112,052,000	98.99
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26,615,100	26,615,100	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pengadaan Mebel	26,615,100	26,615,100	100.00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85,899,680	83,154,363	96.80

					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17,019,680	15,034,363	88.34
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	68,880,000	68,120,000	98.90
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31,457,600	31,457,600	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26,057,600	26,057,600	100.00
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,400,000	5,400,000	100.00
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,000,000	88,311,202	88.31
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,000,000	88,311,202	88.31
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19,800,000	19,800,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19,800,000	19,800,000	100.00
38		KECAMATAN KAMPAR UTARA			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	741,069,717	639,805,599	86.34
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	741,069,717	639,805,599	86.34
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	119,587,674	119,371,143	99.82
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31,467,000	31,467,000	100.00
				2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19,358,674	19,358,674	100.00
				3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3,402,000	3,402,000	100.00
				4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65,360,000	65,143,469	99.67

					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204,347,465	200,632,814	98.18
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17,678,815	16,526,578	93.48
				2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31,168,650	30,472,236	97.77
				3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	155,500,000	153,634,000	98.80
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43,411,876	43,172,942	99.45
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37,859,476	37,620,542	99.37
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,552,400	5,552,400	100.00
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,000,000	100,000,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,000,000	100,000,000	100.00
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11,550,000	10,650,000	92.21
					SUB KEGIATAN:			
				1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11,550,000	10,650,000	92.21
39		KECAMATAN KAMPA			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,194,599,278	1,148,426,979	96.13
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,194,599,278	1,148,426,979	96.13
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	183,635,077	181,159,077	98.65
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44,166,377	44,166,377	100.00
				2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51,069,000	51,069,000	100.00
				3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,217,700	5,217,700	100.00

				4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83,182,000	80,706,000	97.02
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130,561,500	129,255,000	99.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16,891,500	15,585,000	92.27
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113,670,000	113,670,000	100.00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28,615,300	28,615,300	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24,318,700	24,318,700	100.00
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,296,600	4,296,600	100.00
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,000,000	100,000,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,000,000	100,000,000	100.00
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11,550,000	11,550,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11,550,000	11,550,000	100.00
40		KECAMATAN SALO			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	926,227,782	839,157,909	90.60
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	926,227,782	839,157,909	90.60
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	248,571,931	240,077,342	96.58
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	3,224,800	3,224,800	100.00
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80,936,748	80,936,748	100.00
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47,502,000	47,502,000	100.00

				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,394,383	7,394,383	100.00
				5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109,514,000	101,019,411	92.24
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136,691,620	126,565,179	92.59
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16,966,620	8,880,179	52.34
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119,725,000	117,685,000	98.30
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34,356,563	33,714,563	98.13
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22,166,563	21,524,563	97.10
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100.00
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,000,000	100,000,000	100,00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,000,000	100,000,000	100,00
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11,550.000	11,550.000	100,00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.550.000	11.550.000	100,00
41		KECAMATAN BANGKINANG			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,917,235,495	1,805,751,747	94.19
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,917,235,495	1,805,751,747	94.19
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	320,175,826	318,530,194	99.49
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58,196,862	58,056,664	99.76

				2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120,976,950	120,870,216	99.91
				3	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	32,504,014	31,810,314	97.87
				4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108,498,000	107,793,000	99.35
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80,933,400	80,933,400	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80,933,400	80,933,400	100.00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288,899,880	279,478,817	96.74
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21,599,880	16,358,817	75.74
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	267,300,000	263,120,000	98.44
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,000,000	100,000,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100,000,000	100,000,000	100.00
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	757,356,558	757,356,558	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	544,356,558	544,356,558	100.00
				2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	213,000,000	213,000,000	100.00
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15,000,000	15,000,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15,000,000	15,000,000	100.00
42		KECAMATAN KUOK			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,263,717,116	1,177,809,853	93.20
					SUB KEGIATAN:			

				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,263,717,116	1,177,809,853	93.20
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	179,316,205	170,408,080	95.03
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59,365,504	59,365,504	100,00
				2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63,842,500	63,842,500	100,00
				3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7,590,201	7,590,201	100,00
				4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48,518,000	39,610,000	81.64
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171,719,100	166,679,100	97.06
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18,599,100	18,599,100	100.00
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	153,120,000	148,080,000	96.71
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27,204,463	26,614,900	97.83
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22,502,563	21,913,000	97.38
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,701,900	4,701,900	100.00
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,000,000	100,000,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,000,000	100,000,000	100.00
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.550.000	11.550.000	100,00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.550.000	11.550.000	100,00
43		KECAMATAN BANGKINANG KOTA			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,198,586,153	2,047,202,709	93.11

					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,198,586,153	2,047,202,709	93.11
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	530,724,856	523,863,176	98.71
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	4,933,000	4,933,000	100.00
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	136,707,926	136,643,789	99.95
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	230,806,000	230,806,000	100.00
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25,962,930	25,962,930	100.00
				5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2,376,000	2,354,000	99.07
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129,939,000	123,163,887	94.79
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250,692,560	235,124,176	93.79
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72,932,560	61,924,176	84.91
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	177,760,000	173,200,000	97.43
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63,955,713	63,828,769	99.80
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29,489,713	29,363,269	99.57
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34,466,000	34,466,000	100.00
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,000,000	100,000,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,000,000	100,000,000	100.00
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	731,998,576	731,782,849	99.97
					SUB KEGIATAN:			

				1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	358,800,576	358,584,849	99.94
				2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	373,198,000	373,198,000	100,00
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.550.000	11.550.000	100,00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.550.000	11.550.000	100,00
44		KAMPAR KIRI TENGAH			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,634,046,724	1,588,772,470	97.23
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,634,046,724	1,588,772,470	97.23
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	205,148,102	194,904,000	95.01
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58,269,742	57,475,000	98.64
				2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46,578,600	44,875,000	96.34
				3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18,845,760	18,836,000	99.95
				4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3,078,000	3,078,000	100.00
				5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78,376,000	70,640,000	90.13
					Penggandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,775,000	2,775,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pengadaan Mebel	2,775,000	2,775,000	100.00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79,000,050	76,964,426	97.42
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	15,400,050	14,604,426	94.83
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63,600,000	62,360,000	98.05
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32,336,515	30,701,000	94.94
					SUB KEGIATAN:			

				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32,336,515	30,701,000	94.94
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,000,000	100,000,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,000,000	100,000,000	100.00
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14,850,000	14,850,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14,850,000	14,850,000	100.00
45		KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,467,031,522	1,393,627,146	95.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,467,031,522	1,393,627,146	95.00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	169,022,850	169,013,339	99.99
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	6,419,915	6,419,915	100.00
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28,702,700	28,694,595	99.97
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45,591,750	45,591,750	100.00
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16,218,485	16,218,485	100.00
				5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72,090,000	72,090,000	100.00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	191,946,000	189,887,680	98.93
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29,226,000	29,212,680	99.95
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	162,720,000	160,675,000	98.74
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
					SUB KEGIATAN:	34,271,078	32,271,078	94.16

				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25,221,078	23,221,078	92.07
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,050,000	9,050,000	100.00
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,000,000	100,000,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,000,000	100,000,000	100.00
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	366,009,400	366,009,400	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	288,009,400	288,009,400	100.00
				2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	78,000,000	78,000,000	100.00
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11,550,000	11,550,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11,550,000	11,550,000	100.00
46		KECAMATAN GUNUNG SAHILAN			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,051,532,715	943,416,145	89.72
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,051,532,715	943,416,145	89.72
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8,388,000	8,333,400	99.35
					SUB KEGIATAN:			
				1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8,388,000	8,333,400	99.35
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	293,864,911	280,451,120	95.44
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	4,244,000	4,244,000	100.00
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110,621,151	109,391,450	98.89
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67,090,500	61,357,840	91.46
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,222,260	9,000,350	88.05
				5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101,687,000	96,457,480	94.86

					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136,291,950	132,685,850	97.35
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15,607,950	13,746,350	88.07
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120,684,000	118,939,500	98.55
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44,619,246	37,908,850	84.96
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44,619,246	37,908,850	84.96
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,326.675	1.210.000	91,21
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,000,000	100,000,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,000,000	100,000,000	100.00
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.550.000	11.550.000	100,00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.550.000	11.550.000	100.00
47		KECAMATAN PERHENTIAN RAJA			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,390,962,068	1,301,867,215	93.59
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,390,962,068	1,301,867,215	93.59
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	209,827,026	209,781,850	99.98
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	4,717,200	4,717,200	100.00
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33,602,966	33,557,950	99.87
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	110,275,250	110,275,100	100.00
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,011,610	8,011,600	100.00
				5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53,220,000	53,220,000	100.00

					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114,005,976	109,932,861	96.43
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14,739,000	12,285,885	83.36
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99,266,976	97,646,976	98.37
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25,382,563	25,378,500	99.98
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20,502,563	20,498,500	99.98
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,880,000	4,880,000	100.00
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,000,000	100,000,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,000,000	100,000,000	100.00
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.550.000	11.550.000	100,00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.550.000	11.550.000	100,00
48		KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,143,549,928	1,078,499,995	94.31
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,143,549,928	1,078,499,995	94.31
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	150,791,746	150,429,046	99.76
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	4,630,000	4,630,000	100.00
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33,004,656	32,641,956	98.90
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39,966,232	39,966,232	100.00
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,340,858	10,340,858	100.00
				5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62,850,000	62,850,000	100.00

					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152,419,200	152,181,640	99.84
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18,859,200	18,621,640	98.74
				2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133,560,000	133,560,000	100.00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56,484,220	56,484,220	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46,736,020	46,736,020	100.00
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,748,200	9,748,200	100.00
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,000,000	100,000,000	100.00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,000,000	100,000,000	100.00
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.550.000	11.550.000	100,00
					SUB KEGIATAN:			
				1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.550.000	11.550.000	100,00

Tabel 3.1.2

Capaian Kinerja Program/Kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

NO	URUSAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	KELUARAN/ HASIL		
					Rp.	Rp		TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	8	9		10	11	12
1	PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				307,203,698,887	284,905,215,074	92.74	5 kegiatan/ 51 sub kegiatan	5 kegiatan/ 51 sub kegiatan	92.74
		DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	220,075,574,675	226,630,357,463	102.98			
				Sub Kegiatan :						
				1 Penambahan Ruang Kelas Baru	2,941,367,491	2,782,020,011	94.58	54 Sekolah	54 Sekolah	94.58
				2 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	646,986,000	646,986,000	100.00	100%	100%	100
				3 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1,000,290,000	1,000,290,000	100.00	100%	100%	100
				4 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	484,176,000	484,176,000	100.00	100%	100%	100
				5 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	17,847,602,240	17,814,197,641	99.81	107 Sekolah	107 Sekolah	99.81
				6 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	2,934,135,626	2,889,855,036	98.49	79 Sekolah	79 Sekolah	98.49
				7 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	85,366,000	85,366,000	100.00	100%	100%	100
				8 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	173,144,000	173,144,000	100.00	100%	100%	100
				9 Pengadaan Mebel Sekolah	7,828,327,308	7,724,431,143	98.67	167 Lokal	167 Lokal	98.67
				10 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	44,241,986,641	42,950,064,511	97.08	65 Paket	65 Paket	97.08
				11 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	286,315,159	262,320,559	91.62	14713 siswa	14713 siswa	91.62
				12 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	171,259,620	171,009,980	99.85	100%	99.85%	99.85
				13 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	312,508,028	275,447,428	88.14	100%	99.85%	99.85
				14 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	37,056,795,669	36,802,196,551	99.31	100%	99.31	99.31
				15 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	164,057,092	153,470,520	93.55	100%	93.55	93.55
				16 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	65,149,904	65,149,904	100.00	100%	100.00	100.00

				17	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	101,182,322,897	109,696,447,179	108.41	100%	108.41	108.41
				18	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2,653,785,000	2,653,785,000	100.00	100%	100.00	100.00
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	68,164,090,468	39,650,798,081	58.17			
					Sub Kegiatan :						
				1	Penambahan Ruang Kelas Baru	1,489,820,116	1,460,188,866	98.01	100%	98.01	98.01
				2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	462,287,000	462,287,000	100.00	100%	100.00	100.00
				3	Pembangunan Laboratorium	2,501,329,000	2,501,329,000	100.00	100%	100.00	100.00
				4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3,658,622,486	3,650,840,586	99.79	100%	99.79	99.79
				5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	989,778,421	975,178,131	98.52	100%	98.52	98.52
				6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	256,820,000	256,820,000	100.00	100%	100.00	100.00
				7	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	502,623,000	502,623,000	100.00	100%	100.00	100.00
				8	Pengadaan Mebel Sekolah	1,195,117,586	1,164,535,936	97.44	100%	97.44	97.44
				9	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2,902,071,671	2,835,264,181	97.70	100%	97.70	97.70
				10	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	200,000,905	191,914,305	95.96	100%	95.96	95.96
				11	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	269,001,608	230,941,458	85.85	100%	85.85	85.85
				12	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	556,234,234	519,178,062	93.34	100%	93.34	93.34
				13	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	24,726,790,046	24,414,125,924	98.74	100%	98.74	98.74
				14	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	223,722,232	222,772,632	99.58	100%	99.58	99.58
				15	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	27,967,073,163	0	0.00	100%	0.00	0.00
				16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	224,221,000	224,221,000	100.00	100%	100.00	100.00
				17	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	38,578,000	38,578,000	100.00	100%	100.00	100.00
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	15,759,594,852	15,424,855,938	97.88			
					Sub Kegiatan :						
				1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	203,739,586	182,578,878	89.61	6 ruang	3 ruang	50
				2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1,623,888,000	1,623,888,000	100.00	100%	100%	100
				3	Pengadaan Mebel PAUD	6,820,000	6,801,000	99.72	4 ruang	6 ruang	150

				4	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	593,608,586	591,098,186	99.58	100%	99.58	99.58
				5	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	797,402,009	797,402,009	100.00	12 bulan	12 bulan	100
				6	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	471,592,194	471,428,474	99.97	525 peserta	525 peserta	100
				7	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1,382,896,641	1,382,896,641	100.00	100%	100%	100
				8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	113,803,848	113,288,762	99.55	100%	99.55	99.55
				9	Pengelolaan Dana BOP PAUD	41,243,988	40,763,988	98.84	12 bulan	12 bulan	100
				10	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	10,524,600,000	10,214,710,000	97.06	12 bulan	12 bulan	100
					Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3,004,438,892	2,999,203,592	99.83			
					Sub Kegiatan :						
				1	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	140,861,707	135,861,707	96.45	2500 peserta	2500 peserta	100
				2	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	145,476,111	145,399,711	99.95	2500 peserta	2500 peserta	100
				3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	356,525,250	356,404,050	99.97	240 peserta	240 peserta	100
				4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	90,875,824	90,838,124	99.96	80 lembaga	80 lembaga	100
				5	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2,270,700,000	2,270,700,000	100.00	12 bulan	12 bulan	100
					Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	200,000,000	200,000,000	100.00			
					Sub Kegiatan :						
				1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	200,000,000	200,000,000	100.00	95 guru	95 guru	100
2	URUSAN KESEHATAN					100,132,494,809	90,459,389,068	90.34	12 kegiatan/41 sub kegiatan	12 kegiatan/41 sub kegiatan	90.34
		DINAS KESEHATAN			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	28,570,690,730	25,053,374,408	87.69			
					Sub Kegiatan :						
				1	Pembangunan Puskesmas	725,067,430	722,094,430	99.59	10 Kegiatan, 3 Puskesmas,3 Pustu	99.59	99.59
				2	Pengembangan Puskesmas	8,336,310,600	7,252,596,733	87.00	10 Kegiatan,	87.00	87.00

									3 Puskesmas,3 Pustu		
				3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	2,377,878,465	1,086,803,050	45.70	1 Puskesmasdan 1 Pustu	45.70	45.70
				4	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	197,083,284	196,742,084	99.83	15 Puskesmas Pembantu 15 Puskesmas	99.83	99.83
				5	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5,220,377,121	4,674,195,581	89.54	60 %	89.54	89.54
				6	Pengadaan Obat, Vaksin	5,161,900,280	4,681,827,790	90.70	90 %	90.70	90.70
				7	Pengadaan Bahan Habis Pakai	6,337,312,080	6,228,585,541	98.28	100 %	98.28	98.28
				8	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	214,761,470	210,529,199	98.03	31 Puskesmas	98.03	98.03
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	58,643,033,412	52,841,598,260	90.11			
					Sub Kegiatan :						
				1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2,087,749,232	1,957,535,651	93.76	31 Puskesmas100 Persen	93.76	93.76
				2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1,210,472,000	495,799,000	40.96	31 Puskesmas31 Puskesmas31 Puskesmas100 Persen	40.96	40.96
				3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	391,745,275	345,849,750	88.28	100 Persen 31 Puskesmas31 Puskesmas	88.28	88.28
				4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1,765,412,947	1,546,671,000	87.61	4 Kali 31 Puskesmas100 Persen 31 Puskesmas	87.61	87.61
				5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1,542,692,048	1,405,855,400	91.13	100 %, 21	91.13	91.13

									Sekolah, 31 Puskesmas		
				6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1,039,200,177	949,192,000	91.34	100 Persen	91.34	91.34
				7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	775,854,854	769,369,600	99.16	100 Persen 31 Puskesmas31 Puskesmas	99.16	99.16
				8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	90,886,655	89,104,924	98.04	100%	98.04	98.04
				9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	61,291,065	59,516,916	97.11	100%	97.11	97.11
				10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	724,190,055	638,372,000	88.15	15 Puskesmas,100%	88.15	88.15
				11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	534,140,261	497,981,700	93.23	100%	93.23	93.23
				12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	418,290,071	380,212,000	90.90	100%	90.90	90.90
				13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	2,380,612,854	1,597,805,914	67.12	5 DOKUMEN	67.12	67.12
				14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	9,977,484,461	9,461,521,643	94.83	100%	94.83	94.83
				15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6,100,484,758	5,702,769,550	93.48	40 Desa 31 puskesmas31 puskesmas31 Puskesmas100 Persen	93.48	93.48
				16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	829,444,304	687,132,200	82.84	100%	82.84	82.84
				17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1,962,029,317	1,801,651,150	91.83	100%	91.83	91.83
				18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1,114,781,000	1,026,369,000	92.07	100%	92.07	92.07
				19	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	548,758,809	329,827,900	60.10	100%	60.10	60.10
				20	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	211,246,634	181,275,500	85.81	1000 CJH 31 Puskesmas100 Persen	85.81	85.81
				21	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2,559,309,466	2,251,135,046	87.96	50 Fokus 31 Puskesmas31	87.96	87.96

									Puskesmas150 Kasus 31 Puskesmas31 Puskesmas100 Persen 95 Persen 100 Persen 60 Persen 100 Persen 100 Persen 95 Persen 50 Persen 31 Puskesmas			
					22	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	15,042,020,111	14,905,852,116	99.09	100%	99.09	99.09
					23	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	11,879,900	11,878,700	99.99	1 Sertifikat	99.99	99.99
					24	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	207,780,000	179,987,000	86.62	6 Unit	86.62	86.62
					25	Operasional Pelayanan Puskesmas	2,705,434,236	1,436,780,000	53.11	100%	53.11	53.11
					26	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1,591,508,848	1,590,031,850	99.91	100%	99.91	99.91
					27	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	469,415,314	468,574,750	99.82	31 Puskesmas9 Puskesmas31 Puskesmas	99.82	99.82
					28	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	437,701,000	298,075,000	68.10	2 Dokumen	68.10	68.10
					29	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	483,161,760	481,787,000	99.72	100%	99.72	99.72
					30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	1,368,056,000	1,293,684,000	94.56	100%	94.56	94.56
						Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	241,259,707	236,047,150	97.84			
						Sub Kegiatan :						
					1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	241,259,707	236,047,150	97.84	2 Dokumen	97.84	97.84
						Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47,599,515	47,255,450	99.28			
						Sub Kegiatan :						

				1	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	47,599,515	47,255,450	99.28	15 persen 100%	99.28	99.28
					Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	45,084,000	44,316,000	98.30			
					Sub Kegiatan :						
				1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	17,250,000	17,250,000	100.00	150 nakes	150 nakes	100
				2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	27,834,000	27,066,000	97.24	31 Puskesmas100 PraktekMandiri	97.24	97.24
					Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	10,439,214,181	10,323,131,700	98.89			
					Sub Kegiatan :						
				1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	43,542,500	42,875,000	98.47	31 Puskesmas	98.47	98.47
				2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	10,375,131,000	10,259,723,000	98.89	536 Orang	98.89	98.89
				3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	20,540,681	20,533,700	99.97	100%	99.97	99.97
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75,412,100	75,411,500	100.00			
					Sub Kegiatan :						
				1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75,412,100	75,411,500	100.00	3 Puskesmas9 Nakes	3 Puskesmas9 Nakes	100
					Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	118,363,000	87,175,000	73.65			
					Sub Kegiatan :						
				1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	118,363,000	87,175,000	73.65	100 %	70 %	70 %
					Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	17,593,978	17,293,800	98.29			
					Sub Kegiatan :						

				1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	17,593,978	17,293,800	98.29	100%	98.29	98.29
					Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	106,840,000	40,295,000	37.72			
					Sub Kegiatan :						
				1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	106,840,000	40,295,000	37.72	80 IRTP	37.72	37.72
					Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,291,729,186	1,206,452,800	93.40			
					Sub Kegiatan :						
				1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1,291,729,186	1,206,452,800	93.40	100%	93.40	93.40
					Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	535,675,000	487,038,000	90.92			
					Sub Kegiatan :						
				1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	535,675,000	487,038,000	90.92	100%	90.92	90.92
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	31,212,363,624	29,442,818,544	94.33	3 kegiatan/7 sub kegiatan	3 kegiatan/7 sub kegiatan	92.99
					Sub Kegiatan :						
				1	Pengembangan Rumah Sakit	15,576,863,184	14,628,288,656	93.91	100%	14,628,288,656	93.91
				2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	2,837,162,000	2,778,846,000	97.94	100%	2,778,846,000	97.94
				3	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	11,816,210,740	11,285,848,561	95.51	100%	11,285,848,561	95.51
				4	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	336,520,000	300,321,940	89.24	100%	300,321,940	89.24
				5	Pengadaan Obat, Vaksin	645,607,700	449,513,387	69.63	100%	449,513,387	69.63
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,152,425,000	1,836,532,687	85.32	100%	1,836,532,687	85.32
					Sub Kegiatan :						

				1	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2,152,425,000	1,836,532,687	85.32	100%	1,836,532,687	85.32
					Perencanaan Kebutuhan dan Pendetayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	12,680,160,756	11,538,233,318	90.99	100%	11,538,233,318	90.99
					Sub Kegiatan :						
				1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	12,680,160,756	11,538,233,318	90.99	100%	11,538,233,318	90.99
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					155,177,004,724	137,643,971,654	88.70	9 kegiatan/ 27 sub kegiatan	9 kegiatan/ 27 sub kegiatan	88.70
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,790,095,077	1,747,997,817	97.65			
					Sub Kegiatan :						
				1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	211,628,720	209,464,220	98.98	2 dok	2 dok	100%
				2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	114,908,187	114,908,187	100.00	1 keg	1 keg	100%
				3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1,250,118,645	1,238,392,445	99.06	13 Di	13 Di	100%
				4	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	213,439,525	185,232,965	86.78	13 Di	13 Di	100%
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	9,754,738,294	9,136,511,821	93.66			
					Sub Kegiatan :						
				1	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	274,990,000	216,069,795	78.57	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
				2	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	9,479,748,294	8,920,442,026	94.10	983 SR/ KK	983 SR/ KK	100%
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3,625,553,700	1,794,434,200	49.49			
					Sub Kegiatan :						
				1	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	67,310,000	60,610,000	90.05	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
				2	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	3,558,243,700	1,733,824,200	48.73	380 KK	230 kk	60, 52%
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	7,446,322,380	6,622,427,233	88.94			

				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1,398,089,640	630,798,028	45.12			
				Sub Kegiatan :						
				1 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	1,398,089,640	630,798,028	45.12	100%	45.12	45.12
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	221,471,660	168,131,660	75.92			
				Sub Kegiatan :						
				1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	221,471,660	168,131,660	75.92	100%	75.92%	75.92%
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	84,985,835	84,985,835	100.00	100%	100%	100%
				Sub Kegiatan :						
				1 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	84,985,835	84,985,835	100.00	100%	100%	100%
4	UNSUR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				45,744,733,278	45,585,484,255	99.65	8 kegiatan/ 14 sub kegiatan	8 kegiatan/ 14 sub kegiatan	99.65
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	130,662,657	125,330,657	95.92			
				Sub Kegiatan :						
				1 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	48,790,856	48,790,856	100.00	1 Keg	1 Keg	100
				2 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	38,872,000	37,740,000	97.09	1 Keg	1 Keg	100
				3 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	42,999,801	38,799,801	90.23	1 Tahun	1 Tahun	100
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	460,278,815	455,387,585	98.94			
				Sub Kegiatan :						
				1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	200,148,395	195,358,165	97.61	1 Keg	1 Keg	100
				2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	260,130,420	260,029,420	99.96	10 Laporan	10 Laporan	100
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	240,952,789	216,684,947	89.93			

				1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	911,171,352	838,525,202	92,03	100	92.03	92.03
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					3.963.369.986	3.875.497.093	97,78	9 Kegiatan / 26 Kegiatan	9 Kegiatan / 26 Kegiatan	
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					1.502.629.091	1.492.122.591	99,30	1 Kegiatan / 4 Sub Kegiatan	1 Kegiatan / 4 Sub Kegiatan	
				I	PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.502.629.091	1.492.122.591	99,30			
					SUB KEGIATAN :						
				1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	554.647.740	554.642.740	100,00	15 Kasus	15 Kasus	100
				2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	685.278.566	674.778.566	98,47	17 Kasus	17 Kasus	100
				3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	99.032.405	99.032.405	100,00	21 Dokumen	21 Dokumen	100
				4	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	163.670.380	163.668.880	100,00	87 Orang	87 Orang	100
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					2.137.815.895	2.067.087.095	96,69	4 Kegiatan / 8 Sub Kegiatan	4 Kegiatan / 8 Sub Kegiatan	
				I	PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	428.197.120	416.637.120	97,30			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :						
				1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	49.560.700	38.960.700	78,61	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
				2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	378.636.420	377.676.420	99,75	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100
				II	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	1.451.400.700	1.399.661.900	96,44			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :						

				1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	210.993.790	209.944.990	99,50	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100
				2	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	31.460.000	31.460.000	100,00	1 Unit	1 Unit	100
				3	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1.035.164.570	994.404.570	96,06	7 Paket	7 Paket	100
				4	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	173.782.340	163.852.340	94,29	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
				III	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	121.092.250	115.142.250	95,09			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :						
				1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	121.092.250	115.142.250	95,09	80 Orang	80 Orang	100
				IV	PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	137.125.825	135.645.825	98,92			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :						
				1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	137.125.825	135.645.825	98,92	1 laporan	1 laporan	100
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				322.925.000	316.287.407	97,94	4 Kegiatan / 14 Sub Kegiatan	4 Kegiatan / 14 Sub Kegiatan	
				I	PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	232.427.695	229.027.470	98,54			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :						
				1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.998.180	11.998.180	100,00	1 dokumen	1 dokumen	100,00
				2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	37.351.100	37.349.575	100,00	1 laporan	1 laporan	100,00
				3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	12.648.635	12.648.635	100,00	1 dokumen	1 dokumen	100,00
				4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.988.180	11.988.180	100,00	1 dokumen	1 dokumen	100,00
				5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	6.727.900	6.727.900	100,00	1 dokumen	1 dokumen	100,00
				6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	100.100.100	97.013.000	96,92	15 unit	15 unit	96,92
				7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	38.941.600	38.650.000	99,25	60 orang	60 orang	99,25

				8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	12.672.000	12.652.000	99,84	30 desa/kelurahan	30 desa/kelurahan	99,84
			II	INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN		21.595.014	21.595.014	100,00			
				SUB KEGIATAN MELIPUTI :							
				1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	9.596.912	9.596.912	100,00	1 dokumen	1 dokumen	100,00
				2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	11.998.102	11.998.102	100,00	1 dokumen	1 dokumen	100,00
			III	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN		33.593.991	33.593.991	100,00			
				SUB KEGIATAN MELIPUTI :							
				1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	11.997.438	11.997.438	100,00	50 orang	50 orang	100,00
				2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	11.999.507	11.999.507	100,00	6 desa/kelurahan	6 desa/kelurahan	100,00
				3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	9.597.046	9.597.046	100,00	1 dokumen	1 dokumen	100,00
			IV	PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA		35.308.300	32.070.932	90,83			
				SUB KEGIATAN MELIPUTI :							
				1	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	35.308.300	32.070.932	90,83	1 laporan	1 laporan	100
6	PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					7.322.443.694	7.130.548.532	97,38			
		DINAS SOSIAL				7.322.443.694	7.130.548.532	97,38	7 Kegiatan / 14 Sub kegiatan	7 Kegiatan / 14 Sub kegiatan	
			I	PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.086.778.466	4.044.439.839	98,96			
				SUB KEGIATAN MELIPUTI :							
				1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	545.453.550	535.401.500	98,16	57 Orang PSM	57 Orang PSM	100%
				2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	260.223.433	248.289.036	95,41	21 Orang TKSK	21 Orang TKSK	100%
				3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	854.994.737	850.444.500	99,47	115 Orang PKH	109 Orang PKH	100%

				4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2.426.106.746	2.410.304.803	99,35	7 Lembaga Sosial	7 Lembaga Sosial	100%
				II	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	274.761.215,00	258.213.380,00	93,98			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :						
				1	Penyediaan Alat Bantu	274.761.215,00	258.213.380,00	93,98	27 Orang Penyandang Disabilitas	27 Orang Penyandang Disabilitas	100%
				III	REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL	199.109.868	191.313.500	96,08			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :						
				1	Pemberian Layanan Kedaruratan	199.109.868	191.313.500	96,08	100 Orang PPKS	80 Orang PPKS	80%
				IV	PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.474.139.454	1.401.422.592	95,07			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :						
				1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	245.457.470	228.838.992	93,23	34852 KPM	34852 KPM	100
				2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	30.000.000	30.000.000	100,00	200 Paket	200 paket	100
				3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.198.681.984	1.142.583.600	95,32	32 Orang Penyandang Disabilitas dan Lansia Produktif	32 Orang Penyandang Disabilitas dan Lansia Produktif	100
				V	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA	349.183.920	334.610.901	95,83			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :						
				1	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	227.800.000	225.668.101	99,06	1 Paket	1 Paket	100
				2	Pelayanan Dukungan Psikososial	121.383.920	108.942.800	89,75	82 KK Korban Bencana	82 KK Korban Bencana	100
				VI	PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	308.025.976	306.773.000	99,59			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :						
				1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	308.025.976	306.773.000	99,59	72 Orang Tagana	72 Orang Tagana	100
				VII	PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	630.444.795	593.775.320	94,18			

					SUB KEGIATAN MELIPUTI :						
				1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	560.124.515	523.465.320	93,46	1 Paket Taman Makam Pahlawan	1 Paket Taman Makam Pahlawan	100
				2	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	70.320.280	70.310.000	99,99	2 Orang Penjaga Makam	2 Orang Penjaga Makam	100
7		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA				3.110.499.775	2.750.522.444	88,43	5 Kegiatan / 10 Sub Kegiatan	5 Kegiatan / 10 Sub Kegiatan	
				I	PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	1.480.500.392	1.463.688.200	98,86	20 Orang	20 Orang	100
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :						
				1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	381.376.368	373.764.200	98,00	80 Orang	80 Orang	100
				2	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	1.099.124.024	1.089.924.000	99,16	2 Paket	2 Paket	100
				II	PELAYANAN ANTARKERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.102.168.355	772.786.200	70,12	12 Bulan/ 12 Kecamatan	12 Bulan/ 12 Kecamatan	100
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :						
				1	Perluasan Kesempatan Kerja	1.102.168.355	772.786.200	70,12	21 Kecamatan	21 Kecamatan	100
				III	PENGLOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	53.752.027	51.107.000	95,08	12 Bulan/ 1 Dokumen	12 Bulan/ 1 Dokumen	100
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :						
				1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	31.386.170	31.012.000	98,81	12 Bulan	12 Bulan	100
				2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	22.365.857	20.095.000	89,85	12 Bulan	12 Bulan	100
				IV	PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	292.526.114	285.181.344	97,49	25 Perusahaan	25 Perusahaan	100
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :						
				1	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	87.352.210	87.350.000	100,00	15 Perjanjian	15 Perjanjian	100
				2	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	205.173.904	197.831.344	96,42	1 Dokumen	1 Dokumen	100

				V	PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	181.552.887	177.759.700	97,91	50 Kasus	50 Kasus	100	
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :							
				1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	51.326.905	50.633.700	98,65	50 Kasus	50 Kasus	100,00	
				2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	98.099.470	95.028.100	96,87	50 Kasus	50 Kasus	100,00	
				3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	32.126.512	32.097.900	99,91	15 Serikat	15 Serikat	100,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4,763,644,726	4,654,725,639	97,71				
8		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,KB, PEMBERDAYAANPEREMPUAN DAN PE LINDUNGAN ANAK			I	Pelebagaan Pengarus utamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	57,028,301	55,952,100	98.11			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI:							
				1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	57,028,301	55,952,100	98.11	30 org perencana opd	30 org perencana opd	100,00	
				II	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	53,021,326	50,499,960	95.24				
					SUB KEGIATAN MELIPUTI							
				1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	53,021,326	50,499,960	95.24	30 org kader parpol dan organisasi khusus perempuan	30 org kader parpol dan organisasi khusus perempuan	100,00	
				III	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	204,208,290	202,299,386	99.07				

					SUB KEGIATAN MELIPUTI							
				1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	85,115,180	83,436,526	100	8 kecamatan dan 2 desa, masing-masing kegiatan terdiri dari 25 org maka 25 x 10 = 250 org + 20 org forum puspa	8 kecamatan dan 2 desa, masing-masing kegiatan terdiri dari 25 org maka 25 x 10 = 250 org + 20 org forum puspa	100,00	
				2	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	119,093,110	118,862,860	99.81	75 Orang (5 kecamatan)	75 Orang (5 kecamatan)	100,00	
				IV	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	109,820,286	109,820,286	100.00				
					SUB KEGIATAN MELIPUTI							
				1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	109,820,286	109,820,286	100.00	10 Desa	10 Desa	100,00	
				V	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	142,275,930	131,581,110	92.48				
					SUB.KEGIATAN MELIPUTI							
				1	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	142,275,930	131,581,110	92.48	20 orang (6 Kecamatan)	20 orang (6 Kecamatan)	100,00	
				VI	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2,351,639,081	2,293,302,531	97.52				
					SUB KEGIATAN MELIPUTI							
				1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48,070,544	46,403,264	96.53	21 Kecamatan	21 Kecamatan	100,00	

				2	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,303,568,537	2,246,899,267	97.54	21 Kecamatan	21 Kecamatan	100,00
				VII	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44,151,845	41,788,450	94.65			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI:						
				1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	44,151,845	41,788,450	94.65	21 Kecamatan	21 Kecamatan	100,00
				VIII	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	69,257,630	68,649,630	99.12			
					SUB.KEGIATAN MELIPUTI						
				1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	69,257,630	68,649,630	99.12	Terlaksananya Kegiatan Hari Anak	Terlaksananya Kegiatan Hari Anak	100,00
				IX	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	709,819,729	701,780,989	98.87			
					SUB.KEGIATAN MELIPUTI						
				1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	488,553,125	482,979,385	98.86	7 kecamatan regenerasi forum anak, 14 desa terbentuknya forum anak	7 kecamatan regenerasi forum anak, 14 desa terbentuknya forum anak	100,00
				2	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	221,266,604	218,801,604	98.89	4x pertemuan gugus tugas, 2x RIRA, 4X Pertemuan SRA, Pertemuan APASAI, VLH, Terlaksananya Penilaian KLA	4x pertemuan gugus tugas, 2x RIRA, 4X Pertemuan SRA, Pertemuan APASAI, VLH, Terlaksananya Penilaian KLA	100,00

				X	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	112,950,000	112,742,000	99.82			
					SUB.KEGIATAN MELIPUTI						
				1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	112,950,000	112,742,000	99.82	30 Desa	30 Desa	100,00
				XI	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	375,417,246	372,961,646	99.35			
					SUB.KEGIATAN MELIPUTI						
				1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	262,042,000	259,586,400	99.06	10 Desa	10 Desa	100,00
				2	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	113,375,246	113,375,246	100.00	10 Desa	10 Desa	100,00
				XII	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	534,055,062	513,347,551	96.12			
					SUB.KEGIATAN MELIPUTI						
				1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	534,055,062	513,347,551	96.12	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00
9	KETAHANAN PANGAN					4,258,254,076	3,729,366,515	87.58			
		DINAS KETAHANAN PANGAN		I	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1,962,619,429	1,589,304,427	80.98			
					SUB.KEGIATAN MELIPUTI						
				1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	730,049,915	486,472,415	66.64	3 Kegiatan	2 Kegiatan	66,66
				2	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	1,232,569,514	1,102,832,012	89.47	17 Kelompok Wanita Tani (KWT)	17 Kelompok Wanita Tani (KWT)	100,00
				II	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	166,856,243	163,486,243	97.98			
					SUB.KEGIATAN MELIPUTI						

				1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	133,145,001	132,085,001	99.20	21 Kecamatan	21 Kecamatan	100,00
				2	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	33,711,242	31,401,242	93.15	21 Kecamatan	21 Kecamatan	100,00
				III	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	345,045,150	303,730,150	88.03			
					SUB.KEGIATAN MELIPUTI						
				1	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	42,819,000	35,194,000	82.19	16 Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	16 Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	100,00
				2	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	302,226,150	268,536,150	88.85	20 Ton Beras Medium	20 Ton Beras Medium	100,00
				IV	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1,464,968,635	1,356,472,430	92.59			
					SUB.KEGIATAN MELIPUTI						
				1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapitaper Tahun	205,698,127.00	204,798,127.00	99.56	2 Iven (Lomba Cipta Menu Tingkat Kabupaten & Provinsi) dan Buku Laporan Pola Konsumsi Masyarakat	2 Iven (Lomba Cipta Menu Tingkat Kabupaten & Provinsi) dan Buku Laporan Pola Konsumsi Masyarakat	100,00
				2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeka ragam Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1,259,270,508.00	1,151,674,303.00	91.46	41 Kelompok Wanita Tani (KWT) (Lokus Stunting, PEN & Inflasi)	41 Kelompok Wanita Tani (KWT) (Lokus Stunting, PEN & Inflasi)	100,00
				V	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	68,457,675	68,157,675	99.56			
					SUB.KEGIATAN MELIPUTI						
				1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	68,457,675	68,157,675	99.56	21 Kecamatan	21 Kecamatan	100,00
				VI	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	250,306,944	248,215,590	99.16			
					SUB.KEGIATAN MELIPUTI						
				1	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	250,306,944	248,215,590	99.16	63 Sampel pangan segar	63 Sampel pangan segar	100,00
10	URUSAN PERTANAHAN					937,116,144	801,681,340	85.55			

		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		I	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	649,713,854	554,774,850	85.39			
					SUB.KEGIATAN MELIPUTI						
				1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	649,713,854	554,774,850	85.39	3 kegiatan	3 kegiatan	100,00
				II	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	188,822,290	178,406,290	94.48			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI:						
				1	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	188,822,290	178,406,290	94.48	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00
				III	Penerbitan Izin Membuka Tanah	98,580,000	68,500,200	69.49			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI						
				1	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	98,580,000	68,500,200	69.49	100%	100%	100,00
11		URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				10,458,147,145	10,365,237,620	99.11			
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP		I	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	25,364,468	25,364,468	100.00			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI:						
				1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	25,364,468	25,364,468	100.00	1 dokumen	0 dokumen	0
				II	Pencegahan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	331,780,680.00	330,096,680.00	99.49			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI:						
				1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	331,780,680.00	330,096,680.00	99.49	20 perusahaan	20 perusahaan	100,00
				III	Penanggulangan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	24,655,440	24,655,440	100.00			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI:						
				1	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	24,655,440	24,655,440	100.00	1 tahun	1 tahun	100,00
				IV	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	5,801,743,927	5,757,331,925	99.23			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI:						
				1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5,801,743,927	5,757,331,925	99.23	1 tahun	1 tahun	100,00
				V	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan /atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan	304,312,228	289,435,207	95.11			

					Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
					SUB KEGIATAN MELIPUTI:						
				1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	163,941,000	149,675,979	91.30	10 Kegiatan/ usaha	13 Kegiatan/ usaha	110,00
				2	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	140,371,228	139,759,228	99.56	40 Perusahaan	55 Perusahaan	100,00
				VI	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	726,881,000	725,837,000	99.86			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI:						
				1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	726,881,000	725,837,000	99.86	1 tahun	1 tahun	100,00
				VII	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	89,083,176	88,793,176	99.67			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI:						
				1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	89,083,176	88,793,176	99.67	1 buku	1 buku	100,00
				IX	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	62,259,798	62,144,298	99.81			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI:						
				1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	62,259,798	62,144,298	99.81	1 tahun	1 tahun	100,00
				X	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	56,798,796	52,323,796	92.12			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI:						
				1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	56,798,796	52,323,796	92.12	1 tahun	1 tahun	100,00
				XI	Pengelolaan Sampah	3,035,267,632	3,009,255,630	99.14			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI:						
				1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	8,156,690	8,156,690	100.00	1 tahun	1 tahun	

				2	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	873,832,350	848,089,350	97,05	1 tahun	1 tahun	100,00
				3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1,084,435,102	1,084,435,102	100,00	1 tahun	1 tahun	100,00
				4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/Kota	1,068,843,490	1,068,574,488	99,97	1 tahun	1 tahun	100,00
12	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					8.581.699.804	7.528.768.629	87,73	1 Program/6 kegiatan	Program/6 kegiatan	
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	5.941.447.565	5.610.092.016	94,42			
					KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARA. DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	294.486.637	286.867.931	97,41			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI:						
				1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	128.224.900	127.567.109	99,49	8 Dokumen	8 Dokumen	100
				2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPJ	23.455.510	23.455.150	18,29	1 Dokumen	1 Dokumen	100
				3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	142.806.227	135.845.672	105,94	1 Dokumen	1 Dokumen	100
					KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.378.640.261	3.287.494.070	97,30			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI:						
				1.	Peyediaan Gaji dan Tunjangan Asn	3.373.011.171	3.281.866.570	97,30	12 Bulan	12 Bulan	100
				2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.629.090	5.627.500	99,97	1 kegiatan	1 kegiatan	100
					KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.165.487.646	816.840.558	70,09			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI:						
				1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.364.800	15.272.000	99,40	12 Bulan	12 Bulan	100
				2.	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	244.205.459	238.200.000	97,54	12 Bulan	12 Bulan	100
				3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.991.925	31.581.000	98,72	12 Bulan	12 Bulan	100
				4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.003.500	61.750.500	88,21	12 Bulan	12 Bulan	100
				5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.441.560	55.028.100	99,25	12 Bulan	12 Bulan	100

				6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	26.784.000	19.404.000	72,45	12 Bulan	12 Bulan	100
				7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	384.555.000	231.250.506	60,13	12 Bulan	12 Bulan	100
					KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	450.790.000	439.700.000	97,54			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI:						
				1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	450.790.000	439.700.000	97,54	1 Unit	1 Unit	100
				2.	Pengadaan Mebel	554.347.500	491.452.051	88,65	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
				3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya				12 Bulan	12 Bulan	100
					KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.000.000	4.000.000	100,00			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI:	92.964.000	71.253.179	76,65			
				1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.130.000	14.130.000	100,00	12 Bulan	12 Bulan	100
				2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	520.428.300	510.251.473	98,04	12 Bulan	12 Bulan	100
				3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.784.000	19.404.000	72,45	12 Bulan	12 Bulan	100
				4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	384.555.000	231.250.506	60,13	12 Bulan	12 Bulan	100
					KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	450.790.000	439.700.000	97,54			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI:						
				1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.074.373	80.020.257	87,86	12 Bulan	12 Bulan	100
				2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.839.750	17.820.000	99,89	12 Unit	12 Unit	100
				3.	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	248.748.000	246.069.000	98,92	12 Bulan	12 Bulan	100
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB					11.930.435.617	8.151.506.448	68,33	3 PROGRAM 6 KEGIATAN 18 SUB KEGIATAN	3 PROGRAM 6 KEGIATAN 18 SUB KEGIATAN	80.81
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	I	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		241.398.189	240.075.189	99,45	21 Kecamatan	21 Kecamatan	91.84
					KEGIATANNYAMELIPUTI:						

					PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	241.398.189	240.075.189	99,45			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :						
				1.	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	241.398.189	240.075.189	99,45	21 Kecamatan	21 Kecamatan	91.84
				II	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.621.916.307	5.762.986.245	87,03	21 Kecamatan	21 Kecamatan	77.59
					KEGIATANNYAMELIPUTI:						
					PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL	1.553.151.503	1.463.924.130	94,26			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :						
				1.	Advokasi Program KKBPK Kepada Stakholder dan mitra kerja	147.263.292	137.663.832	93,48	21 Kecamatan	21 Kecamatan	81.55
				2.	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media massa cetak dan Elektronik serta media luar ruang	306.445.495	306.445.495	100,00	21 Kecamatan	21 Kecamatan	100
				3.	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	1.011.300.001	935.559.152	92,51	21 Kecamatan	21 Kecamatan	71.76
				4.	Pengendalian program KKBPK	88.142.715	84.255.651	95,59	21 Kecamatan	21 Kecamatan	99.69
					PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)	2.561.348.697	2.294.123.947	89,57			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :						
				1.	Penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB	1.261.333.697	1.044.317.697	82,79	100%	64,33%	64.33
				2.	Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	1.300.015.000	1.249.806.250	96,14	18 Kader	18 Kader	100
					PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANA PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,347,688,755	1,585,143,588	67.52			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :						
				1.	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan kb ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	82.500.000	45.705.114	55,40	100%	67,02%	67.02

				2.	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka pangan (MKJP)	469.999.829	416.005.900	88,51	100%	68,41%	68.41
				3.	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	82.524.274	80.241.500	97,23	100%	53,58%	53.58
				4.	Peningkatan kompetensi tenaga pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	111.016.172	107.376.172	96,72	100%	76,32%	76.32
				5.	Dukungan operasional pelayanan KB bergerak	972.107.900	574.264.200	59,07	100%	68,24%	68.24
				6.	Promosi dan konseling KB pasca persalinan dan pasca keguguran	81.794.822	74.218.012	90,74	100%	74,62%	74.62
					PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISAI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB	707.473.110	707.127.270	99,95			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :						
				1.	Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	51.973.110	51.627.270	99,33	21 Kecamatan	21 Kecamatan	98.73
				2.	Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB	655.500.000	655.500.000	100,00			
				III	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.067.121.121	2.148.445.014	42,40	21 Kecamatan	21 Kecamatan	97.38
					KEGIATANNYAMELIPUTI:						
					PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	5.067.121.121	2.148.445.014	42,40			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :						
				1.	Orientasi/ pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	303.557.647	303.557.490	100,00	21 Kader	21 Kader	91.26

					2.	promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi keluarga/ UPPKS)	4.364.740.000	1.447.493.374	33,16	21 Kader	21 Kader	98.23
					3.	promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjut usiaan serta pengelolaan keuangan keluarga)	398.823.474	397.394.150	99,64	21 Kecamatan	21 Kecamatan	98.13
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						47.981.177.279	46.200.943.786	96,29	2PROGRAM 9 KEGIATAN 15 SUB KEGIATAN	2PROGRAM 9 KEGIATAN 15 SUB KEGIATAN	99,35
		DINAS PERHUBUNGAN		I		PROGRAM PENYELENGGARAANN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	36.649.142.382	35.441.643.285	96,71	100%	99,34%	99,34
						KEGIATANNYA MELIPUTI :						
						PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/KOTA	334,600,000	330,797,000	98.86			
						SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :						
					1.	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	334,600,000	330,797,000	98.86	4 dokumen	4 dokumen	100
						PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	31.935.169.830	31.874.072.344	99,81			
						SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :						
					1.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/kota	4.595.338.080	4.575.416.200	99,57	500 unit	500 unit	100
					2.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan jalan	27.339.831.750	27.298.656.144	99,85	500 unit	500 unit	100
						PENERTIBAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR	31.750.035	31.432.500	99,00			
						SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :						
					1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	31.750.035	31.432.500	99,00	12 Laporan	12 Laporan	100

					PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	266.641.000	193.782.000	72,68			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :						
					1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5.150.000	2.575.000	50,00	4 unit	4 unit	100
					2. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	72.925.000	5.700.000	7,82	3200 dokumen	3200 dokumen	96.14
					3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	188.566.000	185.507.000	98,38	9 unit	9 unit	100
					PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	1.144.788.560	1.138.543.450	99,45			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :						
					1. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupate/Kota	838.285.360	836.594.000	99,80	12 Laporan	12 Laporan	100
					2. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	36.503.750	33.510.000	91,80	12 Laporan	12 Laporan	100
					3. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	269.999.450	268.439.450	99,42	12 Laporan	12 Laporan	100
					PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA	58.256.000	55.850.822	95,87			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :						
					1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	48.206.000	46.700.822	96,88	12 Laporan	12 Laporan	100
					2. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	10.050.000	9.150.000	91,04			
					AUDIT DAN INSPEKTASI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN	88.750.000	88.650.000	99,89			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :						
					1. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	88.750.000	88.650.000	99,89	12 Laporan	12 Laporan	100

					PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.123.786.957	2.059.312.169	65,92			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :						
				1.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.123.786.957	2.059.312.169	65,92	5 unit	5 unit	100
				II	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	227.250.000	226.950.000	99,87	100%	99,76%	99.76
					KEGIATAN MELIPUTI :						
					PEMBANGUNAN DAN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU	227.250.000	226.950.000	99,87			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :						
				1.	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	227.250.000	226.950.000	99,87	3 unit	3 unit	99.76
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					4.858.187.316,00	4.809.319.696,00	98,99	2 program 3 kegiatan 10 sub kegiatan	2 program 3 kegiatan 10 sub kegiatan	99.32
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN		I	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.628.316.690	3.582.865.250	98,75	100%	99,38%	99.38
					KEGIATANNYA MELIPUTI :						
					PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.628.316.690	3.582.865.250	98,75			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :						
				1.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	223.440.000	223.440.000	100,00	100%	97,41%	97.41
				2.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.202.465.000	2.185.552.420	99,23	100%	99,97%	99.97
				3.	Pelayanan Informasi Publik	288.090.850	273.063.650	94,78	100%	99,59%	99.59
				4.	Manajemen Komunikasi Krisis	140.145.840	128.161.180	91,45	100%	97,23%	97.23

					5.	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	774.175.000	772.648.000	99,80	100%	99,85%	99.85	
				II	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		1.229.870.626	1.226.454.446	99,722	100%	98,73%	98.73	
					KEGIATANNYA MELIPUTI :								
					PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DI TETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		422.537.540	422.026.160	99,88				
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :								
					1.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	54.583.540	54.583.540	100,00	100%	90,08%	90.08	
					2.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	367.954.000	367.442.620	99,86	100%	99,62%	99.62	
					PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		807.333.086	804.428.286	99,64				
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :								
					1.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	348.345.000	347.186.500	99,67	100%	98,79%	98.79	
					2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	66.097.086	66.096.786	100,00	100%	97,84%	97.84	
					3.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	392.891.000	391.145.000	99,56	100%	98,97%	98.97	
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						4.397.114.684	4.133.634.856	94,01	5 program 5 kegiatan 7 sub kegiatan	5 program 5 kegiatan 7 sub kegiatan	96,99	
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL			I	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		218.644.573	218.504.923	99,94	100%	99%	99.43	
					KEGIATANNYA MELIPUTI :								
					PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN NYA DAM DAERAH KABUPATEN/KOTA		218.644.573	218.504.923	99,94				
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :								

				1.	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	59.721.714	59.582.064	99,77	100%	99.95%	99.95
				2.	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	158.922.859	158.922.859	100,00	100%	97.60%	97.60
				II	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	54.962.530	53.807.530	97,90	100%	94.65%	94.65
					KEGIATANNYA MELIPUTI :						
					Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	54.962.530	53.807.530	97,90			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :						
				1.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/kota	54.962.530	53.807.530	97,90	100%	94.65%	94.65
				III	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	313.853.116	313.775.366	99,98	100%	98.21%	98.21
					KEGIATANNYA MELIPUTI :						
					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM USAHA MIKRO DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	313.853.116	313.775.366	99,98			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :						
				1.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	313.853.116	313.775.366	99,98	100%	98,21%	98.21
				IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.968.125.221	2.714.507.005	91,46	100%	92,54%	92,54
					KEGIATANNYA MELIPUTI :						
					PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	2.968.125.221	2.714.507.005	91,46			

					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :						
				1.	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.153.516.348	1.020.469.732	88,47	100%	100%	100
				2.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.814.608.873	1.694.037.273	93,36	100%	90,46%	90,46
				V	PROGRAM PENGEMBANGAN UKM	437.329.452	430.957.052	98,54	100%	89,84%	89,84
					KEGIATANNYA MELIPUTI :						
					PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL	437.329.452	430.957.052	98,54			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :						
				1.	Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta desain dan Teknologi	437.329.452	430.957.052	98,54	100%	89,84%	89,84
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					1.445.014.820	1.314.141.547	90,94		4 program 4 kegiatan 7 sub kegiatan	4 program 4 kegiatan 7 sub kegiatan 92,44
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		I	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	79.183.780	65.953.000	83,29	100%	78,62%	78,62
					KEGIATANNYA MELIPUTI :						
					PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	79.183.780	65.953.000	83,29			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :						
				1.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	79.183.780	65.953.000	83,29	100%	83,67%	83,67
				II	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	766.574.760	714.407.547	93,19	100%	96,21%	96,21
					KEGIATANNYA MELIPUTI :						
					PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	766.574.760	714.407.547	93,19			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :						

					1.	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	311.592.046	307.075.509	98,55	100%	96.79%	96,79
					2.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	131.050.628	114.542.750	87,40	100%	95.86%	95,86
					3.	Koordinasi dan sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	323.932.086	292.789.288	90,39	100%	95.70%	95,70
				III	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		393.340.300	331.060.000	84,17	100%	91.87%	91,87
					KEGIATANNYA MELIPUTI :							
					PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		393.340.300	331.060.000	84,17	100%	91.87%	91,87
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :							
					1.	Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	302.010.300	263.110.000	87,12	100%	88.06%	88,06
					2.	Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	91.330.000	67.950.000	74,40	100%	96.49%	96,49
				IV	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		205.915.980	202.721.000	98,45	100%	99.26%	99,26
					KEGIATANNYA MELIPUTI :							
					PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA		205.915.980	202.721.000	98,45	100%	99.26%	99,26
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :							
					1.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	205.915.980	202.721.000	98,45	100%	99.26%	99,26
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						8,536,684,495	8,361,140,715	97.94	2 program 5 kegiatan 7 sub kegiatan	2program 5kegiatan 7 sub kegiatan	97,94

		DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	I	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.116.577.402	2.115.603.400	99,95	100%	98,60%	98,60
				KEGIATANNYA MELIPUTI :						
				PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA	2.116.577.402	2.115.603.400	99,95	100%	98,60%	98,60
				SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :						
				1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	1.120.000.019	1.119.909.823	99,99	90 Peserta	90 Peserta	100
				2. Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	996.577.383	995.693.577	99,91	100%	84,58%	84,58
			II	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	10.968.909.908	10.860.687.039	99,01	100%	97,89%	97,89
				KEGIATANNYA MELIPUTI :						
				PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.556.886.086	2.510.515.086	98,19	100%	93,49%	93,49
				SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :						
				1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	2.556.886.086	2.510.515.086	98,19	6 Paket	6 Paket	92,77
				PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLANHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	504.438.106	447.941.736	88,80	100%	100%	100
				SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :						
				1. Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	504.438.106	447.941.736	88,80	3 Event	3 Event	100

					PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI	53.665.684	53.215.684	99,16	100%	100%	100
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :						
				1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	53.665.684	53.215.684	99,16	22 Cabor	22 Cabor	100
					PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI	7.853.920.032	7.849.014.533	99,94	100%	99,23%	99.23
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI :						
				1.	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	7.700.885.347	7.696.024.710	99,94	5 Event	5 Event	99.36
				2.	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	153.034.685	152.989.823	99,97	12 Bulan	12 Bulan	94.84
	STATISTIK					93.765.000	92.955.000	99,14	1 Program, 1 Kegiatan	1 Program, 1 Kegiatan	
19	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN			I	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	93.765.000	92.955.000	99,14			
					PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	93.765.000	92.955.000	99,14			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
				1	Membangun Metadata Statistik Sektoral	93.765.000	92.955.000	99,14	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100,00
	PERPUSTAKAAN								1 Program 3 Kegiatan 3 Sub Kegiatan	1 Program 3 Kegiatan 3 Sub Kegiatan	
		DINAS PEPUSTAKAAN DAN ARSIP									
				I	PROGRAMPEMBINAAN PERPUSTAKAAN	656.797.357,00	637.931.499,00	97,13			
					Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	148.438.211,00	148.065.518,00	99,75			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
				1	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	148.438.211,00	148.065.518,00	99,75	1200 eksemplar	1200 eksemplar	100,00
					Pembudayaan Gemar membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	464.250.792,00	452.123.477,00	97,39			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						

					1.	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	154.967.895,00	150.066.295,00	96,84	4 Even	4 Eeven	100,00
					2.	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	133.677.998,00	128.364.998,00	96,03	4 Lomba	4 Lomba	100,00
					3.	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	175.604.899,00	173.692.184,00	98,91	17 Kecamatan	17 Kecamatan	95,00
						Pelestarian naskah kunomilik daerah Kabupaten/Kota	44.108.354,00	37.742.504,00	85,57			
						SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
					1.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	44.108.354,00	37.742.504,00	85,57	50 Eksplorer	50 Eksplorer	100,00
	KEARSIPAN						187.557.974,00	177.431.673,00	94,60	2 Program 4 Kegiatan 4 Sub Kegiatan	2 Program 4 Kegiatan 4 Sub Kegiatan	
				I		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	105.325.739,00	103.595.739,00	98,36			
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	86.072.445,00	84.342.445,00	97,99			
						SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
					1.	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	86.072.445,00	84.342.445,00	97,99	1800 Berkas	1800 Berkas	100,00
						Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	19.253.294,00	19.253.294,00	100,00			
						SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
					1.	Akuisisi, pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	19.253.294,00	19.253.294,00	100,00	2500 Berkas	2500 Berkas	100,00
				II		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	82.232.235,00	73.835.934,00	89,79			
						Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	44.358.970,00	41.572.970,00	93,72			
						SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
					1.	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	44.358.970,00	41.572.970,00	93,72	70 Arsip	70 Arsip	100,00
						Penyelamatan Arsip perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/ atau dibubarkan, dan pemekaran daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	37.873.265,00	32.262.964,00	85,19			
						SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
					1.	Pendataan Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat daerah Kabupaten/Kota	37.873.265,00	32.262.964,00	85,19	1000 Arsip	1000 Arsip	100,00

20	URUSAN PERDAGANGAN				1,705,901,727	1,674,549,316	98.16	10 kegiatan/13 sub kegiatan	kegiatan/13 sub kegiatan	98.16
	DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL									
				Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	64,108,573	53,222,573	83.02			
				SUB KEGIATAN :						
			1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	64,108,573	53,222,573	83.02	164 Pelaku Usaha	164 Pelaku Usaha	100%
				Penerbitan Tanda Daftar Gudang	10,392,230	10,391,933	100.00	21 Kecamatan	21 Kecamatan	100%
				SUB KEGIATAN :						
			1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	10,392,230	10,391,933	100.00	16 Kecamatan	16 Kecamatan	100%
				Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	111,862,750	107,252,250	95.88			
				SUB KEGIATAN :						
			1	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	111,862,750	107,252,250	95.88	6 Pasar	6 Pasar	100%
				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	514,057,626	510,746,576	99.36	4 Pasar	4 Pasar	100%
				SUB KEGIATAN :						
			1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	514,057,626	510,746,576	99.36	1 Paket	1 Paket	100%
				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	36,277,467	36,277,467				
				SUB KEGIATAN :						
			1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	16,086,397	16,086,397	100.00	35 PKL	35 PKL	100%
			2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	20,191,070	20,191,070	100.00	4 Pasar	4 Pasar	100%
				Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	50,124,134	46,409,934	92.59			
				SUB KEGIATAN :						
			1	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	50,124,134	46,409,934	92.59	21 Kecamatan	21 Kecamatan	100%
				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	479,642,898	478,886,378	99.84			
				SUB KEGIATAN :						
			1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	11,302,650	11,302,650	100.00	19 Kecamatan	19 Kecamatan	100%

					2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	468,340,248	467,583,728	99.84	8 Kecamatan	8 Kecamatan	100%
						Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13,377,929	13,377,929	100.00			
						SUB KEGIATAN :						
					1	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	13,377,929	13,377,929	100.00	7 Distributor	7 Distributor	100%
						Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	376,594,500	368,520,656	97.86			
						SUB KEGIATAN :						
					1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	256,365,888	249,029,688	97.14	654 UTTP	654 UTTP	100%
					2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	120,228,612	119,490,968	99.39	40 Pemeilik Usaha	40 Pemilik Usaha	100%
						Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	49,463,620	49,463,620	100.00			100%
						SUB KEGIATAN :						
					1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	49,463,620	49,463,620	100.00	2 Event Pameran	2 Event Pameran	100%
22	URUSAN INDUSTRI						3,834,776,025	3,457,193,621	90.15	3 kegiatan/6 sub kegiatan	3 kegiatan/6 sub kegiatan	90.15
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA											
						Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3,637,227,807	3,268,944,517	89.87			
						SUB KEGIATAN :						
					1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	319,290,560	315,619,996	98.85	1 tahun	1 tahun	100%
					2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	797,683,650	776,575,000	97.35	7 unit	7 unit	100%
					3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2,520,253,597	2,176,749,521	86.37	1 dok	1 dok	100%
						Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	88,812,322	86,805,712	97.74			
						SUB KEGIATAN :						

					1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	88,812,322	86,805,712	97.74	12 bulan	12 bulan	100%
						Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	108,735,896	101,443,392	93.29			
						SUB KEGIATAN :						
					1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	46,432,456	45,953,000	98.97	1 dok	1 dok	100%
					2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	62,303,440	55,490,392	89.06	1 dok	1 dok	100%
23	SEKRETARIAT DAERAH						24,768,972,161	23,790,516,393	96.04	10 Kegiatan/ 32 Sub Kegiatan	10 Kegiatan/ 32 Sub Kegiatan	96.04
						SEKRETARIAT DAERAH						
						Penataan Organisasi	1,130,447,434	964,303,361	85.30			
						SUB KEGIATAN :						
					1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	545,387,275	474,753,228	87.05	100	87.05	87.05
					2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	150,285,073	143,037,179	95.18	100	95.18	95.18
					3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	147,343,386	109,879,336	74.57	100	74.57	74.57
					4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	160,034,400	148,075,318	92.53	100	92.53	92.53
					5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	127,397,300	88,558,300	69.51	100	69.51	69.51
						Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5,621,930,865	5,510,808,863	98.02			
						SUB KEGIATAN :						
					1	Fasilitasi Keprotokolan	4,524,118,868	4,415,256,416	97.59	100	97.59	97.59
					2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	285,046,250	284,718,650	99.89	100	99.89	99.89
					3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	812,765,747	810,833,797	99.76	100	99.76	99.76
						Administrasi Tata Pemerintahan	1,665,529,301	1,560,778,607	93.71			
						SUB KEGIATAN :						
					1	Penataan Administrasi Pemerintahan	152,582,104	149,282,104	97.84	100	97.84	97.84
					2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1,179,723,256	1,087,286,440	92.16	100	92.16	92.16

				3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	333,223,941	324,210,063	97.29	100	97.29	97.29
					Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	10,564,599,873	10,183,537,932	96.39			
					SUB KEGIATAN :						
				1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6,688,581,007	6,431,356,256	96.15	100	96.15	96.15
				2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	3,127,101,541	3,029,568,551	96.88	100	96.88	96.88
				3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	748,917,325	722,613,125	96.49	100	96.49	96.49
					Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	837,304,742	740,613,199	88.45			
					SUB KEGIATAN :						
				1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	298,066,788	259,419,722	87.03	100	87.03	87.03
				2	Fasilitasi Bantuan Hukum	248,962,057	227,046,757	91.20	100	91.20	91.20
				3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	290,275,897	254,146,720	87.55	100	87.55	87.55
					Fasilitasi Kerjasama Daerah	823,795,393	768,873,058	93.33			
					SUB KEGIATAN :						
				1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	747,697,162	697,403,097	93.27	100	93.27	93.27
				2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	22,911,507	20,985,737	91.59	100	91.59	91.59
				3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	53,186,724	50,484,224	94.92	100	94.92	94.92
					Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	887,887,132	877,429,092	98.82			
					SUB KEGIATAN :						
				1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	260,852,644	253,382,324	97.14	100	97.14	97.14
				2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	421,447,730	418,961,910	99.41	100	99.41	99.41
				3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	205,586,758	205,084,858	99.76	100	99.76	99.76
					Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	491,154,421	480,090,589	97.75			
					SUB KEGIATAN :						
				1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	206,959,240	204,015,208	98.58	100	98.58	98.58
				2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	149,310,373	141,915,573	95.05	100	95.05	95.05
				3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	134,884,808	134,159,808	99.46	100	99.46	99.46
					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2,065,004,605	2,024,558,757	98.04			

					SUB KEGIATAN :						
				1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	832,943,000	801,543,852	96.23	100	96.23	96.23
				2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	900,650,626	891,603,926	99.00	100	99.00	99.00
				3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	331,410,979	331,410,979	100.00	100	100.00	100.00
					Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	681,318,395	679,522,935	99.74			
					SUB KEGIATAN :						
				1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	404,709,395	403,723,703	99.76	100	99.76	99.76
				2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	129,947,050	129,444,330	99.61	100	99.61	99.61
				3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	146,661,950	146,354,902	99.79	100	99.79	99.79
24	URUSAN SEKRETARIAT DPRD					41,528,194,288	35,627,556,201	85.79	7 kegiatan / 25 sub kegiatan	7 kegiatan / 25 sub kegiatan	85.79
	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH										
					Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2,878,707,039	2,101,725,023	73.01	3 Laporan	3 Laporan	100%
					SUB KEGIATAN :						
				1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1,558,068,192	1,026,246,286	65.87	1 Laporan	1 Laporan	100%
				2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1,180,105,500	1,013,494,790	85.88	1 Laporan	1 Laporan	100%
				3	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	140,533,347	61,983,947	44.11	1 Laporan	1 Laporan	100%
					Pembahasan Kebijakan Anggaran	921,668,530	881,031,127	95.59	6 Dokumen	5 Dokumen	83,33%
					SUB KEGIATAN :						
				1	Pembahasan KUA dan PPAS	245,758,560	238,227,127	96.94	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
				2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	216,242,000	214,384,600	99.14	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
				3	Pembahasan APBD	133,047,200	123,839,800	93.08	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
				4	Pembahasan APBD Perubahan	121,475,400	116,319,600	95.76	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
				5	Pembahasan Laporan Semester	3,259,000	0	0.00	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
				6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	201,886,370	188,260,000	93.25	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
					Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	10,566,766,869	9,650,988,589	91.33	5 Laporan	5 Laporan	100%

					SUB KEGIATAN :							
				1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang dan Pemerintahan Hukum	2,855,280,440	2,284,868,245	80.02	1 Laporan	1 Laporan	100%	
				2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3,126,987,914	2,985,947,500	95.49	1 Laporan	1 Laporan	100%	
				3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1,987,730,515	1,807,540,259	90.93	1 Laporan	1 Laporan	100%	
				4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	2,422,051,600	2,397,916,185	99.00	1 Laporan	1 Laporan	100%	
				5	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	174,716,400	174,716,400	100.00	1 Laporan	1 Laporan	100%	
					Peningkatan Kapasitas DPRD	8,111,803,750	7,421,536,501	91.49	100 Persen	100 Persen	100%	
					SUB KEGIATAN :							
				1	Pendalaman Tugas DPRD	1,933,702,200	1,518,399,845	78.52	45 Orang	45 Orang	100%	
				2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	3,666,597,950	3,582,483,056	97.71	1 Laporan	1 Laporan	100%	
				3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	558,200,000	367,375,000	65.81				
				4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	384,000,000	384,000,000	100.00	8 Orang	8 Orang	100%	
				5	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1,569,303,600	1,569,278,600	100.00	1 Laporan	1 Laporan	100%	
					Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1,361,461,100	986,650,000	72.47	4 Laporan	4 Laporan	100%	
					SUB KEGIATAN :							
				1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	366,697,500	150,000,000	40.91	1 Laporan	1 Laporan	100%	
				2	Pelaksanaan Reses	994,763,600	836,650,000	84.11	3 Laporan	3 Laporan	100%	
					Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	78,898,640	73,495,600	93.15	1 Laporan	1 Laporan	100%	
					SUB KEGIATAN :							
				1	Pengawasan Kode Etik DPRD	78,898,640	73,495,600	93.15	1 Laporan	1 Laporan	100%	
					Fasilitasi Tugas DPRD	17,608,888,360	14,512,129,361	82.41	3 Laporan	3 Laporan	100%	
					SUB KEGIATAN :							
				1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	13,689,415,930	11,532,711,695	84.25	1 Laporan	1 Laporan	100%	
				2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	754,969,320	700,276,840	92.76	1 Laporan	1 Laporan	100%	
				3	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3,164,503,110	2,279,140,826	72.02	1 Laporan	1 Laporan	100%	
25	URUSAN PERENCANAAN					6,211,325,760	6,065,071,134	97.65	2 program / 6 kegiatan / 31 sub kegiatan	2 program / 6 kegiatan / 31 sub kegiatan	97.65	

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH											
				I	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3,075,934,413	3,039,982,961	98.83	100%	100%	100
					Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1,937,438,570	1,903,686,295	98.26	100%	100%	100
					SUB KEGIATAN :						
				1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	260,273,206	260,104,006	99.93	1 dokumen	1 dokumen	100
				2	Pelaksanaan Konsultasi Publik	347,230,799	337,340,324	97.15	21 berita acara	21 berita acara	100
				3	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	43,175,476	40,435,476	93.65	4 berita acara	4 berita acara	100
				4	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	338,798,036	324,237,736	95.70	1 berita acara	1 berita acara	100
				5	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	128,945,130	128,945,130	100.00	21 berita acara	21 berita acara	100
				6	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	819,015,923	812,623,623	99.22	1 dokumen	1 dokumen	100
				1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	65,815,265	61,868,025	94.00	1 dokumen	1 dokumen	100
				2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	43,746,872	43,546,700	99.54	7 perangkat daerah	7 perangkat daerah	100
				3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	137,517,042	134,405,900	97.74	1 laporan	1 laporan	100
				4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	44,558,849	44,558,000	100.00	1 laporan	1 laporan	100
				5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	69,391,300	67,450,225	97.20	1 dokumen	1 dokumen	100
				6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	163,911,120	162,458,972	99.11	9 perangkat Daerah	9 perangkat Daerah	100
				7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	408,741,512	402,927,496	98.58	9 perangkat Daerah	9 perangkat Daerah	100

				8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	75,285,538	72,704,800	96.57	1 laporan	1 laporan	100
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	800,663,949	726,899,920	90.79	100%	100 %	100
					SUB KEGIATAN :						
				1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	251,181,813	229,062,150	91.19	6 perangkat daerah	6 perangkat daerah	100
				2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	69,004,686	66,115,300	95.81	6 perangkat daerah	6 perangkat daerah	100
				3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	222,940,217	200,245,200	89.82	1 laporan	1 laporan	100
				4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	90,321,973	80,446,155	89.07	1 dokumen	1 dokumen	100
				5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	72,650,800	61,547,150	84.72	6 perangkat daerah	6 perangkat daerah	100
				6	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	94,564,460	89,483,965	94.63	6 perangkat daerah	6 perangkat daerah	100
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	1,325,759,900	1,308,268,135	98.68	100%	100%	100
					SUB KEGIATAN :						
				1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	208,138,939	207,749,950	99.81	1 dokumen	1 dokumen	100
				2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10,083,404	9,559,300	94.80	4 perangkat daerah	4 perangkat daerah	100
				3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	26,895,400	26,760,000	99.50	4 perangkat daerah	4 perangkat daerah	100
				4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	719,019,972	712,801,774	99.14	1 laporan	1 laporan	100
				5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	41,427,581	39,078,150	94.33	1 dokumen	1 dokumen	100
				6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	18,556,712	18,548,600	99.96	21 kecamatan	21 kecamatan	100

				7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	34,955,876	34,188,550	97.80	21 kecamatan	21 kecamatan	100
				8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	266,682,016	259,581,811	97.34	1 laporan	1 laporan	100

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Program/Kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

NO	URUSAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	KELUARAN/ HASIL		
					Rp.	Rp		TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	8	9		10	11	12
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN				10.481.252.410	9.264.671.899	88,39	7 Kegiatan 27 Sub Kegiatan	7 Kegiatan 27 Sub Kegiatan	
		DINAS PERIKANAN			10.481.252.410	9.264.671.899	88,39			
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, waduk,Rawa, dan genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.947.349.216	1.492.170.556	76,63	2.600 ton		
				SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
				1. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	51.231.611	51.191.611	99,92	1 laporan	1 laporan	100,00
				2. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1.896.117.605	1.440.978.945	76,00	65 kelompok	65 kelompok	100,00
				Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/Kota	111.462.294	109.412.294	98,16	2.600 ton		
				SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
				1. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	111.462.294	109.412.294	95,22	20 kelompok	20 kelompok	100,00
				Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	4.086.132.518	3.619.508.192	88,58	66.900		
				SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
				1. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	4.038.697.657	3.579.692.931	88,63	128 kelompok	128 kelompok	100,00
				2. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	47.434.861,00	39.815.261,00	83,94	15 Kelompok		
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.212.124.704	1.087.253.723	89,70	66.900 ton		
				SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
				1. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	756.000.000	700.646.111	92,68	7.000.000 Benih	7.000.000 benih	100,00

					2	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	367.804.650	298.557.910	81,17	4 Paket	4 Paket	100,00
					3.	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	88.320.054	88.049.702	99,69	12 Bulan		
						Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2.229.731.762	2.107.795.900	94,53	100 %		
						SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
					1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2.229.731.762	2.107.795.900	94,53	5 danau/ lubuk larangan	5 danau/ lubuk larangan	100,00
						Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-	-			
						Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	60.308.524	54.618.524	90,57	8.000 Ton		
						SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
					1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	60.308.524,00	54.618.524,00	90,57	20 UPI	20 UPI	100,00
						Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	834.143.392	793.912.710	95,18	8.000 Ton		
						SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
					1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	270.497.053	235.527.486	87,07	12 bulan	12 bulan	100,00
					2.	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	563.646.339	558.385.224	99,07	12 bulan	12 bulan	100,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						3.988.937.280	3.971.212.580	99,56	3 Kegiatan	3 Kegiatan	
		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.845.147.159	1.835.032.459	99,45	6 Sub Kegiatan	6 Sub Kegiatan	
						SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
					1.	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	524.897.808	516.402.808	98,38	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00

				2.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.320.249.351	1.318.629.651	99,88	4 unit	8 unit	200,00
					Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya tarik Destinasi dan Kawaswan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.606.553.512	1.599.743.512	99,58			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
				1.	Penguatan Promosi melalui media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1.606.553.512	1.599.743.512	99,58	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00
					Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	537.236.609	536.436.609	99,85			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
				1.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	463.896.769	463.096.769	99,83	24 event	27 event	113,00
				2.	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	73.339.840	73.339.840	100,00	21 kecamatan	21 kecamatan	100,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					16.461.040.009	15.954.442.556	96,92	5 Kegiatan 9 Sub Kegiatan	5 Kegiatan 9 Sub Kegiatan	
		DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				7.184.259.548	6.779.019.936	94,36			
					Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	865.253.190	614.617.840	71,03			
					SUB KEGIATAN :						
				1.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	435.173.210	193.177.110	44,39	35 UPJA dan 10 unit alsintan	35 UPJA dan 10 unit alsintan	100,00
				2.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	430.079.980	421.440.730	97,99	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00
					Pengembangan Sarana Pertanian	-	-	-			
					Pembangunan Prasarana Pertanian	4.960.364.139	4.852.038.679	97,82			
					SUB KEGIATAN :						
				1.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	68.026.698	63.246.698	92,97	4 unit	4 unit	100,00
				2.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	848.077.198	844.097.948	99,53	2.250 meter	2.250 meter	100,00
				3.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	4.044.260.243	3.944.694.033	97,54	20 ha	20 ha	100,00
					Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	261.773.344	215.336.317	82,26			
					SUB KEGIATAN :						

					1.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	261.773.344	215.336.317	82,26	3.220 Ha	3.220 Ha	100,00
					Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		389.351.174	334.199.469	85,83			
					SUB KEGIATAN :							
					1.	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	389.351.174	334.199.469	85,83	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00
					Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		1.572.770.891	1.377.445.471	87,58			
					SUB KEGIATAN :							
					1.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	848.326.295	767.492.295	90,47	226 Ha	226 Ha	100,00
					2.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	724.444.596	609.953.176	84,20	1.820 kelompok	1.820 kelompok	100,00
4	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN						9.276.780.461	9.175.422.620	98,91	11 Kegiatan 15 Sub Kegiatan	11 Kegiatan 15 Sub Kegiatan	
					Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		1.983.555.781	1.961.885.823	98,91			
					SUB KEGIATAN :							
					1.	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	337.515.885,00	330.849.523,00	98,02	4.500 ekor	4.500 ekor	100,00
					2.	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1.646.039.896	1.631.036.300	99,09	9.000 batang	9.000 batang	100,00
					Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam daerah Kabupaten/Kota		49.405.883	45.597.883	92,29			
					SUB KEGIATAN :							
					1.	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	49.405.883	45.597.883	92,29	12 bulan	12 bulan	100,00
					Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan hijauan Pakan ternak Dalam daerah Kabupaten/Kota		1.398.615.199	1.389.642.899	99,36			
					SUB KEGIATAN :							
					1.	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	1.398.615.199	1.389.642.899	99,36	12 bulan	12 bulan	100,00
					Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-			
					Pengembangan Prasarana Pertanian		261.687.279	252.969.599	96,67			
					SUB KEGIATAN :							

					1.	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana Kawasan dan Komoditas Perkebunan	261.687.279	252.969.599	96,67	2 buku	2 buku	100,00
						Pembangunan Prasarana Pertanian	4.003.708.283	3.983.312.927	99,49			
						SUB KEGIATAN :						
					1.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3.703.708.342	3.684.833.986	99,49	21 Km	21 Km	100,00
					2.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	299.999.941	298.478.941	99,49	1 unit	1 unit	100,00
						Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	596.169.462	577.421.304	96,86			
						SUB KEGIATAN :						
					1.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	234.921.993	229.420.201	97,66	1.000 ekor	1.000 ekor	100,00
					2.	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	361.247.469	348.001.103	96,33	12.000 ekor	12.000 ekor	100,00
						Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	55.784.800	55.754.800	99,95			
					1.	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	55.784.800	55.754.800	99,95	6.300 ekor	6.300 ekor	100,00
						Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	142.143.650	127.851.650	89,95			
					1.	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	142.143.650	127.851.650	89,95	12 bulan	12 bulan	100,00
						Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	77.079.243	75.729.243	98,25			
					1.	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	77.079.243	75.729.243	98,25	12 bulan	12 bulan	100,00
						Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	126.530.208	124.548.628	98,43			
					1.	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	126.530.208	124.548.628	98,43	15 perusahaan	15 perusahaan	100,00
						Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	582.100.673	580.707.865	99,78			
					1.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	524.625.065	523.467.065	99,78	48 orang	48 orang	100,00
					2.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	57.475.608	57.240.800	99,59	5 KUB	5 KUB	100,00

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Perumusan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Kampar selain bertujuan untuk mencapai sasaran dalam visi dan misi pembangunan daerah juga memperhatikan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi. Pertumbuhan perekonomian sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Kebijakan dan prioritas Nasional antara lain adalah; ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, pembangunan energi dan pertambangan (kegiatan padat karya), peningkatan investasi, pengembangan industri dan perdagangan, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Sedangkan untuk kebijakan Pemerintah Provinsi Riau yaitu; mendorong transformasi ekonomi ke arah hilirisasi industri yang mengolah hasil-hasil pertanian, perkebunan dan pertambangan, pengembangan industri, pengembangan pertanian, dan pengembangan pariwisata. Untuk Kabupaten Kampar kebijakan yang dilaksanakan meliputi; peningkatan struktur perekonomian daerah berbasis potensi lokal dan berdaya saing, pengembangan pertanian, industri, pariwisata, dan investasi. Selanjutnya perkembangan perekonomian daerah juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah lain yang berada di sekitar Kabupaten Kampar. Faktor internal yang diupayakan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yaitu kebijakan fiskal/APBD dalam bidang perekonomian, peningkatan daya saing daerah dengan keunggulan perekonomian yang dilandasi oleh sumber daya manusia yang berkualitas, dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Selain dari pada itu faktor non ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan perekonomian yaitu kestabilan kondisi sosial dan politik, diharapkan dapat mendukung dan mendorong peningkatan perekonomian daerah.

Memperhatikan kondisi makro yang lalu dan perkembangan saat ini, kondisi perekonomian pada tahun 2021 diperkirakan akan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020, walaupun masih adanya pengaruh pandemi Covid-19 yang berdampak luas dan sistematis terutama dalam bidang ekonomi. Dampak yang ditimbulkan masih terasa di tahun 2021 berupa melemahnya kegiatan ekonomi karena penurunan daya beli, penurunan intensitas produksi karena pelarangan untuk

berkumpul yang dkuatirkan terjadinya penyebaran Covid-19, sehingga mengurangi jumlah tenaga kerja dan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya akan menurunkan penerimaan daerah. Namun demikian Kabupaten Kampar sebagai daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang besar terutama di sektor pertanian dalam arti luas, masih memiliki beberapa prospek ekonomi yang masih dapat diandalkan, antara lain :

1. Karakteristik perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian dan perikanan, sebagian besar merupakan komoditi perkebunan karet, kelapa sawit, dan budidaya ikan air tawar;
2. Pergeseran peran sektor dari primer ke sekunder dan tersier menunjukkan trend positif bahkan relatif cepat sehingga akan memacu perolehan nilai tambah produksi yang cukup signifikan bagi masyarakat lokal atau semakin terpacunya pertumbuhan PDRB;
3. Pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan air bersih, termasuk infrastruktur perdesaan telah ikut mendorong kelancaran arus barang dan jasa dari pusat-pusat produksi ke pasar, dan mengefisienkan sebaran distribusi barang-barang konsumsi masyarakat sehingga diharapkan dapat menahan laju inflasi;
4. Sektor UMKM dan koperasi sebagai pilar penting dalam perekonomian yang tahan krisis, sudah cukup berperan penting dalam berbagai bidang usaha, yang menjadi alternatif lapangan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat;
5. Untuk tumbuh sekitar 0,33% pada tahun 2021, masih dibutuhkan dorongan yang kuat berupa investasi baru. Dalam hal ini perlu selalu optimis akan hadirnya investor untuk menangani sektor-sektor yang memerlukan teknologi tinggi dan modal yang besar. Namun terhadap kegiatan ekonomi yang hanya memerlukan teknologi sederhana/tepat guna dan tidak memerlukan permodalan yang besar diharapkan dapat ditangani oleh UMKM dan usaha perseorangan yang ada di wilayah Kampar cukup banyak terutama usaha produktif yang berada di tingkat kecamatan dan perdesaan;
6. Beberapa pengungkit pertumbuhan ekonomi yang dapat diandalkan terutama pada wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta wilayah-wilayah yang perbatasan langsung dengan kota/kabupaten dan provinsi tetangga. Dengan

semakin meningkatnya pembangunan infrastruktur, menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik sehingga akan menambah spirit perkembangan perekonomian dan investasi;

7. Terganggunya stabilitas perekonomian secara internasional dan nasional yang disebabkan karena terjadinya pandemi Covid-19, sehingga berdampak terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Kampar berupa penurunan dan perlambatan laju pertumbuhan oleh karena terdapat beberapa sektor strategis yang berskala nasional dan internasional di Kabupaten Kampar;
8. Masih sangat memungkinkan untuk mengembangkan pasar lokal, meningkatkan daya saing daerah melalui produk unggulan utama sehingga dalam beberapa tahun kedepan Kampar memiliki produk-produk unggulan yang mampu bersaing di pasar regional, nasional maupun internasional dan sekaligus mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat regional Provinsi Riau, Nasional, dan Internasional.

Disamping itu asumsi-asumsi yang menjadi pertimbangan dalam memprakirakan kondisi ekonomi dan keuangan daerah pada tahun 2021 adalah :

1. Apabila perekonomian nasional akan fokus pada upaya pemulihan sebagai akibat dari terjadinya pandemi Covid-19, sehingga pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya sekitar 5,6% akan mengalami koreksi dan pada gilirannya akan terjadi restrukturisasi dan perubahan alokasi APBN sehingga dana perimbangan diprediksikan akan mengalami penurunan;
2. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional terganggu akibat pandemi Covid-19, maka ekonomi regional akan ikut terganggu dan apabila pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2021 diprediksikan 0,74% (kuartal 1) dan Provinsi Riau 0,41% (kuartal 1), maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar diharapkan akan tumbuh sebesar 0,33%. Sementara itu pada saat yang sama diprediksikan PAD akan mengalami peningkatan sebesar 3,44%;
3. Porsi belanja APBD dipengaruhi oleh kondisi rasio peningkatan dana perimbangan dan sharing pembiayaan kemitraan dengan pemerintah pusat dan provinsi;
4. Pelaksanaan APBN dan APBD sebagai bagian dari investasi pemerintah dan stimulan perekonomian daerah, berjalan lancar sesuai dengan perencanaan;

5. Perekonomian Nasional maupun daerah tidak terganggu oleh situasi politik dan keamanan yang kurang kondusif;
6. Tidak terjadi bencana alam yang merusak infrastruktur dan sumber-sumber perekonomian masyarakat, walaupun terjadi namun masih dalam batas-batas normal yang dapat dikendalikan dampaknya;
7. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diperkirakan akan meningkat pada kisaran 0,33% yang diharapkan akan mendorong pemerataan, dan juga sudah mulai tumbuhnya investasi karena situasi yang semakin kondusif, walaupun diperkirakan inflasi sekitar 0,15%;
8. Tingkat kemiskinan diprediksi hanya akan sedikit berkurang pada tahun 2021 sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengembangkan potensi sumberdaya manusia dan potensi masyarakat untuk membangun pondasi ekonomi kerakyatan yang kokoh walaupun efek dari pandemi Covid-19 sangat terasa mengganggu sendi-sendi kehidupan perekonomian masyarakat.
9. Dengan kondisi di atas diharapkan pada tahun 2021 semakin meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan baru pada sektor formal sehingga tingkat pengangguran terbuka pada periode yang sama diharapkan akan semakin menurun.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horison waktunya dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Dalam mencapai pembangunan Kabupaten Kampar lima tahun ke depan, maka terdapat strategi-strategi dari setiap sasaran yang disampaikan sebagai berikut:

MISI I. Menyiapkan Sumber Daya Manusia Yang Handal Dan Profesional

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana, mutu tenaga kependidikan, manajemen pelayanan pendidikan dan peningkatan budaya baca
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pencegahan dan penanggulangan penyakit serta membangun pola hidup sehat
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja, perlindungan dan jaminan sosial serta kesetaraan gender dan perlindungan anak
	Meningkatnya pembangunan kepemudaan	Meningkatkan pembangunan kepemudaan melalui peningkatan sarana dan prasarana olah raga dan peran serta pemuda dalam pembangunan
Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) berbasis sistem elektronik, ketentraman dan ketertiban umum serta penanggulangan pasca bencana
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perijinan, administrasi kependudukan, pengaduan masyarakat dan kewilayahan dengan memanfaatkan teknologi informasi

MISI II. Mengembangkan Pertanian Yang Modern Dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Mengembangkan pertanian berbasis potensi daerah Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya kesejahteraan petani	Meningkatkan penerapan teknologi produksi dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan peran penyuluh
	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan serta meningkatkan kemandirian pangan
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengembangkan perlindungan sumberdaya alam dan ruang terbuka hijau serta mengelola persampahan dan mengendalikan perusakan lingkungan hidup
	Pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	Melakukan monitoring dan penegakan hukum terhadap tingkat kepatuhan RTRW agar terjaga keseimbangan manusia dengan kondisi lingkungan hidup yang berkualitas

MISI III. Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar Yang Berkualitas Dan Proporsional

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Mendorong percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dan penunjang kePU-an, penyediaan pelayanan air bersih dan infrastruktur irigasi
	Meningkatnya permukiman dan fasilitas umum lainnya	Meningkatkan pembangunan rumah layak huni, lingkungan perumahan yang sehat serta utilitas umum
	Meningkatnya infrastruktur transportasi	Meningkatkan kualitas layanan transportasi guna meningkatkan angka kelaikan angkutan dan menurunkan angka kecelakaan

MISI IV. Menciptakan Iklim Usaha Yang Kondusif

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatkan Perekonomian Daerah	Meningkatnya Investasi	Meningkatkan iklim dan realisasi investasi serta meningkatkan promosi dan kerjasama investasi
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan ekonomi kerakyatan	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil menengah, koperasi dan BUMDES serta meningkatkan pengelolaan pasar dan perlindungan konsumen

MISI V. Mengembangkan Kawasan Pariwisata Dan Industri Pengolahan Yang Maju

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatkan Sektor Pariwisata	Meningkatnya destinasi wisata	Mengembangkan dan meningkatkan destinasi wisata potensial
	Meningkatnya pemasaran dan promosi pariwisata	Mengembangkan program pemasaran pariwisata yang menarik, baik melalui media maupun penyelenggaraan eventevent wisata
Meningkatkan Pengelolaan Industri Sektor	Meningkatnya pembangunan industri	Mengembangkan industri kecil dan menengah di bidang pengolahan hasil melalui peningkatan kapasitas dan penerapan teknologi industri

MISI VI. Memperkuat Citra Kampar Sebagai Serambi Mekah Riau Yang Religius, Beradat Dan Berbudaya

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Membangun masyarakat yang beriman dan bertakwa	Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan yang harmois dan wawasan kebangsaan
Menumbuhkembangkan adat dan budaya daerah	Memajukan dan melestarikan adat dan budaya daerah	Meningkatkan pelestarian seni budaya daerah dan cagar budaya

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan Kabupaten Kampar dalam pentahapan strategi lima tahun ke depan ditunjukkan sebagai berikut:

MISI I. Menyiapkan Sumberdaya Manusia Yang Handal Dan Profesional

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN 2019 - 2022
Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana, mutu tenaga kependidikan, manajemen pelayanan pendidikan dan peningkatan budaya baca	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal
	Pelaksanaan Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru dalam jabatan melalui latihan berkala dan merata, serta penguatan KKG (Kelompok Kerja Guru) dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran);
	Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan melalui pengembangan manajemen mutu dan penerapan teknologi informasi
	Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana pembelajar sepanjang hayat dan sarana peningkatan minat baca masarakat.
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pencegahan dan penanggulangan penyakit serta membangun pola hidup sehat	Pengembangan fasilitas dan standarisasi pelayanan kesehatan dasar meliputi sarana dan prasarana, mutu tenaga kesehatan, mutu manajemen pelayanan, jaminan kesehatan nasional, pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

	Peningkatan kualitas pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular
	Pengembangan promosi kesehatan masyarakat, perbaikan gizi masyarakat, keluarga berencana dan lingkungan sehat
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja, perlindungan dan jaminan sosial serta kesetaraan gender dan perlindungan anak	Peningkatan akses dan kesempatan kerja melalui kerjasama dengan dunia usaha seperti pelaksanaan jobfair
	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui beragam kegiatan pelatihan, magang dan BLK dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan industri
	Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
	Peningkatkan perlindungan anak dan peran serta perempuan dalam pembangunan melalui keserasian kebijakan dan penguatan kelembagaan
Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) berbasis sistem elektronik, ketentraman dan ketertiban umum serta penanggulangan pasca bencana	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan perkantoran berbasis sistem elektronik
	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
	Peningkatan fungsi dan peran DPRD terutama dalam pembentukan peraturan daerah
	Peningkatan upaya menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan penanggulangan pasca bencana
Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perijinan, administrasi kependudukan, pengaduan masyarakat dan kewilayahan dengan memanfaatkan teknologi informasi	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kewilayahan dengan memanfaatkan teknologi informasi
	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD

MISI II. Mengembangkan Pertanian Yang Modern Dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN 2019 - 2022
Meningkatkan penerapan teknologi produksi dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan peran penyuluh	Peningkatan kapasitas dan pengetahuan para penyuluh terhadap teknologi terbaru di bidang produksi dan pengendalian penyakit
	Peningkatan diseminasi teknologi terbaru di bidang produksi dan pengendalian penyakit melalui beragam metode penyuluhan
Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan serta meningkatkan kemandirian pangan	Pembaharuan data ketersediaan dan cadangan pangan
	Peningkatan efektivitas pengembangan desa mandiri pangan
Mengembangkan perlindungan sumberdaya alam dan ruang terbuka hijau serta mengelola persampahan dan mengendalikan perusakan lingkungan hidup	Peningkatan upaya-upaya perlindungan sumberdaya alam (hutan, lahan, air dan plasma nutfah)
	Peningkatan armada dan tenaga pengangkutan sampah ke TPA dan pengembangan TPS 3R
	Peningkatan persentase luasan Ruang Terbuka Hijau melalui pembangunan hutan dan taman kota
	Pengadaan sarana dan prasarana pengontrol dan pengendali pencemaran air dan udara
Melakukan monitoring dan penegakan hukum terhadap tingkat kepatuhan RTRW sehingga persentase RTH sesuai dengan ketentuan dan agar terjaga keseimbangan manusia dengan kondisi lingkungan hidup yang berkualitas	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang dan pengembangan sistem informasi pertanahan
	Peningkatan monitoring dan penegakkan hukum terhadap tingkat kepatuhan RTRW

MISI III. Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar Yang Berkualitas Dan Proporsional

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN 2019 - 2022
Mendorong percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dan penunjang ke-PU-an, penyediaan pelayanan air bersih dan infrastruktur irigasi	Percepatan pembangunan jalan, jembatan, drainase, gorong-gorong dan turap
	Peningkatan penyediaan alir baku dan sarana pengendalian banjir
	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Meningkatkan pembangunan rumah layak huni, lingkungan perumahan yang sehat serta utilitas umum	Peningkatan pembangunan rumah layak huni dan lingkungan perumahan yang sehat
	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana utilitas umum dan penerangan kawasan permukiman
Meningkatkan kualitas layanan transportasi guna meningkatkan angka kelaikan angkutan dan menurunkan angka kecelakaan	Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perhubungan
	Peningkatan kelaikan sarana angkutan dan keselamatan transportasi

MISI IV. Menciptakan Iklim Usaha Yang Kondusif

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN 2019 - 2022
Meningkatkan iklim dan realisasi investasi serta meningkatkan promosi dan kerjasama investasi	Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi melalui peningkatan pelayanan perijinan dan pemberian insentif
	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi melalui pameran, roadshow dan event-event lainnya
Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil menengah, koperasi dan BUMDES serta meningkatkan pengelolaan pasar dan perlindungan konsumen	Peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan BUMDES dalam peningkatan perekonomian masyarakat
	Peningkatan perlindungan konsumen, pengelolaan pasar dan pembinaan pedagang

MISI V. Mengembangkan Kawasan Pariwisata Dan Industri Pengolahan Yang Maju

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN 2019 - 2022
Mengembangkan dan meningkatkan destinasi wisata potensial	Peningkatan daya tarik wisata, jumlah pelaku usaha industri pariwisata dan jumlah SDM pengelola pariwisata
Mengembangkan program pemasaran pariwisata yang menarik, baik melalui media maupun penyelenggaraan event-event wisata	Peningkatan upaya pemasaran pariwisata
Mengembangkan industri kecil dan menengah di bidang pengolahan hasil melalui peningkatan kapasitas dan penerapan teknologi industri	Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi dan teknologi industri
	Pengembangan sentra-sentra industri potensial

MISI VI. Memperkuat Citra Kampar Sebagai Serambi Mekah Riau Yang Religius, Beradat Dan Berbudaya

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN 2019 - 2022
Meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan yang harmonis dan wawasan kebangsaan	Peningkatan kehidupan antar umat beragama yang harmonis melalui peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat serta peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
Meningkatkan pelestarian seni budaya daerah dan cagar budaya	Peningkatkan upaya pelestarian seni tradisional dan cagar budaya yang dimiliki

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

3.3.1 Rekomendasi DPRD Kabupaten Kampar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kampar Tahun 2021

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Nomor : 06/KPTS/DPRD/2022 Tanggal 19 Mei 2022 Tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kampar Tahun Anggaran 2021, adalah sebagai berikut:

A. PANSUS I BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

1. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH (VISI MISI)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, LKPJ disusun sebagai laporan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kampar 2017 – 2022.

Dalam dokumen tersebut telah ditetapkan visi Bupati Kampar adalah “ ***Terwujudnya Kabupaten Kampar Sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Relegius, Beradat, Berbudaya Dan Sejahtera***”. Visi tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam 6 (enam) misi yaitu :

- 1) Menyiapkan sumberdaya manusia yang handal dan profesional
- 2) Mengembangkan pertanian yang moderen dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- 3) Membangun infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan proporsional
- 4) Menciptakan iklim usaha yang kondusif
- 5) Mengembangkan kawasan pariwisata dan industri pengolahan yang maju
- 6) Memperkuat citra Kampar sebagai serambi Mekkah Riau yang relegius, beradat dan berbudaya

LKPJ merupakan gambaran kinerja Pemerintah Daerah secara utuh sepanjang tahun, dalam rangka pencapaian sasaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan tolok ukur kinerja yang tertuang dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD. LKPJ digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah oleh Pemerintah Pusat dalam rangka pengembangan kapasitas pemerintah Daerah.

Apabila merujuk kaedah tersebut diatas, Kami menilai laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah tidak mengalami peningkatan yang signifikan baik dari sisi narasi yang digunakan maupun data dan informasi yang disajikan. LKPJ terkesan kurang inovatif dan belum mampu menyajikan materi yang atraktif dan dengan cepat dapat di pahami. Laporan yang baik hendaknya tersusun secara sistematis, simpel, utuh dan lengkap serta memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif. Laporan juga menggambarkan kapasitas sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah. Untuk itu Kami minta perhatian Saudara Bupati agar dimasa yang akan datang lebih memperhatikan wujud dari LKPJ ini baik secara kontekstual, tekstual maupun tampilannya. Dengan dukungan teknologi informasi dewasa ini inovasi dan kreatifitas sangat terbuka luas dalam menyiapkan suatu dokumen yang bermutu.

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

1. Pemerintah Kabupaten Kampar menyusun perencanaan strategis dan taktis guna untuk menyelamatkan keberadaan Barang Milik Daerah dan untuk mencapai optimalisasi pemanfaatan asset Kabupaten Kampar;
2. Agar Pengelolaan Aset khususnya kendaraan dinas dan rumah dinas dilakukan oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang dengan baik dan serius karena dapat mempengaruhi peringkat hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh BPK Republik Indonesia di kemudian hari;

3. Agar persoalan Aset tidak menjadi temuan Pihak Pemeriksa, baik Pemeriksa Internal maupun Eksternal dan agar tidak menjadi persoalan hukum di kemudian hari maka Pengelolaan Aset Daerah harus berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Khusus untuk kendaraan dinas pengelolaannya harus pula berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang Milik Negara berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri;
5. Khusus untuk rumah dinas pengelolaannya mesti berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar membenahi system informasi akuntansi, system informasi manajemen barang milik daerah dan prosedur administrasi barang milik daerah dengan dukungan Teknologi Informasi yang kompetible untuk memaksimalkan transparansi pengelolaan Aset;
7. Meningkatkan Kapabilitas Pegawai yang terlibat dalam tata kelola Aset melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dengan hasil yang terukur;
8. Meningkatkan peran Inspektorat Kabupaten Kampar dalam Pengawasan Barang Milik Daerah;
9. Apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kampar untuk penyelamatan Aset-aset Pemerintah Daerah.

2. PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN

Dalam urusan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggara serta 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang mendelegasikan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang serta urusan pendukung.

Dengan melakukan analisa kualitatif dan kuantitatif terhadap laporan LKPJ yang disampaikan, maka beberapa penilaian, masukan dan rekomendasi dari Pansus I terhadap Kinerja berbagai urusan dimaksud sebagai berikut :

1) URUSAN PEMERINTAHAN

Pemerintahan daerah yang diselenggarakan menurut amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut asas tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sedang pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah pusat, dengan berdasar asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan terdapat urusan yang dilimpahkan dan ditugaskan kepada daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, dan pemerintah pusat melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. pembagian urusan tersebut

didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Usuran pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Secara umum Pansus I menilai pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan sudah berjalan dengan baik, apalagi kita dihadapkan dengan persoalan yang bersifat global yaitu Pandemi Covid 19.

Pemerintah Daerah harus mengkaji ulang asumsi- asumsi yang telah dibangun berikut strategi, sasaran dan program untuk pencapaiannya harus disusun ulang sehingga pembangunan tidak mengalami stagnan dan bencana dapat di tanggulangi. Pansus I menyadari penanggulangan dan pengendalian wabah ini telah memeras energi dan sumberdaya yang kita miliki. Untuk Pansus I menyampaikan terima kasih dan simpati yang mendalam kepada Pemerintah Daerah beserta jajaran yang terkait langsung dan tidak langsung dalam hal pandemi covid 19. Secara umum dapat kita lihat dan rasakan upaya pengendalian dan penanggulangan bencana Covid 19 di Daerah kita sudah menunjukkan hasil yang baik kendatipun kita tetap prihatin terhadap jatuhnya korban baik dikalangan masyarakat luas maupun tenaga medis. Semoga Allah menempatkan mereka ditempat yang sebaik-baiknya, Amiin.

Dalam kondisi yang sulit tersebut Pemerintah Kabupaten Kampar masih mampu meraih berbagai penghargaan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Riau. Menurut catatan yang kami miliki lebih dari 15 penghargaan yang telah diraih pemerintah di bawah kepemimpinan Buapti Bapak Catur Sugeng Susanto,SH,MH. Penghargaan tersebut merupakan rekognisi pemerintah pusat dan provinsi atas kinerja pemerintah daerah. Semoga pencapaian ini menjadi motivasi bagi pimpinan daerah beserta

jajarannya dimasa depan. Sekali lagi atas nama lemvaga dan rakyat Kabupaten Kampar izinkan saya menyampaikan terima kasih yang tulus seiring doa semoga bernilai ibadah disisi Allah SWT.

2) URUSAN PENDIDIKAN

Urusan pendidikan merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan ini menempati posisi yang strategis karena menyangkut kualitas sumberdaya manusia, kemajuan daerah dan daya saing daerah. Sumberdaya manusia dalam rencana strategis pembangunan kabupaten kampar termakhtub dalam misi I yaitu Menyiapkan sumberdaya manusia yang handal dan profesional dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan. Adapun strategi yang ditetapkan adalah meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana, mutu tenaga kependidikan, manajemen pelayanan pendidikan dan peningkatan budaya baca.

Bila dilihat dari perjanjian kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah raga Tahun 2021 (halaman 39) antara lain persentase guru SD dan SMP yang bersertifikasi rata-rata 55 %, Persentase Anak Usia Sekolah dari Keluarga Pra sejahtera yang sekolah lulus sampai SMP sebesar 28 %. Demikian juga dengan persentase Ruang Kelas SD dengan kondisi baik sebesar 62 % dan SMP 65 %. Bila kita perhatikan dana yang dialokasikan untuk program OPD ini mencapai Rp. 766.289.334.590,- dimana khusus untuk program pendidikan jumlah dana yang disediakan mencapai Rp.756.733.112.158 dan Rp.625.251.998.706 bersumber dari APBD Kabupaten Kampar.

Akan tetapi dari laporan LKPJ yang disampaikan masih ditemui permasalahan yang terkait dengan aparatur yang profesional yang masih kurang , rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik serta system manajemen pendidikan dan pengawasan pendidikan yang lemah. Fakta ini

tentu saja menjadi renungan bagi kita dan literasi untuk mereview perencanaan atau pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Kita sebaiknya berlapang dada untuk mengevaluasi sisi dan tahapan manajemen yang mana yang seharusnya kita benahi dan perbaiki. Sebaba kita semua tentu sepakat bahwa membangun sumberdaya manusia merupakan unsur penting dan sangat strategis

Kelalaian kita dalam persoalan sumberdaya manusia akan memberikan dampak yang luas dan panjang. Tenaga pendidik yang kurang bermutu tentu saja berdampak kepada kualitas proses belajar mengajar. Efek selanjutnya adalah kemampuan kognitif anak didik menjadi rendah dan generasi ini tentu saja tidak akan mempunyai daya saing yang tinggi dalam era persaingan global sekarang ini. Dengan tersedianya Teknologi Informasi baik sarana , kemudahan dalam mendapatkan serta biaya yang terjangkau akan mampu mengatasi ***distruksi*** dari berbagai dimensi.

Berkenan dengan hal tersebut Pansus I merekomendasikan agar Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga menerapkan sisitem manajemen pendidikan yang moderen yaitu manajemen yang berbasis teknologi informasi dengan didukung data yang valid dan akurat. Hari ini dunia sudah masuk ke era Revolusi Indusrti 4.0. Dunia tidak lagi berbicara ***Univerce*** tetapi sudah memasuki ***Metaverce***. Penggunaan ***Internet of things*** sudah menjadi keniscayaan dalam setiap unsur kehidupan termasuk dunia pendidikan. Jika hari ini kita masih berkuat dengan sistem pendidikan konvensional, maka jangan terkejut pada saatnya nanti generasi kita akan tergilas dalam persaingan yang semakin kompetitif dan ketat. Sudah saatnya dunia pendidikan kita ***MOVE- ON*** melalui penguasaan dan pemanfaatn teknologi informasi yang maju dan moderen baik oleh tenga pendidik, tenaga kependidikan maupun siswa siswi

3) URUSAN KESEHATAN

Urusan kesehatan termasuk kedalam Misi I Pemerintah Kabupaten Kampar dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Strategi yang diterapkan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pencegahan dan penanggulangan penyakit serta membangun pola hidup sehat. Kata kunci dalam penyelenggaraan urusan kesehatan adalah mutu pelayanan kesehatan.

Mutu pelayanan kesehatan sangat melekat dengan faktor- faktor subjektivitas individu yang berkepentingan dalam pelayanan kesehatan, seperti pasien, masyarakat dan organisasi masyarakat, profesi layanan kesehatan, dinas kesehatan, dan pemerintah daerah sehingga akan membentuk pandangan yang berbeda dalam definisi mutu pelayanan kesehatan. Perbedaan ini antara lain disebabkan oleh terdapatnya perbedaan latar belakang, pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, pengalaman, lingkungan dan kepentingan. Dengan demikian mutu pelayanan kesehatan harus dilihat dari berbagai dimensi dan perspektif.

Menurut Defenisi Kementrian Kesehatan Mutu pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap jasa pemakai pelayanan kesehatan yang sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk serta penyelenggaranya sesuai dengan standar dan kode etik profesi. Mutu pelayana kesehatan juga diartikan sebagai penampilan yang pantas atau sesuai (yang berhubungan dengan standar) dan suatu intervensi yang diketahui aman, yang dapat memberikan hasil kepada masyarakat yang bersangkutan dan yang telah mempunyai kemampuan untuk menghasilkan dampak pada kematian, kesakitan, ketidakmampuan dan kekurangan gizi.

Bagi pemakai jasa pelayanan kesehatan (masyarakat) mutu pelayanan kesehatan dipersepsikan memenuhi kebutuhan yang dirasakan, Sopan dan santun, tepat waktu , tanggap dan mampu menyembuhkan keluhan serta mencegah berkembangnya atau meluasnya penyakit. Sedangkan bagi tenaga pemberi layanan kesehatan mutu di artikan; ketersediaan peralatan, prosedur kerja dan protokol dan kebebasan profesi dalam setiap melakukan layanan kesehatan sesuai dengan teknologi kesehatan mutakhir. Bagi administrator pelayanan kesehatan, tidak secara langsung memberikan pelayanan kesehatan tetapi bertanggung jawab terhadap mutu layanan kesehatan yang menyangkut kebutuhan supervisi, keuangan dan logistik.

Apabila dilihat dari perjanjian kinerja Dinas Kesehatan terdapat 23 sasaran strategis dengan 128 indikator kinerja. Bila lebih dicermati seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja bermuara kepada peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayan kesehatan. Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 143.081.417.974,- anggaran yang di rasa cukup untuk mewujudkan sasaran dan tujuan urusan kesehatan. Akan tetapi kenyataan yang kita temui tingkat kepuasan masyarakat masih dibawah 80 %. Kita menyadari pandemi covid 19 telah menyita energi dan sumberdaya yang tersedia. Akan tetapi misi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan tidak bisa diabaikan. Sebab kekuatan dan kesejateraan suatu masyarakat indikator utamanya adalah derajat kesehatan masyarakatnya.

Permasalahan yang disampaikan pada LKPJ tahun 2021 lebih disebabkan oleh disiplin, integritas dan dedikasi tenaga kesehatan. Kita menyadari tenaga medis merupakan profesi yang rentan terhadap terpaparnya penyakit dan efek ikutan lainnya. Tetapi sebagai sumberdaya manusia dengan pengabdian kepada kemanusiaan resiko tersebut telah diketahui sebelumnya. Untuk Dinas Kesehatan, Pimpinan Rumah Sakit hendaknya memiliki konsep perlindungan terhadap tenaga medis baik di rumah sakit, puskesmas dan institusi pelayanan kesehatan lain. Dengan

demikian integritas dan dedikasi tenaga medis dapat terwujud seiring ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Untuk mewujudkan hal tersebut bukanlah pekerjaan yang sederhana. Hal tersebut memerlukan perencanaan yang komprehensif dan holistik serta komitmen dari Pimpinan Daerah dan DPRD Kabupaten Kampar. Dari sisi ini Pansus I berharap mari kita terus bangun dan kuatkan koordinasi dan sinergi pimpinan daerah, lembaga legislatif dan stakeholders lainnya untuk bersama-sama membangun dan mengembangkan urusan kesehatan dengan inprovisasi program dan mendapatkan pendanaan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pihak swasta lainnya.

Terkait keberadaan ambulance baik dari RSUD, Puskesmas maupun Ambulance Desa. Keluhan masyarakat yang kami tangkap, pada saat mobil tersebut berada di jalan raya sang driver menggunakan fasilitas salah satunya dengan membunyikan sirine. Seandainya ambulance tersebut membawa pasien atau orang sakit, tentunya pengguna jalan yang lain dengan ikhlas memberikan laluan. Akan tetapi banyak yang menduga ambulance tersebut tidak membawa pasien tetapi seolah-olah membawa pasien gawat darurat. Kami berharap kiranya Dinas Kesehatan bersama sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merumuskan suatu formulasi atau SOP Aturan Mengemudi Ambulance yang Benar, yang akan dijadikan bahan edukasi dan pegangan bagi petugas atau driver ambulance dimaksud.

B. PANSUS II BIDANG KEUANGAN, PAJAK DAN INFRASTRUKTUR KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kampar yang tergambar dalam pelaksanaan APBD merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah dan mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kampar tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui APBD dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas belanja daerah melalui belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer baik dari pemerintah pusat maupun transfer antar daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam pengelolaan penerimaan pendapatan daerah dilaksanakan dalam rangka efisiensi dan efektifitas dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kebutuhan, tuntutan dan dinamika yang berkembang sesuai dengan kemampuan sumberdaya yang dimiliki.

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi pengeluaran daerah untuk menunjang kegiatan yang telah direncanakan. Belanja Daerah disusun dengan dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input dengan memperhatikan kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Kebijakan belanja daerah harus tetap memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi, misi daerah serta perubahan lingkungan eksternal.

1) KEUANGAN

Keuangan yang dimaksud dalam laporan ini adalah laporan yang menyangkut Kebijakan, arah dan realisasi terkait Pendapatan dan Belanja Daerah. Pandemi Covid-19 yang mewabah di seluruh dunia tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan tetapi juga berdampak pada sektor perekonomian. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha tetapi juga Pemerintahan. Pemerintah sebagai instansi yang bertugas melayani masyarakat, harus mampu menanggulangi bencana Covid19 agar tidak makin meluas dan juga dituntut harus mampu melindungi masyarakat yang terdampak pandemi Covid -19. Urgensinya penanganan pandemi Covid-19 menyebabkan pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah yang aktif untuk menangani dampak pandemi Covid-19 ini. Tercatat kurang lebih sebanyak 23 regulasi penanganan bencana Covid-19 ditambah 7 eksisting regulasi terkait penanganan bencana.

Diantara regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang penanganan Pandemi Covid-19 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang. Perppu tersebut secara garis besar membahas dua hal, yang pertama kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah, yaitu mengatur kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kedua adalah kebijakan stabilitas sistem keuangan yang meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan negara. Disahkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang disusul dengan Inpres No 4 tahun 2020 menjadi landasan pelaksanaan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran pemerintah. Penyesuaian anggaran pemerintah, yang meliputi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan merupakan salah satu kunci awal respon yang harus dilakukan instansi pemerintah dalam menghadapi perkembangan masalah ini.

Tidak hanya pemerintah pusat, Pemerintah Daerah juga dituntut untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran. Implementasi refocusing dan realokasi anggaran ini tentu saja menimbulkan permasalahan pada pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Beberapa permasalahan terkait pengelolaan

keuangan Pemerintah disebabkan antara lain anggaran yang tidak memadai, regulasi yang bertubi tubi, ada traumatik dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga dan belum pernah terjadi bencana yang dampaknya berskala nasional seperti pandemi Covid-19. Tidak terkecuali pada Pemerintah Kabupaten Kampar, pengelolaan belanja yang digunakan untuk penanggulangan Covid 19 menimbulkan permasalahan baru. Misalnya saja dalam hal penatausahaan dan pertanggungjawaban pengeluaran belanja untuk Covid 19 yang jumlahnya cukup besar, terutama pada penggunaan Belanja Tidak Terduga.

Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 39 tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penanggulangan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah daerah diwajibkan menyediakan anggaran untuk penanggulangan Covid-19. Jika anggaran yang ada tidak mencukupi maka pemerintah diharuskan melakukan pergeseran anggaran serta menunda kegiatan tertentu.

Sebelum menyampaikan laporan ini lebih lanjut, Izinkan Pansus menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kabupaten atas prestasi meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau ***unqualified opinion*** yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Raihan. WTP pada tahun 2021 ini merupakan untuk keenam kalinya secara berturut-turut Pemerintah Kabupaten Kampar meraihnya. Bahkan menurut berita yang kami Baca Bupati Kampar secara khusus diminta oleh BPK mewakili beberapa Bupati dan Walikota untuk memberikan arahan pada acara penyerahan LHP oleh BPK Perwakilan Riau tahun 2021 di Ruang Auditorium Lantai 2 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Riau Pekanbaru, Rabu 17 Mei 2022. Ini sungguh prestasi yang menggembirakan dan membanggakan serta patut kita syukuri.

1.1. Pendapatan

Dalam LKPJ tahun 2021 kita disajikan tentang kondisi dan kebijakan keuangan Daerah. Pada sisi pendapatan disampaikan Kebijakan Umum Perubahan Pendapatan Daerah yaitu dengan menetapkan 3 (tiga) arah kebijakan yaitu; (1) Mengoptimalkan pendapatan Asli Daerah dari Pajak dan Retribusi Daerah dengan melaksanakan 9 (sembilan) kebijakan, (2) Memaksimalakan perolehan Pendapatan Transfer dengan melakukan 7 (tujuh) kebijakan dan (3) Mengoptimalkan perolehan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan tersebut telah membuahkan hasil meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 21.743.252.219,59 atau 8,84 % dari total PAD Tahun 2021 sebesar Rp.267.610.288.176,34 bila dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun 2020 sebesar Rp.245.867035.956,75. Pendapatan transfer mencapai Rp.2.161.245.800.300,00 atau 97,13 % dari target yang ditetapkan dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 113.144.484.335,00 atau 0,76 % diatas target. Walaupun Demikian secara total realisasi Pendapatan Daerah mencapai 97,63 % atau sebesar Rp. 2.480.928.780.920,76 dari target sebesar Rp.2.541.147.951.540.

Berdasarkan data tersebut diatas Kami Pansus II menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Saudara Bupati Kampar terkhusus aparaturnya yang terkait langsung dengan pengelolaan pendapatan daerah ini. Ditengah keterbatasan ruang gerak sesuai dengan protokol kesehatan dan kebijakan Work From Home (WFH), aparaturnya dimaksud mampu menggaet prestasi dalam pendapatan tersebut.

1.2. Belanja Daerah

Penetapan belanja daerah ditetapkan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Berdasarkan laporan yang disampaikan, realisasi Belanja Daerah Tahun 2021 sebesar Rp.2.501.626.248.277,14 atau 64,49 % dari Anggaran sebesar Rp. 2.647.390.998.717,00. Realisasi belanja Daerah ini mengalami kenaikan sebesar

Rp. 3.759.454.556.83 atau 0,15 % dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp. 2.497.866.793.720,31.

Perubahan belanja daerah pada tahun 2021 cukup signifikan. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Riau sehubungan dengan pandemi covid-19 sehingga daerah harus melakukan refocusing anggaran dan pengurangan belanja pada program, kegiatan dan sub kegiatan akibat berkurangnya dana transfer.

Permasalahan lain terkait belanja daerah karena kurang ketelitian aparatur dalam administrasi pengelolaan keuangan daerah seperti kesalahan dalam penulisan atau input kode rekening sehingga diperlukan revisi, Akibatnya terjadi penundaan pelaksanaan pekerjaan karena harus menunggu Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Permasalahan tersebut seharusnya tidak terjadi apabila prinsip kehati-hatian diterapkan. Untuk itu Pansus II mengingatkan agar kesalahan-kesalahan yang bersifar Human error tidak terulang lagi dimasa depan. Demikian juga dalam menetapkan suatu program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, disamping mengkaji dengan kesesuaian RPJPD, RPJMD dan Renstra OPD sebaiknya juga dilakukan Analisa Lingkungan Eksternal dan Analisa lingkungan Internal yang rigid sehingga kegiatan betul-betul bermanfaat dan memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat. Selanjutnya dalam penyusunan LKPJ sebaiknya di *upgrade* template nya dari tahun ke tahun sehingga narasi dan redaksinya lebih informatif.

2) PAJAK

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah pun memberikan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan diskresi dalam penetapan tarifnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak kabupaten/kota

terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Adapun retribusi daerah terbagi menjadi tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa usaha yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, yang meliputi pelayanan daerah dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan, atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh swasta.

Termasuk dalam golongan retribusi ini yaitu retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat pengi napan/pesanggrahan/vila, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air, serta retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Sedangkan retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Termasuk dalam golongan retribusi ini yaitu retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan.

Sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 antara lain adalah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bila dikaitkan dengan alokasi dana untuk OPD

Badan Pendapatan daerah pada APBD Perubahan Tahun 2021 sebesar Rp.22.010.247.590 dengan realisasi sebesar Rp. 19.427.152.141. Alokasi dana yang cukup besar tersebut telah mampu mendorong kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam pengelolaan Pendapatan Daerah. Hal ini dapat kita cermati dalam laporan realisasi pendapatan dari Pajak Daerah sebesar 146.101.632.400,00 yang melampaui anggaran sebesar 2,95 %. Demikian juga dengan realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp.12.773.657.760,00 dengan capaian 0,16 % diatas anggaran.

Yang menjadi perhatian oleh Pansus II adalah pada Dokumen LKPJ Tahun 2021 laporan terkait Badan Pendapatan Daerah informasinya realtif sedikit yang disampaikan sehingga Pansus II kurang memperoleh informasi yang utuh dan lengkap mengenai kinerja OPD ini.

Berkenan dengan hal tersebut, Pansus II meminta perhatian Saudara Bupati untuk :

1. Menyampaikan laporan Pajak Daerah dan Retribusi Daeah secara lengkap sebagai suplement dari dokumen LKPJ Tahun 2021sehingga DPRD mendapatkan laporan yang utuh dan konprehensif.
2. Dengan demikian penilaian atas kinerja OPD terkait dapat dilakukan lebih objektif.
3. Melakukan review trerhadap objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan melakukan forcasting pendapatan daerah dari Pajak dan Retribusi
4. Menggunakan Informasi Teknologi dengan memakai sistem yakni aplikasi berbasis komputerise, sekalipun harga untuk pengadaannya sistemnya relatif mahal akan tetapi manfaatnya akan besar dalam mendukung kinerja pendapatan khususnya pada pajak daerah dan retribusi daerah. Sebaliknya Para Pihak yang terkait akan mudah memantau progres kinerjanya.

3) INFRASTRUKTUR

Sebelum kami lebih lanjut menyampaikan laporan mengenai infrastruktur. Kami mengajak kita semua untuk meliha dan mencermati kebijakan strategis pemerintah terkait dengan pembangunan infrastruktur. Mengutip dari situs resmi Kementrian Sekretaris Negara dengan tofik " Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Indonesia Maju. Visi Indonesia maju membutuhkan adanya lompatan besar dalam merancang strategi pembangunan nasional, utamanya untuk memastikan terjadinya akselerasi pencapaian Indonesia maju dengan GDP ke-5 terbesar pada 2045. Bila mencermati berbagai capaian yang telah diraih oleh bangsa Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini, sesungguhnya kita telah memiliki modal awal untuk menuju Indonesia maju, indikatornya antara lain dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang stabil diatas 5%, menurunnya angka pengangguran dan jumlah masyarakat miskin, rendahnya tingkat ketimpangan berdasarkan indeks Gini Ratio serta bonus demografi yang dimiliki Indonesia.

Indonesia telah memiliki pondasi yang kokoh untuk mencapai cita-cita Indonesia maju tersebut, sebagai buah dari masifnya pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam 5 tahun terakhir, kita dapat menyaksikan berbagai pembangunan infrastruktur yang sudah mulai dirasakan manfaatnya dalam mendorong bergerakaknya ekonomi regional. Pembangunan infrastruktur secara massif dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia ini digagas guna memastikan terjaminnya ketersediaan infrastruktur agar dapat dapat menjadi lompatan bagi Indonesia untuk menuju negara maju, sekaligus dapat lepas dari perangkap sebagai negara berkembang saja atau "*middle income trap*".

Urgensi keberlanjutan pembangunan infrastruktur semakin dirasakan ditengah meningkat tajamnya persaingan ekonomi antar kawasan, karena dengan membangun infrastruktur sejatinya adalah membangun masa depan sebuah peradaban, karena dapat berperan sebagai stimulus bergerakaknya beragam aktivitas ekonomi. Melalui percepatan pembangunan infrastruktur secara lebih merata di seluruh tanah air, dapat tercipta konektivitas yang kuat antar wilayah, menurunkan biaya logistik, memperkecil ketimpangan, meningkatkan kualitas

hidup masyarakat, serta memupus kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan daya saing dan stimulus pertumbuhan ekonomi guna mencapai negara maju.

Selanjut jika kita perhatikan agenda strategis menyongsong Pertemuan G20, Kelompok kerja infrastruktur atau Infrastructure Working Group (IWG) yang secara spesifik membahas mengenai agenda prioritas terkait infrastruktur. Negara anggota G-20 telah sepakat untuk mendukung agenda yang diangkat dan berkomitmen untuk memberikan dukungan yang nyata terhadap pembangunan infrastruktur yang berfokus pada pemulihan pasca pandemi COVID-19. Selain itu, peningkatan investasi infrastruktur yang berkelanjutan, penyediaan infrastruktur yang inklusif dan resilient, serta pemanfaatan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang untuk membantu pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Negara anggota G-20 dan organisasi internasional telah mencapai kesepakatan dan berkomitmen untuk mengupayakan revitalisasi investasi infrastruktur dengan cara yang berkelanjutan, inklusif, mudah diakses, dan terjangkau, terutama melalui peningkatan keterlibatan sektor swasta untuk mendukung investasi publik dan lembaga keuangan internasional. Mengembangkan kebijakan untuk memobilisasi investasi infrastruktur inklusif untuk meningkatkan inklusi sosial dan mengatasi kesenjangan antar daerah.

Dalam agenda infrastruktur, terdapat empat agenda utama. Keempat agenda tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan investasi infrastruktur berkelanjutan dengan mendorong partisipasi sektor swasta
2. Menekankan peran infrastruktur dalam mendorong inklusi sosial dan mengurangi kesenjangan antar daerah
3. Meningkatkan investasi infrastruktur digital dan penggunaan teknologi dalam infrastruktur
4. Mendorong infrastruktur transformatif pasca COVID-19

Semenjak tahun 2021, InfraTracker telah digunakan untuk menganalisis dan melacak stimulus infrastruktur untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca COVID-19 dan mencapai hasil transformatif jangka panjang. Selain itu perlu juga kita cermati infrastruktur digital dan investasi teknologi dalam infrastruktur yang ditujukan untuk mempersempit kesenjangan digital. Hal ini dianggap penting, karena infrastruktur digital mampu menjembatani kesenjangan penyediaan layanan yang signifikan, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan akses terhadap layanan keuangan.

Konsep ini sangaja Pansus II sampaikan pada Sidang yang terhormat ini, bahwa sebagai bagian dari NKRI, kita harus mengambil bagian dalam pembangunan infrastruktur global. Sudah saatnya kita melakukan akselerasi dan keluar dari ruang kedaerahan ke dimensi yang lebih luas dengan catatan untuk mendorong kemajuan negeri kita. Anggota Dewan yang terhormat bersama-sama dengan pimpinan daerah serta jajarannya harus lebih membuka wawasan dan jejaring dengan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk membangun infrastruktur daerah ini. Era digital membutuhkan kolaborasi dan sindikasi dalam melaksanakan pembangunan utamanya infrastruktur

Apabila kita tidak meraih peluang ini tidak mustahil daerah kita akan menjadi daerah marjinal dimasa depan. Anak cucu kita akan menyalahkan kita karena kelalaian kita dalam mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman. Dalam ilmu ekonomi, infrastruktur merupakan wujud dari public capital (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah. Infrastruktur dalam hal tersebut meliputi jalan, jembatan, dan pengairan dan lainnya. Sedangkan menurut The Routledge Dictionary of Economics memberikan pengertian yang lebih luas lagi yakni peran strategis infrastruktur sebagai pelayan utama dari suatu negara atau daerah dalam membantu bergeraknya roda kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat.

Sesuai dengan kebijakan strategis Pembangunan Daerah maka perumusan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Kampar selain bertujuan untuk mencapai sasaran dalam visi dan misi pembangunan daerah juga memperhatikan

pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan Provinsi Riau. Bertitik tolak dari hal tersebut beberapa aspek ekonomi yang kita miliki dan dapat diandalkan antara lain Bidang infrastruktur adalah pembangunan infrastruktur jalan, irigasi dan air bersih. Demikian juga dengan infrastruktur pedesaan telah ikut berkontribusi dalam mendorong kelancaran arus barang dan jasa dari pusat-pusat produksi ke pasar dan telah mampu mengefisienkan sebaran distribusi barang-barang konsumsi masyarakat sehingga berpengaruh lebih lanjut terhadap laju inflasi.

Dalam mewujudkan infrastruktur yang tangguh dan kemanfaatan yang berkelanjutan dilakukan sejak penyusunan perencanaan yang membutuhkan berbagai kajian mendalam, seperti analisa daya dukung lingkungan, yang salah satunya bersumber dari data dan informasi geologi. khususnya Geologi Teknik. yang diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi permukaan dan bawah permukaan, yaitu melalui penyajian data dan informasi morfologi dan kemiringan lereng, jenis batuan, daya dukung tanah, mikrozonasi, potensi likuifaksi, potensi longsor, potensi banjir, sumberdaya air tanah, serta jarak dari aliran sungai. Pembangunan infrastruktur di daerah kita dilakukan melalui pengarusutamaan infrastruktur tangguh melalui penerapan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria,), penerapan SNI (Standar Nasional Indonesia). Hal-hal tersebut kami sadari sangat tehnikal, namun untuk mengingatkan OPD terkait agar memperhatikan prinsip-prinsip tersebut diatas.

Dalam APBD Kabupaten Kampar Tahun 2021 telah ditetapkan 11 sasaran strategis dengan 15 indikator kinerja yang dituangkan kedalam 6 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp.158.817 225.257 dengan realisasi sebesar 141.799.069.946 atau 89,28 %. Sedangkan yang dilaksanagn oleh Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman terdiri dari 8 Program dengan jumlah Anggaran sebesarRp. 55.898.469.465 dengan realisasi sebesar Rp.54.472.901.493 atau 97,45 %.

Kalau dijumlahkan kedua OPD ini maka dana yang dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp. 214. 715.694.722 dengan realisasi sebesar Rp. 196 .271.971.439 atau 91,41 %.

Bila dianalisa lebih dalam, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kampar telah dilaksanakan dengan optimal. Perencanaannya telah disusun dengan baik dan terintegrasi dengan Pembangunan infrastruktur dari pemerintah dan pemerintah Provinsi Riau. Dampak dari pembangunan infrastruktur tersebut secara berkesinambungan telah dirasakan oleh masyarakat. Kendatipun demikian beberapa sisi masih perlu perbaikan dan pembenahan. Grand design pembangunan infrastruktur mestilah kita evaluasi secara berkala agar pemanfaatan anggaran dan pembangunannya dapat lebih optimal. Rencana Induk hendaklah dijadikan rujukan utama dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh OPD lain dan Infrastruktur yang dibangun melalui dana desa Pemerintah Kabupaten Kampar sebaiknya memiliki mekanisme pengendalian dan pengawasan sehingga terintegrasi dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar. Dengan demikian alokasi dana yang realtif besar untuk pembangunan infrastruktur akan memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan kepada kemajuan Kabupaten Kampar itu sendiri.

Bertitik tolak dari paparan diatas melalui Pimpinan DPRD Kabupaten Kampar Pansus II merekomendasikan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah agar me-evaluasi secara berkala Rencana Induk Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Kampar yang akan dijadikan referensi utama Para Pihak yang terkait.
2. Agar dalam penetapan kegiatan Pembangunan infrastruktur terlebih dahulu dilakukan kajian yang mendalam terhadap daya dukung lingkungan.
3. Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) secara berkala untuk membahas isu-isu strategis nasional dan regional untuk dimanfaatkan bagi kepentingan daerah.

3.3.2 Tanggapan Umum Bupati Kampar

Menindaklanjuti Pandangan Fraksi di DPRD Kabupaten Kampar mengenai kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dan rekomendasi DPRD Kabupaten Kampar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kampar Tahun 2021 dapat kami sampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Pandangan Fraksi Golkar, PKS, PDI Perjuangan, Gerindra, PAN, Nasdem, PPP

- Pemerintah Daerah mengucapkan terimakasih sebesar besarnya atas masukan yang diberikan dan akan menjadi catatan serta pedoman bagi kami untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah pada tahun-tahun berikutnya.

2. Pandangan fraksi Nasdem

- Berkenaan dengan pembayaran Honor Guru PDTA dan Komite Madrasah tahun anggaran 2021 memang terdapat kekurangan pembayaran yang disebabkan oleh refofusing anggaran. Akan tetapi, pada tahun 2022 telah di anggarkan kembali untuk 12 bulan pembayaran.
- Berkenaan dengan penyelesaian pembangunan Jalan Poroh Sei Pinang/ Bangkinang tidak tersedia anggaran akibat adanya Pandemi Covid 19.

3. Pandangan Fraksi PPP

- Berkenaan dengan pembangunan kantor DISDUK CAPIL bahwa penganggaran untuk pembangunan kantor DISDUK CAPIL dan Puskesmas tersebut dianggarkan secara bertahap menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada pada Dinas PUPR.
- Berkenaan dengan Proyek fisik taman kota bahwa kegiatan pembangunan tersebut telah putus kontrak pada OPD Dinas Perumahan dan Rakyat dan Kawasan Permukiman di karenakan kontraktor pelaksana wanprestasi, Secara teknis lebih lanjut dapat dijelaskan oleh OPD terkait.
- Berkenaan dengan Pembangunan Puskesmas di Kampar Kiri kegiatan pembangunan tersebut telah putus kontrak pada OPD Dinas Kesehatan di karenakan kontraktor pelaksana wanprestasi, Secara teknis lebih lanjut dapat dijelaskan oleh OPD terkait.

3.3.2 Tanggapan dan Tindaklanjut Pemerintah Kabupaten Kampar terhadap Rekomendasi DPRD Kabupaten Kampar atas LKPj Bupati Kampar Tahun 2021

A. PANSUS I BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

1. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH (VISI MISI)

Visi dan Misi Bupati Kampar periode 2017-2022 telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2017.

Untuk penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan Format sistematika penulisan yang telah diatur dalam Permendagri tersebut.

Terkait dengan isi laporan berupa penyajian data dan kelengkapan data, Pemerintah Kabupaten Kampar akan memperbaiki kondisi ini agar dalam penyusunan dan penyampaian data untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini menjadi komprehensif.

Menjawab Rekomendasi PANSUS dalam hal penyelamatan BMD dan untuk mencapai optimalisasi pemanfaatan BMD, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar secara tidak langsung telah menggunakan strategi dan taktis tertentu, dimana dalam optimalisasi pemanfaatan BMD ini selain menggandeng Jaksa Pengacara Negara, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar secara rutin dibawah pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP-KPK) selalu melaporkan perkembangan data pemanfaatan BMD, sehingga secara bertahap

penertiban BMD dapat terlaksana sebagaimana mestinya, selain berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam hal melaksanakan penatausahaan BMD juga berpedoman pada Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Menjawab Rekomendasi PANSUS yang Berkaitan dengan Kendaraan Dinas dan Rumah Dinas, disampaikan bahwa khusus KENDARAAN DINAS melalui pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam program Monitoring Center for Prevention KPK (MCP-KPK), Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar hingga saat ini masih berjalan mengumpulkan Fakta Integritas pada setiap dinas selaku pengguna agar membuat dan mendatangi Fakta Integritas pemakaian kendaraan dinas pada setiap individu yang memanfaatkan kendaraan dinas (1 kendaraan dinas 1 orang Fakta Integritas) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah dimana dari ; disampaikan bahwa khusus RUMAH DINAS melalui Jaksa Pengacara Negara kita telah melakukan pengamanan fisik terhadap Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Kampar sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan cara memasang plang bukti kepemilikan rumah dinas tersebut.

Menjawab Rekomendasi PANSUS, dalam hal pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar telah melaksanakan penatausahaan BMD secara elektronik yaitu memakai Aplikasi SIPKD Modul Aset dan telah memakai Aplikasi Sistem Barang Persediaan khusus untuk Barang Sisa dan kedepannya nanti Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar akan memberikan pendidikan dan pelatihan untuk seluruh pejabat yang mengelola BMD secara bertahap yang dimulai dari Pengurus Barang Pengelola beserta jajaran dengan Pengurus Barang Pengguna.

2. PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN

1) Urusan Pemerintahan

Untuk efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Kampar melakukan inovasi-inovasi dalam berbagai urusan. Pada Tahun 2022, telah diusulkan 80 inovasi, dan dari 80 tersebut baru 64 inovasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kampar Nomor 050-593/X/2022 tentang Penetapan Inovasi Daerah Tahun 2022. Dari 63 tersebut 12 diantaranya diikutkan dalam lomba inovasi di tingkat nasional.

NO	NAMA INOVASI
1	Pelayanan kenaikan pangkat dan pensiun satu atap
2	Aplikasi Siaga Bencana Kampar (APAK SIGAP)
3	Aplikasi Smartgov
4	E-Verval
5	Pembentukan UPT Bapenda
6	Simpad (Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah)
7	LABINOV (Laboratorium Inovasi)
8	POJOK INOVASI
9	Aplikasi JDIH Kabupaten Kampar berbasis Android
10	E-Buku Tamu dan Audio Visual
11	Pojok konsultasi/ruang sekretariat LPPD dan LKJIP Bupati Kampar
12	Debi Saad Kecapi (Desa binaan sadar administrasi kependudukan dan pencatatan sipil)
13	Satu kali seminggu memiliki satu misi satu suara untuk memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat (CIEK MISU)
14	Mobil Voluntary Counseling dan Testing (VCT)
15	Kampung Sehat Jiwa di Setiap Kecamatan (KAMSEWA)
16	Amankan Makanan Kita dari bahan, Bumbu berbahaya (AMAK DAN BUYA)
17	Asi Eksklusif cegah Stunting (Asiek Ceting)
18	Launcing Menu Gizi (berbahan Pangan Lokal)
19	Aksi Deteksi Bumil kek Cegah stunting (DEBUM KECE)
20	Ocu Mapan (Optimalisasi Cara Untuk Mandiri Pangan)
21	Pembangunan Aplikasi E-SKM
22	Pembangunan Aplikasi Absen Digital Berbasis Lokasi
23	Pembangunan Aplikasi E-Dokumen SPBE
24	Penyelenggaraan Statistik Sektoral
25	E-Wartawan
26	Bangkinang-Kampar Jejaring Ekonomi Kreatif (Bangkjek)
27	Daftar Informasi Publik Online (DIPO)
28	Sistem Retribusi Online (SRO)
29	Masyarakat Ocu Relawan Kebakaran (Ocu Moran)
30	Kampar Cepat Tangap (Kacet)
31	Aplikasi pelaporan BUMDES

32	Aplikasi E-CMS
33	Halaman Kampung Desa Digital Sungai Petai
34	Penyaluran Dana Bantuan kepada Desa melalui Aplikasi (SISKEUDES)
35	SIPADES ONLINE
36	Sistim Informasi Pendataan Aset dan Barang (SIAP)
37	Sistim Informasi Database Perizinan QR Code (SIDAQ)
38	Sistim Informasi Manajemen Arsip Elektronik Perizinan (SIMANIZ)
39	Tracking si Cantik
40	Sistem Perizinan Sicantik Terpadu (SIPINTER)
41	Mambolo OSS
42	Info La CU
43	Inovasi E-Payment (E-Payment SIBERES)
44	Inovasi Pelayanan (Pelayanan SATU HATI)
45	Sistem Informasi Penerima Siswa Baru (PPDB) Online
46	Sistim Informasi Survey Kepuasan Masyarakat (SISKM)
47	Menuju satuan pendidikan ramah anak yang bersih, enerjik, ramah, ideal, dan inklusif, mantap dan nyaman (MESRA BERIMAN)
48	Gemilang (Gerakan Mengisi Waktu Luang)
49	Pojok dan Gerai UMK
50	Safari Gemari (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan)
51	E-databes peserta pelatihan IKM
52	Bank Pakan Silase
53	Pemasaran Bahan Olah Karet (BOKAR) langsung ke Pabrik
54	Kaptul Keliling (KAPTULING)
55	Gerakan Menyumbang Buku (GERBANGKU)
56	Geliat Kamu (Gerakan Literasi Untuk Kesejahteraan Kampar Maju)
57	GELIS (Gerakan Literasi Sekolah)
58	One Village One Library (Satu Desa Satu Pustaka)
59	Varietas Padi Unggul Kabupaten Kampar
60	Peningkatan Produksi Tanaman Cabe melalui pengaplikasian PESTISIDA NABATI RENI BESERI (PESNAB-RENBASERI)
61	Sistem informasi pendataan fasilitas umum perumahan&pemukiman (SIMPESIUM)
62	Pokja Pkp Mambolo Nagoghi
63	Pelayanan satu Pintu di RSUD utk masyarakat Miskin
64	Membuat blangko yg berisikan keluhan serta permasalahan yg dihadapi oleh KPM PKH
65	Sistim Informasi Orang Terlantar (SIM-LONTAR)
66	Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) online
67	Ruang Rapat Khusus dan Informasi (RUANG RAKUSIN)
68	Pelayanan Organisasi Kampar Kiri (POKARI)
69	Mobil Shuttle RSUD
70	Asmara (Antar Serahkan Medikasi, Anda Dirumah Saja)
71	Stimulus (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Untuk Layanan Adminstrasi dan Medis)
72	POL PP DESA
73	perizinan berusaha terintegrasi secara online single submission (OSS)
74	SKTM ONLINE
75	Pembuatan peta geografis tapung hulu
76	RUNNING TEXT Tapung Hulu
77	Vaksinasi
78	SIP GANTENG (Sistem Informasi Pembayaran Gampang dan Enteng)
79	E-Payment (sistem informasi pencairan non Tunai)
80	SIM BAPER (Sistem Informasi Manajemen Barang Persediaan)

2) Urusan Pendidikan

Pada tahun 2021 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar telah menerapkan berbagai sistem yang berbasis elektronik (on-line) diantaranya :

i. **Sistem Informasi Laporan Bulanan Sekolah *Online***

Sistem Aplikasi ini sudah dipergunakan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga semenjak tahun 2016 sampai dengan sekarang. Dengan adanya sistem ini sangat membantu Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dalam Menyajikan data – data Pendidikan, mulai dari data keadaan Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan serta data sarana dan prasarana sekolah dengan mudah karna pengolahan datanya yang terkoneksi dengan Internet. Sistem ini bisa berjalan dengan lancar tentu dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di sekolah yaitu Operator yang ada disetiap sekolah yang bekerja meng-update data sebelum tanggal 10 setiap bulannya.

ii. **Sistem Layanan Kepuasan Masyarakat**

Tahun 2021 bagian Sekretariat Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga telah menyediakan layanan untuk semua Tamu yang datang ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga yang disediakan di Resepsionis, dimana tamu yang datang baik dari Tenaga Pendidik maupun dari lapisan Masyarakat untuk mengisi data pada Aplikasi tersebut, dan di Rekap setiap hari oleh Admin yang ditunjuk langsung untuk mengoperasikan Aplikasi tersebut.

iii. **Aplikasi SIPBOS**

Tujuan Aplikasi SIPBOS untuk Memudahkan Sekolah dalam pengolahan Data BOS dimana sekolah dengan mudah untuk melaksanakan permintaan, Pelaporan dan menentukan Aset yang bersumber dari Dana BOS. Semua yang telah kami sampaikan diatas telah terealisasi semuanya dengan baik pada tahun 2022. Dan selanjutnya pada tahun

3) Urusan Kesehatan

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 dimana Kementerian Kesehatan telah menetapkan 6 tujuan strategis, yang salah satunya adalah peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu. Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, ditetapkan sasaran strategis yaitu meningkatnya ketersediaan pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan.

Dalam meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar telah berupaya melakukan pemahaman pengukuran tentang Indikator Nasional Mutu (INM) dan Indeks Keselamatan Pasien (IKP) terhadap sumber daya kesehatan yang ada di 31 Puskesmas yang ada di Kabupaten Kampar. Sumber daya yang diberi pemahaman dan pelatihan Indikator Nasional Mutu (INM) dan Indeks Keselamatan Pasien (IKP) tersebut adalah Ketua Mutu di seluruh Puskesmas. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di pertengahan Tahun 2022 dengan output bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar adalah salah satu fasilitas pelayanan kesehatannya yang telah melakukan indikator mutu yang pelaporannya termasuk 2 besar di Provinsi Riau, sumber dari data pelaporan aplikasi mutu fasilitas pelayanan kesehatan oleh Kementerian Kesehatan pada bulan Januari 2023.

Upaya apa yang telah dilakukan Dinas Kesehatan terhadap konsep perlindungan terhadap tenaga medis di Puskemas adalah dengan melakukan pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) yang dilaksanakan pada bulan November 2022. Adapun tenaga yang dilatih adalah tenaga medis yang ditugaskan sebagai tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di 31 Puskesmas Se-Kabupaten Kampar. Kegiatan ini merupakan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kemungkinan penularan penyakit infeksi baik dari pasien ke tenaga kesehatan, atau dari pasien ke pasien lainnya serta keluarga pasien yang berobat untuk mendapatkan pelayanan di Puskemas.

Langkah-langkah Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan terutama di Puskesmas sesuai dengan tuntutan standar serta regulasi yang berlaku, maka perlu dilakukan langkah-langkah sistematis sesuai dengan yang diatur dalam standar dan regulasi antara lain; Pembentukan Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Menyusun Pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Menyelenggarakan Tatalaksana Kewaspadaan Standar seperti; kebersihan tangan, Alat Pelindung Diri (APD) yang telah diatur di dalam Permenkes No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di fasilitas pelayanan kesehatan.

SDM kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Dalam meningkatkan integritas dan dedikasi tenaga kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar telah melakukan upaya sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar telah berupaya dengan mengusulkan tenaga Nusantara Sehat untuk Puskesmas yang kekurangan tenaga kesehatan, di Tahun 2022 Dinas Kesehatan telah melakukan permintaan usulan penugasan khusus Nusantara Sehat dengan total 50 orang dari 9 jenis tenaga kesehatan dari 15 Puskesmas. Dari usulan tersebut, yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan hanya 39 orang tenaga kesehatan dari 9 jenis tenaga kesehatan dari 15 Puskesmas tersebut.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar berupaya mengusulkan insentif untuk tenaga kesehatan yang bertugas di daerah Kawasan terpencil dan sangat terpencil, tujuan insentif diberikan untuk meningkatkan semangat kerja dan penghargaan bagi mereka yang mau bertugas di wilayah yang aksesnya masih sulit dijangkau. Akan tetapi, dengan keterbatasan anggaran di Tahun 2022 maka usulan ini belum bisa terpenuhi karena untuk skala prioritas yang diutamakan yaitu pencapaian standar pelayanan minimal.

B. PANSUS II BIDANG KEUANGAN, PAJAK DAN INFRASTRUKTUR KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1) Keuangan

- Pendapatan Daerah

Tahun 2021, Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 267.610.288.178,34 atau 100.32% dari Target yang di anggarkan sebesar Rp. 266.757.666.995 dengan komposisi realisasi yang berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp. 146.101.632.400 atau 102.95% dari target yang di anggarkan sebesar Rp. 141.913.003.373, Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp. 12.773.657.760 atau 106.16% dari target sebesar Rp. 12.032.240.00, Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan mencapai Rp. 27.916.502.794 atau 99,89% dari Target Anggaran Rp. 27.946.502.794, dan Realisasi Lain – lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp. 80.818.495.222,34 atau 95,23% dari Target Anggaran Rp. 84.865.920.738.

- Belanja Daerah

Sehubungan dengan permasalahan lain terkait belanja daerah karena kurang ketelitian aparatur dalam administrasi pengelolaan keuangan daerah seperti kesalahan dalam penulisan atau input kode rekening sehingga diperlukan revisi, akibatnya terjadi penundaan pelaksanaan pekerjaan karena harus menunggu Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dapat dijelaskan bahwa ketidaksesuaian input kode rekening disebabkan karena perubahan regulasi yang mendasari pengelolaan keuangan daerah dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah dan Peraturan pelaksana yaitu Peraturan Tentang Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tetang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya dicabut dan diganti dengan Peraturan Meneri Daklam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah sehingga menyebabkan terjadi kendala dalam pemahaman terhadap regulasi tersebut. Selanjutnya perubahan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur juga menjadi penyebab terjadinya kesalahan input belanja daerah dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Namun kesalahan input yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran masih dapat dilakukan dengan melakukan pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD dengan syarat dan kriteria tertentu yang diatur peraturan perundangan.

2) Pajak

Pada Tahun 2021, Bapenda Kabupaten Kampar telah melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap Objek Pajak dan Subjek Pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan capaian 388 objek pajak dengan Nilai Pokok Pajak sebesar Rp. 162.220.698. Outcome dari kegiatan tersebut yaitu dilakukan penghapusan atas objek pajak ganda dan objek pajak tidak ditemukan, serta melakukan pemutakhiran data bagi data objek dan subjek pajak yang mengalami perubahan. Untuk optimalisasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Daerah perlu dibentuk Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan Daerah yang akan memotong jarak dan waktu pelayanan bagi masyarakat dalam penatausahaan pajak daerah. Dengan pembentukan UPT tersebut juga dapat diproyeksikan peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah sebagaimana table di bawah ini:

No	Jenis Pajak Daerah	Target 2022	Proyeksi Jangka Pendek (2023)	Proyeksi Jangka Menengah (2025)
1	Pajak Hotel	1.512.100.000	1.587.705.000	1.965.730.000
2	Pajak Restoran	6.455.647.500	6.778.429.875	8.392.341.750
3	Pajak Reklame	953.090.000	1.000.744.500	1.239.017.000
4	Pajak Hiburan	1.307.675.364	1.358.675.364	1.400.775.000
5	Pajak Parkir	180.500.000	189.525.000	234.650.000
6	Pajak Penerangan Jalan	73.144.868.351	76.802.111.768	95.088.328.856
7	Pajak Air Tanah	1.649.514.275	1.731.989.988	2.144.368.557
8	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	8.380.000.000	8.799.000.000	10.894.000.000
9	Pajak Sarang Burung Walet	82.000.000	86.100.000	106.600.000
10	Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan	21.870.200.000	22.963.710.000	28.431.260.000
11	BPHTB	37.000.000.000	38.850.000.000	48.100.000.000
	JUMLAH	151.227.920.126	158.789.316.131	196.596.296.163

3) Untuk Penatausahaan Pajak Daerah, Bapenda Kabupaten Kampar telah menggunakan Aplikasi Berbasis Web yaitu SIMPAD (Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah) dan SISMIOP (Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak). Dengan adanya aplikasi tersebut, maka Pembayaran pajak sudah dapat dilakukan secara Online (Host to Host) dengan Bank Persepsi (Bank Riau Kepri) maupun beberapa payment point seperti bukalapak, Tokopedia, linkaja, ovo, indomaret dan Gopay sehingga masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak daerah kapanpun dan dimanapun sesuai dengan payment point yang dimiliki. Selain dari sisi pembayaran yang sudah online, Bapenda Kabupaten Kampar juga telah melakukan Host to Host dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga ketika masyarakat yang melakukan pendaftaran tanahnya harus melakukan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terlebih dahulu, jika tidak melakukan pembayaran maka pada Sistem BPN tidak dapat melakukan penginputan karena system menolak. Sedangkan untuk monitoring pendapatan asli daerah, Bapenda Kabupaten Kampar juga telah menyediakan Aplikasi Dashboar PAD, yang mana pada aplikasi ini terlihat realisasi pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dapat dilihat secara real time. Sedangkan untuk retribusi daerah masih dalam proses pengembangan. Untuk menunjang optimalisasi pendapatan daerah tentunya pemanfaatan teknologi informasi sangat mempunyai peran, untuk itu Bapenda Kabupaten Kampar memerlukan dukungan anggaran dan sumberdaya manusia, karena ke depan akan dilakukan pengembangan Aplikasi berbasis android seperti E-SPPT, E-BPHTB, E-SIGPAD dan E-MonevPAD untuk memudahkan bagi masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan pemerintah dalam melakukan pemetaan potensi serta monitoring dan evaluasi perpajakan daerah.

4) Infrastruktur

No	Rekomendasi	Tanggapan
1	Pemerintah Daerah Agar Mengevaluasi Secara Berkala Rencana Induk Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Kampar yang akan di jadikan referensi para pihak terkait.	Evaluasi terhadap rencana pembangunan infrastruktur yang mengacu pada RPJPD dan RPJMD telah dilakukan melalui Evaluasi RKPD Triwulan I,II,III dan IV dan Melalui Laporan LAKIP yang Disusun Setiap Tahun anggaran
2	Agar dalam penetapan kegiatan pembangunan infrastruktur terlebih dahulu dilakukan kajian yang mendalam terhadap daya dukung lingkungan	Untuk melakukan Kajian awal terhadap usulan kegiatan pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu yang tidak singkat, kajian harus dilakukan minimal N-1 tahun anggaran pelaksanaan kegiatan.
3	Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) secara berkala untuk membahas isu-isu strategis nasional dan regional untuk dimanfaatkan bagi kepentingan daerah.	FGD sangat perlu dilakukan agar terjadi sharing ide serta informasi terkait peluang dalam memanfaatkan isu-isu strategis nasional dan regional untuk kepentingan daerah

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Prinsip-prinsip tugas pembantuan adalah:

- 1) Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan desa dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah pusat atau yang memberikan tugas pembantuan.
- 2) Penyelenggaraan tugas pembantuan dibiayai atas beban pengeluaran pembangunan APBN. Sehingga tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- 3) Pencatatan dan pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan tugas pembantuan dilakukan secara terpisah dari APBD dan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- 4) Tata cara pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah dan desa dalam pelaksanaan tugas pembantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan APBN yang berlaku.

- 5) Pemerintah daerah memberitahukan adanya tugas pembantuan kepada DPRD dan pemerintah desa memberitahukannya kepada badan perwakilan desa.
- 6) Pemerintah daerah dan desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan tugas pembantuan kepada departemen/lembaga pemerintah non departemen yang menugaskannya.
- 7) Dalam hal pelaksanaan tugas pembantuan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN. Ketentuan mengenai pemungutan dan penyetoran penerimaan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi APBN.
- 8) Dalam hal terdapat saldo anggaran pelaksanaan tugas pembantuan, maka saldo tersebut disetor ke kas negara.
- 9) Semua kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah dan desa dalam pelaksanaan tugas pembantuan diselenggarakan secara terpisah dari kegiatan pengelolaan keuangan untuk pelaksanaan desentralisasi dan dekonsentrasi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menggambarkan bahwa Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, pada ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa

untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan, selanjutnya pada ayat (2) Pemerintah provinsi dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan provinsi dan ayat (3) Pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten/kota.

Dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota, dan/atau desa sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan.

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dan APBD I dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai dari APBD.

4.1.1 Tugas Pembantuan Yang Diterima

Pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten mendapatkan Tugas Pembantuan dari Kementerian Perdagangan RI melalui DIPA No. DIPA-090.02.4.690537/2022 tanggal 10 Maret 2022 dari UU Nomor 6 Tahun 2021 Tentang APBN Tahun Anggaran 2022.

Tugas Pembantuan yang diterima melalui Program Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan, melalui Pembangunan Pasar Rakyat LKMD Kasikan yang berlokasi di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu.

Pagu Dana kegiatan tersebut sebesar Rp. 3.000.000.000,- dan realisasi Rp. 2.608.965.900,- dengan realisasi fisik terbangunnya Pasar Rakyat LKMD Kasikan di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu (100%).

4.1.2 Tugas Pembantuan Yang Diberikan

Dalam percepatan pembangunan hingga ke tingkat desa, Pemerintah Kabupaten Kampar juga memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Desa berupa Belanja bantuan Keuangan yang untuk penggunaan sebagai berikut :

1. Dana Desa

- 1) Dana Desa pasal 3 PP Nomor : 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (DD) yang bersumber dalam APBN, memanfaatkan bahwa Pemerintah menganggarkan Dana desa secara Nasional dalam APBN setiap Tahun.
- 2) Tujuan pengalokasian Dana Desa (DD) Tujuan Pengalokasian Dana Desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pembangunan, pemberdayaan Masyarakat dan kemasyarakatan, dengan prioritas Penggunaan untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut :
 - a. Program perlindungan Sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa paling sedikit 40%.
 - b. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% 61
 - c. Dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) paling sedikit 8%
 - d. Program sector prioritas lainnya
- 3) Untuk menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2014 tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Kampar mengeluarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 05 Tahun 2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa

dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022, dimana Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kampar berjumlah Rp. 124.234.108.100,- (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Delapan Ribu Seratus Rupiah) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 215.759.396.000,- (Dua Ratus Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) yang telah disalurkan sebesar Rp. 215,093,518,324,- (Dua Ratus Lima Belas Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) atau 99,69% dialokasikan untuk 242 Desa se Kabupaten Kampar. Perhitungan Dana Desa dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor : 190/PMK.07/2021 tanggal 16 Desember 2021, yang kemudian di ganti ke Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor : 128/PMK.07/2022 tanggal 26 Agustus 2022 tentang Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pagu Alokasi Formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk Desa, angka penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut :

- a. 55% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 25% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 10% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 10% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang dimaksudkan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :

- a. Peningkatan Kualitas Hidup
- b. Peningkatan kesejahteraan
- c. Penanggulangan kemiskinan
- d. Peningkatan pelayanan publik

2. Alokasi Dana Desa (ADD)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014 Tanggal 30 Mei 2014 dan keputusan 4 menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Desa tertinggal, imigrasi, menteri keuangan, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas) menerangkan bahwa ADD adalah dana yang diberikan Kepada Desa yang berasal dari Daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota (pasal 72 ayat 4 Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005), dimana berdasarkan Undang- undang Nomor tersebut pasal 72 ayat 4 “ Desa memperoleh jabatan ADD”. ADD yang diberikan ke Desa merupakan hak Desa yang dapat digunakan oleh Desa unuk memperkuat pembangunan, Pemerintahan dan Operasional Pemerintahan Desa.

Tujuan diberikannya ADD ini adalah untuk memperkuat Kemampuan Keuangan Desa, memperkuat otonomi desa dalam membiayai jalannya Pemerintahan, Pembangunan dan Urusan Sosial Kemasyarakatan serta untuk mewujudkan kesejahteraan dan demokrasi di Desa. Pemerintah Kabupaten Kampar pada Tahun 2022 melalui

Peraturan Bupati Kampar Nomor 05 Tahun 2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022, telah membagikan anggaran Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada 242 Desa dengan jumlah total berjumlah **Rp. 129.400.339.269,-** (*Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Juta Tiga ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*).

Perhitungan Alokasi Dana Desa per Desa di hitung dengan rumusan 60 % dibagi merata dan 40 % dari Anggaran Dana Desa di hitung dengan bobot sebagai berikut :

- a. 55% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 25% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 10% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 10% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis

Manfaat ADD bagi Desa adalah :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. Belanja tak terduga.

Dalam memanfaatkan dan menggunakan ADD ini, Pemerintah Desa menggunakan rumus 60% untuk Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan 40% dari ADD di gunakan untuk Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Belanja tak terduga.

Dalam APBDesa setiap tahunnya dilakukan perhitungan 30% Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan 70% dari APBDes digunakan untuk Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Belanja tak terduga. Dalam pengelolaan ADD adalah pada umumnya

Pemerintah Desa mengalami perubahan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan yaitu menjadi penanggung jawab penuh dan sekaligus pengguna anggaran yang 64 dituangkan dalam APBDesa, dimana salah satu sumbernya adalah ADD, permasalahan lainnya dibidang pengelolaan administrasi baik dalam penyusunan RKA dan menyiapkan SPJ nya, dan pelaksanaan kegiatan dilapangan (Pemberdayaan Masyarakat), serta keterbatasan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten. Kelemahan Perangkat dan Aparatur Pemerintah Desa tersebut mejadi sumber kelemahan administrasi desa. Inilah masalah yang paling sering terjadi sehingga menjadi titik lemah bagi kelancaran pencairan dana maupun pertanggung jawaban Kepala Desa. Solusi dan langkah yang dilaksanakan adalah melakukan bimbingan teknis Kepada Perangkat Desa (Sekretaris Desa) dan Kaur Desa baik melalui pelatihan dan Konsultasi, hanya saja hal ini tidak semuanya dapat dilaksanakan dengan baik karena masih dalam tahap pemulihan atau recovery dari Pandemi Covid-19 yang masih melanda. Sehingga berpengaruh kepada pengalihan Anggaran kegiatan untuk penanganan Pandemi. Diharapkan ke depannya segala kegiatan masih dapat terlaksana, meskipun dengan anggaran dan ruang gerak yang terbatas baik dari Dinas terkait maupun dari Pemerintahan Desa beserta jajarannya, sehingga monitoring terhadap pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara rutin dan berkala tetap terlaksana. Sedangkan dampak yang dapat dirasakan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa dengan adanya Program Dana ADD ini adalah secara umum bahwa Penyelenggaraan Pemerintah Desa lebih berdaya guna dan efekktif serta meningkatnya pembangunan infrastruktur Desa

3. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 08 Tahun 2022 tanggal 24 Februari 2022, Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten

Kampar Tahun Anggaran 2022, DBH Pajak Daerah dengan jumlah Rp. 16.358.862.213,- (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Dua Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah), dan yang tersalurkan sebesar Rp. 10.571.423.964,- atau 65%, sedangkan DBH Retribusi dengan jumlah sebesar Rp. 1.236.070.200,- (Satu milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah).

4. BKK Ambulance Desa

Anggaran BKK Ambulance Pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 24.700.000.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) yang telah disalurkan sebesar 92,11% kepada 70 (Tujuh Puluh) Desa dari 76 (Tujuh Puluh Enam) Desa yang direncanakan yang tersebar di Kabupaten Kampar, sedangkan ada 6 (Enam) Desa yang belum terealisasi, karena Dana yang tersedia tidak mencukupi untuk Mobil Type Double Gardan, antara lain :

1. Desa Kebun Tinggi, Kecamatan Kampar Kiri Hulu
2. Desa Pangkalan Kapas, Kecamatan Kampar Kiri Hulu
3. Desa Tanjung Permai, Kecamatan Kampar Kiri Hulu
4. Desa Lubuk Bigau, Kecamatan Kampar Kiri Hulu
5. Desa Ludai, Kecamatan Kampar Kiri Hulu
6. Desa Dua Sepakat, Kecamatan Kampar Kiri Hulu.

Khusus untuk Desa Ludai dan Desa Dua Sepakat, mereka meminta masing-masing dua unit yang berbeda yakni Ambulance Air dan Mobil Ambulance biasa.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar tiap tahun telah melaksanakan Sosialisasi Tata Cara Pengadaan Barang/jasa khususnya pengadaan Mobil Ambulance Desa. Sosialisasi ini bertujuan untuk selalu memberikan pemahaman agar aparat desa atau kelurahan semakin memahami proses pengadaan barang dan jasa khususnya pengadaan kendaraan kesehatan atau mobil Ambulance Desa sesuai

aturan yang berlaku. Untuk Spesifikasi kendaraan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar berkoordinasi dengan bidang kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Bagian Administrasi Pembangunan, dan PBJ. Hal ini kita lakukan agar desa-desa yang menganggarkan pengadaan Mobil Ambulance, harus sesuai dengan aturan pengadaan barang yang berlaku yang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan oleh Ambulance, seperti Brangkar, Oksigen, Infus, lampu sirene, lampu penerangan dan fasilitas lainnya sesuai SOP.

Daerah yang jauh dari ibukota Kabupaten dan Ibukota Provinsi diharapkan memanfaatkan Ambulance sesuai dengan fungsinya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk transportasi layanan kesehatan masyarakat dan untuk memaksimalkan pemanfaatan transportasi ini dengan selalu berkoodinasi dengan tenaga kesehatan dan Puskesmas terdekat

5. *BKK Provinsi Riau yang bersumber dari APBD*

Anggaran BKK Provinsi Riau Pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 34.045.000.000,- (Tiga Puluh Empat Milyar Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang telah disalurkan sebesar 100% kepada 242 (Dua Ratus Empat Puluh Dua), Besaran alokasi BKK sesuai dengan Klasifikasi BUMDes yang bersangkutan. Tertinggi alokasi anggaran BKK diberikan kepada BUMDes Majun dengan pagu Rp. 190.000.000,- sedangkan alokasi BKK terendah untuk Desa dengan Klasifikasi BUMDes dasar sebesar Rp. 125.000.000,-. Anggaran BKK Tahun 2022 dari Pemerintah Provinsi Riau diperuntukkan untuk kegiatan berdasarkan Juknis yang disampaikan.

4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Permasalahan yang dihadapi adalah Pemerintah Kabupaten Kampar belum mampu memenuhi ADD sebesar 10 % dari Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai dengan yang telah di amanahkan oleh Undang-Undang Desa Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam pengelolaan ADD adalah pada umumnya Pemerintah Desa mengalami perubahan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan yaitu menjadi penanggung jawab penuh dan sekaligus pengguna anggaran yang dituangkan dalam APBDesa, dimana salah satu sumbernya adalah ADD, permasalahan lainnya dibidang pengelolaan administrasi baik dalam penyusunan RKA dan menyiapkan SPJ nya, dan pelaksanaan kegiatan dilapangan (Pemberdayaan Masyarakat), serta keterbatasan pengawasan oleh Pemeintah Kabupaten. Kelemahan Perangkat dan Aparatur Pemerintah Desa tersebut mejadi sumber kelemahan administrasi desa. Inilah masalah yang paling sering terjadi sehingga menjadi titik lemah bagi kelancaran pencairan dana maupun pertanggungjawaban Kepala Desa.

Solusi dan langkah yang dilaksanakan adalah melakukan bimbingan teknis Kepala Perangkat Desa (Sekretaris Desa) dan Bendaharawan Desa melaluin pelatihan dan Konsultastif, setra melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pemerintahan desa secara rutin dan berkala. Sedangkan dampak yang dapat dirasakan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa dengan adanya Program Dana ADD ini adalah secara umum bahwa Penyelenggaraan Pemerintah Desa lebih berdayaguna dan efektif serta meningkatnya pembangunan infrastruktur Desa.

Pada tahun 2022 Kabupaten Kampar memperoleh berbagai prestasi dan penghargaan baik skala Nasional maupun Regional. Prestasi dan penghargaan yang diperoleh antara lain, sebagai berikut :

1. Bupati Kampar Terima Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP dari Mendagri tanggal 28 Maret 2022
2. Pemerintah Kabupaten Kampar Membuat Inovasi Rumah Kerlip Beriman Program pembangunan ekosistem untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Kampar dengan penyediaan balai baca, panggung Gembira, Pustaka ibu dan anak, mini lab, tabulampot dll. Program ini bertujuan untuk mendorong tingkat partisipasi publik yaitu anak, penyandang disabilitas, perempuan pelaku UMK Kampar dalam percepatan pembangunan khususnya di desa sangat tertinggal dan tertinggal.
3. Pemerintah Kabupaten Kampar Membuat Inovasi Gerakan Bangkit Menuju Kampar Layak Anak (Gerbang Melayu) Beriman.
4. Pemerintah Kabupaten Kampar Membuat Inovasi Derapp Desa Ekowisata Ramah Anak dan Peduli Perempuan Percepatan pembangunan desa sangat tertinggal khususnya di kawasan suaka Margasatwa Rimbang Baling melalui desa Ekowisata Ramah Anak dan Peduli Perempuan mendorong kolaborasi pentahelix dalam kerangka gerakan bangkit menuju kampar layak anak (Gerbang Melayu) beriman.
5. Menerima Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori Madya Dari Kementerian PPPA RI pada tanggal 02 Agustus 2022.
6. Menerima anugerah kabupaten/kota layak anak (KLA) dengan kategori madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI pada tanggal 08 Agustus 2022.
7. Menerima penghargaan inovasi terbaik III E-payment SIBERES dari BPSDM Kemendagri Pada Tanggal 11 November 2022

8. Menerima apresiasi dan penghargaan atas cakupan pencapaian Vaksinasi Covid 19 diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat bekerjasama Program Breakthrough Action Covid 19 yang diimplementasikan John Hopkins Center For Comunication Program dan didukung oleh USAID pada tanggal 22 November 2022.
9. Menerima Penghargaan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Terbaik Kedua di Indonesia pada tanggal 06 Desember 2022.
10. Menerima penghargaan BKN Award 2022 pada tanggal 18 oktober 2022
11. Menerima penghargaan dalam katagori atas peran aktif dalam mendukung kelancaran operasional Hulu Migas dikabupaten Kampar. Penghargaan tersebut diberikan pada acara malam apresiasi dan penghargaan Stakeholder Ke-2 Northern Sumatra Forum (NSF) SKK Migas – KKKS Sumbagut (Sumatera Bagian Utara) pada tanggal 28 Oktober 2022.
12. Menerima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Kategori Tertinggi Dari Komisi Informasi Riau pada Tanggal 12 Desember 2022
13. Menerima penghargaan terbaik Peringkat 1 kategori kinerja penyaluran DAK fisik, DAK non fisik dan Dana Desa terbaik tahun 2022 pada Tanggal 16 Januari 2023.
14. Menerima piagam penghargaan predikat kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022 yang langsung diserahkan oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 28 Februari 2023.
15. Menerima penghargaan terbaik II kinerja lelang barang milik daerah tahun anggaran 2022 pada tanggal 28 Februari 2023.
16. Mendapatkan penghargaan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Award 2023 atas komitmennya untuk ikut menjaga kemerdekaan Pers di Riau dan membantu memelihara iklim industri pers yang sehat dan profesional pada tanggal 28 Februari 2023

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kampar Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2022 yang mencakup Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah, Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah, Capaian Tugas Pembantuan dan Penugasan. Dari Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan tersebut, pada laporan ini dapat dilihat hasil capaian program dan kegiatan serta permasalahan dan solusi masalah. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2022 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya, disamping masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan roda pemerintahan, juga menjadi bahan pertimbangan sekaligus memberikan arti tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Bupati Kampar kepada DPRD Kabupaten Kampar secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar Tahun Anggaran 2022. Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di Tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan, Legislatif (DPRD) dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kampar memberikan apresiasi

yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen kepentingan dan masyarakat Kabupaten Kampar yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Berbagai keberhasilan pembangunan daerah memotivasi Pemerintah Kabupaten Kampar untuk semakin meningkatkan kinerja pembangunan. Namun demikian, kita juga menyadari bahwa masih ada berbagai kelemahan yang perlu menjadi perhatian dan penyelesaian untuk tahun kedepan. Kelemahan-kelemahan tersebut akan menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk diperbaiki di masa selanjutnya.

Beberapa langkah penting dan strategi yang akan ditempuh agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih baik adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan akan dilakukan lebih akurat dan cermat berdasarkan prioritas, dan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kinerja dengan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan disepakati secara bersama-sama dengan *stakeholders*, sehingga pelaksanaan pembangunan nantinya dapat dievaluasi dan diukur kinerjanya secara lebih akurat. Selain itu, pengawasan akan lebih dioptimalkan sehingga rencana kegiatan yang dibuat dapat berdayaguna dan berhasil guna secara maksimal.
2. Melakukan konsolidasi organisasi secara internal dalam rangka meningkatkan kesadaran dan komitmen jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Kampar terhadap tugas dan fungsi pelayanan umum.
3. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keekonomisan pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
4. Mekanisme pengumpulan data kinerja akan diperbaiki sehingga pencapaian kinerja dapat didukung dengan informasi yang lebih akurat. Selain itu, agar

perencanaan pembangunan daerah yang disusun dapat dievaluasi dan diperbandingkan kinerjanya baik di tingkat regional maupun nasional, maka perencanaan pembangunan daerah akan lebih didasarkan kepada informasi yang terukur, sehingga pencapaian hasil-hasil potensi daerah yang ada dapat lebih dicermati. Untuk itu beragam informasi dan indikator pembangunan daerah yang tersedia di beberapa instansi akan lebih diberdayakan.

5. Lebih meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan.
6. Mengalokasikan penggunaan anggaran secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
7. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus selaku pelayan masyarakat.
8. Merekrut sumber daya manusia yang profesional dalam bidangnya sehingga dapat mendukung tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kampar.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum secara maksimal dapat menggambarkan kondisi riil yang sebenarnya, namun demikian melalui Laporan ini dapat memberikan gambaran terhadap pelaksanaan program kegiatan dalam tahun 2022 termasuk didalamnya beberapa keberhasilan dan kelemahannya yang dihadapi. Akhirnya, semoga laporan ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Kampar kepada DPRD Kabupaten Kampar dan *stakeholder's* lainnya dan sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan di masa men datang, terima kasih. Insya Allah kita semua dapat mewujudkan Visi Kabupaten Kampar yaitu **" Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya, Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025 "**



PEMERINTAH
KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2023

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KAMPAR TAHUN 2022

 **KAMPAR**
The Beauty Of Sumatera

